LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kami menyadari bahwa dalam LPPD Kabupaten Belitung ini masih ada hal–hal yang belum teruraikan secara sempurna dari penyampaian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerja. Berkenaan dengan hal itu, kami akan terus melakukan peninjauan ulang terhadap LPPD Kabupaten Belitung ini dan melakukan upaya-upaya perbaikan agar lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat berguna bagi kita semua untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas–tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Maret 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

BUPATI BELITUNG

YUSPIAN, S.Sos, M.I.R

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
INSPEKTORAT
Jl. JEND. A. YANI NO. 08 TANJUNGPANDAN TELPON 21048

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Tanjungpandan, 27 Maret 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG INSPEKTORAT

PARYANTA
NIP. 196701281989031003

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 8

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 22

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **24**

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 24

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 24

2.1.2 Angka Kemiskinan 25

2.1.3 Angka Pengangguran 26

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 26

2.1.5 Pendapatan Per Kapita 27

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)* 27

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 28

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 28

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 59

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 67

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 69

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN **240**

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL **241**

4.1 URUSAN PENDIDIKAN 241

4.2 URUSAN KESEHATAN 243

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM 255

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 258

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 261

4.6 URUSAN SOSIAL 268

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN 272

BAB V PENUTUP **278**

LAMPIRAN 1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT SRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023

LAMPIRAN 2 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 3 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT AGAMA TAHUN 2023

LAMPIRAN 4 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 5 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2023

LAMPIRAN 6 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Belitung didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS. Luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km^2, dengan luas wilayah daratan sebesar 2.293,69 km^2 atau 229.369 Ha dan sisanya berupa lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Membalong, dan yang terkecil Kecamatan Selat Nasik (kecamatan kepulauan). Luas wilayah dari lima kecamatan adalah sebagai berikut :

- Membalong : 909,550 Km^2
- Tanjungpandan : 378,448 Km^2
- Badau : 458,200 Km^2
- Sijuk : 413,992 Km^2
- Selat Nasik : 133,500 Km^2

Kabupaten ini terdiri dari sekitar 163 buah pulau besar dan kecil di mana pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar lainnya adalah Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Tabel 1.1
Jumlah Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1.	Tanjungpandan	17
2.	Membalong	35
3.	Selat Nasik	38
4.	Sijuk	55
5.	Badau	18
Jumlah		**163**

Sumber : Bappeda Kab. Belitung

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2022 antara 0 mm sampai 347,4 mm dengan jumlah hari hujan antara 1 hari sampai 25 hari setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 347,4 mm. Rata-rata temperatur udara pada

tahun 2022 bervariasi antara 26,1°C sampai 33,9°C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 77 persen sampai 91 persen, dan tekanan udara antara 1010,1 mb sampai dengan 1012,0 mb.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km² atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, yang mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

c. Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung per Desember 2023 berjumlah 189.945 jiwa dengan 64.831 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung berkedudukan di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 108.003 jiwa (56,86%) dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tanjungpandan	54.541	53.462	108.003	36.589
2.	Membalong	13.901	13.180	27.081	9.698
3.	Selat Nasik	3.210	3.033	6.243	2.133
4.	Sijuk	16.850	16.153	33.003	11.067
5.	Badau	8.039	7.576	15.615	5.344
Jumlah		**96.541**	**93.404**	**189.945**	**64.831**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023 paling banyak adalah lulusan SD/sederajat yaitu sebanyak 45.728 orang (24,07%). Sedangkan dari segi jenis pekerjaan, penduduk Kabupaten Belitung paling banyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 20.616 orang. Untuk peran serta perempuan dalam pekerjaan hanya sebagian kecil saja perempuan di Kabupaten Belitung memiliki pekerjaan dan mayoritas mengurus rumah tangga sebagaimana rincian Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian terlampir dalam laporan ini.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2023

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tdk/Blm Sekolah	18.412	17.558	35.970
Blm Tamat SD/Sederajat	15.885	14.954	30.839
Tamat SD/Sederajat	22.547	23.181	45.728
SLTP/Sederajat	13.775	13.059	26.834
SLTA/Sederajat	20.556	18.382	38.938
D-I/II	391	628	1.019
Akademi/D-III/Sarjana Muda	1.504	1.798	3.302
D-IV/Strata-I	3.317	3.746	7.063
Strata-II	152	95	247
Strata-III	2	3	5
Jumlah	**96.541**	**93.404**	**189.945**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2023

d. Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 42 desa, yang terdiri dari :

Tabel 1.7
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Tanjungpandan	a. Kelurahan Kota b. Kelurahan Parit c. Kelurahan Kampong Damai d. Kelurahan Paal Satu e. Kelurahan Lesung Batang f. Kelurahan Pangkallalang g. Kelurahan Tanjungpendam h. Desa Buluh Tumbang i. Desa Perawas j. Desa Dukong k. Desa Juru Seberang l. Desa Air Saga m. Desa Air Merbau n. Desa Aik Pelempang Jaya o. Desa Aik Ketekok p. Desa Aik Rayak
2	Membalong	a. Desa Membalong b. Desa Perpat c. Desa Lassar d. Desa Simpang Rusa e. Desa Kembiri f. Desa Bantan g. Desa Tanjung Rusa h. Desa Mentigi i. Desa Pulau Seliu j. Desa Pulau Sumedang k. Desa Gunung Riting l. Desa Padang Kandis
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	a. Desa Badau b. Desa Air Batu Buding c. Desa Sungai Samak d. Desa Kacang Butor e. Desa Cerucuk f. Desa Pegantungan g. Desa Ibul
3	Selat Nasik	e. Desa Selat Nasik f. Desa Petaling g. Desa Suak Gual h. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	k. Desa Sijuk l. Desa Batu Itam m. Desa Terong n. Desa Air Seruk o. Desa Tanjung Binga p. Desa Air Selumar q. Desa Sungai Padang r. Desa Keciput s. Desa Pelepak Pute t. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	h. Desa Badau i. Desa Air Batu Buding j. Desa Sungai Samak k. Desa Kacang Butor l. Desa Cerucuk m. Desa Pegantungan n. Desa Ibul

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung

e. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung

No	Perangkat Daerah	Tipe	Urusan/Fungsi
1	Sekretariat Daerah	A	unsur penunjang sekretariat
2	Sekretariat DPRD	C	unsur penunjang sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah	A	unsur penunjang pengawasan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
5	Dinas Kesehatan	A	urusan pemerintahan bidang kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	A	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
8	Dinas Pariwisata	A	urusan pemerintahan bidang pariwisata
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A	urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	A	urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang perindustrian
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	A	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
14	Dinas Perhubungan	A	urusan pemerintahan bidang perhubungan
15	Dinas Lingkungan Hidup	A	urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A	urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan
17	Dinas Perikanan	A	urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	A	urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
20	Satuan Polisi Pamong Praja	B	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	B	fungsi penunjang bidang kepegawaian,

	Sumber Daya Manusia		pendidikan dan pelatihan
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A	fungsi penunjang bidang keuangan
24	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	A	fungsi penunjang bidang pendapatan
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	urusan bidang bencana dan sub bidang kebakaran
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	urusan kesatuan bangsa dan politik
27	Kecamatan Tanjungpandan	A	unsur penunjang kewilayahan
28	Kecamatan Membalong	A	unsur penunjang kewilayahan
29	Kecamatan Sijuk	A	unsur penunjang kewilayahan
30	Kecamatan Badau	A	unsur penunjang kewilayahan
31	Kecamatan Selat Nasik	A	unsur penunjang kewilayahan

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun Dinas yang memiliki UPT adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perangkat Daerah

No	Dinas	Nama UPT	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT Satuan Pendidikan SD	114
		UPT Satuan Pendidikan SMP	21
		UPT Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar	1
		UPT Museum	1
2	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	1
		UPT Puskesmas	9
		UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono (BLUD)	1
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	UPT Pengelolaan Air Minum	1
		UPT Sarana Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium	1
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	UPT Perbenihan dan Perbibitan	1
5	Dinas Perikanan	UPT Perikanan Budidaya	1
	Dinas Perhubungan	UPT Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan	1
6	Dinas Lingkungan Hidup	UPT Laboratorium Lingkungan	1
		UPT Pengelolaan Sampah	1
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	UPT Metrologi Legal	1

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2023 sebanyak 3.016 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2023

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
1	Sekretariat Daerah	100
2	Sekretariat DPRD	24
3	Staf Ahli Bupati	3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL (PNS)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20
6	Inspektorat	40
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	14
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
11	Dinas Perhubungan	38
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	73
13	Dinas Perikanan	34
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	32
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	48
17	Dinas Kesehatan	57
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	35
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
21	Dinas Pariwisata	29
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20
23	Dinas Pemuda dan Olah Raga	21
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	25
25	Dinas Lingkungan Hidup	37
26	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masayarakat dan Desa	27
27	Satuan Polisi Pamong Praja	42
28	Kecamatan Tanjungpandan	15
29	Kecamatan Badau	13
30	Kecamatan Sijuk	17
31	Kecamatan Membalong	17
32	Kecamatan Selat Nasik	12
33	Kelurahan Kota	8
34	Kelurahan Parit	5
35	Kelurahan Kampong Damai	6
36	Kelurahan Paal Satu	5
37	Kelurahan Lesung Batang	4
38	Kelurahan Pangkallalang	6
39	Kelurahan Tanjung Pendam	5
40	UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	355
41	UPT Puskesmas Selat Nasik	31
42	UPT Puskesmas Tanjung Binga	46
43	UPT Puskesmas Membalong	44
44	UPT Puskesmas Badau	39
45	UPT Puskesmas Perawas	35
46	UPT Puskesmas Sijuk	34
47	UPT Puskesmas Air Saga	49
48	UPT Puskesmas Tanjungpandan	51
49	UPT Puskesmas Simpang Rusa	32
50	UPT Sekolah-sekolah dan SKB	100
JUMLAH		**3.016**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2023

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2022-2023, target pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp. 1.064.832.351.593,00 pada tahun 2022 dan menjadi Rp. 1.055.850.545.765,00 pada tahun 2023. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2022-2023, realisasi pendapatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 cenderung melebihi target dengan persentase pada Tahun 2022 sebesar 104,04% sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 103,93% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2023

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2022	1.064.832.351.593,00	1.107.840.034.233,53	104,04
2023	1.055.850.545.765,00	1.117.439.818.908,00	105,83

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2023

Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Per Komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2023

No	Komponen Pendapatan	2023			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	147.139.608.350,00	186.621.508.495,00	126,83	158.803.365.450,00	188.041.448.784,53	118,41
2	Dana Perimbangan	897.489.400.967,00	920.148.463.207,00	102,52	890.019.700.000,00	905.578.221.778,00	101,75
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.221.536.448,00	10.669.847.206,00	95,08	16.009.286.143,00	14.220.363.671,00	88,83
Jumlah		**1.055.850.545.765,00**	**1.117.439.818.908,00**	**103,93**	**1.064.832.351.593,00**	**1.107.840.034.233,53**	**104,04**

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2023

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2022 dan 2023 bersumber dari dana perimbangan dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 81,74% dan Tahun 2023 sebesar 82,34%. Komponen kedua pada Tahun 2022 adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 16,97% sedangkan pada Tahun 2023 adalah sebesar 16,7%. Untuk Komponen ketiga pada Tahun 2022 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 1,28% sedangkan pada Tahun 2023 adalah sebesar 0,95%.

Pada Tahun Anggaran 2023, alokasi belanja operasi mempunyai target anggaran sebesar Rp. 959.091.928.326,00 dan terealisasi Rp. 849.822.871.783,00 dengan persentase pencapaian target sebesar 88,61%. Sedangkan pada belanja modal memiliki target Rp. 162.890.260.033,00 dan terealisasi Rp. 151.031.461.750,00 atau 90,59%. Sementara itu, target belanja tak terduga sebesar Rp. 2.367.000.000,00 dan terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00% sedangkan target belanja transfer sebesar Rp. 108.169.751.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 107.594.010.100,00 atau 92,72%. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja daerah pada tahun 2023 memiliki target Rp 1.232.518.939.359,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.086.448.343.633,00 atau 89,93 %.

Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022-2023

No	Komponen Belanja	2023			2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	959.091.928.326,00	849.822.871.783,00	88,61	945.274.857.259,00	841.947.804.625,83	89,07
2	Belanja Modal	162.890.260.033,00	151.031.461.750,00	92,72	154.537.904.424,00	128.347.523.022,00	83,05
3	Belanja Tak Terduga	2.367.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	1.430.000.000,00	65,00
4	Belanja Transfer	108.169.751.000,00	107.594.010.100,00	99,47	102.826.375.000,00	102.457.507.600,00	99,64
Jumlah		**1.232.518.939.359,00**	**1.108.443.343.633,00**	**89,93**	**1.204.839.136.683,00**	**1.074.182.835.247,83**	**89,15**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2023

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan menunjukkan penyebab terjadinya kesenjangan antara pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Berikut permasalahan strategis Kabupaten Belitung, yaitu :

(1) Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah dengan kualitas yang baik agar dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan pembangunan daerah disektor-sektor lainya dan hal tersebut secara positif akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, antara lain :

1) Belum optimalnya akses dan mutu layanan pendidikan;
2) Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat;
3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
4) Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja;
5) Beban pengeluaran masyarakat miskin yang tinggi; dan
6) Pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan masih kurang.

(2) Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public, serta akuntabilitas kinerja cukup memuasakan, tercermin melalui Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belitung sudah berstatus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan Nilai Laporan Akuntablitas dengan kategori “B”. Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan :

1) Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah;
2) Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah;
3) Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah;
4) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; dan
5) Belum optimalnya implementasi e-government

(3) **Permasalahan Daya Saing Potensi Ekonomi**

Untuk mengukur daya saing ekonomi daerah, beberap indikator dan pendekatan dapat digunakan untuk itu. Salah satunya dengan mengkonstruksi indeks potensi ekonomi daerah dan kemudahan usaha. Kajian daya saing daerah dengan berbasis potensi ekonomi daerah dibangun dengan menggunakan 8 pilar, yaitu :

1) Produktivitas;
2) Keuangan daerah;
3) Kemudahan investasi;
4) Sumber daya manusia;
5) Potensi masyarakat;
6) Sumber daya alam dan energi;
7) Transportasi dan komunikasi; dan
8) Layanan jasa perbankan dan koperasi.

Pembangunan daerah perlu memperhatikan potensi daerah, yang dilakukan dengan menelaah PDRB untuk melihat adanya potensi basis dan non basis dalam rangka mengoptimalkan hasil pembangunan guna mendapatkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Jika pemerintah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berangkat dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya. Di dalam RPJPD dan RPJMD tampak bidnag-bidang prioritas pada setiap program daerah kabupaten/kota dalam memperkokoh pengembangan sektor unggulan. Selain itu, APBD harus mencerminkan program-program dan tujuan-tujuan pembangunan. Karena suatu rencana akan bersifat operasionil apabila anggarannya tersedia. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya.

Masalah Pokok pembangunan pereknomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan
2) Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro
3) Kurangnya daya saing pariwisata
4) Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

(4) Permasalahan Lingkungan

Kabupaten Belitung yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah terutama sektor pertambangan (sumber daya alam tak terbarukan) telah dilakukan eksploitasi selama bertahun-tahun lamanya, hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lahan/hutan dan terjadinya pencemaran air. Seiring terjadinya pergeseran pembangunan sektor unggulan dari sektor pertambangan ke sektor non tambang (pariwisata, pertanian dan perhubungan), pertumbuhan pembangunan kabupaten dan penduduk Kabupaten Belitung menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan lahan serta penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah serta pencemaran udara, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan persampahan serta optimalisasi pengelolaan Ruang Terbauka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi masyarakat maka keberadaan RTH terutama RTH publik sangat diperlukan.

(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas perspektif pembangunan yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD dirumuskan dalam bentuk visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Belitung secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung, RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional.

Untuk periode 2018 – 2023, RPJMD Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitug Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Beliltung Tahun 2018-2023.

1. **Visi**

   Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, yaitu : adalah ***MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023***.

   Adapun makna yang terkandung di dalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

   a. **Ekonomi Berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;
   b. **Berdaya saing** bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
   c. **Inovatif** mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

   Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kabupaten Belitung dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

2. **Misi**

   Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus. Pemerintah Kabupaten Belitung, telah menetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

   a. **Misi Kesatu :** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

      Misi Kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan, bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Belitung yang meliputi hak untuk menikmati kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi listrik, termasuk terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan

keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Selain itu perlu ada upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, termasuk memperluas kesempatan kerja.

b. **Misi Kedua** : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional,akuntabel dan transparan.

Misi Kedua : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi. Pelayanan birokrasi yang optimal juga dicapai melalui peningkatan kinerja dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. **Misi Ketiga** : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan, lingkungan dan berkelanjutan.

Misi Ketiga : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat diartikan bahwa kebangkitan ekonomi berbasis sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar terutama di sektor prioritas lebih diunggulkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Di samping itu perlu pula percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan melalui pengembangan infrastruktur dan integrasi wilayah lokal, regional, nasional dan global.

Sementara itu, misi ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah sudah mencakup misi satu dan misi tiga dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, yaitu meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, yang sudah jelas mencerminkan pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 menetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 1.14
Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran Kabupaten Belitung

VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023			
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia
			2. Angka Kemiskinan

		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup
		3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah
		4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi
		7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK
			9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	10. Indeks Profesional ASN
		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Survei Kepuasan Masyarakat
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup
		17. Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20. Indeks kualitas air
			21. Indeks kualitas udara
			22. Indeks Kualitas tutupan lahan
		18. Meningkatnya pengelolaan sampah	23. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

VISI: MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023			
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	2. Indeks Pembangunan Manusia	2. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	3. Indeks Pembangunan Manusia
			4. Angka Kemiskinan
		4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka Harapan Hidup
		5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	6. Rata-rata Lama Sekolah
		6. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7. Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)
		19. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	20. Status Desa "Maju"
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	3. Indeks Reformasi Birokrasi	10. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	21. Indeks Reformasi Birokrasi
		11. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	22. Opini BPK
			23. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung
		12. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	24. Indeks Profesional ASN
		13. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	25. Survei Kepuasan Masyarakat
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	16. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	26. Laju Pertumbuhan Ekonomi
		17. Meningkatnya pengembangan pariwisata	27. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)
		18. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	28. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
		19. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	29. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)
			30. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)
		20. Meningkatnya investasi	31. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)
		21. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	32. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan

5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	19.	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	24.	Indeks Kualitas lingkungan hidup
				20.	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	25.	Indeks kualitas air
						26.	Indeks kualitas udara
						27.	Indeks Kualitas tutupan lahan
				21.	Meningkatnya pengelolaan sampah	28.	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan

4. Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023

Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Belitung yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah ini selain merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati juga telah disempurnakan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, meliputi :

1) Akses pendidikan untuk semua

Prioritas pembangunan pendidikan difokuskan kepada pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan sehingga mampu memenuhi atau mencapai standar pendidikan (SNP) yang meliputi komponen standarisi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Memberikan memberikan layanan pendidikan datam upaya mengembangkan potensi, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional.

2) Pelayanan kesehatan terintegrasi

Prioritas pembangunan kesehatan terintegrasi difokuskan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh Segenap anggota masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan peningkatan ketersediaan dan pernanfaatan sarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi kesehatan dan memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak ketiga lintas sektoral, dan meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat . Peningkatan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, meningkatkan sumberdaya kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga non medis, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Perwujudan dari pelayanan kesehatan terintegrasi ini dalam bentuk inovasi yaitu SEHATI (sistem Kesehatan Terintegrasi) serta Pelanduk (Pelayanan Medik untuk Kampung) Dengan adanya program SEHATI ini sistem pelayanan sudah terintegrasi dengan instansi terkait dan dalam pelaksanaannya program ini memberikan pendampingan kepada pasien rujukan keluar daerah lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti mobil penjemputan di Bandara Soekarno Hatta sampai pemberian uang saku. Program Pelanduk ini mengadopsi kebutuhan masyarakat yang bertujuan meningkatkannya pelayanan kesehatan secara prima gratis 24 jam dan terintegrasi dengan Call Center 119 dan kartu SEHATI.

3) **Infrasturktur dan konektifitas daerah**

Prioritas pembangunan Infrastruktur dan konektifitas difocukskan untuk meningkatkan aksessibilitas wilayah di Kabupaten Belitung, meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana tranportasi guna menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal di Kabupaten Belitung, Peningkatan management pemeliharaan Jaringan jalan, Inventarisasi, evaluasi dan perencanaan sistim iaringan transportasi, peningkatan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perikanan, industri dan kawasan pariwisata. Peningkatan infrastuktur

Pertanian berupa jaringan irigasi sistem jaringan irigasi dalam upaya menunjang ketahanan pangan daerah.

Peningkatan penataan ruang dengan menjadikan tata ruang menjadi salah satu pedoman pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi rnasyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelenggarakan pengendal ian pemanfaatan ruang yang efektif. Membentuk kelambagaan penataan ruang. Keselarasan perencanaan tataruang Provinsi dan tata ruang kabupaten dan pemanfaatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (Raperda **RZWP3K**) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4) **Inovasi pelayanan publik dan birokrasi**

Prioritas Pembangunan inovasi pelayanan publik dan birokrasi bertujuan untuk mewuiudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan penyelenggaraan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Mengefektifkan sistem pengawasan dan audit dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Menata dan menyempurnakan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

Mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha,dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemeliharaan sarana dan prasaran publik, pengembangan sistem dan prosedur pelayanan publik serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.

Salah satu bentuk dari inovasi pelayanan publik dan birokrasi adalah inovasi Besadu (Belitung Saluran Aspirasidan Pengaduan). Layanan BESADU ini merupakan media pengaduan yang menjadi wadah untuk menampung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai pelayanan publik yang prima dan efektif melalui aplikasi berbasis teknologi.

5) **Pengembangan ekonomi lokal**

Prioritas pengembangan KUMKM dan Koperasi bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing KUMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan para pengusaha/calon pengusaha, peningkatan produktifitas, peningkatan ragam produk-produksi unggulan dan meningkatnya unit koperasi yang mandiri dan maju. Memberikan kemudahan bagi KUMKM yang beorientasi Export; mendorong KUKM menciptakan produk substitusi impor, memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas KUMKM memberikan fasilitas akses permodalan dan tehnologi bagi KUMKM dan - Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia KUMKM.

Meningkatkan kualitas dan keberagaman investasi di berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi daerah dan menjadikan investasi sebagai pemicu perkembangan sektor hulu dan sektor hilir, serta penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan kualitas investasi dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

6) **Pengembangan sektor perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan**

Prioritas pengembangan sektor perikanan adalah Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melakukan pemulihan dan perlindungan potensi sumberdaya kelautan dan paikanan beserta ekosistemnya.

Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatnya Pelayanan Informasi Perikanan dan Kelautan kepada masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Meningkatkan keterkaitan sektor perikanan kelautan dengan lapangan usaha di sektor lain. Pengembangan usaha ekonomi perikanan produktif, Pengembangan riset dan teknologi perikanan dan kelautan; Pengembangan mutu dan nilai tambah hasil perikanan, mengembangkan dan menerapkan teknologi serta sistem informasi perikanan dan kelautan.

7) **Pengembangan budaya dan kearifan lokal**

Prioritas pembangunan pengembangan budaya dan kearifan lokal difokuskan kepada meningkatkan apresiasi masyarakat, termasuk aparat pemerintah terhadap aset budaya serta meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya, sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dapat berfungsi optimal. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalarn pengelolaan kekayaan budaya, dan berkembangnya industri budaya dengan melakukan Penguatan Lembaga Adat dalam meningkatkan pengetahuan dan kearifan lokal. Melakukan Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nila tradisionil, pengembangan peran serta masyarakat dalam operasionalisasi dan pemeliharaan aset budaya - Peningkatan sumber daya manusia pengelola aset budaya, meningkatkan promosi Budaya, melestarikan Cagar Budaya sebagai asset bernilai tinggi dan objek pariwisata yang potensial.

8) **Pengembangan Pariwisata**

Prioritas pembangunan Pariwisata difokuskan pada pengembangan 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangan potensi desa menjadi potensi wisata (PROGRAM TUSENA), pengembangan Geopark Belitong untuk mendukung perkembangan KSPN dan KEK Tanjungkelayang, pengembangan lokasi utama perhutanan sosial. Sektor pariwisata ini merupakan unggulan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan wilayah sebagai transformasi dari sektor pertambangan.

9) **Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19**

Prioritas pembangunan daerah akan mendorong kepada proses inovasi dan transpormasi membangun Kabupaten Belitung, seperti yang diharapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam kampanye pemilihan Bupati Belitung.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitung selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Pembangunan Provinsi. Prioritas pembangunan nasional atau sering disebut dengan prioritas nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan prioritas nasional (PN) dan prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN dan RPJMD Provinsi Kepulaluan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belitung, sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam pembangunan yang akan dibagi kedalam beberapa cluster, diantaranya adalah :

a. Cluster I

Cluster I ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Pariwisata merupakan core bisinis dari kabupaten belitung yang memberikan stimulus bagi seluruh sektor pembangunan. Pariwisata memberikan efek domino dan timbal balik terhadap sektor- sektor lainnya. Sejak terjadinya transisi pembangunan kabupaten belitung dari pertambangan ke pariwisata , sektor ini menjadi sektor yang paling diharapkan untuk mendorong seluruh sektor pembanguan daerah.

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Belitung, Pariwisata merupakan sektor unggulan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pariwisata akan mendorong produksi sektor pertanian dan perikanan untuk pemenuhan kebutuan lokal daerah, di mana mengurangi ketergantungan pasokan produksi pertanian dari luar daerah khususnya pangan yang dapat diproduksi lokal. Potensi pertanian agrikultur dan pertanian lainnya juga menjadi atraksi wisata yang dapat dikembangkan berupa agriwisata.

Begitu juga dengan perikanan, menjadi sektor yang akan turut bertumbuh dengan berkembangnya kuliner dan kebutuhan bahan baku untuk pengrajin makan ringan yang terus bertambah akibat makin banyaknya pelancong pariwisata. Sektor ini pun menjadi suatu atraksi wisata yang juga sangat menarik untuk dikembangkan.

Sejalan dengan itu pengembangan usaha mikro menjadi lebih terpacu dengan adanya peningkatan kunjungan wisata, tumbuhnya usaha-usaha mikro di daerah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa baik bagi penduduk lokal maupun bagi wisatawan. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk turut membangun pariwisata melalui usaha mikro dan selanjutnya akan memacu pertumbuhan koperasi-koperasi di daerah. Pembangunan pariwisata menjadi titik pokok pelaksanaan investasi daerah, dengan ditetapkannya KSPN dan KEK, merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Belitung baik sekali kecil maupun skala besar, baik di sektor jasa pariwisata maupun di sektor sektor lainnya selain pariwisata.

Pembangunan Infratruktur yang baik dan memenuhi standar menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan mobilitas dan aksebilitas pariwisata dan meningkatkan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa jalan dan jebatan saja tetapi semua infrasturtur ekonomi masyarakat, yang meningkatkan aksebilitas dan kemudahan berusaha. Pembangunan infrastruktur diarahkan sinergi dengan pembangunan pariwisata dengan membuat bangunan iconik pariwisata yang menjadi atraksi bagi pariwisata.

Pengembangan pariwisata berupa peningkatan aktraksi dan dan amenitas pariwisata di seluruh sektor, saling berterkaitan dan saling mendukung kenyamana wisatwan dalam melakukan aktivitasnya, pembangunan sumber daya manuasi pariwisata , masyarakat sadar wisata, dan komunitas-komunitas masyarakat berbasis pariwisata di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Pembangunan objek wisata baik yang dikembangkan oleh masyarakat atau pun pihak-pihak pengembang pariwisata terus dibina dan diarahkan untuk memenuhi kepada pelayanan yang baik dan memenuhi standar pelayanan pariwisata.

b. Cluster II

Cluster I ini masuk dalam misi ke-1 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Pembangunan pariwisata tidak hanya pada pengembangan pada cluster pertama atau cluster ekonomi, tetapi harus didukung juga dengan cluster kedua yaitu sebagai berikut : Sektor kesehatan, merupakan sektor penunjang tidak langsung dari pembangunan pariwisata karena daera tujuan yang sehat tentunya akan membuat wisatawan menjadi lebih tertarik, apalagi perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat menjadi faktor pendukung pariwisata apalagi di masa pandemi saat ini.

Kesehatan mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor pariwisata, karena infrastruktur kesehatan menjadi faktor utama ketertarikan wisatwan khususnya mancanegara untuk menjamin keselamatan dan kenayaman dalam berwisata. Pendidikan menjadi sektor yang sanagat menentukan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan memliki moral dan prilaku yang baik, pendididkan karakter bangsa, sebagai identitas bangsa, dan identitas daerah menjadi faktor pendukung pembangunan pariwisata. Manusia yang cerdas dan kreatif dibentuk dari pendidkan yang baik.

Peningkatan daya beli masyarakat, dengan pembangunan pariwisata akan meningkatkan daya beli masyarakat, karena semakin banyaknya peluang kerja dan peluang berusaha di masyarakat. Pembangunan Pariwisata akan mengurangi penganguran.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembanguna pariwisata meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat baik di desa untuk menjadikan desa – desa yang maju dan mandiri.

c. Cluster III

Cluster III ini masuk dalam misi ke-2 RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023. Birokrasi yang bersih inovatif dan profesional, akuntabel dan trasnparant. Menjadi pendorong bagi pengambangan cluster I dan cluster II, pemerintah yang baik, mejadi pemicu dari cluster I dan cluster II.

Aparatur negara menjadi birokrasi yang bersih dan transparat serta akuntabel dalam melaksanakan pembangunan daerah akan mendorong seluruh sektor dengan komitmen yang baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pembanguna daerah.

Aparatur daerah yang profesional dalam melaksanakna tugas-tugasnya dan selalu berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan pembanguna daerah untuk mencai visi dan misi daerah. Apatur yang selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh *stake holder* masyarakat.

Pada suatu saat *cluster* ketiga ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ring pembangunan pariwisata, di mana aparatur Kabupaten Belitung dengan inoovasi-inovasinya akan menjadi daya tarik bagi

daerah lain untuk selalu mencari tahu dan datang ke Belitung untuk melakukan study tentang pelayanan publik yang baik. RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023 merupakan Dokumen Strategis Kabupaten Belitung yang juga memuat janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Belitung terpilih. Janji-janji tersebut terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi, dan menjadi tugas bagi perangkat daerah untuk mengimplementasikanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

(6) Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karenanya setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama juga merupakan salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk maksud tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.16
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
MISI 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	
		Angka Kemiskinan	%
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	Desa
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan			
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	Predikat
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Predikat
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
MISI 3 : : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara)	Orang
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	%

13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi (ribu rupiah)	Ribu Rupiah
		Nilai Omset Usaha Mikro (ribu rupiah	Ribu Rupiah
14	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan	%
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
17	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Poin
		Indeks Kualitas Udara	Poin
		Indeks Kualitas Lahan	Poin
18	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%

(7) Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja ini merupakan merupakan wahana proses yang akan memberikan skala prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan instansi terarah.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2023 yang ditetapkan pada bulan Januari 2023 mengalami perubahan pada bulan November 2023 seiring terjadinya perubahan RPJMD, RKPD dan APBD 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.17
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2022

	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	74,21
		2	Angka Kemiskinan	5,41
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka harapan hidup	71,47 Tahun
3	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata lama sekolah	8,56 Tahun
4	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	14.049 Rupiah
5	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status desa “Maju”	31 Desa
6	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
7	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	WTP
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	BB
8	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional	10	Indeks Profesionalitas ASN	76
9	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju pertumbuhan ekonomi	4,4-5,1
11	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	400.000 orang
12	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	27,83%
13	Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai omset koperasi (ribu rupiah)	85.562.956 (Ribu Rupiah)
		16	Nilai omset usaha mikro (ribu rupiah)	1.957.050.000 (Ribu Rupiah)
14	Meningkatnya investasi	17	Nilai investasi (juta rupiah)	5.023.529 (Juta Rupiah)
15	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	59,94 %
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,88
17	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20	Indeks Kualitas Air	53,46
		21	Indeks Kualitas Udara	93,83
		22	Indeks Kualitas	50,35
18	Meningkatnya pengelolaan sampah	23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	16,00%

(8) Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal terserbut, pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.217.064.591.359,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 940.707.636.124,00 Belanja Modal sebesar Rp. 165.820.204.235,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.367.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 108.169.751.000,00. Alokasi anggaran yang ada untuk membiayai program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 1.18
Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Operasi	Rp. 940.707.636.124,00
Belanja Modal	Rp. 165.820.204.235,00
Belanja Tak Terduga	Rp. 2.367.000.000,00
Beanja Transfer	Rp. 108.169.751.000,00
TOTAL BELANJA	**Rp. 1.217.064.591.359,00**

Tabel 1.19
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN
Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rp. 117.700.029.572
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rp 76.390.354.526
Meningkatnya daya beli masyarakat	Rp 1.507.363.368
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Rp 3.189.978.222
Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	
Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Rp 134.157.167.935
Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Rp 4.497.117.387
Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Rp 16.306.861.710
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	
Meningkatnya pengembangan pariwisata	Rp 10.294.652.754
Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Rp 20.899.070.236
Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Rp 14.041.234.302
Meningkatnya investasi	Rp 1.082.570.940
Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Rp 128.929.551.152
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Rp. 4.213.086.520
Meningkatnya pengelolaan sampah	Rp 8.411.530.600

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Bila dikaji secara mendalam ada pergeseran makna SPM pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Secara tekstual, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dengan kata lain SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam penerapannya, SPM harus berdasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan Paradigma penting lain berkaitan dengan SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Dalam belanja daerah harus ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kinerja Pemerintah Daerah tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah mencakup 6 (enam) bidang urusan wajib yaitu bidang urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaaan umum; urusan perumahan rakyat; urusan ketentraman,ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan umum berisikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang merupakan pedoman berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran bertahap selama lima tahun.

Kebijakan Umum Pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan dalam target-target pembangunan Kabupaten Belitung, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yaitu ***MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023.***

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran. Arah kebijakan merupakan bentuk konkret pelaksanaan perencanaan pembanguan yang memberi arahan kepada pemerintah daerah supaya lebih optimal dalam menentukan dan mecapai tujuan. Arah kebijakan disusun berdasarkan tema pembangunan setiap tahun untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan. Dengan demikian penuangan RPJMD ke dalam RKPD lebih jelas dengan penekanan pada tema setiap tahunnya.

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Belitung telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Belitung Tahun 2023-2027 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2023. Rencana aksi diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut dan harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemisikinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada skala nasional pascapandemi telah meberikan dampak positif pada proses pembangunan ekonomi di daerah yaitu baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Ibarat organ tubuh, perekonomian berfungsi layaknya jantung yang memompa darah serta mengalirkan oksigen keseluruh tubuh. Peranannya sangat vital dalam memompa denyut kehidupan suatu wilayah.

Selama tahun kedua pandemic Covid-19 melanda Indonesia yaitu di tahun 2021, perekonomian Belitung telah menunjukkan pemulihan sehingga berada pada zona tumbuh (positif). Begitu juga pada tahun 2022 dan tahun 2023 yang menunjukkan performa kinerja pertumbuhan positif sebagaimana tergambar indikataor makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,38 (Persen)	74,02 (Persen)	0,87
2	Angka Kemiskinan (%)	6,45 (Persen)	6,46 (Persen)	0,155
3	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT) (%)	4,30 (Persen)	4,14 (Persen)	-3,721
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan /ADHK) (%)	5,71 (Persen)	5,75 (Persen)	0,701
5	Pendapatan Per kapita (PDRB Per Kapita Per Tahun) (Rupiah)	6,613 (Juta Rupiah)	71,62 (Juta Rupiah)	8,302
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,237	0,253	6,751

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

a. Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*,
   Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH),
b. Pengetahuan *(knowledge),* dan
   Pengetahuan dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
c. Standar hidup layak *(decent standard of living)*.
   Standar hidup layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita.

Nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung terus mengalami kemajuan selama kurun 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung

NO	I P M	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KET
1	IPM KABUPATEN BELITUNG	73,38	74,02	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2023 mencapai 74,02. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 73,38. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami peningkatan, yang semula 72,24 di tahun 2022 menjadi 72,85 di tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga telah malampaui nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 72,91 menjadi 74,39 dengan capaian pertumbuhan IPM 1,48 poin.

Pada tahun 2023, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,54, naik 0,23 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,90 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,98 tahun, naik 0,24 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.045.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.365.000,- per tahun.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung juga cukup memprihatinkan karena Kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun 2022. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin parah. Salah satunya adalah tingkat inflasi. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,76 persen; kelompok transportasi sebesar 6,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,67 persen; kelompok pendidikan sebesar 6,90 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,87 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,27 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Tabel 2.3
Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA KEMISKINAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	6,45	6,46	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2024

2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 4,14 menurun dari tahun 2022 sebesar 4,30. TPT Kabupaten Belitung tahun 2023 sedikit menurun dari tahun 2022. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 68,09% artinya sebesar 68,09 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2023 ini meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 65,25%.

Tabel 2.4
Persentase Angka Pengangguran Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	4,30	4,14	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2024

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung menurut lapangan usaha tahun 2023 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Belitung, pertumbuhan ekonomi Belitung pada tahun 2023 kembali menunjukkan performa kinerja pertumbuhan positif sebesar 5,75 persen dibanding tahun 2022. Secara perbandingan regional, perekonomian Belitung jauh lebih baik dari perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh 4,38 persen.

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung

NO	PDRB ADHK (%)	TAHUN 2022	TAHUN 2023	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	5,71	5,75	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2024

Percepatan atau perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 mengalami peningkatan 3,11 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 0,19 persen. Adapun 3 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Belitung selama tahun 2023 apabila dibandingkan tahun 2022 yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan ekonomi 15,27 persen disusul sektor informasi dan komunikasi 13,97 persen, dan sektor jasa lainnya 11,35 persen.

Dari sisi lapangan usaha, Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar.Untuk kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 26,82% dan tahun 2023 sebesar 26,56% dari total PDRB. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya

Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Beberapa indikator perekonomian mulai membaik seperti daya beli yang mulai meningkat hingga angka-angka kegiatan bisnis juga mengalami sedikit

kenaikan. Tingginya ekonomi maka pendapatan mengalami kenaikan, sehingga berbagai lapangan usaha mengalami peningkatan. Pembangunan ekonomi melalui sektor terkait pariwisata-ekraf juga sangat strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi. Namun demikian, tantangan perlambatan ekonomi global, ancaman resesi, risiko stagflasi, dan tingginya ketidakpastian perlu terus diwaspadai. Oleh karena itu, momentum pemulihan pariwisata perlu terus dioptimalkan, antara lain, melalui konsistensi kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah serta sinergi percepatan pemulihan dan pengembangan pariwisata baik yang menyasar wisatatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Tabel 2.6

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,19	3,11
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,93	-0,37
C	Industri Pengolahan	9,05	4,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,03	2,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	0,77
F	Konstruksi	-0,88	8,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	14,25	1,75
H	Transportasi dan Pergudangan	36,27	10,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,16	10,23
J	Informasi dan Komunikasi	10,49	13,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,03	15,27
L	Real Estate	5,48	4,25
M,N	Jasa Perusahaan	22,31	8,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,95	6,85
P	Jasa Pendidikan	2,91	11,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	9,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	12,22	11,35
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,62**	**5,75**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2024

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Penghitungan pendapatan per kapita yang digunakan saat ini adalah menggunakan metode penghitungan PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. Pada Tahun 2022 PDRB Per Kapita Riil Kabupaten Belitung tercatat Rp.66.130.000,- sedangkan pada Tahun 2023, PDRB Per Kapita Riil juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.71.620.000,-

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan *(Gini Ratio)*

Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indikator ini hanya dilakukan pengukuran di daerah tingkat provinsi. Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Adapun angka ketimpangan pendapatan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula pada Tahun 2022 adalah 0,237 berubah menjadi angka 0,253 pada Tahun 2023. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam ketimpangan rendah. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten Belitung masih berada ketimpangan rendah.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Pendidikan**	1. Jumlah Satuan Pendidikan AnakUsia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	**98**	**Disdikbud**	
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	**3,222 Orang**	**Disdikbud**	
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	**0**	**Disdikbud**	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	**210 Orang**	**Disdikbud**	
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	**278 Orang**	**Disdikbud**	
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	**171 Orang**	**Disdikbud**	
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	**43 Orang**	**Disdikbud**	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	**SD = 122 SMP = 32**	**Disdikbud**	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	**75.236 Orang**	**Disdikbud**	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	**15.816 Orang**	**Disdikbud**	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	**370 Orang**	**Disdikbud**	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	**211 Orang**	**Disdikbud**	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	**1.231Orang**	**Disdikbud**	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	**558 Orang**	**Disdikbud**	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	**1.190 Orang**	**Disdikbud**	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	**514 Orang**	**Disdikbud**	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	**462 Orang**	**Disdikbud**	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	**171 Orang**	**Disdikbud**	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	**403 Orang**	**Disdikbud**	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	**181 Orang**	**Disdikbud**	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	**1.108 Orang**	**Disdikbud**	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	**485 Orang**	**Disdikbud**	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	**113 Orang**	**Disdikbud**	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	**27 Orang**	**Disdikbud**	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	**143 Orang**	**Disdikbud**	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	**93 Orang**	**Disdikbud**	
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	**SD = 122 SMP = 32**	**Disdikbud**	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	**75.236 Orang**	**Disdikbud**	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	**15.816 Orang**	**Disdikbud**	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	**370 Orang**	**Disdikbud**	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	**211 Orang**	**Disdikbud**	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	**1.231 Orang**	**Disdikbud**	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	**558 Orang**	**Disdikbud**	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	**1.190 Orang**	**Disdikbud**	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	**514 Orang**	**Disdikbud**	
		10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	**462 Orang**	**Disdikbud**	
		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	**171 Orang**	**Disdikbud**	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	**403 Orang**	**Disdikbud**	
		13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	**181 Orang**	**Disdikbud**	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	**1.108 Orang**	**Disdikbud**	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	**485 Orang**	**Disdikbud**	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	**113 Orang**	**Disdikbud**	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	**27 Orang**	**Disdikbud**	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	**183 Orang**	**Disdikbud**	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah	**93 Orang**	**Disdikbud**	
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	**3 PKBM**	**Disdikbud**	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	**414 Orang**	**Disdikbud**	
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	**0**	**Disdikbud**	
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	**46 Orang**	**Disdikbud**	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	**89 Orang**	**Disdikbud**	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	**86 Orang**	**Disdikbud**	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah	**2 Orang**	**Disdikbud**	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	**6 Orang**	**Disdikbud**	
2	**Kesehatan**	1. Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	**3**	**Dinkes**	
		1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan Akreditasinya	**3**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**312.000**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	**696**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**11.912**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	**686**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**20.136**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	**686**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**90.786**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	**678**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**32.577**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	**754**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**20**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**27**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**78.128**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**705**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**20**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**27**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**20**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**27**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**57**		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**29**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**17.717**	**Dinkes**	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**		
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	**6.193**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	**59**		
3.	**Pekerjaan Umum**	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten /kota (ha)	**288,37 ha**	**DPUPR**	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	**15.114 M**		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	**87.633,17 ha**		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	**205.461,393 m**		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	**11**		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	**7**		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	**(i) 810 M** **(ii) 24.224,6 M** **(iii) 9.593,04 M** **(iv) 0** **(v) 0** **(vi) 759** **(vii) 4.022 M**		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	**288.37Ha**	**PUPR**	
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	**15.114 m**		
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	**87.633,17 Ha**		
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	**205.461,393 m**		
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	**Ada**		
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan Sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	**Ada**		
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	**(i) 810 M** **(ii) 24.224,6 M** **(iii) 9.593,04 M** **(iv) 0** **(v) 0** **(vi) 759 M**	**PUPR**	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah :i.Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(vii) 4.022 M		Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	**2.608,66 = ---------- x 100% 3.710,18 = 70,31%**	**DPUPR**	
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	**39.958,45 = ---------- x 100% 83.629,30 = 47,48%**		
		3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	**9.950,00 = ---------- x 100% 20.923,90 = 47,55%**		
		1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	**Ada**		
		2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	**Tidak Ada**		
		3. Jumlah BUMD dan atauUPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	**BUMD ADA 8 UPTD ADA 8 PERUMDA TBM ADA 4**		
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	**0**		
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	**1**		
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	**695**		
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	**350**		
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	**1.045**		
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	**417**	**DLH**	
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	**417**		
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	**1.045**		
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	**30.121 = ---------- x 100% 43.044 = 69,98%**	**DPUPR**	
		8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	**1.045 = ---------- x 100% 30.121**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			= 3,47%		
		9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	350 = --------- x 100% 30.121 = 1,16%		
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	695 = -------- x 100% 30.121 = 12,28%	DPUPR	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2 = ---- x 100% 5 = 40%	DLH	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	1 m^3 = ------- x 100% 5 m^3 = 20%		
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	695 = ------- x 100% 1.045 = 66,51%	DPUPR	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	417 = ------- x 100% 30.121 = 1,38%	DLH	
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	101 = ------- x 100% 1.415 = 7,14%	DPUPR	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	587	DPMPTSPP	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PUPR	
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada		
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	8		
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	BPKAD	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4.251		
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	4.022		Kondisi Baik
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	666.024	DPUPR	
		2. Panjang jalan yang dibangun	0,34 Km		
		3. Panjang jembatan yg dibangun	0		
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	5.824 Km		Pekerjaan di Tahun 2023 Data Pendukung Terlampir
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Surat Keterangan
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	**5,205 Km**		Pekerjaan di Tahun 2023 Data Pendukung Terlampir
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	**0**		Tidak ada Pekerjaan di Tahun 2023 Surat Keterangan
		8. Panjang jalan yang dipelihara	**595,250 Km**		
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	**1.047,7 m**		
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	**4 Kali**		
		2. Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	**64 Orang**		
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	**64**		dari Tahun 2018s.d. 2023
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	**Ada**		Apliksi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	**Ada**		Apliksi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	**Tidak Ada**		Surat keternagan
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	**Ada**	**DPUPR**	Apliksi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	**Ada**		Apliksi LPSE https://lpse.belitungkab.go.id/
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	**Ada**		Profil OPD dan Apliksi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	**Tidak Ada**		Surat keternagan
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	**Ada**	**DPUPR**	Apliksi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di	**Ada**		Apliksi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		wilayah kab/kota			
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	**Ada**		Surat keterngan
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	**Tidak Ada**		Surat keterngan
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	**Ada**		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	**Tidak Ada**		Surat Pernyataan Tidak ada Kecelakaan
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	**Ada**		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	**1**		Apliksi SIPJAKI https://sipjaki.pu.go.id/
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	**0**		OSS di Dinas PMPTSPP /
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	**1**		https://lpse.belitungkab.go.id/
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	**1**		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	**0**		OSS di Dinas PMPTSPP
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan engawasannya	**34**		Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	**0**		-
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasan	**34**	**DPUPR**	Laporan Monitoring Jasa Konstruksi
4	**Perumahan Rakyat**	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	**0**		
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana	**0**	**BPBD**	
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	**0**		
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai	**0**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dengan rencana aksi			
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	**0**		
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	**0**		
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	**0**		
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	**0**		
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	**0**		
		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	**0**		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	**0**		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	**0**	**BPBD**	Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	**0**		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	**0**		Surat pernyataan : Dikarenakan tidak adanya kerusakan rumah akibat fenomena alam yang termasuk kategori bencana
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	**0**		Data Pendukung
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	**62,01 Ha**	**PUPR**	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	**16 unit**		
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	**41,27 Ha**		
		1. Jumlah rumah di kab/kota	**43.044**		
		2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	**16**		
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	**8.014**		
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		
		5. Rasio rumah dan KK	$\frac{64.831}{43.044}\ x\ 100\% = 1.51\ \%$		
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	**16 Unit**		
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	**28 Perumahan**	**PUPR**	
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	**28 Perumahan**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan	**2.175 unit**		
		4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	**2.175 unit**		
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	**28 Perumahan**		
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	**2.175 unit**		
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	**28**		
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	**28**		
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	**28**		
5.	**Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	**88**	**POLPP**	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	**490**		
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	**15 Perda**		
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	**1 Orang**		
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	**7**		
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	**193**		
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	**100 / 100 = ------- x 100% = 100%**	**BPBD**	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	**179.621 / 170.621 = ---------- x 100% = 100%**		
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	**0**		
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	**0**		
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	**179.621 / 179.621 = ---------- x 100% = 100%**		
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	**179.621 / 179.621 = ---------- x 100% = 100%**		
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	**0**		
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	**0**		
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	**0%**		
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	**0%**		
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	**0%**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	**3.012 = ------ x 100% = 100% 3.012**		
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	**= 188**		
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	**0**		
		3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	**0**		
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0		
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	**16**		
		6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	**5 Orang**		
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	**5**	**BPBD**	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	**3**		
6.	**Sosial**	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	**2**		1. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 2. Website Begalor
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	**144 orang**		
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	**1 Tim = 16 Orang**		SK Tim Reaksi Cepat
		4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	**144 orang**		
		5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	**1**	**DSPPA**	
		6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	**105 orang**		
		7. Jumlah rumah singgah/ shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	**1**		
		8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	**109 Orang**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		menerima paket sandang			
		9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	**3 Orang**		
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	**3**		
		11. Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	**1 Paket**		
		12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	**0 Orang**		
		13. Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	**Tidak ada**		
		14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	**123 Orang**		
		15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	**105 Orang**		
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	**105 Orang**		
		17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	**10 Orang**	**DSPPA**	
		18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	**7 Orang**		
		19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	**44 Orang**		
		20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	**105 Orang**		
		21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	**144 Orang**		
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	**0**		
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	**17 orang**		
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	**0**	**DSPPA**	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	**0**		
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	**24**		
		6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau	**73 Orang**	**DSPPA**	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		relawan sosial yang tersedia			
7.	**Tenaga Kerja**	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	**1**		
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	**0%**		
		3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	**84**		
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	**20 = ---- x 100% 30 66,7%**		
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	**23 = ---- x 100% 27 = 85,1%**		
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	**23 = ---- x 100% 320 = 7,19%**		
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	**7 = ---- x 100% 10 = 70%**	**DKUKMPTK**	
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	**10 = ---- x 100% 10 = 100%**		
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	**320**		
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	**320 = ---- x 100% 320 =100%**		
		8. Persentase penyerapan lulusan	**154 = ---- x 100% 154 = 48,12%**		
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	**0**		
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	**0**		
		11. (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan	**0**		
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	**0**		
		2. Data tingkat produktivitas total	**0**		
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	**93 = ---- x 100% 93 = 100%**	**DKUKMPTK**	
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	**7 = --- x 100% 17 = 41,18%**		
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB	**20**		1 Konfederasi, 2 Federasi dan 17 SP/SB di Perusahaan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		DKUKMPTK	
		4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100 = ----- x 100% 100 = 100%		
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	254 = ------- x 100% 254 =100%		
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	14 = ----- x 100% 254 = 5,51%		
		7. Jumlah mogok kerja	0		
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0		
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0		
		10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		
		11. Jumlah perselisihan PHK	4		
		12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	121		
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1		Surat Keterangan
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0		Surat Keterangan
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industri	6 = ---- x 100% 14 = 42,86%		
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	45		
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	115		
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0		
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4 orang		
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0		
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	1		
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0		
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0		
		11. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	1		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang mendapatkan fasilitasi kepulangan			
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	**0**		
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	**0**		
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	**0**		
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	**28**	**DSPPA**	
		2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	**10**		
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	**5 Media**		
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	**10 Lembaga**		
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	**13 / 13 = ---- x 100% = 100%**		
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	**10 Lembaga**		
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	**10 Lembaga**		
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	**18 Organisasi**		
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	**338 Orang**		
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	**8 Lembaga**		
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	**6 Lembaga**		
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	**2 Kebijakan**		
		6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	**8 Lembaga**		
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	**49 / 49 = ---- x 100% = 100%**		
9	**Pangan**	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	**1**	**DKPP**	MoU antara Kepala Bulog dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peratanian Kabupaten Belitung
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	**12**		1. Ceremonial Penyerahan Bantuan Pangan CPPD di Desa Terong Kecamatan Sijuk tanggal 23 Agustus

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2023 2. Penyaluran CPPD di Desa Lassar Kecamatan Membalong tanggal 23 Agustus 2023 3. Penyaluran CPP di Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong tanggal 23 Agustus 2023 4. Penyaluran Beras di Desa Mentigi Kecamatan Membalong tanggal 23 Agustus 2023 5. Penyaluran CPP di Desa Kembiri Kecamatan Membalong tanggal 23 Agustus 2023 6. Penyaluran CPPD di Desa Membalong Kecamatan Membalong tanggal 23 Agustus 2023 7. Penyaluran CPP di Desa Ibul Kecamatan Badau tanggal 23 Agustus 2023 8. Penyaluran CPP di Desa Badau Kecamatan Badau tanggal 23 Agustus 2023 9. Penyaluran CPPD di Desa Selat Nasik Kecamatan Selat Nasik tanggal 24 Agustus 2023 10. Penyaluran CPP di Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik tanggal 23 Agustus 2023 11. Penyaluran CPP di Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik tanggal 24 Agustus 2023 12. Penyaluran CPPD di Desa Bantan Kecamatan Membalong tanggal 25 Agustus 2023
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	**0**		Surat Pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung belum tersedia regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	**1**		
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	**7**		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	**12**		Penyaluran cadangan pangan pada keluarga rawan rentan pangan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	**12**		Penyaluran Cadangan pangan daerah pada tahun 2023 disalurkan pada keluarga rentan rawan pangan berdasarkan Data Food Security and Vunerability Atlas (FSVA) Tahun 2022 pada 12 Desa yaitu : 1. Desa Lasar Kec. Membalong 2.Desa Simpang Rusa Kec. Membalong 3. Dea Mentigi Kec. Membalong 4. Desa Kembiri Kec.Membalong 5. Desa Terong Kec. Sijuk 6.Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Membalong Kec.Membalong 7.Desa Ibul Kec.Badau 8.Desa Badau Kec.Badau 9.Desa Selat Nasik Kec.Selat Nasik 10.Desa Petaling Kec.Selat Nasik 11.Desa Suak Gual Kec.Selat Nasik 12. Desa Bantan Kec.Membalong
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	**4**		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan keamanan pangan segar
10	**Pertanahan**	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota (Izin PKPR)	**16**	**DPMPTSPPP** **Bagian Pemerintahan**	Data Izin PKPR pengganti Izin Lokasi
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	**0**		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	**0**		Surat Pernyataan : Dikarenakan tidak ada Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek di Kab. Belitung
		4. Dokumen Izin membuka tanah	**0**		Surat Pernyataan : Belum ada Dokumen Izin Membuka tanah karena masih proses pembahasan regulasi
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	**0**		Surat pernyataan : Belum ada Dokumen perencanaan Penggunaan Tanah Kab. Belitung Tahun 2023
11	**Lingkungan Hidup**	1. Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	**IKA (Indeks Kualitas Air) = 59.71** **IKU (Indeks Kualitas Udara) = 90,43** **ITH (Indeks Tutupan Hutan) = 44,89**	**DLH**	
		1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	**1. Tersedianya Informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah : Ada** **2. Tersedianya Informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah : Ada** **3. Tersedianya Informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan : Tidak Ada**		
		1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	**11** **= ----- x 100%** **34** **= 32,35%**	**DLH**	
		2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	**2** **= ----- x 100%** **11**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	**= 18,18%**		
		3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	**2 = ----- x 100% 3 = 66,66%**		
		4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	**0 = ----- x 100% 0 = 0%**		
		5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	**0 = ----- x 100% 0 = 0%**		
		6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	**1 = ----- x 100% 1 = 100%**		
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	1. Penerbitan akta perkawinan	**75**	**Disdukcapil**	
		2. Penerbitan akta perceraian	**17**		
		3. Penerbitan akta kematian	**1.149**		
		4. Penyajian data kependudukan	**3**		• Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kab. Belitung Tahun 2022, • Buku Agregat Kependudukan I Tahun 2022, • Buku Agregat Kependudukan II Tahun 2022
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	**0**	**DPPKBPMD**	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	**0**		
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	**42**		
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	**0**		
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	**7**		
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	**0**		
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	**42**		
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	**0**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	**Ada**	**DPPKBPMD**	• Buku GDPK • Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2020 ttg Grand Design Pembangunan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2039
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	**19,90**		Buku Info Grafik Kinerja Utama
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility ate/ASFR 15-19)	**35,60**		Data Ibu Bersalin Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Belitung Tahun 2023 dari Dinkes Kab. Belitung
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	**25.683 / 32.291 = 79,54%**		Laporan Pengendalian Lapangan Kabupaten Belitung
		5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	**11** **Jumlah Perangkat Daerah Kab. Belitung yang berperan aktif :5** **Jumlah Mitra Kerja yg Berperan Aktif :6**	**DPPKBPMD**	SK Pokja Advokasi Kependudukan dan KB Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023
		6. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	**17 / 17 = 100%**		
		7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	**3.732 / 25.683 = 14,43%**		
		8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	**33 pokja** • **Pokja Advokasi KKB Kab. Belitung Th 2019-2023 : 1** • **Pokja Kampung KB Tk. Kab.: 1** • **Pokja Kampung KB Tk. Kecamatan : 5 Kec** • **Pokja Kampung KB Tk. Desa : 26 Desa Kampung KB**		• SK Pokja Advokasi Kependudukan & KB Kab. Belitung • SK Pokja Kampung KB Tk. Kabupaten s.d. Desa
		9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	**2.136 / 2.969 = 71,94%**		
		10. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	**< 66,30% sebanyak 7 desa**		
		11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	**13.963 / 17.831 = 78,30%**		
15	**Perhubungan**	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	**15+11 = 26 / 23+29 = 52 = 50%**	**DISHUB**	Ketersediaan Fasilitas Terminal Tanjungpandan
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	**1.292 / 173.725 = 74,37%**		Data jumlah kendaraan wajib uji termasuk kendaraan dengan kepemilikan pribadi

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	**1 / 4 = --- x 100% = 25%**		Jumlah tarif sampai tahun 2023 dan jumah lintas sampai tahun 2023
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	**12.194 / 16.558 = ---------- x 100% = 73,64%**		Jumlah pemasangan sampai tahun 2023 dan target kebutuhan sampai tahun 2024
16	**Komunikasi dan Informatika**	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**29 / 31 =------- x 100% = 93,55%**	**DISKOMINFO**	Tabel OPD yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo)
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	**29 / 31 =------- x 100% = 93,55%**		Akses Internet Berkualitas : - Tingkat Realibitas (SLA) 97,58% Downtime selama 1 Tahun = 12.715 Menit Bandwith : 1. 100 Mbps Dedicated 2. 300 Mbps Shared
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	**1**		Topologi Jaringan
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	**122 / 122 = ------- x 100% = 100%**		Tabel Daftar domain sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	**31 / 31 = ------ x 100% = 100%**		Tabel Portal dan Situs Web
		3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	**31 / 31 = ------ x 100% = 100%**		Tabel Aplikasi Umum dan Khusus
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	**29 / 29 = ------ x 100% = 100%**		Tabel Layanan SPBE
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	**24 / 24 = ------ x 100% = 100%**		Tabel Layanan SPBE yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik)
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	**125 / 125 = ------ x 100% = 100%**	**DISKOMINFO**	Tabel Sertifikat Elektronik yang terdaftar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	**28 = ------ x 100% 28 = 100%**		Tabel Layanan Publik yang terintegrasi
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	**31 = ------ x 100% 31 = 100%**		Tabel Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	**31 = ------ x 100% 31 = 100%**		Tabel Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
		10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	**31 = ------ x 100% 31 = 100%**		Tabel Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	**36 = ------ x 100% 36 = 100%**		Tabel data yang dapat berbagi pakai
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	**25 = ------ x 100% 31 = 80,64%**		Tabel Perangkat Daerah yang mengimplementasi inovasi smart city
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	**86 = ------ x 100% 103 = 83,49%**		Tabel ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	**3**		1. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 100.3.4/339/DISKOMINFO /2023 tentang Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Belitung 2. Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik Kabupaten Belitung (Pasal 51 3. Perbup No.79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung (Pasal 18)
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	**4 = --- x 100% 5 = 80%**		Keterangan : Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM,Kelompok Kerja Wartawan Bleitung,Persatuan Wartawan Belitung (PWI) dan Media Independent Online (MIO)
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	**29 = ----- x 100% 33 = 87,87%**	**DISKOMINFO**	Daftar Konten Informasi
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	**6 = ---- x 100% 6 = 100%**		Daftar Diseminasi dan layanan informasi publik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0 = --- x 100% = 0% 9**	**DKUKMPTK**	
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0%**		
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**98 = ------ x 100% 141 = 69,50%**		
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0%**		
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**30 = ------ x 100% 141 = 21,27%**	**DKUKMPTK**	
		6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**30 = ---------- x 100% 16,034 = 0,19%**		
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0%**		
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	**0**		
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**25 = ------ x 100% 141 = 17,73%**		
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0 = ------ x 100% 141 = 0%**		
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0 = ------ x 100% 141 = 0%**		
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**98 = ------ x 100% 141 = 69,50%**		
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	**0 = ------ x 100% 141 = 0%**		
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	**231 = --------- x 100% 20.324 = 2,77%**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	-	DKUKMPTK	
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	37 = --------- x 100% 20.324 = 0,18%		
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	35 = --------- x 100% 20.324 = 0,17%		
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	426 = ---------- x 100% 20.324 = 2,1%		
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	961 = -------- x 100% 20.324 = 4,7%		
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	341 = ---------- x 100% 20.324 = 1,1%		
18	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	DPMPTSPP	Perda Kab. Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Kab. Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 dokumen		Dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal DPMPTSPP Kabupaten Belitung tertulis dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		Tahun 2023 akhir baru ditetapkan Perbup tentang tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, sehingga implementasinya baru ditahapan sosialisasi pada pelaku usaha di Kabupaten Belitung, dan belum ada investor yang mengajukan insentif/ keringanan lainnya sehingga belum ada laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3		1. Forum Pemberdayaan Usaha Daerah di Hotel BW Inn, Tanjungpandan 2. Sosialisasi Pemberian Insentif dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kemudahan Investasi Daerah di Kantor Bupati Belitung. 3. One on one meeting dengan investor PT. Resort Pantai Belitung di Kantor Bupati Belitung dan Kantor DPMPTSPP Belitung
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	**3**	**DPMPTSPP**	1. Pameran Belitong Expo di Tanjungpandan 2. Pameran APKASI di Tangerang yang dikoordinasi oleh Bagian Prokopim Setda Kab Belitung 3. Pameran ITTE di Tangerang bersama dengan Dinas PMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	**2**		▪ Menerima dan mendampingi investor dari PT. Resort Pantai Belitung dikantor Bupati Belitung dan DPMPTSPP Belitung ▪ Penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal yang diselenggarakan bekerjasama dengan HIPMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BKPM RI
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	**923**		
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	**4062**		
		9. Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 1.091.899.000.000,-		
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	**3 orang**		
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	**566 perusahaan**		
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten / kota	**3 data**		
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	**1.027 Orang**	**Dispora**	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	**0**		
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	**2.379 Orang**		
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	**230 Orang**		
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	**178 Orang**		
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	**4 Event**		
20	**Statistik**	1. Tersedianya buku profil daerah	**2**	**Diskominfo**	1. Buku Belitung Dalam Angka 2. Buku Kompilasi Data Statistik Sektoral Kab.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Belitung 2023
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	**0**		Tidak ada Pengajuan Survei Statistik Sektoral. Untuk Survei yang mendapat rekomendasi di tahun sebelumnya tidak perlu lagi untuk melakukan permohonan rekomendasi
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	**5**		- 1 Kompilasi Diskominfo - 1 Kompilasi Bappeda - 1 Kompilasi DKPP - 1 Kompilasi Dinas Pariwisata - 1 Kompilasi DSPPPA
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	**0**		Tidak ada pengajuan Survei Statistik Sektoral. Untuk survey yang sudah mendapat Rekomendasi di tahun sebelumnya tidak perlu lagi untuk melakukan permohonan rekomendasi
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	**4**		1. Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LPPKD) Kab. Belitung 2022 2. Indeks Pembangunan Daerah Kab. Belitung (indeks Gini dan PDRB) 3. Penyusunan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 2022 4. Indikator Strategis Kab. Belitung 2022
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	**4 / 4 = ---- x 100% = 100%**		
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	**4 / 4 = ---- x 100% = 100%**		
21	**Persandian**	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	**0%**	**Diskominfo**	
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	**37 / 38 = ----- x 100% = 97,36%**		
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	**0%**		
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	**0%**		
22	**Kebudayaan**	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	**33**	**Dindikbud**	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	**38**		
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan	**33**		1. Jam Gede 2. Eks tuan Rumah Tuan Kuase 3. Museum tanjungpandan 4. Gereja Regina pacis 5. Eks Europeesche Klinik

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesejahteraan masyarakat)			6. Eks Zusterhius 7. Eks Chineesche Hospital 8. Rumah type kolonial Danlanud 9. Rumah Type Kolonial Dandim 10. Eks Societed 11. Kelenteng Hok Tek Che 12. Holland Indisch School 13. Eks Gedung Landraad 14. Eks Tuintdienst 15. Eks kantor Asisten Residen 16. Eks Rumah Asisten residen 17. Gedung Nasional 18. Eks Districhoofd 19. Dockyard 20. Kerkhof 21. Mesjid Tua Sijuk 22. Kelenteng Sijuk 23. Situs Padang Kelarin 24. Situs Padang Pendam 25. Mercusuar Pulau Lengkuas 26. Situs gunung lilangan 27. Situs kota tanah 28. Situs Gunung tajam 29. Situs Parit Gunung 30. Situs aik labu kembiri 31. Situs Luday 32. Mercusuaer P.Sumedang 33. Mercusuar Tanjung lancur
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	**3**	**Dindikbud**	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	**38**		
		6. Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	**38**		
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	**0**		
		8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	**26**		
		9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	**28**		
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	**2238**		
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	**21103**		
		12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		**DPKD**	Tidak Perlu Diisi
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	**0**		
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	**0**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7		
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	4		
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	3		
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	3		
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	4		
23	Perpustakaan	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	100.547 / 189.945 = 52,93		
		2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	15.706 / 189.945 x 100% = 8,27%		
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	254 / 189.945 = 0,13		
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	28 / 178 x 100% = 15,73%		
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2 Sub Kegiatan		
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0 Koleksi		
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0 Koleksi		
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	17 Koleksi		
24	Kearsipan	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	5.224 / 12.498 x 100% = 41,8%	DPKD	
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	7.274 / 12.498 x 100% = 58,2%		
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	4.083 / 12.498 x 100% = 32,7%		
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	205 / 260 x 100% = 78,9%		
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	3 / 7 x 100% = 42,86%		
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	411 / 411 x 100% = 100%		
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0		
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	12,39		
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pencarian arsip yang sesuai NSPK			
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	**40**		
25	**Kelautan dan Perikanan**	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	**135 RTP**	**Dinas Perikanan**	
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	**0 / 1 = ---- x 100% = 0%**		Surat Pernyataan : proses operasional penyelenggaraan TPI di Kabupaten Belitung sampai tahun ini baru pada tahap proses inventarisasi dan persiapan indentifikasi pengelola sehingga belum beroperasi
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	**10 Izin Budaya**		
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	**110 Pembudidaya**		
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	**= 2.481.985+ 1.000.000 ekor = 3.481.985 ekor**		
26	**Pariwisata**	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	**140 Destinasi Wisata**	**Dispar**	Daya Tarik Wisata = 78 Desa Wisata = 21 Buah Geosite Belitung Geopark = 21 Geosite Hutan Kemasyarakatan = 20 HKM
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	**980**		Fasum = 571 Buah Fasilitas Pariwisata = 409 Buah
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	**992**		**1. Daya Tarik wisata = 11** **2. Jasa Transportasi Wisata = 3** **3. Jasa perjalanan wisata = 32** **4. Jasa makanan dan minuman = 825** **5. Jasa Penyediaan akomodasi = 57** **6. Jasa Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi = 46** **7. Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran = 11** **8. Jasa Informasi Wisata = 2** **9. Jasa Pramuwisata = 2** **10. Wisata Tirta = 2** **11. Spa = 7**
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	**= 73 Negara = 7.093 Orang**		
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	**42 event**		
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	**0 event**		
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	**122 industri**		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	**1.740 / 3.249 = 53,55%**		
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	**377 / 362 = 104,14%**		
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	**5 Kecamatan**		
27	**Pertanian**	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	**1**	**DKPP**	
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	**163**		
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	**0%**		Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa selama tahun 2023 tidak ada fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian
		4. Persentase prasarana yang digunakan	**163 / 165 = 98.78%**		
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	**0%**		Surat Pernyataan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung bahwa selama tahun 2023 tidak ada usulan izin usaha pertanian
		1.Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	**52 / 52 = 100%**		
28	**Kehutanan**	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	**0**		Surat Pernyataan : Belum memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan karena menunggu legalitas Surat Keputusan arahan pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, UPTD Tahura selaku unit teknis structural pengelola Tahura juga belum terbentuk.
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	**0**		Sda
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	**0**	**DLH**	Sda
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	**0**		Sda
		5. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	**0**		Sda
		6. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	**0**		Sda
29	**Energi Sumber Daya Mineral**	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	**0**		Dikarenakan tidak ada kegiatan Pemanfaatan langsung panas bumi dalam Kabupaten Belitung
30	**Perdagangan**	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	**0%**	**DKUKMPTK**	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		b. Toko swalayan		DKUKMPTK	
		2. Persentase penerbitan TDG	**0%**		
		3. Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	**0%**		
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	**0%**		
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	**0%**		
		6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	**131** **= ------ x 100%** **131** **= 100%**		
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	**K = (a+b) x 100%** **=(0,5+0,5) x 100%** **= 100%**		
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	**0%**		
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	-		
		1. Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	**2.756** **= --------- x 100%** **3.300** **= 83,52%**		
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	**0%**		
31	**Perindustrian**	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Bidang Perindustrian DPMPTSPP Kabupaten Belitung ditahun 2023 tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	DPMPTSPP	Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala DPMPTSPP Kab. Belitung
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Dokumen RPIK bidang perindustrian DPMPTSPP Kabupaten Belitung masih berada pada tahapan tersusunnya naskah akademik 30%		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala DPMPTSPP Kab. Belitung
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Bidang Perindustrian DPMPTSPP Kabupaten Belitung ditahun 2023 tidak menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah		Dibuktikan dengan Laporan Izin Usaha Industri Kecil DPMPTSPP Kab. Belitung Tahun 2023
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Bidang Perindustrian DPMPTSPP Kabupaten Belitung ditahun 2023 tidak menerbitkan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala DPMPTSPP Kab. Belitung
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	95		Screenshot Data Aplikasi SIINas di Bidang Perindustrian DPMPTSPP Kab. Belitung

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Pendidikan**	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi PAUD	**5.714 = --------- x 100% 6.007 = 95,12%**	**Disdikbud**	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	**18.931 = ---------- x 100% 19.193 = 98.63%**		
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	**7.657 = -------- x 100% 9.586 = 79,87%**		
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	**528 = --------- x 100% 4.576 = 11,53%**		
2	**Kesehatan**	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	**242 = --------- x 1000 189.945 = 1,274**	**Dinkes**	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	**3 = ----- x 100% 3 = 100%**		
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	**2,436 = --------- x 100% 2.436 = 100%**		
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	**2,638 = --------- x 100% 2,638 = 100%**		
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	**2,602 = --------- x 100% 2,602 = 100%**		
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	**11.397 = --------- x 100% 11.397 = 100%**		
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**26,875 = --------- x 100% 26,875 = 100%**		
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**99.441 = --------- x 100% 99.441 = 100%**		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	**17.913 = --------- x 100% 17.913 = 100%**		
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**37.206 = --------- x 100% 37.206 = 100%**		
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**2.966 = --------- x 100% 2.966 = 100%**		
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	**327 = ------ x 100% 327 = 100%**		
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	**5.163 = --------- x 100% 5.163 = 100%**		
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	**3.515 = --------- x 100% 3.515 = 100%**		
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	**183,59 = ---------- x 100% 288,37 = 63,66%**	**DPUPR**	
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	**9.378,21 = ---------- x 100% 87.633,17 = 10,70%**	**DPUPR**	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	**558,9 = ---------- x 100% 1.077,73 = 51,86%**		
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	**33.887 = ---------- x 100% 43.044 = 78,73%**		
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	**30.121 = ---------- x 100% 43.044 = 69,98%**		
		6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	**587 = ------- x 100% = 100% 587**		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	583.433 = ---------- x 100% 666.024 = 87,60%		
		8. Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	444 = ------- x 100% 444 = 100%		
		9. rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 = ----- x 100% = 0% 34		Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung tidak ada kejadian kecelakaan konstruksi
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /kota	0 = ----- x 100% = 0% 0	DPUPR	Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 = ----- x 100% = 0% 0		Surat Pernyataan Kepala PUPR Kab. Belitung
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	41,27 = ------- x 100% 62,01 = 66,55%		
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8.014 = ---------- x 100% 43.044 = 18,618%		
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum)	2.175 = --------- x 100% 2.175 = 100%		
5.	**Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	88 = ----- x 100% 88 = 100%	SAT POL PP	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	15 = ----- x 100% 24 = 62,5%		
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	179.621 = ---------- x 100% 179.621 = 100%	BPBD	
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	179.621 = ---------- x 100% 179.621 = 100%		
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3.012 = -------- x 100% 3.012 = 100%		
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	195 = ---------- x 100% = 69,89% 279		
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	= 19,58 menit		
6	**Sosial**	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	144 = ---------- x 100% = 100% 144	DSPPPA	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	**24 / 24 x 100% = 100%**		
7.	**Tenaga Kerja**	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	**2 / 31 x 100% = 6,45%**	**DKUKMPTK**	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	**375 / 96.145 x 100% = 0,39%**		
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	**7500,99 / 96.145 x 100% = 7,8017474%**		
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	**100 / 254 x 100% = 39,37%**		
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	**45 / 115 x 100% = 39,13%**		
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	**536.418.495.812,00 / 1.106.527.840.359,00 x 100% = 48,47%**	**DSPPPA**	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	**13 / 13 x 100% = 100%**		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	**49 / 93.404 x 100.000 = 52,46**		
9	**Pangan**	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	**24.666 / 15.559 x 100% = 0.158%**	**DKPP**	
10	**Pertanahan**	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	**20.616.026 / 20.616.026 x 100% = 100%**	**DPMPTSPP**	
		2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	**11.866,37 / 11.866,37 x 100% = 100%**	**DPUPR**	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	**20.616.026 / 20.616.026 x 100% = 100%**	**DPMPTSPP**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	**0**		Surat Pernyataaan Sekda Belitung
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	**0**	**Bagian Pemerintahan Setda**	Surat Pernyataaan Sekda Belitung
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	**14 / 14 = ----- x 100% = 100%**		
11	**Lingkungan Hidup**	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	**IKLH Kabupaten Belitung** **IKA = 59,71** **IKU = 90,43** **ITH = 44,89** **IKLH Kab = (0.376 x IKA)+(0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) = (0.376 x 59,71) + (0.405 x 90,43) + (0.219 x 44,89)** **IKLH Kabupaten Belitung = 68,9**	**DLH**	
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	**19.829,21 / 27.200,03 = ---------- x 100% = 72,9%**		
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	**36 / 56 = ----- x 100% = 64,28%**		
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	1. Perekaman KTP Elektronik	**137.820 / 141.416 = ---------- x 100% = 97,457%**	**Dindukcapil**	
		2. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**30.947 / 51.597 = ---------- x100% = 59,978%**		
		3. Kepemilikan akta kelahiran	**53.739 / 54.347 = ---------- x 100% = 98,881%**		
		4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	**23 / 31 = ------ x 100% = 74%**		
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	**= 100%**	**DPPKBPMD**	Surat Pernyataan
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	**17 / 33 = ---- x 100% = 51,51%**		
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	**TFR : 2,18**	**DPPKBPMD**	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	**25.683 / 32.291 = ---------- x 100% = 79,53%**		
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**2.391 / 32.291 = ---------- x 100% = 7,404%**		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15	**Perhubungan**	1. Rasio konektivitas Kabupaten	**=((11x1/17)x70%)+((4x1/10)x30%) =(0.65x70)+(0.40x30)/100 =(45.5+12)/100 =52,50/100 = 0,52**	**DISHUB**	
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten	**295,8 = --------- 1019 = 0,29**		
16	**Komunikasi dan Informatika**	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**29 = ------- x 100% 31 = 93,548%**	**DISKOMINFO**	Topologi Jaringan
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	**51 =------- x 100% 52 = 98,076%**		
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	**118.170 =---------- x 100% 138.330 = 85,426%**		Data Penduduk Usia 17 Tahun Keatas
17	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	**59 = ------ x 100% 141 = 41,84%**	**DKUKMPTK**	
		2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	**20.324 = ---------- x 100% 20.324 = 100%**		
18	**Penanaman Modal**	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	**1.091.899..000.000 - 1.014.230.000.000 ---------- ---------- x 100% 1.014.230.000.000 =7,65%**	**DPMPTSPP**	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	**566 = ---------- x 100% 45.131 = 1,254%**	**DISPORA**	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**33.700 = ---------- x 100% 45.131 = 74,671%**		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	**12 Medali**		
20	**Statistik**	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	**31 = ---- x 100% 31 = 100%**	**DISKOMINFO**	
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	**31 = ---- x 100% 31 = 100%**		
21	**Persandian**	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	**413 = ------- x 100% 645 = 64,031%**	**DISKOMINFO**	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	**Budaya**	Terlestarikannya Cagar Budaya	**8 / 8 = ----- x 100% = 100%**	**DINDIKBUD**	
23	**Perpustakaan**	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	**= 68,77**	**DPKD**	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**= 74,27**		
24	**Kearsipan**	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	**T =(41,8+58,2+32,67+78,85)/4 = 52,88**	**DPKD**	
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	**T = (42,86+100+0+12,39+0+40)/6 = 32,54**		
25	**Kelautan dan Perikanan**	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di wilayah Provinsi	**42.435,73 / 50.227 = ---------- x 100% = 84,487%**	**Dinas Perikanan**	
26	**Pariwisata**	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	**7.093 – 3.749 / 3.749 = ---------- x 100% =89,20%**	**DISPAR**	
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	**294.777-298.157 / 298.157 = ---------- x 100% = -1,13**		
		3. Tingkat hunian akomodasi	**194.907 / 747.682 = ---------- x 100% = 26,07%**		
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	**557.726.510.000 / 13.510.005.360.000 = ---------- x 100% = 4,13%**		
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	**23.502.282.862,18 / 186.618.838.495,80 = ---------- x 100% = 12,59%**		
27	**Pertanian**	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	**3.775,9 / 579,9 = -------- x 100% = 651,12%**	**DKPP**	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	**666 / 693 = --------- x 100% = 96,103**		
28	**Kehutanan**		**0**		
29	**Energi Sumber Daya Mineral**	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	**0**		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	**1.531 = --------- x 100% 1.531 = 100%**	DKUKMPTK	
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	**169.750 = ---------- x 100% 203.850 = 83,27**		
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	**2.756 = --------- x 100% 3.300 = 83,51%**		
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	**40 = --------- x 100% 2.312 = 1,73%**	DPMPTSPP	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	**= 30%**		
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	**12 = --------- x 100% 186 = 6,45%**		
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	**0**		Surat Pernyataan Kepala DPMPTSPP Kabupaten Belitung
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	**0**		Surat Pernyataan Kepala DPMPTSPP Kabupaten Belitung
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	**= 50%+25%+10%+10% = 95%**		
32	Transmigrasi		**0**		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Perencanaan Dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	273.428.779.570 / 311.393.238.411 = 87,80	BPKAD	
		2. Rasio PAD	186.621.508.495,8 / 1.117.439.818.908,8 x 100% = 16,7%	BPPRD	
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Nilai maturitas = 3,118)	Inspektorat	
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	957.416.881.883,00-148.203.222.205,00 / 1.108.448.343.633 = 73,004	BPKAD	
		6. Opini Laporan Keuangan	2013 = WDP 2014 = WDP 2015 = WDP 2016 = WDP 2017 = WDP 2018 = WDP 2019 = WDP 2020 = WTP 2021 = WTP 2022 = WTP	Inspektorat	
32	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	= 0%	Bagian PBJ Setda	
		2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	4.868 / 6.253 x 100% = 77,85%		
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	398.302.000.000 / 494.996.628.826 x 100% = 80,46%		
		4. Presentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	377.257.502.883-316.695.088.251 / 316.695.088.251 x 100% = 19,12%		
33	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	970 / 1215 x100% = 79,83%	BKPSDM	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	350 / 1.215 x 100% = 28,8%		
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	115 / 350 x 100% = 32,85%		
34	Manajemen Keuangan	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	((1.108.448.343.633,00 / 1.232.518.939.359,00)-1) x 100% = 10,06%	BPKAD	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	**186.619.838.495,8** **= ---------- x 100%** **147.139.608.350** **= 26,83%**	**BPPRD**	
		3. Assets Management	**= 4** 1.Apakah ada daftar asset tetap? **Ya** 2.Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? **Ya** 3.Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? **Ya** 4.Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? **Ya**		1. Neraca Audited 2. Surat Sekda dan lampiran, 3. Inventarisasi Aset atas tindak Lanjut temuan BPR-RI 4. LRA dan Neraca 2023
		4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	**176.668.393.594,32** **= ---------- x 100%** **1.204.839.136.683,00** **= 14,66%**		
35	**Transparansi dan Partisipasi Publik**	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	**10.405.821.856** **= ---------- x 100%** **11.170.720.208** **= 93,152%**	**Diskominfo**	SPJ Fungsional Diskominfo 2023
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	**12** **= ----- x 100%** **12** **= 100%**		Dokumen pendukung : 1. Ringkasan RKA SKPD 2. Ringkasan RKA PPKD 3. Raperda APBD 4. Raperda Perubahan APBD 5. Perda APBD 6. Perda Perubahan APBD 7. Ringkasan DPA SKPD 8. Ringkasan DPA PPKD 9. LRA seluruh SKPD 10.LRA PPKD 11.LKPD yang sudah diaudit 12.Opini atas LKPD

2.2 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan selisih antara target dan realisasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi dan analisa guna mendapatkan strategi yang tepat untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)	>90
Berhasil (B)	75.00 – 89.00
Cukup (C)	50.00 – 74.99
Kurang (K)	0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi I:* Jika ***semakin tinggi realisasi,*** menunjukkan pencapaian kinerja yang ***semakin baik,*** atau sebaliknya ***realisasi makin rendah*** pencapaian kinerja ***semakin rendah/ jelek*** adalah:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila ***semakin tinggi realisasi*** menunjukan pencapaian sasaran kinerja ***semakin rendah/jelek***, atau sebaliknya realisasi ***semakin rendah*** pencapaian kinerja ***semakin baik*** menggunakan perumusan:

$$\text{PRESSENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

2.3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instasi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2018 – 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 26 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, melalui Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat Pemerintah Kabuapten Belitung melakukan pembinaan pengembangan dan penetapan, evaluasi, dan reviu IKU. Evaluasi dan reviu pencapaian IKU sangat mempengaruhi kinerja organisasi di masa datang. Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung
Tahun 2023 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target PK	Realisasi	% Realisas
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	74,21	74,49	100,38
2.	Angka Kemiskinan	Persentase	5,41	6,46	80,59
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,47 Tahun	71,54	100,10
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,56 Tahun	8,98	104,91
5.	Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	14.049 Rupiah	14.365	102,25
6.	Status Desa "Maju"	Desa	31 Desa	40	129,03
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	BB	BB	100
8.	Opini BPK	Skala	WTP	n.a	-
9.	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	BB	B	90,73
10.	Indeks Profesional ASN	Skala	76	n.a	-
11.	Suvei Kepuasan Masyarakat	Skala	88	88,28	99,86
12.	Laju Pertumbuhan	Persentase	4,4 – 5,1	5,75	112,74

	Ekonomi				
13.	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	400.000 orang	301.870 orang	75,47
14.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,83%	26,56	95,43
15.	Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	85.562.956 (Ribu Rupiah)	96.586.234 (Ribu Rupiah)	112,88
16.	Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	1.957.050.000 (Ribu Rupiah)	1.966.800.000 (Ribu Rupiah)	100,50
17.	Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	5.023.529 (Juta Rupiah)	4.799.309,25 (Juta Rupiah)	95,53
18.	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	59,94	64,90	108,27
19.	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	68,88	68,90	100,03
20.	Indeks Kualitas air	Skala	53,46	59,71	111,69
21.	Indeks Kualitas udara	Skala	93,83	90,43	96,38
22.	Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	50,35	44,89	89,16
23.	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	16,00	16,96	106

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari indikator:
    1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian 100,38%
    2. Angka Kemiskinan, capaian 80,59%
    3. Angka Harapan Hidup (AHH), capaian 100,10%
    4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), capaian 104,91%
    5. Pengeluaran per Kapita, capaian 102,25%
    6. Status Desa Maju, capaian 129,03%
2. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan dapat dilihat pada indikator:
    1. Indeks Reformasi Birokrasi, capaian 100%
    2. Opini BPK, belum tersedia data (n/a)
    3. Nilai SAKIP capaian 90,73%
    4. Indeks Profesional ASN, belum tersedia data (n/a)
    5. Survei Kepuasan Masyarakat, capaian 100,32%
3. Misi 3 : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dapat dilihat pada indikator :
    1. Laju Pertumbuhan Ekonomi, belum tersedia data 112,74
    2. Jumlah kunjungan wisatawan, capaian 75,47%
    3. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB, capaian 95,43%
    4. Nilai Omset Koperasi, capaian 112,88%
    5. Nilai Omset Usaha Mikro, capaian 100,50%
    6. Nilai Investasi, mencapai 95,53%
    7. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan, capaian 108,27%
    8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 100,03%
    9. Indeks Kualitas Air, capaian 111,69%
    10. Indeks Kualitas Udara, capaian 96,38%

11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, capaian 89,16%
12. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan, capaian 106%

Gambar 2.1
Capaian IKU Kabupaten Belitung 2023

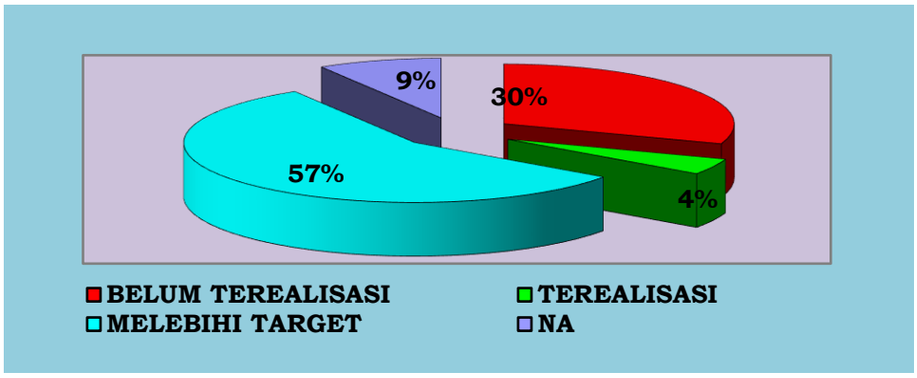

Secara umum pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

2.3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 14 (empat belas) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 1	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	2	Indikator
Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 3	Meningkatnya daya beli masyarakat	1	Indikator
Sasaran 4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan	1	Indikator
Tujuan 2	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	1	Indikator
Sasaran 5	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2	Indikator
Sasaran 6	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	1	Indikator
Sasaran 7	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1	Indikator
Tujuan 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Indikator
Sasaran 8	Meningkatnya pengembangan pariwisata	1	Indikator
Sasaran 9	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	1	Indikator
Sasaran 10	Meningkanya pengembangan koperasi dan usaha mikro	2	Indikator
Sasaran 11	Meningkatnya investasi	1	Indikator
Sasaran 12	Meningkatnya infrasruktur kewilayahan	1	Indikator
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indikator

Sasaran 13	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	3	Indikator
Sasaran 14	Meningkatnya pengelolaan sampah	1	Indikator

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 secara rinci dapat dillihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	74,21	74,49	100,38
		2	Angka Kemiskinan	Persentase	5,41	6,46	80,59
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,47	71,54	100,10
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,56	8,98	104,91
4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	5	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	14.049	14.365	102,25
5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	6	Status Desa "Maju"	Desa	31	40	129,03
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	BB	BB	100
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	8	Opini BPK	Dokumen	WTP	n/a	-
		9	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Nilai	BB	B	90,73
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	10	Indeks Profesional ASN	Skala	75	n/a	-
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11	Survey Kepuasan Masyarakat	Skala	87	88,28	100,32
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,4-5,1	5,75	112,74
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	13	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	400.000	301.870	75,47
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	Persentase	27,83	26,56	95,43

13.	Meningkanya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	85.562.956	96.586.234	112,88
		16	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	1.957.050.000	1.966.800.000	100,50
14.	Meningkatnya investasi	17	Nilai Investasi	Juta Rupiah	5.023.529	4.799.309,25	95,53
15.	Meningkatnya infrasruktur kewilayahan	18	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	59,94	64,90	108,27
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	68,88	68,90	100,03
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20	Indeks Kualitas air	Skala	53,46	59,71	111,69
		21	Indeks Kualitas udara	Skala	93,83	90,43	96,38
		22	Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	50,35	44,89	89,16
18.	Meningkatnya pengelolaan sampah	23	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	16,00	16,96	106

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	19
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	2
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	0
5	NA	-	2
	JUMLAH		23

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat							
1.	Meningkatnya Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	100,38				**SANGAT BERHASIL**
		Angka Kemiskinan	86,59			**BERHASIL**	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	100,10				**SANGAT BERHASIL**
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	104,91				**SANGAT BERHASIL**
4.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per Kapita	102,25				**SANGAT BERHASIL**

5.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Status Desa "Maju"	129,03				**SANGAT BERHASIL**
MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan							
6.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	100				**SANGAT BERHASIL**
7.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	N.A				
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	90,73				**SANGAT BERHASIL**
8.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesional ASN	N.A				
9.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Survey Kepuasan Masyarakat	100,32				**SANGAT BERHASIL**
MISI 3 : Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan							
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	112,74				**SANGAT BERHASIL**
11.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	75,47			**BERHASIL**	
12.	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB	95,43				**SANGAT BERHASIL**
13.	Meningkanya pengembangan koperasi dan usaha mikro	Nilai Omset Koperasi	112,88				**SANGAT BERHASIL**
		Nilai Omset Usaha Mikro	100,50				**SANGAT BERHASIL**
14.	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi	95,53				**SANGAT BERHASIL**
15.	Meningkatnya infrasruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	108,27				**SANGAT BERHASIL**
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	100,03				**SANGAT BERHASIL**
17.	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas air	111,69				**SANGAT BERHASIL**
		Indeks Kualitas udara	96,38				**SANGAT BERHASIL**
		Indeks Kualitas tutupan lahan	89,16				**SANGAT BERHASIL**
18.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	106				**SANGAT BERHASIL**
			JUMLAH (KET. 2 n.a)	**0**	**0**	**2**	**19**

2.3.2.1 TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat

Capaian kinerja tujuan "Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat" diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejehteraan Masyarakat
Kabupaten Belitung Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2023			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	70,93	74,21	74,49	100,38	SB	74,21
2	Angka Kemiskinan	Skala	7,56	5,41	6,46	80,59	B	5,41

Dari tabel di atas terlihat bahwa satu indikator kinerja tujuan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan satu indikator yang belum mencapai target tahun 2023. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,38% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Sementara Capaian Angka Kemiskinan sebesar 80,59% dengan kotegori BERHASIL.

- **Indeks Pembangunan Manusia**

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. United Nations Development Programme dalam terbitan laporan tahunannya (*Human Development Index* – HDI) menegaskan bahwa "manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. HDI juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua Negara dengan tingkat Gross National Income - GNI per kapita yang sama dapat menghasilkan hitungan pembangunan manusia yang berbeda.

Perbedaan ini dapat memicu perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah (*Human Development Reports*, 2019). Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Pembangunan daerah hendaknya tidak hanya berorientasi kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata (*growth oriented*), namun setidaknya pencapaian pembangunan juga harus mampu dirasakan manfaatnya dan menjawab kebutuhan masyarakat (*people need oriented*).

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nila pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Capaian Nilai IPM Kabupaten Belitung (Grafik 3.1) selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 72,39 pada tahun 2019 hingga mencapai 74,49 atau berada pada capaian "tinggi" (70<IPM<80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,11 bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan nilai 73,38. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada tahun 2023 tercapai sebesar 72,85, nilai IPM Kabupaten Belitung tercapai lebih tinggi 1,64. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2019 – 2023 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.1
Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung

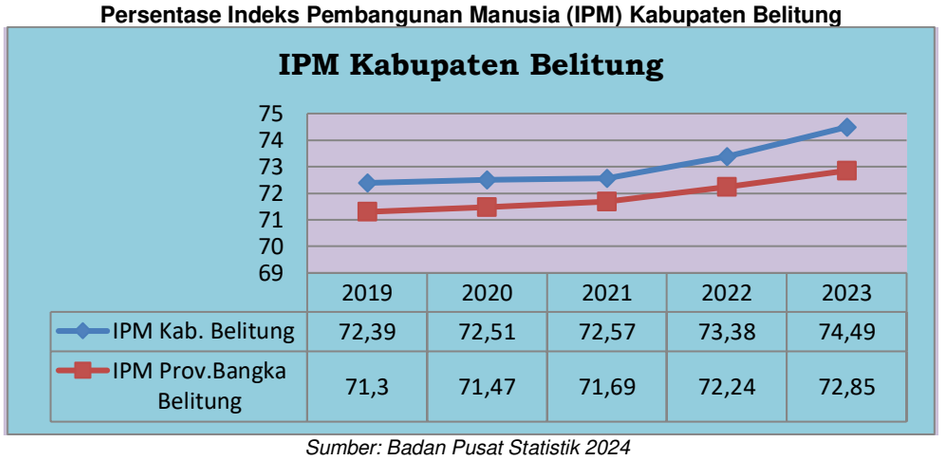

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 80,45. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga mengalami peningkatan, yang semula 72,24 di tahun 2022 menjadi 72,85 di tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten Belitung berada diatas nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 72,91 menjadi 74,39 dengan capaian pertumbuhan IPM 1,48 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2019 - 2023:

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belitung Timur	70,84	70,92	71,42	72,29	73.31
Bangka	72,39	72,40	72,46	72,95	74.49
Bangka Tengah	70,33	70,45	70,89	71,40	72.36
Bangka Barat	69,05	69,08	69,60	70,12	71.13
Bangka Selatan	66,54	66,90	67,06	67,95	69.67
Belitung	72,46	72,51	72,57	73,38	74.49
Pangkal Pinang	77,97	78,22	78,57	79,24	80.45
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71,30	71,47	71,69	72,24	72.85
Indonesia	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur

panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2019 – 2023, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2019 – 2023.

Tabel 2.13
Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung
Tahun 2019 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Umur Harapan Hidup	70,94	71,05	71,10	71,31	71,54
2	Harapan Lama Sekolah	11,84	11,85	11,86	11,89	11,90
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,41	8,46	8,47	8,74	8,98
4	Pengeluaran per Kapita	13.662	13.554	13.563	14.045	14.365

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Pada tahun 2023, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 71,54, naik 0,23 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 11,90 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,98 tahun, naik 0,24 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.045.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.365.000,- per tahun.

- **Angka Kemiskinan**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Belitung. Dimensi persoalan kemiskinan sangat terkait dengan berbagai aspek seperti kesenjangan pendapatan penduduk, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, ketimpangan, dan permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan selalu menjadi primadona yang mewarnai proses pembangunan di semua wilayah. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau kesuksesan kepemimpinan di suatu wilayah sering dikaitkan dan diukur dengan kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan. Namun, kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya menyangkut jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan juga berkaitan dengan ukuran lain seperti indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) dan indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index atau P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan

kesenjangan/ jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P1 dan P2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Belitung mengalami gejolak berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2023

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	16,00	17,39	17,29	16,45	18,02	16,52	15,41	16,19	14,50	14,87
Belitung	**12,70**	**14,58**	**13,94**	**14,11**	**14,00**	**11,88**	**12,07**	**13,53**	**12,34**	**12,51**
Bangka Barat	6,10	6,01	5,46	6,06	6,35	5,65	5,83	5,85	5,30	5,91
Bangka Tengah	9,40	10,19	10,36	11,39	11,12	9,80	9,64	10,03	9,61	10,58
Bangka Selatan	7,40	7,20	7,11	7,88	7,58	7,02	7,49	7,72	6,81	6,66
Belitung Timur	7,90	8,71	8,48	8,44	8,93	8,51	8,56	9,29	8,47	8,89
Pangkalpinang	7,80	10,02	10,12	9,76	10,27	9,00	9,40	10,10	9,76	9,27
Kep. Bangka Belitung	67,20	74,09	72,76	74,09	76,26	68,38	68,40	72,71	66,78	68,69

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota, 2014-2023

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	5,20	5,63	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51	4,81	4,26	4,32
Belitung	**7,36**	**8,38**	**7,85**	**7,77**	**7,56**	**6,29**	**6,27**	**7,15**	**6,45**	**6,46**
Bangka Barat	3,15	3,08	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70	2,75	2,46	2,71
Bangka Tengah	5,27	5,67	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85	5,13	4,86	5,29
Bangka Selatan	3,87	3,74	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52	3,69	3,22	3,11
Belitung Timur	6,68	7,33	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52	7,20	6,49	6,73
Pangkalpinang	4,04	4,97	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36	4,76	4,55	4,27
Kep. Bangka Belitung	4,97	5,40	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53	4,90	4,45	4,52

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung masih di bawah tingkat kemiskinan nasional per maret 2023 sebesar 9,36 seperti terlihat pada gambar berikut ini :

Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019 – 2023

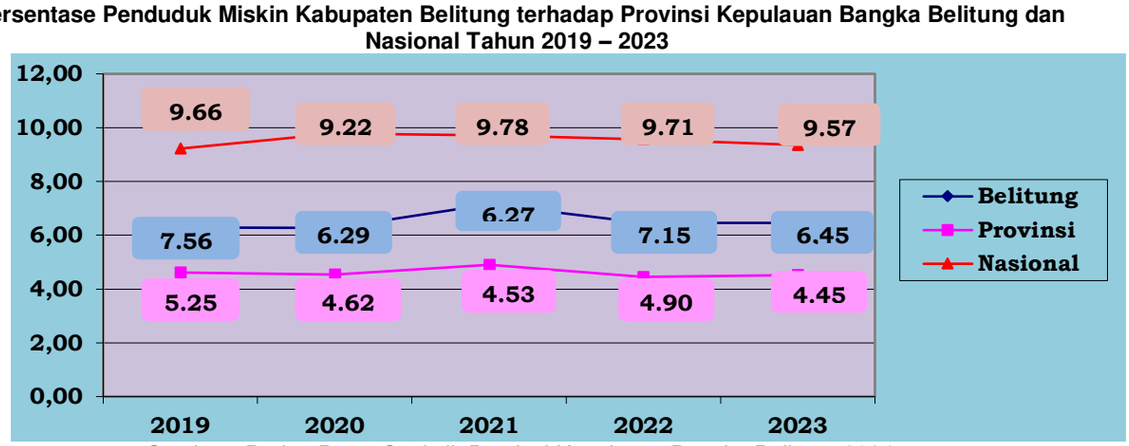

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Tingginya tingkat kemiskinan ini dipicu oleh tingginya garis kemiskinan. Disamping itu tingginya garis kemiskinan memicu banyaknya persentase penduduk miskin di suatu daerah, ini terlihat pada Tabel 2.14 dan Tabel 2.15 dimana daerah daerah yang persentase penduduk miskin yang besar memiliki garis kemiskinan yang tinggi yang terlihat pada kabupaten Pangkal pinang, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Kabupaten Belitung. Selama kurun waktu 2014 – 2023, Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kecenderungan meningkat dan lebih tinggi dari Garis Kemisikinan Provinsi, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.16

Garis Kemiskinan (GK) Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan), 2019 – 2023

Kabupaten/ Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	541.925	577.093	595.429	639.535	685.810
Belitung	**766.276**	**812.321**	**830.484**	**860.629**	**896.948**
Bangka Barat	549.496	589.894	599.887	639.535	681.517
Bangka Tengah	693.842	721.331	735.479	773.509	814.969
Bangka Selatan	523.155	561.617	581.970	621.629	669.016
Belitung Timur	684.277	725.395	798.017	854.534	899.482
Pangkalpinang	748.487	795.653	808.839	858.840	894.224
Kep. Bangka Belitung	677.716	721.455	752.203	801.437	894.224

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Grafik 2.3
Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019 – 2023

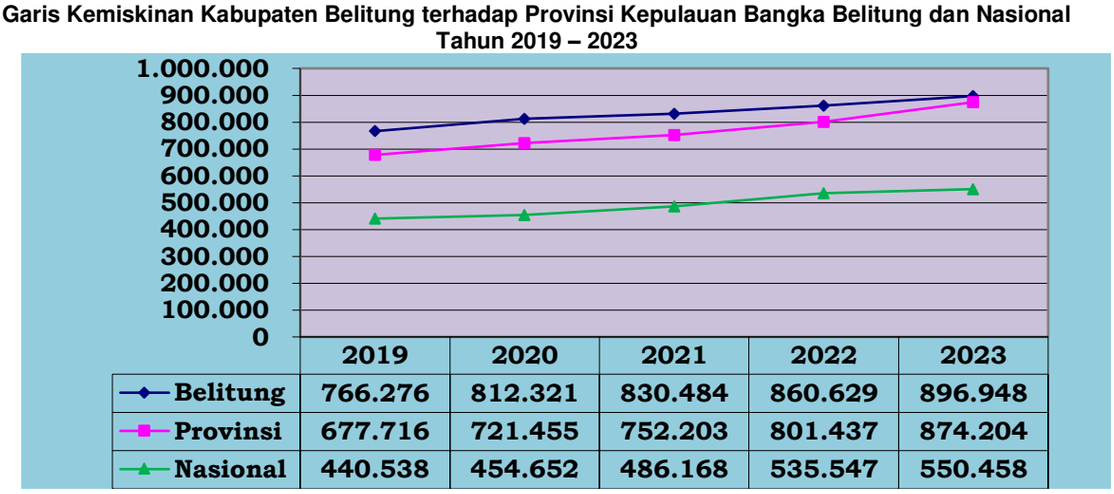

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jumlah minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Belitung untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan sangat tinggi sehingga penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung juga cukup memprihatinkan jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*), yang meningkat dari 0,93 pada tahun 2022 menjadi 1,02 pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belitung	**0,69**	**0,74**	**0,51**	**0,93**	**1,02**
Bangka	0,65	0,47	0,39	0,67	0,35
Bangka Barat	0,31	0,23	0,25	0,27	0,42
Bangka Tengah	0,52	0,72	0,63	0,62	0,64
Bangka Selatan	0,48	0,53	0,35	0,25	0,26

Belitung Timur	0,81	0,70	1,15	0,90	0,91
Pangkal Pinang	0,59	0,59	0,57	0,79	0,62
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	0,51	0,60	0,61	0,60	0,63

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Maka tabel di atas menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung di tahun 2023 menunjukan kecenderungan semakin mendekati garis kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*), di mana Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung merupakan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Ini terlihat dari perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
ndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belitung	**0,11**	**0,16**	**0,06**	**0,26**	**0,20**
Bangka	0,14	0,09	0,06	0,15	0,04
Bangka Barat	0,07	0,04	0,04	0,06	0,09
Bangka Tengah	0,1	0,14	0,11	0,14	0,12
Bangka Selatan	0,08	0,13	0,06	0,03	0,04
Belitung Timur	0,16	0,19	0,29	0,19	0,23
Pangkal Pinang	0,1	0,12	0,13	0,21	0,17
Prov. Kep. Bangka Belitung	0,1	0,13	0,11	0,13	0,13

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024

Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Melihat kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Belitung semakin dalam tahun 2023. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah. Salah satunya adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi tidak hanya mempengaruhi Indeks Kedalamanan dan Indeks Keparahan Kemiskinan, tetapi juga menjadi faktor penentu tinggi tidaknya Garis Kemiskinan. Tingkat inflasi Kabupaten Belitung, tolok ukur tingkat inflasi Kota Tanjungpandan, selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Tingkat Inflasi Bulanan dan Tahunan Kota Tanjungpandan Tahun 2021 – 2023

Bulanan dan Tahunan	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2021	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2022	Inflasi Bulanan dan Tahunan (Persen) Tanjungpandan 2023
Januari	1,03	0,54	1,71
Februari	0,28	-2,08	-0,26
Maret	-0,18	1,29	0,70
April	-0,02	2,58	0,19
Mei	0,52	2,24	1,28
Juni	0,36	-0,03	-0,03
Juli	0,22	1,12	0,58
Agustus	0,28	-1,65	-0,40
September	0,38	0,40	1,41
Oktober	-0,44	-1,00	-0,62
November	0,38	-0,64	-0,21
Desember	1,14	1,43	-0,57
Tahunan	1,31	4,17	3,80

Sumber: BPS Kabupaten Belitung 2023
ADHK 2018 = 100

Pada Desember 2023, inflasi tahun ke tahun atau year on year (y-on-y) dan tahun kalender atau year to date (y-to-d) memperhitungkan perubahan IHK pada periode yang sama sehingga angkanya juga akan menunjukkan nilai yang sama. Kota Tanjungpandan mengalami inflasi y-on-y dan y-to-d sebesar 3,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,93. Sementara itu secara bulanan atau month to month (m-to-m) terpantau deflasi sebesar 0,57 persen.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,76 persen; kelompok transportasi sebesar 6,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,67 persen; kelompok pendidikan sebesar 6,90 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,87 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,27 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Dalam RPJMD Kabuapten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat”, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan
	Sasaran 3 Meningkatnya daya beli masyarakat	Perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat

SASARAN 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Angka Harapanan Hidup dengan target “71,47”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,64	71,47	71,54	100,10	SB	100,10

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2023 dari target 71,47 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 71,54 tahun atau 100,10% dari target kinerja.

Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023.

Grafik 2.4
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

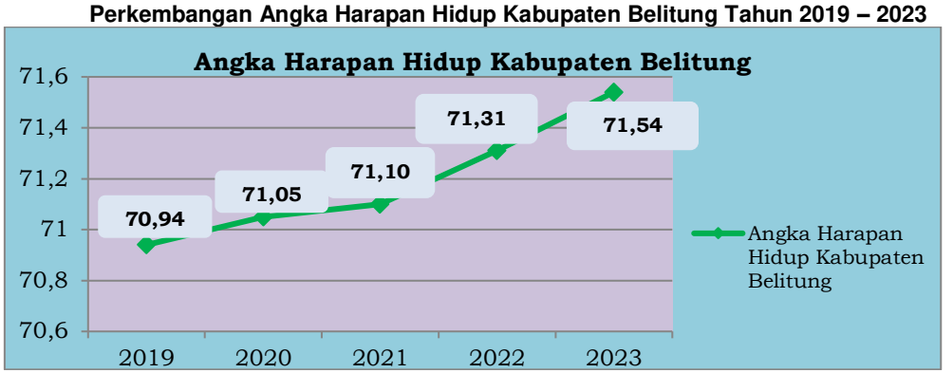

Sumber: Belitung Dalam Angka 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Peningkatan AHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan, jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Belitung. Setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan jumlah Puskesmas 9 unit pada 5 Kecamatan, dengan jumlah puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan maka masyrakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah.

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

Tabel 2.22
Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2023

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	Target	Realisasi	Persentase(%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3120	2436	78.08%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2978	2638	88.58%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2836	2602	91.75%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13640	11397	83.56%

5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27184	26.875	98.86%
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	116415	99441	85.42%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19490	17913	91.91%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	48883	37206	76.11%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2604	2966	113.90%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	319	327	102.51%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	4321	5163	119.49%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3772	3515	93.19%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024

Dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2023 ada 3 indikator yang mencapai 100% atau lebihyaitu :

1. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus (113,90 %)
2. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat (102,51%)
3. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis (119,49%)

Pelayanan Kesehatan Dasar untuk 8 indikator belum mencapai 100% antara lain: Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (91,75%) dan Pelayanan kesehatan ibu hamil (78,08%), pelayanan kesehatan ibu bersalin (88,58%), Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar (98,86%), pelayanan kesehatan balita (83,56), pelayanan kesehatan pada usia produktif (85,42), Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (91,91) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV (93,19%), Adapun indikator SPM yang masih rendah yaitu pelayanan kesehatan hipertensi (76,11)%.

a. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2023 adalah sebesar 78.08%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan untuk sub kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil didukung dari sumber pembiayaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui kegiatan kelas ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil , pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil, memberikan buku KMS Ibu hamil pada saat kontak pertama dengan petugas kesehatan (K1), Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Glukoprotein urin,serta pada ibu hamil dilakukan pelayanan antenatal dengan 10T, pemantauan P4K pada ibu hamil.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tentang adanya ibu hamil kepada tenaga kesehatan dan membatu memasang stiker P4K, pelaksanaan kelas ibu hamil, yang dipantau oleh tenaga kesehatan.

b. Realisasi Jenis Pelayanan Ibu Bersalin tahun 2023 adalah sebesar 88.58%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan ibu bersalin melalui kegiatan kegiatan Jaminan persalinan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani persalinan, pengadaan buku KIA yang digunakan untuk pencatatan selama masa kehamilan dan kelahiran, pemberian vaksin TT pada ibu hamil, menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang diperuntukkan pada ibu yang akan melahirkan di fasilitas kesehatan (RS), mengaktifkan Puskesmas mampu salin pada 9 Puskesmas di Kabupaten Belitung serta menjalin jejaring dengan klinik dan RS swasta.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran swasta dengan adanya bantuan ambulance desa yang diberikan melalui CSR dan digunakan untuk membantu sistem rujukan bagi ibu hamil yang akan bersalin yang mengalami resiko dalam persalinan (PEB, KPD dan lainnya) / komplikasi dalam persalinan. Peran masyarakat dalam hal ini sangat kuat diantaranya selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan melalui perannya sebagai kader kesehatan di Desa.

c. Realisasi Jenis Pelayanan Bayi Baru Lahir tahun 2023 adalah sebesar 91.75%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan Bayi Baru Lahir melalui kegiatan DAK Non Fisik yaitu kegiatan Jaminan persalinan dimana jaminan persalinan ini bisa mendanai persalinan ibu dan perawatan bayi jika bayi harus di lakukan perawatan yang intensif, kegiatan vaksinasi pada bayi baru lahir (HB0, Vit K, salep mata), melakukan kunjungan pelayanan pada bayi baru lahir 4 x, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan pada bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital (SHK) dengan mengambil sampel darah pada tumit bayi dengan metode khusus dan sampel tersebut di kirim ke RS dalam hal ini adalah RSCM karena sudah dilakukan MoU antara Dinas Kesehatan dengan pihak RSCM Jakarta.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat adalah peran serta kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, mencegah adanya bayi baru lahir yang tidak terlayani seperti pelayanan perawatan tali pusar.

d. Realisasi Jenis Pelayanan Balita sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 83.58%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan anak Balita melalui Anggaran DAK Non Fisik yaitu pelayanan DDTK pada balita, pemberian Vit A, kegiatan vaksinasi, pemberian makanan tambahan bagi bayi balita yang mengalami masalah gizi, pelayanan posyandu bayi balita, kegiatan penimbangan. Kegiatan inovasi yang dilakukan adalah AMBONG (asistensi dan pemberian makanan tambahan pada balita dan Ibu mengandung)

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat dalam hal ini berperan sebagai kader posyandu yang bertugas dalam menjalani tugas di 5 (lima) meja yang menjadi mitra tenaga kesehatan.

e. Realisasi Jenis Pelayanan Anak Usia Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebesar 98,86%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan bersumber dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Puskesmas (BOK). Sub kegiatan pelayanan kesehatan anak sekolah melalui kegiatan penjaringan kesehatan pada anak sekolah, pelayanan kegiatan UKGS dan lain – lain.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat warga sekolah dalam hal ini guru di sekolah (guru) UKS/M yang berperan aktif dalam membantu tenaga kesehatan dalam melakukan penjaringan kesehatan pada peserta didik usia pendidikan dasar (SD sampai dengan SMP).

f. Realisasi Jenis Pelayanan Usia Lanjut pada tahun 2023 adalah sebesar 91,91%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan kesehatan usia lanjut bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) melalui kegiatan posyandu lansia di desa, senam lansia di desa, pemeriksaan kesehatan pada lansia yang tidak bisa datang di Posyandu dengan inovasi yang di lakukan di Puskesmas- Puskesmas di Kabuapten Belitung

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di posyandu Usia lanjut dan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).

g. Realisasi Jenis Pelayanan warga Negara usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 85,42%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DAK NonFisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjaringan penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa

b) Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.

h. Realisasi Jenis Pelayanan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 76,11%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pencegahan dan penanggulangan penyakit di danani DAK NonFisik melalui kegiatan penjaringan penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita hipertensi di sarankan untuk rutin memeriksakan kondisi nya ke fasilitas kesehatan (pemeriksaan secara berkala) dan melaksanakan Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM dan kader kesehatan secara keseluruhan.

i. Realisasi Jenis Pelayanan DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 113.90%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus bersumber dari DAK NonFisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjaringan penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita DM harus rutin konsumsi obat dan mengatur pola makan serta melaksanakan GERMAS.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.

j. Realisasi Jenis Pelayanan ODGJB (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 102.51%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan yaitu penjaringan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB), pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan mental, wawancara (jika memungkinkan), edukasi(Jika Memungkinkan) serta proses rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu membantu memerikan informasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas/ kabupaten.

k. Realisasi Jenis Pelayanan TB Paruyang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 119.49%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) baik penanganan pasien, penjaringan, pengadaan BHP untuk menunjang pemeriksaan laboratorium. Kegiatan yang dilakukan yaitu penjaringan orang terduga TB baik dari tingkat desa maupun masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk anak sekolah juga dilakukan penjaringan,serta pada penderita DM dilakukan skrining TB

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Belum ada kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat dalam menanggulangi penyakit TB.

I. Realisasi Jenis Pelayanan HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 9 3 . 1 9 %;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV bersumber dari APBD dan DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan adalah penjaringan kesehatan pada ibu hamil, kelompok beresiko, penderita TB, penderita IMS, waria, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada kelompok-kelompok beresiko, peningkatan kapasitas petugas dalam menjalani klinik VCT di RS ataupun di sarana fasilitas lainnya (Puskesmas).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Belum ada kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat dalam menaggulangi penyakit HIV karena penyakit ini dianggap aib seperti layaknya fenomena gunung es.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat. Dan Arah kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat adalah dengan Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi dan meningkatkan mutu layanan kesehatan ibu.

Adanya arah kebijakan yang mendukung pencapaian strategi Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat yaitu: Meningkatkan sistem pelayanan terintegrasi. Pada Tahun 2021 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung telah membangun gedung PSC 119.

<u>Berikut disampaikan permasalahan untuk indikator SPM bidang Kesehatan yang tidak mencapai target 100%</u>

- SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (78.08%)
  a. Belum semua ibu hamil melakukan ANC sesuai standar karena adanya kehamilan ibu hamil di atas trimester 1
  b. Kurangnya pemahaman ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya ANC sejak awal Kehamilan
  c. Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan ANC sesuai standar
  d. Masih ada ibu hamil yang tidak terdata karena melakukan pemeriksaan kehamilan diluar wilayah kerja faskes
  e. Masih adanya ibu hamil di bawah umur yang hamil di luar nikah
  f. Pelayanan USG terkendala dengan jadwal piket dokter
  g. Belum semua ibu hamil melakukan USG di Trimester 1 dan TrimesterII

- SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (88,58%)
  a. Masih adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong tenaga kesehatan (melahirkan di rumah)
  b. Masih adanya adat masyarakat tidak mau persalinan di damping tenaga kesehatan
  c. Masih adanya persalinan dengan faktor resiko (usia tua/ terlalu muda sehingga malu melahirkan di fasyankes)
  d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan

- SPM Pelayanan kesehatan bayi Baru lahir (91.75)
  a. Masih adanya Bayi yang belum dilakukan pelayanan sesuai definisi operasional. (kunjungan neonatus belum 3 X)
  b. Belum optimalnya penyuluhan tentang pentingnya skrining pada bayi baru lahir
  c. Masih kurangnya konseling tentang pelayanan neonatal esensial setelah lahir

- SPM Pelayanan kesehatan Balita (83.56%)
  a. Pemantauan kesehatan balita melalui sweeping terkendala oleh jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan dikarenakan tenaga yang tersedia mempunyai tugas dalam pelaksanaan program Puskesmas
  b. Masih adanya ibu balita yang tidak rutin membawa balita ke posyandu untuk ditimbang sampai 8 kali
  c. Masih adanya orang tua yang tidak memberikan anaknya imunisasi dasar lengkap
  d. Belum Optimalnya pelaksanaan kelas ibu balita diposyandu

- SPM Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar (98.86%)
  a. Jadwal kegiatan skrining sering bertabrakan dengan jadwal kegiatan di
  b. Masih kurangnya tim penjaringan UKS di Fasyankes
  c. Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan buku raport kesehatanku

- SPM Pelayanan kesehatan Usia Lanjut (91.91%)
  a. Kurangnya kunjungan lansia ke Posyandu karena tidak ada pengobatan
  b. Masih kurangnya dukungan keluarga untuk mendampingi lansia ke posyandu lansia

- SPM Pelayanan Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) (85,42%)
  a. Jumlah sasaran skrining kelompok usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan jumlah SDM Puskesmas yang melayani sasaran skrining usia produktif.
  b. Adanya tugas rangkap dan alih tugas pengelola program P2PTM di Puskesmas.
  c. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu PTM, karena adanya anggapan tubuh dalam kondisi sehat, adanya kekhawatiran apabila mengetahui penyakit yang di derita membuat ketakutan, adanya kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga.
  d. Kurang Optimalnya dukungan lintas sektor, Toma/ toga termasuk pihak swasta dalam layanan posbindu PTM dan juga belum adanya kader khusus posbindu PTM.

- SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (76,11%)
  a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke fasyankes atau
     Posbindu, karena merasa tidak ada keluhan sakit, sehingga tidak diketahui kemungkinan mempunyai resiko penyakit hipertensi
  b. Sebagian masyarakat mencari pengobatan sendiri seperti membeli obat di toko/apotik atau mencari pengobatan alternatif pada saat merasa ada keluhan sakit
  c. Belum semua kasus hipertensi di fasyankes Swasta belum terintegrasi denganpelaporan kasus di Puskesmas

- SPM Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (93.19%)
  a. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti target ibu hamil K1 yang tinggi, kemudian untuk yang di Pulau yaitu tingginya mobilisasi masyarakat dari pula ke daratan, adanya kejadian abortus di trimester 1, adanya ibu hamil yang pindah sebelum dilakukan pemeriksaan awal.
  b. Untuk Kelompok resiko Trangender/Waria tidak tercapai dikarena tim puskesmas mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kelompok tersebut (apatis/ ada penolakan).
  c. Untuk kelompok resiko Penderita TBC, masih ada beberapa pasien TBC baik TBC anak maupun TBC Dewasa yang tidak bersedia diperiksa HIV nya, padahal petugas puskesmas sudah menjelaskan prosedur sesuai SOP.

d. Masih terbatasnya komunitas penjangkau untuk kegiatan skrining ataupun penemuan kasus aktif HIV pada kelompok beresiko, seperti LSL, trangender, dll

Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Disamping memang ada alat dan bahan serta dana untuk kelapangan yang terbatas. Selain itu hal – hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

Solusi :

1. Memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Melakukan kerjasama Lintas Sektor/ Lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan
4. Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas
5. Melakukan Monev secara berkala per bulan/ per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
6. Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatn yang menunjang SPM.

☞ Kebijakan Pengurangan Kawasan Kumuh

Pencapaian kinerja sasaran untuk kebijakan pengurangan kawasan kumuh diukur dengan menggunakan indikator persentase luasan permukiman kumuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Luas\ sisa\ permukiman\ kumuh\ tahun\ berjalan}{Luas\ permukiman\ kumuh\ tahun\ awal} \times 100\%$$

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan intervensi kegiatan KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) pada kawasan kumuh yang pendanaannya bersumber dari DIPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pencapaian pengurangan kumuh sebesar 41,27 Ha. Dengan capaian ini sisa luas total kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Belitung sebesar 20,74 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23

Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Belitung, 2022

No	Kecamatan	Kelurahan*	Luas Kumuh (Ha)**	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2021 (Ha)***	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tanjung Pandan	Pangkal Lalang	26,15	13,60	12,55
2		Lesung Batang	18,57	10,38	8,19
3		Kampong Damai	4,59	4,59	0
4		Parit	12,7	12,7	0
5		Air Saga	0	0	0
Jumlah Luasan (Ha)			**62,01**	**41,27**	**20,74**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Sosialisasi yang diadakan sejak tahun 2018 dalam program KOTAKU dan dukungan dari semua pihak serta fasilitasi Kemekumham dalam penyusunan dokumen pendukung untuk Raperbub Pencegahan kawasan kumuh menjadi faktor pendorong capaian kinerja. Sementara itu koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan stakeholder terkait yang dilakukan secara virtual dapat dilihat sebagai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat terlaksananya anggaran terkait sub kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Jika dilihat dari sisi pendorong, maka kemajuan teknologi menjadi

strategi dalam efisiensi anggaran sehingga kegiatan-kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan melalui virtual/online. Sementara untuk Tahun 2023 sudah tidak ada lagi kegiatan KOTAKU yang berakibat pada masih terdapat Kawasan kumuh perkotaan.

☞ Kebijakan Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman

Pelaksanaan arah kebijakan ini melalui pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang sehat dan aman.

Rasio permukiman layak huni dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{Luas permukiman yang layak huni}}{\textbf{Luas wilayah permukiman}} \times 100$$

$$\frac{29.149,26}{29.170} \times 100$$

Realisasi rasio permukiman layak huni adalah sebesar 99,93 dengan perhitungan luas permukiman yang layak huni sebesar 29.149,26 Ha dibagi dengan Luas wilayah permukiman yaitu 29.170 Ha dikali seratus.

Indikator rasio permukiman layak huni didukung dengan pelaksanaan 3 (empat) Program utama antara lain Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan program Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU).

☞ Kebijakan Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi;

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan “Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi”, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu: terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkualitas dan meningkatnya kualitas ketahanan pangan daerah.

Sasaran Program pertama yaitu terpenuhinya konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi sebesar 97,50% (sembilan puluh tujuh koma lima nol persen) melampaui realisasi target Tahun 2023 sebesar 95,70% (sembilan puluh lima koma tujuh nol persen). Capaian sasaran program diatas didukung dengan realisasi anggaran dari Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Realisasi capaian kegiatan yang berupa cadangan pangan sebanyak 15 (lima belas) ton sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga diperoleh persentase (%) ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah. Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp 21.883.238,- (dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dari target Rp 62.184.868,- (enam puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sasaran program kedua yaitu peningkatan persentase (%) penurunan status desa/kelurahan rawan pangan dengan target 12,24% (dua belas koma dua puluh empat persen) terealisasi 10,20% (sepuluh koma dua puluh persen). Serapan anggarannya Rp.12.548.814,- (dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus

empat belas rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 13.032.030,- (tiga belas juta tiga puluh dua ribu tiga puluh rupiah) atau sebesar 99,54% (sembilan sembilan koma lima puluh empat persen) yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Realisasi capaian kinerja kegiatan berupa peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebanyak 2 jenis peta, hal ini didukung dengan adanya kerja sama dengan tim penyusun peta FSVA dan SKPG yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga diperoleh informasi terkait ketahanan dan kerentanan pangan.

Gambar Rapat Penyusunan Peta FSVA

Perkembangan realisasi nilai Persentase (%) ketersediaan energi dan protein perkapita Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut:

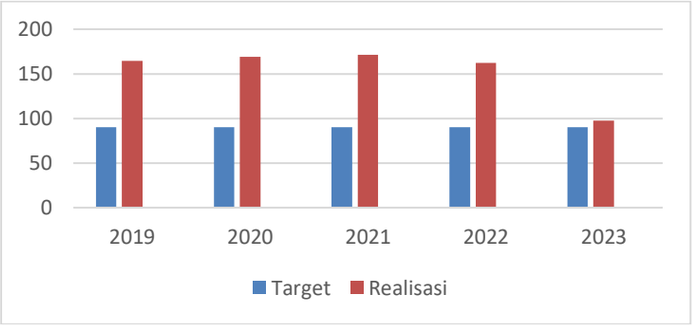

Gambar Perbandingan Nilai Target dan Realisasi Persentase (%) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Tahun 2019-2023

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai Persentase (%) ketersediaan energi dan protein perkapita telah melebihi target akhir Renstra Tahun 2018-2023.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Dilaksanakannya kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
2. Dilaksanakannya koordinasi dengan berbagai pihak terkait distribusi bahan pangan demi kelancaran transportasi pengangkutan suplai bahan pangan masuk ke Kabupaten Belitung. Perlu diketahui bahwa pasokan suplai bahan pangan di Kabupaten Belitung sebagian besar berasal dari Luar Pulau Belitung yang mana kelancaran transportasi sangat menentukan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Belitung.

Capaian kinerja cukup tinggi melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh ketersediaan ikan sebagai sumber pangan protein hewani yang tinggi dan berdasarkan hasil perhitungan konsumsi energi menunjukkan bahwa konsumsi energi aktual pangan hewani lebih tinggi daripada konsumsi energi standar.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

1. Pembinaan, pendampingan dan penerapan pertanian terpadu kepada petani sehingga produksi bahan pangan khususnya padi di Kabupaten Belitung akan meningkat;
2. Koordinasi yang lebih intens lagi kepada berbagai pihak terkait distribusi bahan pangan demi kelancaran transportasi pengangkutan suplai bahan pangan masuk ke Kabupaten Belitung.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung dalam mendukung 16 (enam belas) program inoveatif Kepala Daerah melaksanakan program Bagi Bibit Gratis untuk Kampoeng (BAGUK). Kegiatan tersebut merupakan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari:

Program BAGUK/benih buah-buahan tersebut telah dilaksanakan mulai Tahun 2019 pada 33 (tiga puluh tiga) desa; 14.602 (empat belas ribu enam ratus dua) KK; 9 (sembilan) jenis benih buah-buahan yang meliputi jambu kristal, lengkeng, sawo, manga, durian, rambutan, lengkeng dan manggis.

Gambar Pembagian Bibit Mangga di Desa Padang Kandis Kecamatan Membalong

Selain bibit tanaman, Bibit Day Old Chick (DOC) ayam pedaging yang diserahkan kepada kelompok tani pada 14 (empat belas) desa; 151 (seratus lima puluh satu) peternak. Laporan Kegiatan BAGUK DKPP Tahun 2019-2023 selengkapnya diserkan pada lampiran laporan ini.

Gambar Pembagian bibit ayam di kelompok tani Aliansi Peternak Ayam Mandiri Desa Air Pelempang Jaya Tanjungpandan

☞ Kebijakan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berolah raga;

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Partisipasi dalam olahraga juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres dan kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan meningkatkan masyarakat dalam berolah raga, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung melaksanakan Penyelenggaraan event olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepramukaan diukur dengan event olahraga olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang diselenggarakan sampai dengan triwulan

Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara

IV Tahun 2023 sebesar 8 Prestasi Pemuda dan 2019 Prestasi Olahraga di peroleh dari data realisasi kegiatan tahun 2023.

PERHITUNGAN MEDALI AKHIR
PORPROV VI BANGKA BELITUNG 2023
Sumber: porprov.bangkabaratkab.go.id

KABUPATEN/KOTA	EMAS	PERAK	PERUNGGU	JUMLAH	PERINGKAT
BANGKA TENGAH	71	51	47	169	1
BANGKA BARAT	58	29	63	150	2
BANGKA	56	46	53	155	3
PANGKALPINANG	52	59	77	188	4
BELITUNG TIMUR	30	48	65	143	5
BELITUNG	19	34	74	127	6
BANGKA SELATAN	14	31	43	88	7
GRAND TOTAL	300	298	422	1020	

Dalam upaya mendorong dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belitung terus membangun kesadaran, meningkatkan kemampuan dan memotivasi kemauan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan.

Strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk merupakan komponen terpenting dalam membangun peradaban, namun terdapat hal positif dan negatif. Jumlah penduduk yang banyak menjadi positif bila dikaitkan dengan faktor produksi, karena penduduk yang banyak berarti modal tenaga kerja juga melimpah. Apalagi bila struktur penduduk lebih banyak didominasi oleh usia produktif. Suatu daerah yang mempunyai struktur penduduk seperti ini berarti daerah tersebut memiliki tenaga kerja yang melimpah. Inilah yang disebut bonus demografi. Bila daerah dapat memanfaatkan bonus demografi ini maka akan majulah daerah tersebut, sebaliknya bila tidak bisa memanfaatkannya maka akan menjadi bumerang bagi derah tersebut. Masalah-masalah sosial akan muncul dari penduduk usia produktif ini.

Mengacu pada hal di atas maka kuantitas penduduk harus pula diimbangi dengan kualitas penduduk. Bila tidak mampu mengimbanginya kuantitias penduduk dengan kualitasnya, maka salah satu jalan adalah membatasi laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan dan kebijakan pembangunan dapat direncanakan dengan optimal mengacu pada kebutuhan penduduk yang ada dan terkendali.

Untuk melaksanakan strategi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: Menurunkan jumlah perkawinan usia muda dan Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan Total Fertility Rate (TFR). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Tahun 2023 memiliki tujuan Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 1,17% dan total fertility rate sebesar 2,08%. Berikut target dan capaian kinerja Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	2,70	1,17	230,77%
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,08	106,25%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponesial.

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : *Laju pertumbuhan penduduk*

P_t : *Jumlah penduduk tahun t*

P_0 : *Jumlah penduduk tahun awal*

t : *periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)*

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung 2024

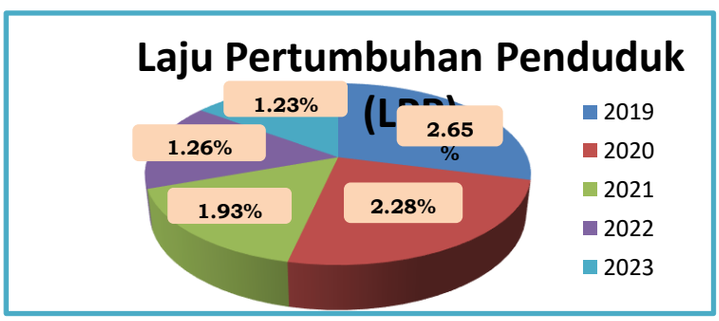

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kinerja "Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)" pada tahun 2023 menurut data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mencapai 1,17%. Atau meningkat 0,06% dari kondisi awal tahun 2022 sebesar 1,23% dengan perbandingan capaian tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung tahun 2023 telah mencapai 230,77%. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

LPP berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Walaupun banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk seperti faktor migrasi dan tingkat kelahiran, namun tetap harus ada upaya untuk menekan angka Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Pengendalian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sehingga dapat mencapai atau hampir mendekati angkayang ditargerkan pada tahun akhir Renstra.

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, upaya untuk meningkatkan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah:

1). Melaksanakan penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral melalui kegiatan Kampung KB.
2). Mengoptimalkan kegiatan di balai penyuluhan KB di tiap kecamatan.3). Pembinaan yang intensif kepada Kader IMP.
4). Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh dan terus menerusterhadap kualitas informasi dan data program Bangga Kencana
5). Meningkatkan komitmen bersama terhadap Program Keluarga Berencana antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di semua tingkatan.

Faktor yang mendorong peningkatan capaian kinerja adalah

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
2) Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi metode jangka panjang olehmasyarakat.
3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan berkeluarga dan perilaku hidup sehat.
4) Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan sebagai tempat promosi dan KIE program Bangga Kencana secara maksimal.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

Masih rendahnya tingkat pendidikan/ pengetahuan kader IMP sehingga pelaksanaan KIE dilapangan belum optimal.

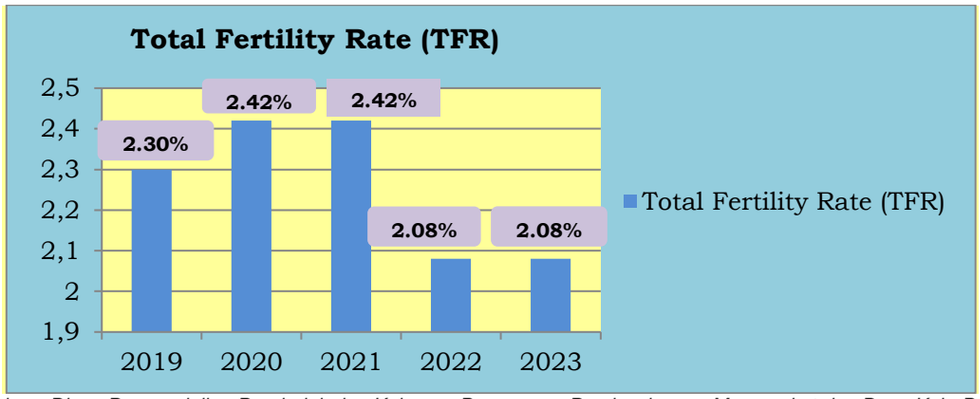

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitung 2024

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Untuk menghitung **Total Fertility Rate (TFR) digunakan rumusan sebagai berikut:**

$$TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 1000$$

Keterangan:

TFR	:	Total Fertility Rate (TFR)
JK15-49	:	Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu
JP15-49	:	Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah 2,08% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 2.21 %.

Meskipun pencapaian kinerja telah di atas target yang ditetapkan, namun tetap saja terdapat permasalahan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapian kinerja yaitu masih tingginya jumlah angka pernikahan dan kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun) di Kabupaten Belitung.

Sedangkan permasalahan yang menjadi factor pendorong pencaipan targetkinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga;
2. Meningkatnya peran serta tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan Insitusi Masyarakat Pedesaan) dalam melaksanakan promosi dan KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
3. Berfungsinya Balai Penyuluhan KB di setiap kecamatan sebagai tempat promosi dan KIE program Bangga Kencana secara maksimal;

Solusi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatangdatang adalah:

1) Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral.
2) Pembinaan yang lebih intensif kepada kader IMP.
3) Memberikan pembinaan kepada PKB/PLKB, mitra kerja serta kader di lini lapangan terkait pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dan pengendalian lapangan
4) Melakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga Penyuluh Lapangan KB untukmeningkatkan pelaksanaan promosi dan pelayanan program KB kepadamasyarakat.

Diharapkan solusi yang tepat dapat dilakukan perekrutan dan optimalisasi tenaga penyuluh lapangan KB untuk meningkatkan promosi dan pelayanan program KB kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada remaja dan orang tua melalui kegiatan PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja untuk mencegah pernikahan diusia muda, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran akan kesehatan reproduksi kepada anak remaja melalui program GenRe dan Pendewasaan Usia Perkawinan.

Kebijakan Meningkatkan program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam UU N0 10 tahun 1992, yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Wujud dari program Keluarga Berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda/mencegah kehamilan kehamilan. Program keluarga berencana tidak semata-mata dibuat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan bagi kesehatan setiap anggota keluarga. Tak hanya ibu, anak dan suami juga bisa merasakan efek dari program ini secara langsung.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan yaitu: Meningkatnya Persentase PUS ber KB dan Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP.

Tabel 2.25

Capaian indikator kinerja meningkatkan program Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Persentase PUS ber KB	%	0,75	0,59	78,67
2	Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP	%	12,67	14,40	113,65

Sumber : Dinas Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri, yang istri berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. Untuk mengukur Persentase PUS ber KB digunakan rumusan: ((Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun berkenaan - Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun awal) / Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB tahun awal) x 100%.

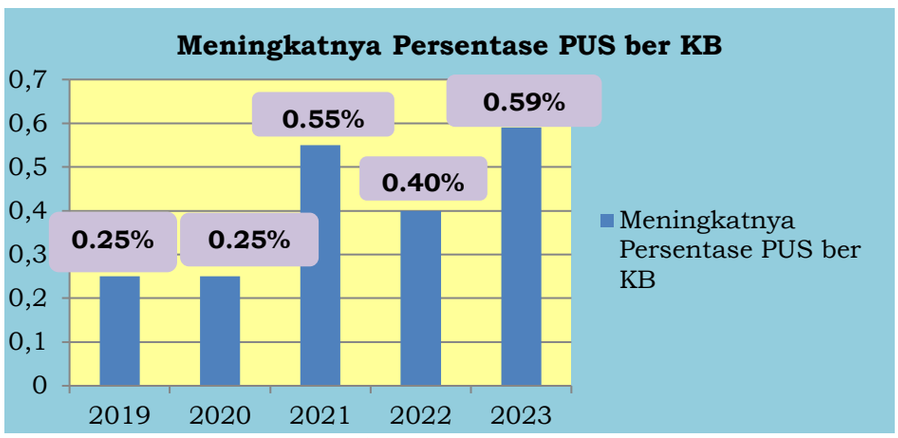

Sumber : Dinas Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2024

Indikator Meningkatnya Persentase PUS ber KB pada tahun 2024 adalah 0,59%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Persentase PUS ber KB pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022kondisi Persentase PUS ber KB adalah 0,40%. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung yang diharapkan mencapai 0,75% atau lebih adalah sebesar 78,67%. Ada beberapa faktor yang mendukungdalam upaya meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB diantaranya adalah:

1. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pemakaian alat dan obat kontrasepsi sebagai upaya mengatur kelahiran;
2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan dalam berkeluarga;

Upaya untuk meningkatkan capaian Persentase PUS ber KB pada tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) mengoptimalkan promosi KB di masyarakat melalui berbagai media promosi diantaranya media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan pemahamandan pengetahuan pasangan usia subur tentang pentingnya mengetahuikontrasepsi yang tepat sasaran, 2) memanfaatkan hasil pendataan keluarga untukmengetahui target akseptor KB agar KIE tepat sasaran, 3) meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan program KB.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

1. Cakupan hasil pelayanan KB yang dicatat dan dilaporkan pada aplikasi New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) masih rendah dikarenakan keterbatasan jumlah dan pengetahuan SDM serta performa aplikasi yang belum maksimal.

2. Pengurangan angka Jumlah Pasangan Usia Subur karena filterisasi pada aplikasi pelaporan Pelayanan KB (aplikasi New SIGA) dimana ketika PUS sudah mencapai usia diatas 49 tahun, maka data PUS tersebut akan otomatis dikeluarkan datanya oleh sistem. Sedangkan di kondisi lapangan banyak ditemui pasangan usia 49 tahun keatas masih dalam kondisi subur dan menggunakan alat kontrasepsi.
3. Beredarnya rumor negatif di masyarakat terkait efek samping penggunaan alat dan obat/cara kontrasepsi terutama metode modern (sebagai contoh : penggunaan suntik KB/konsumsi Pil KB dapat menaikkan berat badan atau menimbulkan jerawat/flek pada wajah) menyebabkan masyarakat lebih memilih metode tradisional (contoh : KB kalender, konsumsi jamu) sebagai upaya ber-KB.
4. Masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa pemakaian alat dan obat kontrasepsi sebagai upaya mengatur kelahiran bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan tertentu.

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang disingkat MKJP adalah metode kontrasepsi yang dapat memberikan perlindungan dari resiko kehamilan untuk jangka waktu sepuluh tahun yang terdiri dari Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP), Alat Konterasepsi dalam Rahim (AKDR) atau IUD, dan Alat Kontrasepsi bawah Kulit (AKBK) atau *Implant*. Indikator kinerja Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dihitung dengan rumusan sebagai berikut: Jumlah peserta KB MKJP / Jumlah Peserta KB x 100%.

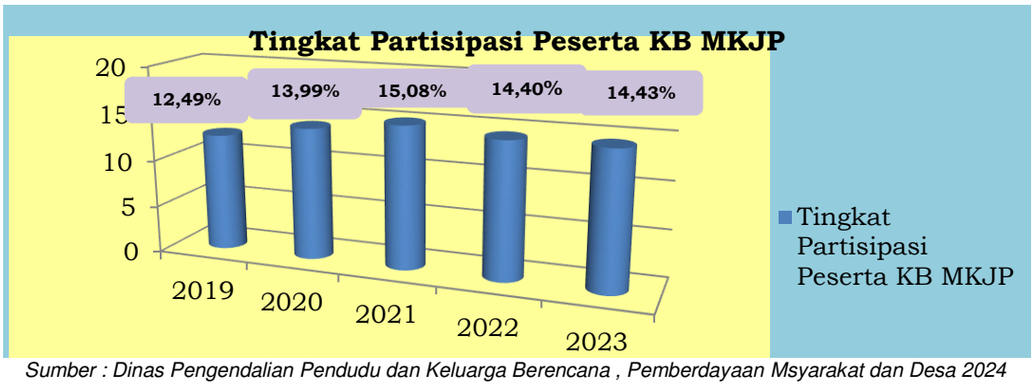

Sumber : Dinas Pengendalian Pendudu dan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Msyarakat dan Desa 2024

Indikator Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2023 adalah 14,43%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 kondisi Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJP adalah 14,40%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD DPPKBPMD Kabupaten Belitung yang diharapkan mencapai angka 13,00% atau lebih telah melampaui target yaitu sebesar 113,65%.

Namun dengan pencapaian seperti kondisi sekarang ini harus tetap membutuhkan upayah yang lebih serius agar Tingkat Partisipasi Peserta KB MKJPpada tahun-tahun mendatang terus meningkat. Langkah yang dilakukan adalah:

1. Meningkatnya peran kader IMP dalam memberikan KIE KB MKJP kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dukungan dana BOKB (DAK Non Fisik) bagi pelaksanaan KIE oleh Kader IMP.
2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak provider yang terlatih melayani pelayanan KB MKJP sehingga meningkatkan kepercayaan di masyarakat untuk menggunakan KB MKJP.
3. Meningkatnya minat masyarakat terkait pemakaian KB MKJP karena lebih efisien dan ekonomis.

Dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala atau faktor penghambat pencapaian kinerja seperti misalnya ketakutan masyarakat akan efek samping maupun rumor kegagalan saat pemasangan alat kontrasepsi MKJP.

Dengan demikian solusi dan rekomendasi yang dapat diambil dalam peningkatankinerja adalah :

a. optimalisasi media elektronik dan media sosial sebagai ajang promosi danadvokasi kepada masyarakat tentang KB MKJP dan KB Pria,
b. meningkatkan peran Institusi Masyarakat (Kelompok KB, IMP, PKK) dalam Konseling Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi.

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran strategis PD DPPKBPMD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota.

*Gambar: **Rangkaian Kegiatan Penunjang Program Pengendalian Penduduk, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Program Pembinaan Keluarga Berencana***

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilakukan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Output kegiatan berupa: Laporan Pelaksanaan Orientasi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Outcome kegiatan berupa Meningkatnya kualitas Kader Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Kebijakan Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam. Terwujudnya Ketahanan pangan daerah yang berkualitas ditentukan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurang beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat yang berdasarkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani melebihi konsumsi energi standar sedangkan untuk konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi standar. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung telah berusaha untuk mencapai Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan Aplikasi HARMONISASI PPH yang dipengaruhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) (Jumlah skor 9 kelompok pangan yaitu padi-padian; umbi-umbian; pangan hewani; minyak dan lemak; buah biji berminyak; kacang-kacangan; gula; sayur dan buah; serta lain-lainnya), Target kinerja pada Tahun 2023 sebesar 88,50.

Gambar: Penyampaian Materi pada acara Orientasi Tim Pendamping Keluarga Risiko Stunting oleh Petugas Lapangan Penyuluh KB

Pada Tahun 2023, nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) terealisasi sebesar 82,20 atau mencapai 92,88% dari target Tahun 2023, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Nilai Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,50	82,20

Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diukur dengan Aplikasi HARMONISASI PPH. Skor ini dipengaruhi oleh Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Skor sembilan kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lainnya. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari hasil penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani melebihi konsumsi energi standar sedangkan untuk konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi standar. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Walaupun target Skor PPH belum tercapai, dari segi kuantitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Belitung melebihi dari target yang ditetapkan hal ini ditunjukkan dengan nilai persentase (%) konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi sebesar 97,05% (sembilan puluh tujuh koma nol lima persen) dari target 95,70% (sembilan puluh lima koma tujuh nol persen) serta nilai konsumsi perkapita per tahun sebesar 746.060 kkal/kap/tahun dari target 750.805 kkal/kap/tahun. Sasaran strategis Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah yang Berkualitas dalam pelaksanaannya didukung oleh 2 (dua) program yang dijabarkan pada sasaran program sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Konsumsi Pangan Terhadap Angka Kecukupan Gizi
2. Meningkatnya Tingkat Keamanan Pangan

Sasaran Program pertama yaitu terpenuhinya konsumsi pangan terhadap Angka Kecukupan Gizi sebesar 97,50% (Sembilan puluh tujuh koma lima nol persen) melampaui realisasi target Tahun 2023 sebesar 95,70% (Sembilan puluh lima koma tujuh nol persen). Capaian sasaran program diatas didukung dengan realisasi anggaran dari dua kegiatan berikut:

a. Kegiatan pertama yang mendukung program ini yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Kabupaten/kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Realisasi capaian kinerja output yang berupa dokumen ketahanan pangan sebanyak 3 (tiga) dokumen sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini didukung dengan adanya Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain terkait penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Belitung, sehingga diperoleh data ketersediaan energi padi-padian.
b. Kegiatan kedua yaitu Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Realisasi capaian kinerja tingkat konsumsi pangan perkapita/tahun sebesar 746.060 kkal/lap/tahun dari target sebesar 750.805 kkal/kap/tahun. Hal ini didukung dengan adanya jumlah konsumsi kelompok pangan padi-padian dan pangan hewani yang melebihi standar Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG); dan capaian kinerja outcome tercapainya tingkat kecukupan energi perkapita/hr sebesar 2.044 kkal/kap/hari dari target 2150 kkal/kap/hari.

Sasaran Program kedua yaitu meningkatnya tingkat keamanan dengan indikator persentase (%) tingkat keamanan pangan. Target persentase tingkat keamanan pangan pada tahun 2023 yaitu sebesar 89,29% (delapan puluh sembilan koma dua sembilan persen) terealisasi 100% (seratus persen). Serapan dana program ini yaitu sebesar Rp. 62.539.400,- (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dari total anggaran sebesar Rp.62.830.300,- (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 99,54% (sembilan puluh sembilan koma lima empat persen) yang seluruhnya digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota. Realisasi capaian kinerja kegiatan berupa pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar sebanyak 16 (enam belas) kali sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercapaianya target persentase keamanan pangan segar ini didukung dengan terpenuhinya sarana prasarana uji sampel pangan segar seperti padi, sayuran dan buah-buahan terkait kandungan pestisida dan e coli.

Rapat pembahasan dan penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dilakukan pada bulan Oktober 2023 oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, dapat dilihat melalui dokumentasi berikut ini:

Gambar Pelaksanaan Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023

Setelah didapat Hasil Skor PPH Tahun 2023, dilakukan perbandingan nilai target dengan realisasi Skor PPH tahun 2019-2023 seperti disajikan pada gambar berikut:

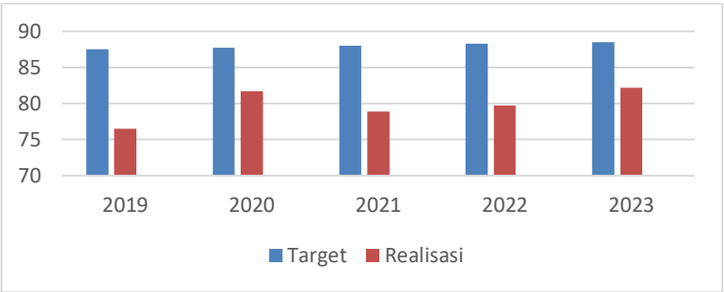

Gambar Target dan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2022-2023

Dari Gambar 4 bisa dilihat bahwa nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum memenuhi target akhir Renstra Tahun 2018-2023. Meskipun demikian, realisasi nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,5 poin dibandingkan dengan Tahun 2022. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan dalam Tahun 2023 untuk meningkatkan Skor PPH yaitu:

1) Dilaksanakannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dengan sumber dana DAK Non Fisik.

Gambar Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari di KWT Mekar Wangi

2) Dilaksanakannya monitoring atas kegiatan Pertanian Keluarga sumber dana APBN Kementerian Pertanian RI sehingga tetap terus beraktivitas dalam hal budidaya pertanian yang bertujuan untuk penyediaan pangan keluarga sehingga kebutuhan keluarga akan bahan pangan akan terpenuhi serta tingkat kesejahteraan keluarga akan meningkat.

   Capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

   1) Pola konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Belitung kurang beragam, hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) bahwa konsumsi pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah masih dibawah konsumsi energi standar;
   2) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyusun pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

   Untuk meningkatkan Skor PPH Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

   1) Pembinaan, pendampingan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar tetap terus berkelanjutan sehingga tingkat ketersediaan pangan akan menjadi stabil;

   Sosialisasi terkait penyusunan pola pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dimulai dari tingkat sekolah khususnya anak-anak agar mengenal dan selanjutnya menerapkan pola pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Tabel 2.27
Realisasi Keuangan
Program penunjang Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	103.717.595.677	91.914.794.118	88,62
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.684.826.640	1.413.665.377	83.91
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	415.157.200	358.744.200	86,41
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	892.292.915	788.096.206	88,32
5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	121.891.776	70.327.613	57,70
6.	Pengawasan Keamanan Pangan	62.830.300	62.539.400	99,54
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.688.189.454	2.921.073.148	62,31
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	940.000.000	295.326.500	31,42
9	Kawasan Permukiman	210.050.000	123.422.112	58,76
10	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	1.101.830.000	1.099.485.000	99,79
11.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.027.539.160	699.442.810	68,07
12.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.837.826.450	1.760.412.000	62,03

Sehingga realisasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan capaian 86,24% dengan persentase rata-rata capaian 73,91% maka terdapat efesiensi 13,76%.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2023 yang ditetapkan adalah 8,56 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD 2018	2023 TARGET	2023 REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD 2023
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,56	8,98	104,91	SB	8,56

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabuapten Belitung tahun 2023 sebesar 8,98 tahun. Realisasi ini melampaui target sebesar 4,91%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai 2023.

Grafik 2.5
Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung
terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2019 - 2023

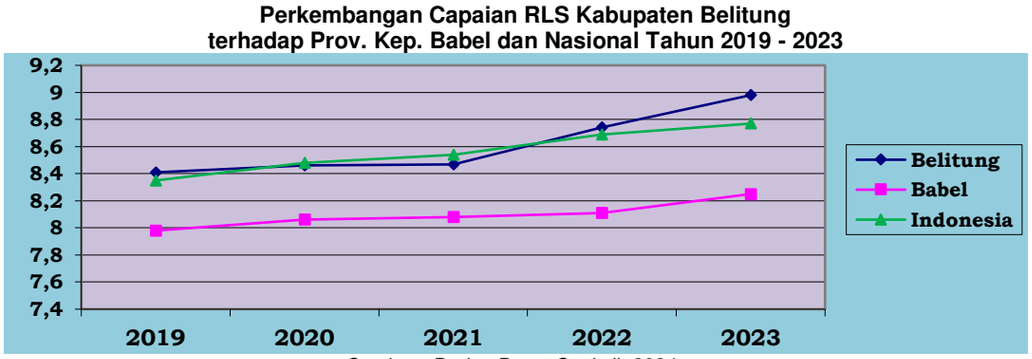

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2019 – 2023, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung. Dan jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2023, capaian RLS Kabupaten Belitung 8,98 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,25 tahun, dan capaian nasional sebesar 8,77 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak .

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu:

1.Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
2.Meningkatkan akreditasi sekolah (SD dan SMP);
3.Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan non formal;
4.Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
5.Menigkatkan kualitas SDM pendidikan;
6.Meningkatkan pemerataan sebaran guru; dan
7.Meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

❖ Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan

merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2023:

Grafik 2.6
Perkembangan APK Tahun 2019 – 2023

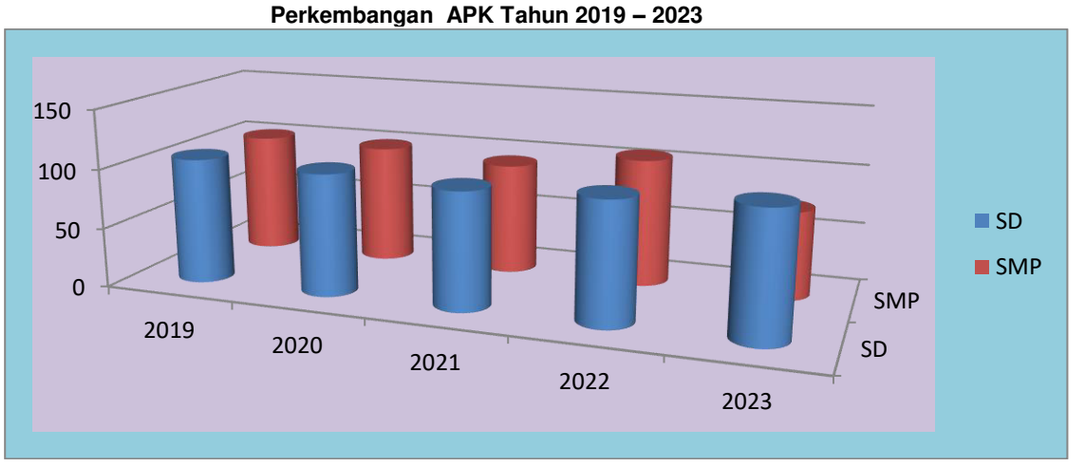

Sumber: publikasi.data.kemdikbud.go.id 2023

Pada tahun 2023, APK Kabupaten Belitung pada beberapa jenjang pendidikan turun dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan APK pada jenjang SD tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah namun sebaliknya penurunan tersebut menunjukkan bahwa pada jenjang SD lebih banyak dihuni anak usia 7-12 tahun, hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.

Selain itu, penurunan terjadi dikarenakan menurunnya jumlah siswa mengulang di sekolah SD, adanya pemberlakuan regulasi penerapan Usia Minimal Masuk sekolah pada Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun pelajaran. Selain itu penurunan APK jenjang SMP, juga disebabkan oleh tidak semua ulusan SD melanjutkan ke jenjang SMP dan sebagian lulusan SD melanjutkan pendidikan di luar wilayah Kabupaten Belitung yang disebabkan ikut orang tua, pindah keluarga atau sebab lain.

❖ Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2023.

Grafik 2.7
Perkembangan APM Tahun 2018-2023

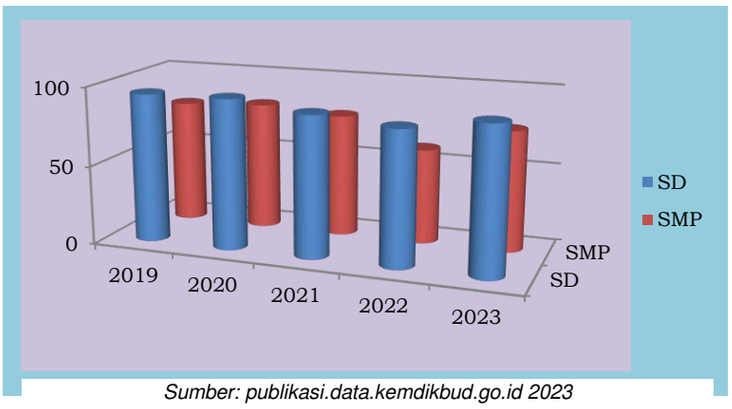

Sumber: publikasi.data.kemdikbud.go.id 2023

Pada tahun 2022, APM jenjang SD dan SMP mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

❖ Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut:

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2024

Dari grafik di samping terlihat bahwa persentase APTs jenjang pendidikan sekolah dasar mengalami penurunan pada tahun 2023(0,18 %) dibandingkan tahun 2022 (0,09 %). Persentase APTs jenjang pendidikan SMP juga mengalami penurunan pada tahun 2023 (0,4 %) dibandingkan tahun 2022 (0,38 %)Persentase angka putus sekolah yang meningkat perlu dilakukan kajian secara mendalam dengan menilai banyak variabel.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1) Melakukan Pembinaan secara Intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah
2) Melalui bidang Teknis Melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan rensponsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan:

1) Melakukan Pembinaan secara intensif kepada sekolah untuk melakukan antisipasi dan pemetaan terhadap siswa yang rentan putus sekolah.
2) Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk mencegah angka putus sekolah melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Tabel 2.29
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2020/2021 - 2022/2023

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Membalong	7	7	7	31	36	31	289	293	289
Tanjungpandan	22	22	22	127	127	137	1 469	1293	1.469
Badau	4	4	4	16	16	16	138	153	138
Sijuk	9	9	9	37	35	37	353	330	353
Selat Nasik	1	1	1	5	5	5	27	26	27
Belitung	43	43	43	226	219	226	2 276	2 095	2.276

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Tabel 2.30
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD/MI di Kabupaten Belitung Tahun 2020/2021 - 2022/2023

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Membalong	30	30	30	246	259	264	2 660	2 568	2 519
Tanjungpandan	44	44	44	630	581	587	11 238	11 024	10 960
Badau	17	17	17	162	149	150	1 587	1 588	1 564
Sijuk	22	22	22	211	197	203	3 221	3 183	3 057
Selat Nasik	7	7	7	64	58	56	583	546	514
Belitung	120	120	120	1 331	1 244	1 260	19 289	18 909	18 614

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Tabel 2.31
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2020/2021 - 2022/2023

Kecamatan	Sekolah			Guru			Murid		
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Membalong	5	5	5	83	71	69	1 028	973	964
Tanjungpandan	15	15	15	292	282	282	4 620	4 726	4 725
Badau	3	3	3	54	46	45	679	658	694
Sijuk	4	4	4	83	80	80	1 311	1 314	1 283
Selat Nasik	2	2	2	24	22	21	267	250	240
Belitung	29	29	29	536	501	497	7.905	7 921	7 906

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD di tiap kecamatan, peningkatan dan penurunan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP dan guru yang memasuki masa pensiun. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualiltas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Untuk mencapai sasaran “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat” melalui dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Program, yaitu:

1.Program Pengelolaan Pendidikan;

2.Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik;

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menyasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan besaran Nominal yang diterima oleh Penerima Program SIMPOR sebesar Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun.

Tabel 2.32
Data Penghargaan yang diterima Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tingkat
1	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023	SDN 33 Tanjungpandan	Nasional
2	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023	SDN 20 Tanjungpandan	Nasional
3	Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023	SMPN 2 Badau	Nasional
4	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2023	SMPN 1 Tanjungpandan	Provinsi
5	10 Besar Nasional Seni Tari	SDN 22 Sijuk	Nasional
6	Finalis Kategori Pamong Belajar Inovatif Dalam RangkaHari Guru Nasional Tahun 2023	UPT SKB Belitung	Nasional
7	Peserta Terbaik 1, Pada Apresiasi Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 Kategori Pamong Belajar SKB	UPT SKB Belitung	Provinsi
8.	Peserta Terbaik 1, Pada Apresiasi Guru Dan TenagaKependidikan Tahun 2023 Kategori Kepala TK	TK PAUD TNP Tanjungpandan	Provinsi
9.	Peserta Terbaik 2, Pada Apresiasi Guru Dan TenagaKependidikan Tahun 2023 Kategori Guru TK	TK PAUD TNP Tanjungpandan	Provinsi
10.	Peserta Terbaik 3, Pada Apresiasi Guru Dan TenagaKependidikan Tahun 2023 Kategori Kepala TK	TK Aqila	Provinsi
11.	Peserta Terbaik 1, Pada Apresiasi Guru Dan TenagaKependidikan Tahun 2023 Kategori Kepala SD	SD Alam Aqila	Provinsi
12.	Peserta Terbaik 2, Pada Apresiasi Guru Dan TenagaKependidikan Tahun 2023 Kategori Kepala SD	SDN 19 Tanjungpandan	Provinsi
13.	Duta Teknologi Tahun 2023	SMPN 6 Tanjungpandan	Provinsi
14.	Peserta Terbaik 1, Pada Apresiasi Guru Dan TenagaKependidikan Tahun 2023 Kategori Guru SMP	SMPN 2 Sijuk	Provinsi
15.	Apresiasi PIK-R UnggulanSegmentasi Berani	SMPN 2 Badau	Provinsi
16.	Lomba Teknologi Tepat Guna(TTG) Pembuatan Sabun Natural Shimasoap	SMPN 3 Tanjungpandan	Provinsi
17.	Juara 2 menyanyi solo FLS2N2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
18.	Juara 1 Tari Tradisi FLS2N2023	SDN 22 Sijuk	Provinsi
19.	Juara 3 Pantomim FLS2N2023	SDN 29 Tanjungpandan	Provinsi
20.	Juara 1 Senam Balok Keseimbangan Putri O2SN2023	SDN 12 Sijuk	Provinsi
21.	Juara 2 Senam Serba BisaPutri O2SN 2023	SDN 12 Sijuk	Provinsi
22.	Juara 2 Senam Lantai PutriO2SN 2023	SDN 12 Sijuk	Provinsi
23.	Juara 3 Karate Kumite PutraO2SN 2023	SDN 23 Tanjungpandan	Provinsi
24.	Juara 3 Karate Kumite PutriO2SN 2023	MIN 1 Belitung	Provinsi
25.	Juara 3 Karate Kata Perorangan Putra O2SN 2023	SDN 23 Tanjungpandan	Provinsi
26.	Juara 3 Karate Kata Perorangan Putri O2SN 2023	MIN 1 Belitung	Provinsi

27.	Juara 2 50M Gaya Kupu-KupuPutra O2SN 2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
28.	Juara 1 100M Gaya BebasPutra O2SN 2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
29.	Juara 1 50M Gaya PunggungPutra O2SN 2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
30.	Juara 1 Senam Serba BisaPutra O2SN 2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
31.	Juara 1 Senam Kuda PelanaPutra O2SN 2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
32.	Juara 2 Senam Meja LompatPutra O2SN 2023	SDN 17 Tanjungpandan	Provinsi
33.	Juara 1 100 M Gaya Bebas Putri O2SN 2023	SDN 15 Tanjungpandan	Provinsi
34.	Juara 2 50M Gaya Kupu-kupuPutri O2SN 2023	SDN 15 Tanjungpandan	Provinsi
35.	Juara 1 50M Gaya PunggungPutri O2SN 2023	SDN 15 Tanjungpandan	Provinsi
36.	Juara 1 Gaya Bebas PutriO2SN 2023	SDN 15 Tanjungpandan	Provinsi
37.	Juara 2 Kids Atletik Formula 1 Putra O2SN 2023	SDN 38 Tanjungpandan	Provinsi
38.	Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	Lesong Panjang	Nasional
39.	Warisan Budaya Tak BendaIndonesia	Makan BedulangBelitong	Nasional
40.	Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional	Maras Taun	Nasional
41.	Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional	Muang Jong	Nasional
42.	Kekayaan Intelektual KomunalEkspresi Budaya Tradisional	Seni Gambus Ombak Berayun	Nasional
43.	Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional	Beripat Beregong	Nasional
44.	Kekayaan Intelektual KomunalEkspresi Budaya Tradisional	Keroncong Setambul Fadjar	Nasional

Sumber Data: Dinas Pendidikan 2024

Untuk meningkatkan mutu layanan manajemen kependidikan diukur dengan menggunakan Indeks pemerataan guru mata pelajaran Tingkat SD dan Indeks Guru Mata Pelajaran Tingkat SMP. Indeks Pemerataan guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota, atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran maupun perbandingan antar daerah.

Indeks Pemerataan Guru di hitung dengan Indeks Gini Ratio dengan skala 0-1, semakin mendekati nol maka dianggap semakin merata sebaran guru. Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,08 dengan realisasi sebesar 0,08 atau mencapai 100% untuk Guru Kelas, Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,17 dengan realisasi sebesar 0,17 atau mencapai 100% untuk Guru Mata Pelajaran Sekolah Dasar, Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,32 dengan realisasi sebesar 0,32 atau mencapai 100% untuk Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu: Melakukan pemetaan sebaran guru sesuai kebutuhan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pemerataan sebaran guru sesuai kebutuhan.

Untuk pelaksanaan program-program tersebut telah dianggarkan sebesar Rp 76.390.354.526,00. Realisasi anggaran untuk menjalankan program-program dalam rangka pencapaian kinerja sasaran secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Realisasi Keuangan
Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	76.098.202.526,00	71.538.646.283,00	94.01
2.	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	292.152.000,00	243.476.500,00	83.34

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran program cukup baik, dengan rata-rata realiasai anggaran sebesar 88.67%, maka terdapat efektifitas anggaran sebesar 6.03%.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Ketersediaan anggaran dan komitmen pimpinan karena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.
- Program pusat yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah.
- Program Inovatif daerah "SIMPOR" dapat berjalan dengan baik.
- Melalui bidang teknis melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan responsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.
  Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswaa putus sekolah.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- Meningkatkan kemampuan pembelajaran
  Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.
- Meningkatkan prasarana dan sarana
- Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru.
  Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.
- Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan.

SASARAN 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di derah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintah Kabupaten Belitung akan terus mendorong dan memberikan stimulus bagi para pelaku usaha baik kecil maupun besar untuk dapat bergerak di tengah pandemi. Dengan cara tersebut, konsumsi rumah tangga diharapkan akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rupiah)	(Ribu Rupiah)	12.910	14.049	14.365	102.25	SB	14.049

Berdasarkan perhitungan BPS, indikator sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, yaitu Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 14.365 (ribu rupiah). Realisasi kinerja indikator Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) tahun ini melampaui target. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, Pengeluaran per Kapita masyarakat Kabupaten Belitung lebih tinggi, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2019-2023
(dalam ribu rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Belitung	13.662	13.554	13.563	14.045	14.365
2	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12.959	12.794	12.819	13.358	13.589
3	Indonesia	11.299	11.010	11.156	11.479	11.890

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, selama kurun waktu 2019 – 2023, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Belitung selalu lebih tinggi dari provinsi dan nasional. Ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Beitung lebih baik dari pada penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia secara rata-rata.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, tingkat Pengeluaran per Kapita tertinggi adalah Kota Pangkalpinang dan tertinggi kedua Kabupaten Belitung. Berikut perbandingan pengeluaran per kapita sebulan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 – 2023 pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Setahun (dalam ribu rupiah)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 – 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2019	2020	2021	2022	2023
1	Bangka	12.480	12.416	12.424	12.863	13.146
2	**Belitung**	**13.662**	**13.554**	**13.563**	**14.045**	**14.365**
3	Bangka Barat	12.275	12.233	12.269	12.790	13.105
4	Bangka Tengah	13.070	12.909	12.945	13.422	13.643
5	Bangka Selatan	11.910	11.757	11.768	12.341	12.627
6	Belitung Timur	11.831	11.730	11.760	12.357	12.536
7	Pangkalpinang	15.883	15.663	15.716	16.307	16.734

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Tabel di atas menyatakan bahwa dalam kurun 2019 – 2023 terjadi fluktuatif rata-rata pengeluaran per kapita setahun pada seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan tahun kebangkitan dari keterpurukan di Tahun 2020 hal ini merupakan dampak akibat adanya pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, rata-rata pengeluaran per kapita setahun Kabupaten Belitung sebesar Rp 14.365.000,00, tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang sebesar Rp 16.74.000,00.

Sementara berdasarkan data resmi BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 – 2023

KABUPATEN/KOTA	MAKANAN		BUKAN MAKANAN		JUMLAH	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Belitung	904 393	901 242	870 831	985 795	1 775 224	1 887 037
Kep. Bangka Belitung	881 622	879 797	772 658	847 753	1 654 280	1 727 550

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2024

Berdasarkan tabel di atas, Pengelompokan golongan pengeluaran per kapita berdasarkan klasifikasi wilayah menunjukkan stratifikasi konsumsi pengeluaran sekaligus mengetahui sebaran dari pola konsumsi penduduk suatu wilayah. Rata-rata perkapita penduduk Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar Rp1.887.037. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk kelompok makanan di Kabupaten Belitung adalah Rp 901.242 dimana proporsi terbesar adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yaitu Rp 985.795. Pada kelompok nonmakanan, lebih dari 50 persen pengeluaran di alokasikan untuk perumahan dan aneka komoditas dan jasa. Secara umum pengeluaran kelompok nonmakanan lebih tinggi daripada pengeluaran untuk kelompok makanan.

Tingginya pengeluaran per kapita ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Pada Desember 2023, berdasar catatan BPS Kabupaten Belitung, tingkat inflasi y-on-y dan y-to-d Kota Tanjungpandan sebesar 3,80 persen dan defllasi m-to-m sebesar 0,57 persen dengan IHK 119,93 sedangkan tingkat inflasi y-on-y dan y-to-d Kota pangkalpinang sebesar 2,01 persen dan imflasi m-to-m sebesar 0.26 dengan IHK 115,94. Inflasi y-on-y dan y-to-d pada Gabungan 2 Kota di Bangka Belitung bulan ini terjadi karena adanya peningkatan indeks pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, yaitu; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 10,12 persen; kelompok transportasi sebesar 2,30 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,06 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,45 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,19 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,11 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat deflasi sebesar 0,09 persen. Andil inflasi y-on-y Gabungan 2 Kota di Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh komoditas beras, rokok kretek filter, cabai merah, angkutan udara, dan cabai rawit. Sementara andil deflasi m-to-m utamanya disebabkan oleh komoditas ikan kerisi, cumi-cumi, ikan selar, ikan bulat dan bahan bakar rumah tangga.

Rata-rata pengeluaran dan tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan masalah yang harus dihadapai masyarakat Kabupaten Belitung. Masyarakat Kabupaten Belitung tentunya harus memiliki pendapatan per bulan dari hasil kegiatan ekonomi mereka yang lebih tinggi dari pengeluaran tersebut. Hal ini sangat bergantung pada kondisi ketengakerjaan Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data resmi BPS Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, indikator ketenagakerjaan Kabupaten Belitung cukup baik, tetapi masalah ketenagakerjaan ini tetap menjadi perhatian serius, karena memiliki peran yang sangat krusial dalam penentuan keberhasilan pembangunan daerah. Berikut ditampilkan tabel ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2019 - 2023 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	TPT					TPAK				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Bangka	3.80	5,42	5,97	5,39	5,03	64.30	63,93	62,68	68,81	67,46
Belitung	**2.90**	**4,82**	**3,51**	**4,30**	**4,14**	**68.74**	**69,32**	**66,28**	**65,25**	**68,09**
Bangka Barat	2.85	4,12	3,83	4,86	4,77	66.99	69,32	65,98	70,23	70,22
Bangka Tengah	4.39	5,59	4,95	3,99	3,88	69.65	70,85	66,24	66,47	70,09
Bangka Selatan	3.87	5,42	5,29	5,09	4,84	68.12	68,86	68,96	66,71	66,93

Belitung Timur	1.71	3,93	3,78	2,50	2,41	71.37	71,33	69,23	67,36	70,48
Pangkalpinang	1.50	5.01	6,93	5,90	5,76	63.64	68.35	65,16	65,78	66,55
Kep. Bangka Belitung	3.65	3.62	5,25	4,77	4,56	67.79	67.70	66,89	67,38	68,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 4,14 menurun dari tahun 2022 sebesar 4,30. TPT Kabupaten Belitung tahun 2023 sedikit menurun dari tahun 2022 . TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja .

Dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 68,09% artinya sebesar 68,09 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2023 ini meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 65,25%.

Perluasan Kesempatan Kerja dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata, meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin, meningkatkan serapan tenaga kerja local dan meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif. Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata dilakukan pembekalan sektor kepariwisataan terhadap Sumber Daya Manusia Peserta Pembekalan sektor Kepariwisataan.

Pelatihan tentang perencanaan kepariwisataan pada perangkat desa se kabupaten Belitung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan aparatur desa dalam mengembangan pariwisata di desa mereka.

Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata I (Kewirausahaan) peserta meru-pakan pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 15-17 Juni 2022 di Hotel Maxone Belitung.

Kegiatan pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata. Peserta adalah pengelola homestay dan pelaku pariwisata Belitung berjumlah 40 Orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 8-10 Agustus 2022 bertempat di Hotel Grand Hatika.

Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata II (Pelestarian Nilai Kearifan Lokal) peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17-19 Oktober 2022 di Hotel Bahamas Belitung.

Pelatihan pemandu Ekowisata dengan peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 7-9 November 2022 di Hotel Grand Hatika

Pelatihan pemandu Wisata budaya peserta 40 orang berasal dari pelaku pariwisata di Belitung. Kegiatan mulai tanggal 28-30 November 2022 di Hotel Grand Hatika

Pencapaian kinerja indikator Meningkatnya daya beli masyarakat pada tahun 2023 merupakan dampak positif dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain: Komitmen pimpinan yang kuat dan konsisten di bidang di bidang peningkatan kesempatan kerja yang dengan melakukan Sinergitas Program Pelatihan yang melibatkan Balai Latihan Kerja Belitung untuk peningkatan ekonomi masyarakat Belitung bersama dengan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Belitung.

Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus sehingga dapat mengundang investor untuk berinvestasi di Kabupaten Belitung di sektor pariwisata dan menyerap tenaga kerjaserta berkembangnya industri pariwisata yang mampu menyerap tenaga kerja.

Namun demikian tetap saja muncul faktor-faktor penghambat capaian kinerja, seperti berikut ini:

- Tingginya tingkat inflasi di Kabupaten Belitung;
- Kurang terlatihnya Angkatan Kerja;
- Masih banyaknya PMKS;
- Terbatasnya sarana sosial;

Untuk mengatasi hal tersebut perlu strategi dan kebijakan sebagai pemecahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja, antara lain:

- Upaya untuk menekan angka laju inflasi dengan terus memonitor persediaan barang kebutuhan pokok terutama pada bulan-bulan tertentu sehingga kstabilan harga di daerah terjaga;
- Perluasan kesempatan kerja dengan fokus pada sektor andalan yang memiliki potensi pengembangan tinggi seperti pariwisata;
- Terus meningkatan kompetensi dan ketrampilan pencari kerja khususnya di bidang pariwisata;
- Koordinasi dengan pihak swasta dalam rangka membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi Angkatan Kerja;
- Kebijakan memenuhi jaminan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- Meningkatkan penyediaan sarana sosial.

Menjadi keharusan bagi setiap daerah di NKRI ini untuk dapat bergerak maju menuju perubahan positif dari waktu ke waktu, sarat dengan prestasi dan pencapaian berarti dalam rangka meretas kemiskinan di segala lini kehidupan agar kemudian dapat terbingkai dalam “masyarakat sejahtera”. Peningkatan pengeluaran per kapita diperoleh dari daya beli masyarakat yang meningkat. Hal ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memaksimalkan produktivitas. Salah satu upaya tersebut dapat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peningkatan investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran difokuskan pada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk pelaksanaan strategi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Sosial menyelenggarakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Untuk mengukur kinerja program digunakan Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tabel 2.39
Persentase (%) Penanganan Penyandang Masalah Sosial
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	%
2019	14.337	12.028	83,89

2020	13.631	12.841	94,20
2021	14.829	14.487	97,69
2022	14.685	14.509	98,79
2023	11.986	11.781	98,29

Jumlah PMKS pada tahun 2020 menurun yaitu 13.631 orang yang memperoleh bantuan sosial menjadi 12.841 dari sebelumnya 14.337 orang atau sebesar 94,20%. Dan ditahun 2021 jumlah PMKS kembali meningkat sebesar 14.829 dan jumlah tertangani sebesar 14.487 dengan persentase meningkat penanganan PMKS meningkat 3,49% menjadi 97,69%. Tahun 2022 jumlah PMKS kembali menurun sebesar 14.685 dan jumlah tertangani sebesar 14.509

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2024

dengan persentase penanganan PMKS meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya menjadi 98,79%. Dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun menjadi 11.986 dan jumlah tertangani sebesar 11.781 dengan persentase penanganan 98,29%. Persentase penanganan PMKS menurun 0,5% dari tahun sebelumnyan namun masih melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 80%.

Data jumlah PMKS yang tertangani di Kabupaten Belitung terhadap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Jumlah dan Jenis Penanganan PMKS Tahun 2021 – 2023

No	Jenis PMKS	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	(%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	(%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	(%)
1	Anak Balita Terlantar	71	71	100	71	71	100	2	2	100
2	Anak Terlantar	219	219	100	86	86	100	15	15	100
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	15	15	100	5	5	100	4	4	100
4	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	37	12	32,43	37	37	10	57	22	38,60
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	10	10	100	8	8	100	13	13	100,
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	15	15	100,00	50	50	100	13	13	100
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1163	100	1154	1154	100	60	60	100
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	612	295	48,20	612	435	71,08	632	475	75,16
9.a	Penyandang Disabilitas Terlantar							30	30	
10	Tuna Susila	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	39	39	-
12	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-	0	0	-	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	6	6	100,00	4	4	100,00	14	1	7,14
18	Korban Trafficking	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	40	40	100,00	32	32	100,00	51	51	100,
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	12	12	100,00	13	13	100,00	0	0	100
21	Korban Bencana Alam	32	32	100,00	16	16	100,00	15	15	100
22	Korban Bencana Sosial	17	17	100,00	2	2	100,00	9	9	100
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1096	1096	100,00	1096	1096	100,00	3465	3465	100
24	Fakin Miskin	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00	7535	7535	100
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	5	100,00	21	21	100,00	16	16	100

No	Jenis PMKS	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	(%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	(%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	(%)
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah		**14829**	**14487**	**97,69**	**14686**	**14509**	**98,79**	**11986**	**11781**	**98,29**

Sumber Data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2024

Meningkatnya penurunan PMKS per tahun dan meningkatnya penanganan PMKS ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti. Dengan meningkatnya pemberian bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayanan SPM maka persentase penanganan PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

1) Perbaikan data layanan PMKS menjadi tepat sasaran
2) Peningkatan berbagai program/ kegiatan yang menyasar/ mengintervensi langsung kepada PMKS
3) Peningkatan Kerjasama lintas sektor. Kerjasama dengan Abiyoso Kemensos RI, Panti Bina Laras Belitung Timur, Pembangunan Rumah Singgah, dll.
4) Peningkatan kemampuan kompetensi PSKS, Karang Taruna, TKSK, PSM, dan lainnya.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampau target didukung/disebabkan antara lain oleh :

1) Adanya kucuran dana, Dana Insentif Daerah (DID), Fiskal, dll
2) Adanya pelaksanaan program hasil Kerjasama dengan Sentra Abiyoso, Kemensos RI.
3) Adanya peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

1) Meningkatkan SDM Pelayanan
2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan
3) Meningatkan layanan rujukan/menambah Kerjasama dengan lintas sektor/ perluasan Kerjasama.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :

Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Lanjut Usia Terlantar

Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Disabilitas Terlantar

Peresmian Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial Kabupaten Belitung (29 November 2023)

Di samping penanganan PMKS, pada tahun 2023 Kabupaten Belitung juga memberikan bantuan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban penyediaan pelayanan dasar.

Untuk menyediakan pelayanan dasar bagi PMKS terutama fakir miskin, maka Kabupaten Belitung menyediakan sarana dan prasarana sosial, yaitu panti sosial. Panti sosial mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. Sarana sosial di Kabupaten Belitung terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Panti Asuhan dan Panti Lansia dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Sarana Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

NO	SARANA SOSIAL	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panti Asuhan (Unit)	3	3	3	3	3
2	Panti Lansia (Unit)	1	1	1	1	1
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Taman Anak Sejahtera (TAS)	2	2	2	2	2
	Jumlah	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, 2023

Data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana panti sosial selama 5 (lima) tahun terakhir tetap tanpa ada penambahan dan pengurangan jumlah sarana dan prasarana panti. Walaupun tanpa penambahan sarana dan prasarana panti di Kabupaten Belitung tetap menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penanganan penyandang masalah sosial.

Tabel 2.42
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Rehabilitasi Sosial	472.694.420,00	391.808.972,00	82,89
2.	Pemberdayaan Sosial	408.808.768,00	362.053.507,00	88,56
3.	Penanganan Bencana	444.430.180,00	388.706.200,00	87,46
4.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan dan Barang Penting	26.930.000,00	0,00	0
5.	Hubungan Industrial	0,00	0,00	0
6.	Pengembangan Perumahan	154.500.000,00	0,00	0

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat dengan persentase realisasi anggaran 75,80% dengan persentase rata-rata capaian program 51,78% dan persentase efisiensi dan efektifitas anggaran sebesar 24,20%.

SASARAN 4 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan" diukur melalui indikator Status Desa Maju. Untuk melilhat capaian kinerja indikator sasaran tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Status Desa "Maju"	Desa	10	31	40	129.03	SB	31

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui indikator Status Desa "Maju" telah melampui target, dari target 31 (tiga puluh satu) desa terealisasi sebanyak 40 (empat puluh) Desa Maju atau sebesar 129,03% yang terdiri dari 23 desa berstatus Desa Maju dan 17 desa berstatus Desa Mandiri.

Penetapan status Desa Maju ini berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.44
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung
Tahun 2019 – 2023

Status IDM	Tanjungpandan					Membalong				
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berkembang	4	3	3	2	2	7	6	4	1	1
Maju	5	6	6	6	7	5	6	8	7	3
Mandiri	0	0	0	1	2	0	0	0	4	8

Status IDM	Selat Nasik					Sijuk					Badau				
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Berkembang	3	3	2	0	1	3	2	2	0	0	5	5	2	1	0
Maju	1	1	2	3	1	7	8	8	9	8	2	2	5	4	4
Mandiri	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	2	3

Sumber : Dinas PPKBPMD Kabupaten Belitung 2024

Selama kurun waktu 2019 – 2023, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 berjumlah 40 desa dengan IDM di Kabupaten Belitung atau meningkat 8,11% dari realisasi tahun 2022 sejumlah 37 desa dengan IDM Desa Maju di Kabupaten Belitung . Terdapat 17 desa mandiri dan 23 desa maju di Kabupaten Belitung tahun 2023, untuk mencapai status desa mandiri harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang digunakan sebagai indikator capaian sasaran pembangunan desa dan status kemandirian desa.

Adapun 40 (Empat Puluh) nama Desa Berstatus "Maju" dan "Madiri" Tahun 2023 dari 5 Kecamatan di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Kabupaten Belitung

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2023	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2023
Tanjungpandan	Buluh Tumbang	MAJU	Badau	Air Batu Buding	MANDIRI
Tanjungpandan	Air Saga	MAJU	Badau	Sungai Samak	MANDIRI
Tanjungpandan	Air Merbau	MAJU	Badau	Badau	MANDIRI
Tanjungpandan	Aik Ketekok	MAJU	Badau	Kacang Butor	MAJU
Tanjungpandan	Aik Rayak	MANDIRI	Badau	Cerucuk	MAJU
Tanjungpandan	Perawas	MANDIRI	Badau	Ibul	MAJU
Tanjungpandan	Aik Pelempang Jaya	MAJU	Badau	Pegantungan	MAJU
Tanjungpandan	Dukong	MAJU	Selat Nasik	Suak Gual	MANDIRI
Tanjungpandan	Juru Seberang	MAJU	Selat Nasik	Selat Nasik	MANDIRI
Sijuk	Sijuk	MANDIRI	Selat Nasik	Petaling	MAJU
Sijuk	Batu Itam	MAJU	Membalong	Membalong	MANDIRI
Sijuk	Tanjung Binga	MAJU	Membalong	Simpang Rusa	MAJU
Sijuk	Air Selumar	MAJU	Membalong	Pulau Seliu	MANDIRI
Sijuk	Sungai Padang	MAJU	Membalong	Gunung Rinting	MANDIRI
Sijuk	Keciput	MAJU	Membalong	Padang Kandis	MANDIRI
Sijuk	Terong	MAJU	Membalong	Perpat	MANDIRI
Sijuk	Pelepak Pute	MAJU	Membalong	Kembiri	MAJU
Sijuk	Air Seruk	MANDIRI	Membalong	Tanjung Rusa	MANDIRI
Sijuk	Tanjong Tinggi	MAJU	Membalong	Bantan	MANDIRI
			Membalong	Lassar	MAJU
			Membalong	Mentigi	MANDIRI

Perkembangan kemandirian desa terpotret dari Indeks Desa Membangun yang mengarah pada ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkolerasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, terdiri dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang terdiri dari:
   a. Dimensi Modal Sosial (Indikator Solidaritas Sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial)
   b. Dimensi Kesehatan (Indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
   c. Dimensi Pendidikan (Indikator akses ke pendidikan dasar, menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan
   d. Dimensi Pemukiman (Indikator akses ke air bersih,akseske sanitasi, akseske listrik, dan akses ke informasi dan komunitasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang terdiri dari Dimensi Ekonomi (Indikator Keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga Ekonomi dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKE) terdiri dari Dimensi Ekologi (Indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 6 (enam) arah kebijakan, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender, meningkatkan peran kelembagaan desa, meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda, memperkuat ekonomi desa kawasan pedesaan, memperkuat pemerintahan desa dan memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan.

Strategi ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD). Ada banyak hal yang jadi faktor pendorong peningkatan Status Desa Maju dan Desa Mandiri diantaranya adalah potensi desa terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam kebanyakan berada di sektor agraris. Sedangkan sumber daya manusia mencakup kualitas pendidikan masyarakat dan aparat pemerintah desa. Selain itu, potensi di sektor pariwisata terkadang dapat menunjang kemajuan desa.

Ketajaman prioritas, inovasi kegiatan dan kualitas perencanaan desa akan menentukan secara signifikan kecepatan perkembangan desa. Kuatnya dukungan kapasitas pemerintah desa yang memadai serta partisipasi masyarakat yang tinggi dan sinergi kelembagaan desa juga menjadi faktor pendorong yang penting untuk peningkatan status desa ini. Kemampuan pemerintah desa dengan kewenangan desa serta keuangan desa yang mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan pemahanan Pemerintah Desa dalam pengisian kuesioner IDM
2. Penetapan Kuesioner IDM yang tidak berubah – ubah setiap tahun
3. Penyediaan sarana dan prasarana social dasar seperti Fasilitas Pendidikan wajib 9 tahun Kesehatan , Pasar Desa dan lembaga perbankan di desa serta kesadaran terhadap mitigasi bencana (penganggaran mitigasi Bencana di desa) yang belum merata di setiap desa
4. Perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran atau ide-ide dan masukkan dalam forum perencanaan pembangunan Desa
5. Perlu adanya sosialisasi untuk mengimplementasikan perubahan peraturan

Untuk mengupayakan pencapaian sasaran ini Dinas PPKBPMD Kab. Belitung melaksanakan program-program, yaitu:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan Alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.039.694.044,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.017.371.898,- setara dengan 97.85% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Output dari kegiatan ini adalah berupa laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan outcome kegiatan adalah administrasi pemerintahan desa yang sesuai regulasi.

     Faktor Pendorong tercapainya kinerja adalah :
     - Ketersediaan data capaian realisasi keuangan per desa, melalui aplikasi Siskeudes online dan Omspan
     - Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala
     - Tersedianya regulasi dari Pusat dan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

     Faktor Penghambat capaian kinerja adalah :
     - Regulasi yang berubah – ubah sehingga mengharuskan dilakukan penyesuaian Perbup atau perda
     - Keterlambatan penetapan regulasi dari pusat (terutama egulasi yang menyangkut perencaaan di desa)
     - Sering terjadi mutasi perangkat desa, terutama perangkat yang membidangi keuangan dan perencanaan di desa.

     Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.039.694.044,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.017.371.898,- atau 97,85% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah :

     Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat serta kerjasama dengan OPD terkait, Tenaga Ahli dari Program P3MD Kemendes dan BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung.

     Faktor penghambat : Masih kurang nya anggaran kegiatan untuk mengakomodir jaminan Kesehatan Kepala desa dan Perangkat desa penganggaran masih di utamakan untuk 10 bulan dan 2 bulan harus dianggarkan di perubahan APBD serta anggaran untuk pembinaan dan pelatihan BUMDesa.

     Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

     (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

     Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah:

- Sudah tersusunnya jadwal kegiatan (siklus) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa sehingga pembinaan yang dilakukan mengikuti siklus/jadwal perencanaan di desa.
- Ketersediaan data capaian realisasi keuangan desa sehingga memungkinkan untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas hambatan yang mungkin di lalui pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkala,

Faktor penghambat :

- Kurangnya pemahaman aparatur desa dalam penerapan pelaksaan regulasi yang mengatur tentang desa
- Kurangnya anggaran untuk jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Faktor pendorong capaian kinerja sub kegiatan adalah :

- Dukungan data dan informasi perangkat daerah opd tehnis terkait yang tergabung dalam Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati / Rancangan Peraturan Daerah

Faktor penghambat tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah

- Tumpang tindih regulasi pusat yang mengatur tentang Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa ini sebesar Rp. 53.278.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.958.712,- atau 80,63 % dari pagu anggaran yang ditetapkan

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat

(3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Faktor pendorong capaian sub kinerja kegiatan adalah:

- Partisipasi aktif pelaksana Operasional BUMDesa dalam kegiatan Pelatihan BUMDesa.
- Tersedianya regulasi terkait BUMDEsa yaitu PP 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menerangkan lebih rinci tentang penyusunan laporan Pertanggung jawaban keuangan BUMDesa dan Permendes 136 Tahun 2022.

Faktor penghambat capaian kinerja kegiatan adalah:

- Tidak adanya SDM di Bidang PMD yang mempunyai latar belakang pendidikan Ekonomi Akuntasi untuk melakukan pembinaan BUMDesa dalam penyusunan Laporan Keuangan BUMdesa

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa ini sebesar Rp. 49.192.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.130.860,- atau 95,81 % dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat.

Gambar Kegiatan Pelatihan Keuangan BUMDesa Th 2023

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat

Faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang tergabung dalam tim Penilai Lomba Desa

- Partisipasi Pemerintah Desa dalam penyelenggaran lomba desa

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah penyampaian jadwal perlombaan desa dan kelurahan oleh pusat dan provinsi yang belum diawal tahun berjalan sehingga Kabupaten dan Kecamatan dalam perlu melakukan penyesuaian jadwal lomba

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa ini sebesar Rp. 102.082.750,- dengan realisasi sebesar Rp.101.054.428,- atau 98,99% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Gambar Kegiatan Persiapan Lomba Desa Tahun 2023

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pada tahun anggaran 2023 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan dengan alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.155.621.045,- dengan realisasi sebesar Rp. 738.157.427,- setara dengan 63,88%. Indikator yang ditetapkan adalah (1) Persentase Kelembagaan Desa Aktif.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang laksanakan untuk mendukung tercapainya target tiap indikator yang telah ditetapkan adalahsebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota. *Output* dari kegiata ini adalah Laporan kegiatan tahunan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Sedangkan *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat

   Faktor pendorong tercapainya kinerja kegiatan adalah:

   1. Ketersediaan Anggaran untuk operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui APBDES di masing – masing desa.
   2. Tersedianya dukungan anggaran untuk peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
   3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa

   Faktor penghambat tercapainya kinerja kegiatan adalah:

   - Kurangnya kesadaran dari Pemerintah Desa terkait pentingnya peran Lembaga kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan di desa meskipun telah dilakukan pembinaan.
   - Kurangnya fasilitasi dari Pemerintah Desa terkait pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pendayagunaannya.
   - Banyaknya jenis lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu), belum lagi adanya kelompok masyarakat lain seperti pokdarwis, gapoktan, satlinmas, kelompok nelayan, dan lain lain sesuai dengan kepentingannya, dimana secara keseluruhan lembaga2 tersebut membutuhkan fasilitasi dan perhatian dari Pemerintah Desa.

   Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.155.694.044- dengan realisasi sebesar Rp. 738.157.427,- atau 63.88% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah

   - Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat serta kerjasama dengan OPD tehnis terkait lomba TTG dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

- Faktor penghambat : adanya beberapa sub kegiatan yang mendapatkan alokasi dana insentif daerah yang di anggarkan pada bulan November 2023 sehingga sulit dan agak riskan untuk direalisasikan (terkendala waktu)

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang laksanakan untuk mendukung tercapainya target tiap indikator yang telah ditetapkan adalahsebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah:

- Faktor pendorong Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Stakeholder dan OPD terkait
- Terbitnya perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Lembaga Adat Melayu Belitung
- Kerjasama yang baik Lembaga Adat Melayu Belitong

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 243.851.950- dengan realisasi sebesar Rp. 168.950.830,- atau 69,28% dari pagu anggaran yang ditetapkan

- Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat
- Faktor penghambat capaian realisasi anggaran kegiatan adalah adanya tambahan alokasi anggaran insentif daerah yang di anggarkan pada bulan November berupa Kegiatan Orientasi Pencegahan Stunting dengan Media Food Model kepada LKD Posyandu yang direncanakan dilaksanakan di 5 kecamatan.

(2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya

Faktor pendorong capaian kinerja adalah

- Tersedianya dukungan anggaran dari pemerintah Desa untuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dan Lembaga kemasyarakatan desa
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan stakeholder dan OPD terkait

Faktor penghambat capaian kinerja :

- Kurangnya kesadaran dari Pemerintah Desa terkait pentingnya peran Lembaga kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan di desa meskipun telah dilakukan pembinaan.
- Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.753.850- dengan realisasi sebesar Rp. 36.584.500,- atau 99,54% dari pagu anggaran yang ditetapkan

Gambar Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Posyandu Tahun 2023

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah Pemenang Lomba TTG. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini

sebesar Rp. 66.054.600- dengan realisasi sebesar Rp. 62.842.981,- atau 95,14% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Faktor pendorong tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah telah terjadwalnya agenda kegiatan serta anggaran Kas yang telah dibuat

Faktor pendorong capaian kinerja adalah:

- Antusias Masyarakat dan pelajar yang tinggi untuk mengikuti Lomba TTG tingkat Kabupaten Belitung
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan stakeholder dan OPD terkait (Tim Penilai dan Juri)

Faktor Penghambat capaian kinerja adalah belum adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap penggunaan dan penyempurnaan alat TTG.

Gambar. Kegiatan Pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna Kab.Belitung 2023

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 230.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dari pagu anggaran yang ditetapkan

Faktor penghambat pelaksanaan sub kegiatan dan penghambat tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah karena pagu sub kegiatan ini baru dianggarkan pada saat mekanisme pergeseran anggaran serelah perubahan anggaran tahun 2023 pada pertengahan bulan Novembre 2023. Anggaran sendiri bersumber dari Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sesuai Kepmenkeu RI Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Msyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

(5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Legiatan Tahunan Tim Penggerak PKK.

Faktor pendukung kinerja Sub Kegiatan adalah:

- Tersedianya anggaran Dana APBD untuk mendukug pelaksanaan program PKK walaupun tidak mencukupi.
- Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program PKK.

Faktor penghambat kinerja Sub Kegiatan adalah:

- Peran serta dan keterampilan kader PKK dalam pelaksanaan program PKK di desa dan kecamatan kurang maksimal.
- Belum cukupnya dukungan anggaran APBD dalam pelaksanaan program PKK
- Fasilitas kantor seperti komputer, printer, mejakerja belum memadai sehingga kegiatan PKK dilaksanakan tetapi belum maksimal.
- Sedikitnya jumlah masyarakat yang bersedia menjadi kader PKK dikarenakan lebih mengutamakan mencari nafkah tambahan mebantu ekonomi keluarga

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 578.960.645,- dengan realisasi sebesar Rp. 469.779.116,- atau 81,14% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Faktor penghambat tercapainya realisasi anggaran sub kegiatan adalah proses penganggaran yang baru dimulai pada pertengahan bulan November 2023 sehingga terkendala waktu dalam proses realisasi sub kegiatan.

Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 95 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, untuk Tahun 2023 Pagu Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp. *57.995.336.000* (Lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang di bagi dengan perhitungan 90% Alokasi dasar yang di bagi secara merata kepada 42 desa dan 10% formula dibagi secara proposional berdasarkan bobot desa dari kriteria/variable dengan bobot jumlah penduduk 30%, jumlah penduduk miskin 50% dan luas wilayah 20% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.46
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	1,104,673,067	328,579,784	1,433,252,851	1,433,253,000
2	Perawas	1,104,673,067	359,011,035	1,463,684,102	1,463,684,000
3	Dukong	1,104,673,067	455,779,954	1,560,453,021	1,560,453,000
4	Juru Seberang	1,104,673,067	241,495,450	1,346,168,517	1,346,169,000
5	Air Saga	1,104,673,053	704,417,021	1,809,090,074	1,809,090,000
6	Air Merbau	1,104,673,067	468,701,242	1,573,374,309	1,573,374,000
7	Aik Pelempang Jaya	1,104,673,067	372,350,220	1,477,023,287	1,477,023,000
8	Aik Ketekok	1,104,673,067	291,975,228	1,396,648,295	1,396,648,000
9	Aik Rayak	1,104,673,067	550,446,212	1,655,119,279	1,655,119,000
10	Membalong	1,104,673,067	434,799,123	1,539,472,190	1,539,472,000
11	Perpat	1,104,673,067	219,573,267	1,324,246,334	1,324,246,000
12	Lassar	1,104,673,067	334,333,808	1,439,006,875	1,439,007,000
13	Simpang Rusa	1,104,673,067	322,466,034	1,427,139,101	1,427,139,000
14	Kembiri	1,104,673,067	299,105,835	1,403,778,902	1,403,779,000
15	Bantan	1,104,673,067	349,409,482	1,454,082,549	1,454,083,000
16	Tanjungrusa	1,104,673,067	199,410,735	1,304,083,802	1,304,084,000
17	Mentigi	1,104,673,067	143,284,544	1,247,957,611	1,247,958,000
18	Pulau Seliu	1,104,673,067	77,145,847	1,181,818,914	1,181,819,000
19	Pulau Sumedang	1,104,673,067	46,608,368	1,151,281,435	1,151,282,000
20	Gunung Riting	1,104,673,067	115,558,347	1,220,231,414	1,220,231,000
21	Padang Kandis	1,104,673,067	151,443,267	1,256,116,334	1,256,116,000
22	Selat Nasik	1,104,673,067	271,611,583	1,376,284,650	1,376,285,000
23	Petaling	1,104,673,067	96,626,918	1,201,299,985	1,201,300,000
24	Suak Gual	1,104,673,067	103,742,758	1,208,415,825	1,208,416,000
25	Pulau Gersik	1,104,673,067	222,252,298	1,326,925,365	1,326,925,000
26	Sijuk	1,104,673,067	243,748,926	1,348,421,993	1,348,422,000
27	Batu Itam	1,104,673,067	194,366,528	1,299,039,595	1,299,040,000
28	Terong	1,104,673,067	322,820,744	1,427,493,811	1,427,494,000
29	Air Seruk	1,104,673,067	457,119,038	1,561,792,105	1,561,792,000
30	Tanjung Binga	1,104,673,067	492,174,292	1,596,847,359	1,596,847,000
31	Air Selumar	1,104,673,067	321,766,408	1,426,439,475	1,426,439,000
32	Sungai Padang	1,104,673,067	256,546,062	1,361,219,129	1,361,219,000
33	Keciput	1,104,673,067	238,756,009	1,343,429,076	1,343,429,000
34	Pelepak Pute	1,104,673,067	193,560,984	1,298,234,051	1,298,234,000
35	Tanjong Tinggi	1,104,673,067	135,022,112	1,239,695,179	1,239,695,000
36	Badau	1,104,673,067	295,349,156	1,400,022,223	1,400,022,000
37	Air Batu Buding	1,104,673,067	194,720,236	1,299,393,303	1,299,393,000
38	Sungai Samak	1,104,673,067	209,515,822	1,314,188,889	1,314,189,000
39	Kacang Butor	1,104,673,067	276,712,441	1,381,385,508	1,381,386,000
40	Cerucuk	1,104,673,067	218,289,577	1,322,962,644	1,322,963,000
41	Pegantungan	1,104,673,067	225,241,078	1,329,914,145	1,329,914,000
42	Ibul	1,104,673,067	163,229,427	1,267,902,494	1,267,903,000
	TOTAL	**46.396.268.800**	**11.599.067.200**	**57.995.336.000**	**57.995.336.000**

Adapun Peraturan Bupati Belitung tentang Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2023 tidak menjadi syarat penyaluran sehingga Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, akan tetapi hal tersebut tidak menghambat komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sedangkan untuk Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2023. Pagu Alokasi besaran bagi hasil pajak adalah Rp. *8.079.725.000*,00 (*delapan milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).* Dan Alokasi Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa adalah sebesar Rp. 1.052.096.000,00 (*satu milyar lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah).* Presentase dan besarnya pembagian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 adalah 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, dan 40% (empat per seratus) dibagi secara proposional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah masing-masing desa dan jumlah penduduk Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.47
Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak DaerahKabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana DesaPer-Desa	Pagu Dana DesaPer-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	115.424.643	72.152.111	187.576.754	187.577.000
2	Perawas	115.424.643	85.186.452	200.611.095	200.611.000
3	Dukong	115.424.643	93.400.696	208.825.339	208.825.000
4	Juru Seberang	115.424.643	54.555.177	169.979.820	169.980.000
5	Air Saga	115.424.643	144.632.411	260.057.048	260.056.000
6	Air Merbau	115.424.643	111.923.586	227.348.229	227.348.000
7	Aik Pelempang Jaya	115.424.643	104.437.892	219.862.535	219.863.000
8	Aik Ketekok	115.424.643	96.157.241	211.581.884	211.582.000
9	Aik Rayak	115.424.643	134.317.448	249.742.091	249.742.000
10	Membalong	115.424.643	106.964.295	222.388.938	222.389.000
11	Perpat	115.424.643	81.344.850	196.769.493	196.769.000
12	Lassar	115.424.643	85.514.286	200.938.929	200.939.000
13	Simpang Rusa	115.424.643	87.886.406	203.311.049	203.311.000
14	Kembiri	115.424.643	93.477.558	208.902.201	208.902.000
15	Bantan	115.424.643	80.932.933	196.357.576	196.358.000
16	Tanjungrusa	115.424.643	51.131.274	166.555.917	166.556.000
17	Mentigi	115.424.643	60.459.343	175.883.986	175.884.000
18	Pulau Seliu	115.424.643	35.218.176	150.642.819	150.643.000
19	Pulau Sumedang	115.424.643	57.479.896	172.904.539	172.905.000
20	Gunung Riting	115.424.643	70.714.547	186.139.190	186.139.000
21	Padang Kandis	115.424.643	53.081.326	168.505.969	168.506.000
22	Selat Nasik	115.424.643	55.681.726	171.106.369	171.106.000
23	Petaling	115.424.643	63.308.375	178.733.018	178.733.000
24	Suak Gual	115.424.643	55.659.352	171.083.995	171.084.000
25	Pulau Gersik	115.424.643	79.135.289	194.559.932	194.560.000
26	Sijuk	115.424.643	74.445.273	189.869.916	189.870.000
27	Batu Itam	115.424.643	56.381.215	171.805.858	171.806.000
28	Terong	115.424.643	63.210.739	178.635.382	178.635.000
29	Air Seruk	115.424.643	95.300.392	210.725.035	210.725.000
30	Tanjung Binga	115.424.643	111.649.789	227.074.432	227.074.000
31	Air Selumar	115.424.643	82.384.486	197.809.129	197.809.000
32	Sungai Padang	115.424.643	62.366.299	177.790.942	177.791.000
33	Keciput	115.424.643	62.525.194	177.949.837	177.950.000
34	Pelepak Pute	115.424.643	78.282.470	193.707.113	193.707.000
35	Tanjong Tinggi	115.424.643	22.754.054	138.178.697	138.179.000

36	Badau	115.424.643	81.307.950	196.732.593	196.733.000
37	Air Batu Buding	115.424.643	77.291.307	192.715.950	192.716.000
38	Sungai Samak	115.424.643	63.142.180	178.566.823	178.567.000
39	Kacang Butor	115.424.643	72.506.071	187.930.714	187.931.000
40	Cerucuk	115.424.643	73.149.567	188.574.210	188.574.000
41	Pegantungan	115.424.643	65.821.411	181.246.054	181.246.000
42	Ibul	115.424.643	74.618.957	190.043.600	190.044.000
TOTAL		**4.847.835.000**	**3.231.890.000**	**8.079.725.000**	**8.079.725.000**

Tabel 2.48
Penetapan Alokasi Bagian Dari Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembuatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	15.029.943	12.206.808	27.236.751	27.237.000
2	Perawas	15.029.943	15.174.656	30.204.599	30.205.000
3	Dukong	15.029.943	18.483.911	33.513.854	33.514.000
4	Juru Seberang	15.029.943	7.894.295	22.924.238	22.924.000
5	Air Saga	15.029.943	35.185.915	50.215.852	50.216.000
6	Air Merbau	15.029.943	23.793.693	38.823.636	38.824.000
7	Aik Pelempang Jaya	15.029.943	20.571.287	35.601.230	35.601.000
8	Aik Ketekok	15.029.943	16.333.644	31.363.587	31.364.000
9	Aik Rayak	15.029.943	29.711.419	44.741.362	44.741.000
10	Membalong	15.029.943	14.704.472	29.734.415	29.734.000
11	Perpat	15.029.943	5.666.163	20.696.106	20.696.000
12	Lassar	15.029.943	10.107.453	25.137.396	25.137.000
13	Simpang Rusa	15.029.943	8.993.387	24.023.330	24.023.000
14	Kembiri	15.029.943	8.696.902	23.726.845	23.727.000
15	Bantan	15.029.943	8.361.484	23,391.427	23.391.000
16	Tanjungrusa	15.029.943	6.268.118	21.298.061	21.298.000
17	Mentigi	15.029.943	4.351.446	19.381.389	19.381.000
18	Pulau Seliu	15.029.943	3.153.525	18.183.468	18.183.000
19	Pulau Sumedang	15.029.943	1.626.179	16.656.122	16.657.000
20	Gunung Riting	15.029.943	4.108.867	19.138.810	19.139.000
21	Padang Kandis	15.029.943	3.821.366	18.851.309	18.851.000
22	Selat Nasik	15.029.943	6.980.881	22.010.824	22.011.000
23	Petaling	15.029.943	1.964.589	16.994.532	16.995.000
24	Suak Gual	15.029.943	2.728.264	17.758.207	17.758.000
25	Pulau Gersik	15.029.943	6.663.432	21.693.375	21.693.000
26	Sijuk	15.029.943	9.391.695	24.421.638	24.422.000
27	Batu Itam	15.029.943	7.807.446	22.837.389	22.837.000
28	Terong	15.029.943	8.265.650	23.295.593	23.296.000
29	Air Seruk	15.029.943	18.115.550	33.145.493	33.146.000
30	Tanjung Binga	15.029.943	19.289.512	34.319.455	34.319.000
31	Air Selumar	15.029.943	10.002.635	25.032.578	25.033.000
32	Sungai Padang	15.029.943	7.127.626	22.157.569	22.158.000
33	Keciput	15.029.943	7.819.425	22.849.368	22.849.000
34	Pelepak Pute	15.029.943	5.803.924	20.833.867	20.834.000
35	Tanjong Tinggi	15.029.943	3.363.161	18.393.104	18.393.000
36	Badau	15.029.943	10.568.652	25.598.595	25.599.000
37	Air Batu Buding	15.029.943	4.453.269	19.483.212	19.483.000
38	Sungai Samak	15.029.943	7.142.600	22.172.543	22.173.000
39	Kacang Butor	15.029.943	7.948.201	22.978.144	22.978.000
40	Cerucuk	15.029.943	6.145.331	21.175.274	21.175.000
41	Pegantungan	15.029.943	6.031.529	21.061.472	21.061.000
42	Ibul	15.029.943	4.010.038	19.039.981	19.040.000
TOTAL		**631.257.600**	**420.838.400**	**1.052.096.000**	**1.052.096.000**

Rincian perhitungan masing-masing Desa mengacu kepada PMK Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Belitung dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja program Administrasi Pemerintahan Desa antara lain:

- Terbitnya Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, pasal 30 menyebutkan perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat.
- Memiliki profil desa 2 tahun terakhir.
- Memiliki peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa
- Tersedianya SDM sebagai operator aplikasi Prodeskel dan Epdeskel di tingkat kabupaten yang melakukan pemantauan melalui aplikasi dan melakukan pembinaan ke desa/kelurahan
- Tersedianya anggaran untuk melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala ke desa.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian Administrasi Pemerintahan Desa adalah:

1. Pemahaman terkait data dasar keluarga, potensi desa kelurahan dan tingkat perkembangan desa/kelurahan yang belum optimal dari operator profil desa/ kelurahan serta pokja profil desa/ Kelurahan
2. Sering terjadinya Penggantian operator operator profil desa/ kelurahan serta pokja profil desa/ Kelurahan

Hal yang menjadi faktor pendorong tercapai program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah:

1. Ketersediaan Anggaran untuk operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui APBDES di masing – masing desa.
2. Tersedianya dukungan anggaran untuk peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa.

Hal-hal yang mennjadi faktor penghambat pencapaian indikator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat adalah:

1. Kurangnya kesadaran dari Pemerintah Desa terkait pentingnya peran Lembaga kemasyarakatan Desa dalam proses pembangunan di desa meskipun telah dilakukan pembinaan.
2. Kurangnya fasilitasi dari Pemerintah Desa terkait pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta pendayagunaannya.
3. Banyaknya jenis lembaga kemasyarakatan desa yang ada di desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu), belum lagi adanya kelompok masyarakat lain seperti pokdarwis, gapoktan, satlinmas, kelompok nelayan, dan lain lain sesuai dengan kepentingannya, dimana secara keseluruhan lembaga tersebut membutuhkan fasilitasi dan perhatian dari Pemerintah Desa.

Tabel 2.49
Realisasi Keuangan program penunjang sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Administrasi Pemerintahan Desa	1.039.694.044,00	1.017.371.898,00	97,85
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.155.621.045,00	738.157.427,00	63,88
3.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	994.663.133,00	925.927.767,00	93,09

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan persentase realisasi anggaran sasaran strategis 84,06% dan persentase rata-rata capaian program sebesar 84,94%, maka terdapat efektifitas dan efesiensi 15,94%.

2.3.2.2 TUJUAN 2 :Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	2023			Kategori	Target Akhir RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	--	BB	BB	100	SB	BB

Berdasar hasil (nilai) evaluasi eksternal yang disampaikan KemenPANRB kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui portal rb nasional dengan alamat https://portalrb.menpan.go.id/ tanggal 06 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung mendapat nilai indeks RB 75,14 dengan predikat “BB”. Sedangkan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung Tahun 2022 Oleh KemenPANRB adalah 57,71 dengan predikat “CC”, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 17,43 poin.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 dan 2023.

Tabel 2.51
Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
1	2019	40,20
2	2020	53,94
3	2021	54,62
4	2022	57,71
5	2023	75,14

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023.

Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	**CC**	**>50-60**	**Cukup (memadai), perlu banyak perbaikanyang tidak mendasar**
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikandan perubahan yang sangat mendasar.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung pada 8 (delapan) area perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi KemenPANRB 2019	
			Nilai	%
A.	Pengungkit/Proses			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	0,70	14
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	0,41	8,20
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	0,38	6,33
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	1,09	21,80
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	4,27	28,47
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,66	27,67
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	1,65	13,75
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	1,83	30,50
	Total Komponen Pengungkit/Proses	60,00	11,99	19,98
B.	Hasil			
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)	20,00	7,04	35,20
2.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN (10)	10,00	4,27	42,70
3.	Kualitas Pelayanan Publik (10)	10,00	6,20	62
	Total Komponen Hasil	40,00	28,21	70,53
	Indeks Reformasi Birokrasi	**100,00**	**40,20**	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil Evaluasi KemenPANRB 2020		Hasil Evaluasi KemenPANRB 2021		Hasil Evaluasi KemenPANRB 2022	
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A.	**Komponen Pengungkit**							
I	Pemenuhan	20,00	9,03	45,15	9,14	45,70	9,49	47,3
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,86	48,60	5,45	54,50	6,46	64,6
III	Reform	30,00	8,55	28,50	8,89	29,63	9,85	32,83
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**22,44**	**37,40**	**23,48**	**39,13**	**25,81**	**43,02**
B	**Komponen Hasil**							
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	5,65	56,50	7,20	72,0	7,27	72,7
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,48	94,80	8,57	85,7	9,14	91,4
3.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,73	97,30	8,61	86,10	8,55	85,5
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,65	66,50	6,76	67,60	6,94	69,4
Total Komponen Hasil		**40,00**	**31,50**	**78,75**	**31,14**	**77,85**	**31,90**	**79,75**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		**100,00**	**53,94**		**54,62**		**57,71**	

Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung meningkat sebanyak 3,09 point pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 yaitu 0,68 point, namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 peningkatan tertinggi diperoleh 13,74 poin pada komponen pengungkit dan hasil. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya terutama pada Komponen Pengungkit yaitu pada area pemenuhan, hasil antara, dan reform dari area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun Hasil Antara Area Perubahan Tahun 2020 s.d 2022 didapatkan dari masing-masing *Leading Sector* antara lain:

No	Hasil Antara	Skala	Hasil Evaluasi KemenPANRB 2020		Hasil Evaluasi KemenPANRB 2021		Hasil Evaluasi KemenPANRB 2022		Sumber Data
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	58,21 (Cukup)	58,21	58,21 (Cukup)	58,21	48,57	48,57	Arsip Nasional RI
2	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0-100	30 (Kurang)	30,00	63,50 (Cukup)	63,50	60,30	60,30	LKPP Republik Indonesia
3	Sistem Merit	0-400	132.5 (Buruk)	33,13	132.5 (Buruk)	33,13	-	-	Komisi Aparatur Sipil Negara
4	ASN Profesional	0-100	61 (Rendah)	61,00	59,44 (Sangat Rendah)	59,44	58,07	58,07	BKN
5	Maturitas SPIP	0-5	2,3	46,00	2	40,00	3	60	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	2	40,00	2	40,00	3	60	BPKP
7	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	72,11	72,11	87,74	87,74	84,32	84,32	Ombudsman RI
8	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	-	-	2,40 (Cukup)	48,00	3,02	60,4	Kementerian PANRB
9	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	-	3,09	61,80	3,57	71,4	Kementerian PANRB

Secara Umum, Indeks hasil antara Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan, seperti pada indeks SPBE dan indeks kualitas pelayanan publik. Namun, hal tersebut tidak signifikan dikarenakan juga terdapat 4 indeks hasil antara yang mengalami penurunan, diantaranya indeks sistem merit yang tidak diukur di tahun 2022, indeks profesionalitas ASN, indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan indeks kualitas pengelolaan arsip. Sehingga masih diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks hasil antara.

Komponen hasil antara lain:

Terkait komponen hasil, menunjukan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Belitung memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai				Sumber Data
			2019	2020	2021	2022	
1	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	52,14	60,03	60,90	60,98	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100			85,73	91,40	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100			86,10	85,53	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100			81,92	83,61	SPI Internal oleh KPK

Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung dikoordinasikan oleh Tim yang ditetapkan sejak tahun 2018 dan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan pejabat ataupun perubahan organisasi pada organisasi perangkat daerah. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagai Ketua adalah Bupati Belitung dan Wakil Ketua adalah Wakil Bupati Belitung, Sekretaris oleh Sekretaris Daerah dengan aggota timterdiri dari unsur Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. Sedangkan Tim Pelaksana diketuai Sekretaris Daerah dan beranggotakan Bagian pada Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Belitung tentang Road Map Refomasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Untuk Tahap II Road Map Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokarasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023.

Namun dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2023 telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024, sebagai bagian dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di kancah internasional, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2023 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023. Berikut hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023 :

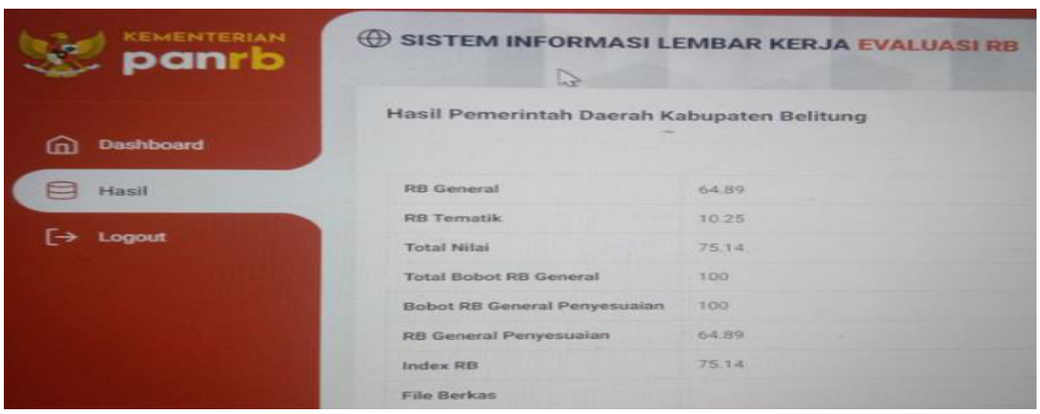

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.88	1.88
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4.39
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyderhanaan Struktur Organisasi	2	99.62	1.99
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyderhanaan Birokrasi	2	2	0.8
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.2	2.56
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	1.5	1.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63.52	2.54
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	1	0.5
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	93.22	2.33
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	3	1.5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5		
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	45.61	1.14

13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	2.12	1.06
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	72.4	1.81
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252.5	2.46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.89	1.17
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	88.87	1.33
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.11	5.6
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1.96
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57.14	2.9
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80.1	3.2
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	61.6	2.46
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76.61	7.66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89.33	7.15
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.28	0.28
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.28	0.28
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4		
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4	0.4	0.4
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0.4	0.27	0.27
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	54.61	0.23
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6		
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6		
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	100	0.42
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6		
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.61	1.61
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3		
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.8	2.8
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2.46	2.46

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general dan menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik.

Faktor Pendukung :

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat :

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab bersama segenap elemen pemerintahan.

Studi Tiru Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung ke Kota Bandung, Agustus 2023

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks indikator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks yang masih dinilai buruk. Karena Secara Umum, indeks indikator penilaian Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Perbaikan dalam strategi penyusunan kegiatan dalam rencana aksi juga perlu dilakukkan agar relevan untuk mencapai target sasaran dalam kegiatan utama. Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 21 kegiatan utama telah menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal baik dalam rb general maupun dalam rb tematik.

Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 bersama Kementerian PAN RB

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Sasaran 5 Terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah
	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur
	Sasaran 7 Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

SASARAN 5 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran "Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel" merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023. Capaian kinerja tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Opini BPK	Skala	WDP	WTP	n/a	-	-	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	CC	BB	B	90,73	Baik	BB

(*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Bellitung juga belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target BB di dapatkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2023 yaitu B dengan nilai 63,52 dengan capaian kinerja sebesar 90,73%.

Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2022 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keungan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2023:

Tabel 2.54
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP
2023	n/a*

(*) masih menunggu hasil audit BPK RI

Penerimaan Penghargaan atas Opini BPK

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 12 Mei 2023. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; 2) Meningkatkan tata kelola aset dan pelaporan keuangan daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan 3) Menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengeleloaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemasangan Plank Kepemilikan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta langkah upaya yang kuat dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan Faktor penghambat capaian kinerja adalah perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terus terjadi, dan juga transisi peralihan sistem informasi keuangan dari SIMDA ke SIPD. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, akan melakukan :

1. Meningkatkan sumber daya manusia terkait barang milik daerah.
2. Optimalisasi sumber daya yang ada melalui kerja sama antar bidang.
3. Penyesuaian tahapan pelaksanaan dengan tahapan perencanaan yang disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya.

Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.55
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Belitung

KOMPONEN	BOBOT	2019	% kinerja komponen terhadap bobot	2020	% kinerja komponen terhadap bobot	2021	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	35	18.83	53.8	22.17	63.34	22.46	64.17
Pengukuran Kinerja	20	11.00	55	12.76	63.80	12.76	63.80
Pelaporan Kinerja	15	7.88	52.53	9.72	64.80	9.80	65.33
Evaluasi Kinerja	10	4.53	45.3	4.53	45.30	4.63	46.30
Capaian Kinerja	20	9.90	49.5	10.85	54.25	11.03	55.15
Total	**100**	**52.14**		**60.03**		**60.90**	
Kategori		**CC**		**B**		**B**	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2024

KOMPONEN	BOBOT	2022	% kinerja komponen terhadap bobot	2023	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	21.68	72.27	22.40	74.67
Pengukuran Kinerja	30	15.26	50.87	16.16	53.87
Pelaporan Kinerja	15	9.84	65.60	10.25	68.33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.20	56.80	14.71	58.84
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**60.98**		**63.52**	
Kategori		**B**		**B**	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2024

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 63.52, dengan kategori B (Baik). Tahun 2022 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2023 sebesar 2,54 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level organisasi perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja. Pimpinan memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 yang tergambar dalam Cascading Kinerja, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja. Seluruh Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap OPD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

Dokumentasi Bimbingan Teknis SAKIP untuk OPD di Lingkungan Pemkab Belitung bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Pelaksanaan Bimbingan Teknis mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap seluruh Kepala OPD beserta staf perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan melaksanakan Sosialisasi SAKIP bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sosialisasi dilanjutkan juga asistensi atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023. Serta asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 bersama OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dokumentasi sosialisasi atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

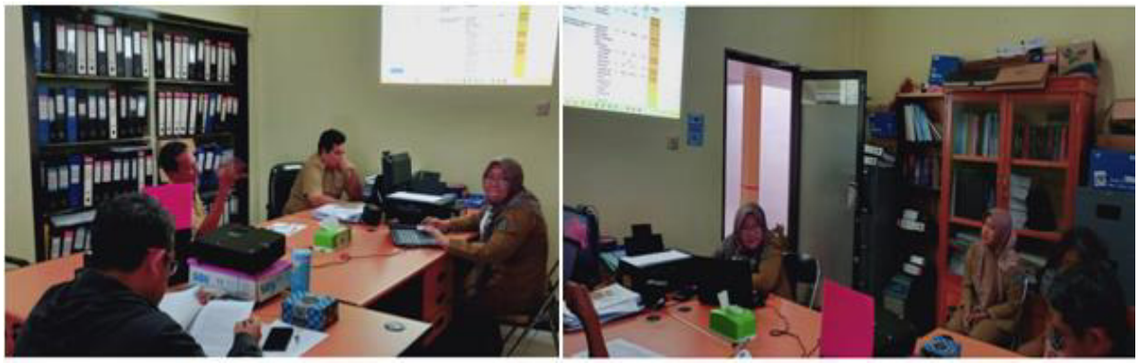

Dokumentasi Asistensi Penyusunan Laporan Kineria Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

Dari data di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang merupakah hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya.

Dokumentasi Rapat Penyampaian Catatan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 bersama Tim Evaluator Kementerian PAN RB

Namun upaya pencapaian kinerja Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP , Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP hal ini ditunjukan dengan monitoring dan evaluasi melalui rapat pimpinan triwulanan antara Bupati dan Kepala OPD diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu: meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Adapun arah kebijakan dalam strategi ini adalah Menerapkan *Sistem Informasi* Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk sisten informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, hal ini telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung sejak tahun 2020.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2022 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah antara lain program perencanaan pembangunan daerah, dengan upaya sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten, pengendalian dan penyusunan RKPD, Penyusunan RKPD, pengelolaan aplikasi e-planning, penyusunan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung, sosialisasi perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian dan evaluasi program inovasi daerah.

Selanjutnya Pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui strategi, yaitu meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini diarahkan pada pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah, serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai upaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Dokumentasi Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP , Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP.

Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

- Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pangkalpinang terkait pengelolaan barang milik daerah;

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:

- belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;

- belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

- integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
- sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
- pelayanan publik yang masih kurang;
- terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik;

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tabel 2.56
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih , Transparan dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	Pengelolaan keuangan daerah	112.698.234.866,00	109.328.078.267,00	97,01
2	Pengelolaan barang milik daerah	1.749.300.510,00	665.225.755,00	38,03
3	Pengelolaan pedapatan daerah	2.246.458.815,00	857.920.510,00	38,19
4	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.066.551.520,00	1.039.541.749,00	97,47
5	Koordinasi dan sinkronisasi perenanaan pembangunan daerah	133.466.293,00	118.241.340,00	88.59
6	Penyelenggaraan pengawasan	265.332.660,00	161.605.923,00	60,91
7	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.997.823.271,00	15.382.818.178,00	96,16

Sehingga untuk Sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel masih menunggu hasil Audit dari BPK RI, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,08% dan persentase rata-rata capaian program 73,76% maka terdapat efesiensi 4,92%.

SASARAN 6 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “76”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Indeks Profesional ASN	Skala	62	76	n.a	-	-	76

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional, yaitu Indeks Profesional ASN tahun 2023 belum dirilis resmi oleh BKN RI.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
Kinerja, dengan nilai maksimal 30
Disiplin, dengan nilai maksimal 5
Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang peling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. Indikator yang digunakan adalah :

Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2022 berdasarkan perhitungan Badan Kepegawaian Negara adalah **71,56 (sedang)** Hasil IP ASN Tahun 2022 sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 470/B-BH.02/SD/KR.VII/2023 tanggal 18 Oktober 2023 hal : Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi Daerah Wilayah Kerja Kanreg VII BKN Tahun 2022.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang

Penjelasan:

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 21,04 dari 25; Kompetensi 21,14 dari 40; Kinerja 24,38 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5.

Tabel 2.58
Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2019-2022

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2019	12,25	33,65	25,07	4,99	75,99	Sedang	Hasil Penilaian Mandiri
2020	12,18	30,62	25,06	4,99	72,86	Sedang	Hasil Penilaian Mandiri
2021	12,69	18,52	23,23	5,00	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2024

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 atara lain : Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan formasi kebutuhan instansi.

Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 93 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam : pengelolaan sistem Manajemen Talenta PNS; perencanaan dan pengembangan karier pegawai berdasarkan Sistem Merit; pelaksanaan assessment pegawai; peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan assessment dan talenta pegawai; dan penyusunan talent pool berdasarkan hasil assessment dan kinerja PNS sebagai dasar Rencana Suksesi pengisian jabatan PNS.

Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS dan untuk memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau tim pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan PNS yang bersangkutan. Diharapkan Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing unit kerja, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Salah satu penyebab belum tercapainya target IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2022 kemarin adalah masih rendahnya nilai dimensi Kompetensi dimana dari nilai bobot maksimal 40, nilai kompetensi yang diperoleh Kabupaten Belitung baru mencapai 21,14. Selain itu diketahui bahwa kompetensi pegawai Pemkab Belitung cukup rendah karena masih ada 69,12% atau sekitar 235 pejabat struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan PKN, PKA dan PKP. Selain itu terbatasnya sarana dan prasrana pendukung kediklatan, Ruang CAT dan fasilitasi yang kurang

memadai serta masih adanya kesenjangan antara syarat jabatan dan standar kompetensim menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja.

Rekapitulasi Pejabat Struktural yang Belum Mengikuti Diklat Penjenjangan Tahun 2023

Tahun	Yang Belum Mengikuti Diklat			Jumlah Total
	PIM. II/PKN	PIM. III/PKA	PIM.IV/PKP	
2023	22	78	135	235

Sumber: Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Kab. Belitung

Rekapitulasi Pejabat Struktural Menurut Jenis Kelamin dan Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	0	28	96	109	233
2	Perempuan	0	3	39	65	107
	Jumlah	0	31	135	174	340

Sumber: Simpeg Kab. Belitung

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 :

Berkoordinasi dengan OPD untuk:

- Memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN, antara lain melalui: Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Workshop, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Seminar, Magang, In House Training;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM.
- Melaksanakan Sosialisasi atau seminar online kepegawian dengan target peserta massal.

Pemerintah Kabupaten Belitung raih penghargaan pada Anugerah Meritokrasi 2023

Pemerintah Kabupaten Belitung meraih dua kategori penghargaan sekaligus pada Anugerah Meritokrasi 2023. Kedua kategori tersebut yaitu pada penerapan sistem merit dengan nilai 252,5 atau berpredikat baik, serta indeks kualitas pengisian JPT dengan nilai 87,16 atau berpredikat baik.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

Tabel 2.59
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kepegawaian daerah	3.290.234.087,00	2.638.930.189,00	80,20
2.	Pengembangan sumber daya manusia	1.206.883.300,00	1.014.778.564,00	84,08

Sehingga untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional dengan rata-rata capaian 81,25% dengan persentase per sasaran 81,25% maka terdapat efesiensi 18,75%.

SASARAN 7 : Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas

Capaian kinerja sasaran "Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas" merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target "88". Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Skala	76,81	88	88,28	100,32	SB	88

Realisasi kinerja indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat berdasarkan tabel di atas telah belum mencapai target yang ditetapkan, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,32%.

Berikut nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung dari Tahun 2019- 2023 :

Tabel 2.61
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

TAHUN	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat
2019	82,54
2020	84,84
2021	84,80
2022	86,88
2023	88,28

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Belitung 2023

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelanggaraan Pelayanan Publik. Mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 48 Perangkat Daerah yang terdiri dari 20 Dinas, 6 Badan, 5 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pelayanan. Dari 48 (empat puluh delapan) OPD/UPP pelaksana SKM hanya 46 (empat puluh enam) yang dapat di lakukan perhitungan dari hasil pelaksanaan SKM. Sedangkan 2 (dua) OPD lainnya tidak dapat dilakukan perhitungan hasil pelaksanaan SKM dikarenakan jumlah responden yang masih sangat tidak mencukupi dari target. 2 (dua) OPD tersebut adalah Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan berlangsung pada bulan januari – november 2023. Pelaksanaan survey dilakukan secara menyebarkan lembaran kuesioner dan juga secara online melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat diakses melalui link http://skm.belitung.go.id/ .

Dari hasil survei didapatkan kesimpulan secara menyeluruh bahwa terdapat 24 OPD/UPP yang memperoleh nilai diatas 88,31 (Sangat Baik), 22 OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 76,61-88,30 (Baik) dan tidak ada OPD/UPP yang memperoleh nilai direntang 65-76,60 (Kurang Baik). Nilai tertinggi diraih oleh Dinas Kesehatan dengan Nilai 98,71 sedangkan yang terendah diraih oleh Kecamatan Selat Nasik dengan nilai 81,95.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan IKM Tahun 2022 dengan nilai 86,88.

Tabel 2.62
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per OPD
Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	IKM 2019	IKM 2020	IKM 2021	IKM 2022	IKM 2023
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	87.07	87.18	83.15	85.64	86.85
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77.39	80.43	77.50	79.22	86.12
3	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	81.85	82.82	86.63	89.01	89.39
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.51	82.48	82.59	86.82	86.43
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	85.75	86.05	90.16	89.74	92.55
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	80.30	85.07	88.97	92.56	88.87
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.49	85.88	84.42	86.98	89.22
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	82.25	82.93	81.13	86.77	89.26
9	Dinas Kesehatan	84.65	85.01	81.08	96.57	98.71
10	Dinas Pariwisata	-	85.21	78.80	87.46	84.61
11	Dinas Perikanan	-	92.6	93.36	91.25	97.62
12	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	82.6	84.69	81.89	85.40	86.67
13	RSUD dr. H. Marsidi Judono	79.71	82.59	84.34	85.96	88.22
14	Kecamatan Tanjungpandan	81.47	83.99	84.41	85.48	86.54
15	Kecamatan Badau	90.41	90.14	93.87	92.18	91.45
16	Kecamatan Sijuk	83.82	87.32	86.65	78.63	88.10
17	Kecamatan Membalong	81.47	90.28	85.35	83.84	89.32
18	Kecamatan Selat Nasik	95.61	79.14	79.14	85.90	82.49
19	Kelurahan Kota	83.93	94.72	83.64	87.05	88.71
20	Kelurahan Parit	82.52	95.68	83.99	88.06	88.96
21	Kelurahan Kampong Damai	83.65	81.84	82.67	83.65	82.37
22	Kelurahan Paal Satu	81.21	85.34	88.32	84.53	85.34
23	Kelurahan Pangkal Lalang	82.02	86.76	81.79	84.31	84.74
24	Kelurahan Tanjung Pendam	83.91	80.48	81.72	80.25	85.29
25	Kelurahan Lesung Batang	79.79	86.9	86.54	88.80	88.41
26	Puskesmas Tanjungpandan	81.42	86.8	84.34	82.21	82.21
27	Puskesmas Air Saga	81.04	83.81	83.17	83.74	82.34
28	Puskesmas Perawas	83.18	84.46	82.40	86.43	89.84
29	Puskesmas Sijuk	77.24	81.47	81.42	89.31	90.45
30	Puskesmas Badau	82.94	86.56	86.24	90.87	88.03
31	Puskesmas Membalong	80.43	80.16	91.35	87.71	98.98
32	Puskesmas Selat Nasik	81.89	83.64	83.39	81.42	81.95
33	Puskesmas Tanjungbinga	79.01	88.75	90.77	90.08	85.24
34	Puskesmas Simpang Rusa	81.6	79.98	79.25	82.38	89.94
35	Sekretariat Daerah	-	90.09	90.03	92.91	93.32
36	Sekretariat DPRD	-	83.73	82.69	87.62	88.91
37	Inspektorat	-	88.43	85.62	86.14	-
38	Dinas Perhubungan	-	75.43	84.58	87.29	88.35
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	81.59	81.08	90.10	95.04
40	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	76.55	81.89	85.98	88.91
41	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	80.89	81.52	89.30	84.05
42	Dinas Lingkungan Hidup	-	78.4	89	84.25	85.64
43	Satuan Polisi dan Pamong Praja	-	81.95	81.93	80.21	87.06
44	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	84.15	86.09	86.97	88.51
45	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	86.41	87.12	88.97	89.12
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	89.89	81.86	93.07	-

47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	98.51	96.53	92.85	91.05
48	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	73.33	86.77	84.28	82.73
RATA – RATA		**76.81**	**82.54**	**84.84**	**86.88**	**88.28**

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung 2023

Pencapaian kinerja sasaran 9 melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu: 1) Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik; 2) Meningkatkan keterbukaan informasi publik; 3) Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 4) Meningkatkan pelayanan publik; 5) Meningkatkan pembinaan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa; 6) Menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik; 7)Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat; 8) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan, 9.) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 10). Meningkatkan peran CSR dalam pembangunan, 11) Meningkatkan pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen 12) Menjamin ketersediaan dan pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Meningkatnya pelayanan publik berbasis TIK diukur dengan menggunakan formulasi hitungan komponen IKU (Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas) yaitu :

- Terintegrasinya sistem informasi
- Diseminasi informasi
- Pemanfaatan data
- Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN

☞ Terintegrasinya sistem informasi diukur dengan perbandingan antara Jumlah sistem informasi yang terintegrasi sebanyak 47 sistem sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat dari tahun sebelumnya yang terelasisasi 47 sistem.

Tabel 2.63
Realisasi Terintegrasi Sistem Informasi Tahun 2023

NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
I	LAYANAN PUBLIK				
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://cloud.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://aplikasi.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https://sipmas.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
5	Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan	https://besadu.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
6	Layanan pendaftaran online (Simino)	https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/pendaftaran-online	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
7	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptspp.belitung.go.id	1	1	DPMPTSPP
8	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	https://bekawan.belitung.go.id	1	1	Disdukcapil
9	Sistem Informasi Bantuan Sosial Kemanusiaan	https://begalor.belitung.go.id/	1	1	DSPPA
10	Penerimaan Peserta Didik Baru	https://ppdb.belitung.go.id/	1	1	Dinas Dikbud
11	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitungkab.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan	https://petaling.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
13	Besadu Rakyat Seputar Lingkungan	https://berasan.belitung.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Aplikasi Persetujuan Lingkungan secara Online	https://pelilean.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Survey Kepuasan Masyarakat	http://skm.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
16	Belitung Smart City	Android	1	1	Diskominfo
II.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM				

NO	APLIKASI	SUB DOMAIN	STATUS	INTEGRASI	KET
1	Belitung Satu Data	https://data.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Aplikasi Data Terkini	https://adat.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Whistle Blowing System	http://wbs.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Belitung	http://fllaj.belitung.go.id	1	1	Dishub
5	e-office Kabupaten Belitung	https://srikandi.arsip.go.id/	1	1	DPKD
6	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	http://lpse.belitung.go.id/	1	1	Bagian PBJ Setda
7	Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Program Pembangunan	http://sipelempang.belitung.go.id/	1	1	Bagian Admistrasi Pembangunan
8	Sistem Informasi Keuangan Desa	https://siskeudes.belitung.go.id	1	1	DPMKBPMD
9	Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	https://siswaskeudes.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
10	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Belitung	https://simpai.belitung.go.id/	1	1	Bappeda
11	Sistem Informasi Tukang Berkarya	https://sikaya.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
12	Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite	https://sugak.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
13	Sistem Informasi Rapat	https://sirapat.belitung.go.id/	1	1	Diskominfo
III.	ADMINISTRASI LEGISLASI				
1	JDIH Kabupaten Belitung	http://jdih.belitung.go.id	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	http://jdih.dprd.belitung.go.id	1	0	Sekretariat DPRD
IV.	MANAJEMEN PEMBANGUNAN				
1	e-Planning	https://sipd.kemendagri.go.id	1	1	Bappeda
2	e-Monev	https://monev.belitung.go.id	1	1	Bappeda
V.	SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH				
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPRD
VI.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN				
1	SIMPEG	http://simpeg.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
2	e-SKP	http://skp.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi PNS	http://e-kinerja.belitung.go.id/absen	1	1	BKPSDM
4	e-TPP PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/v3/	1	1	BKPSDM
5	e-Arsip	http://earsip.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	https://aktivitas.belitung.go.id/v2/	1	1	BKPSDM
7	e-Absensi Non PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/absen/nonpns/	1	1	BKPSDM
8	e-TPP PPPK	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/pppk/	1	1	BKPSDM
9	e-Lapkin	https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/	1	1	BKPSDM
10	e-KGB	http://kgb.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
		JUMLAH	**47**	**47**	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2023

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1) Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan berbagai pakai berupa pengembangan aplikasi yang dibutuhkan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dan aplikasi pelayanan publik yang sudah saling terintegrasi dengan layanan publik lainnya.

2) Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur berupa pembangunan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah.
3) Interopabilitas dan teknologi berupa integrasi data dan peremajaan perangkat Teknologi Informasi.
4) Tata kelola arsitektur dan peta rencana yang mendukung keberlangsungan implementasi layanan teknologi informasi.
5) Sosialisasi, Pelatihan dan Workshop terkait Teknologi Informasi.

Untuk mempertahankan dan meningkat kinerja tahun selanjutnya akan melakukan:

1) Peningkatan koordinasi dengan OPD, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
2) Pembangunan kerjasama dengan instansi lain terkait implementasi SPBE.
3) Melakukan perbaikan tatakelola Ekosistem Kota Cerdas dengan menyusun dokumen revisi *Masterplan Smart City.*
4) Peningkatan kapasitas Jaringan Intra Pemerintah

☞ Diseminasi Informasi diukur dengan membandingkan antara jumlah media diseminasi yang aktif dengan jumlah media diseminasi yang dimiliki. Diseminasi informasi publik diselenggarakan melalui 5 media yang aktif. Adapun lima media diseminasi tersebut terdiri dari :

① Media website, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung mengelola tiga website antara lain :

Tabel 2.64
Daftar Media Website yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023

Alamat / Url	Keterangan
https://kominfo.belitung.go.id/	Website Dinas Kominfo
https://portal.belitung.go.id/	Website Pemkab Belitung
https://mediacenter.belitung.go.id/	Website Media Center Dinas Kominfo
https://ppid.belitung.go.id/	Website PPID Kabupaten Belitung
https://besadu.belitung.go.id/	Website Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan Kabupaten Belitung

② Media sosial, maraknya penggunaan media sosial saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung menggunakan beberapa media sosial yang dijadikan sebagai sarana penyampaian diseminasi informasi kepada masyarakat, antara lain :

Tabel 2.65
Daftar Media Sosial yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2023

Jenis Media Sosial	Alamat / Url
Facebook	https://www.facebook.com/kominfobelitung
Instagram	https://www.instagram.com/kominfobelitung/
Twiter	https://twitter.com/kominfobelitung
Youtube	https://www.youtube.com/channel/
Tiktok	Kominfo Belitung

③ Media penyiaran radio, penyelenggaraan diseminasi ini dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Sampai saat ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan di LPPL Radio Suara Praja dengan berkerjasama dengan berbagai pihak terkait sebagai bentuk penyampaian informasi ke masyarakat, diantaranya :

Tabel 2.66
Daftar Talkshow di LPPL Radio Suara Praja Tahun 2023

NO	NAMA INSTANSI	PEMBICARA	TOPIK
1.	UMKM Mandakini	Manda (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
2.	Ketua UMKM Jakute (Jajak Kute)	Ely (Ketua)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
3.	Persagi Kab. Belitung	Annisa & Audylya	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Diet Pada Hipertensi
4.	Departemen Biologi Dosen Biologi IPB Bogor	Puji Rianti & M. Naufal	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Sustainable And Integrated Tourism Based on Biological Resources in Belitung Island, Indonesia

5.	Sanggar Dian Praja	Wiwidiasih (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe
6.	UMKM Simbok Yakini	Nanik Hadi (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
7.	UMKM Jahari 88	Tania (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
8.	TK Aqila	Eka Lizayani (Kepala Sekolah)	Program Acara Pukis (Perempuan Punya Kisah)
9.	Bujang Dayang Belitung Tahun 2022-2023	Floren Citra Valencia & Moh. Firmansyah	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
10.	Wakil 1 Bujang Dayang Belitung Tahun 2022-2023	Agung Aulia Dyvta Noori N	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
11.	Persagi Kab. Belitung	Anis Maulida Henny Nuliza	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Protein Hewan Cegah Stunting
12.	Persagi Kab. Belitung	Ami (Dinkes Kab. Belitung) & Sri (RSUD Marsidi Judono)	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Anemia Gizi Pada Remaja
5.	Sanggar Dian Praja	Wiwidiasih (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe
6.	UMKM Simbok Yakini	Nanik Hadi (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
7.	UMKM Jahari 88	Tania (Owner)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
8.	TK Aqila	Eka Lizayani (Kepala Sekolah)	Program Acara Pukis (Perempuan Punya Kisah)
9.	Bujang Dayang Belitung Tahun 2022-2023	Floren Citra Valencia & Moh. Firmansyah	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
10.	Wakil 1 Bujang Dayang Belitung Tahun 2022-2023	Agung Aulia Dyvta Noori N	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
11.	Persagi Kab. Belitung	Anis Maulida Henny Nuliza	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Protein Hewan Cegah Stunting
12.	Persagi Kab. Belitung	Ami (Dinkes Kab. Belitung) & Sri (RSUD Marsidi Judono)	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Anemia Gizi Pada Remaja
13.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini & Ikhwan	Program Acara Besti Modus Smartphone Android
14.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti Csirt (Tim Tanggap Insiden)
15.	UMKM Belfie Cookies	Belfie	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
16.	Bupati Belitung Bagian Perekonomian Setda Kab Belitung	H. Sahani Saleh, S.Sos	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Perkembangan Inflasi Kab. Belitung
17.	Pertamina Patra Niaga	Hizkia Reiner Bontong	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Penyaluran Bbm Subsidi
18.	Diskominfo Kab Belitung	Fitrohrozi	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong) Candu & Kemat
19.	Guru SMKN 1 Tanjungpandan	Tedi Hediana	Program Acara Jalan Cerite (Sep Karier,Pengalaman Dll) Berkiprah 13 Tahun Di Selat Nasik Sebagai Guru SMK
20.	Diskominfo Kab Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Gov Csirt)
21.	UMKM Es Coklat Ruti Cecal Dari Filosofi Bahagie	Dedi	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
22.	Persagi Kab Belitung	Feti Aprilia Inne Larasati	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Gizi pada Penderita Hipertensi
23.	Wakil II Bujang Dayang Belitung Tahun 2022-2023	Rafhael Aprileondi & Regita Aprilia Ramesti	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
24.	Buday Kategori Fhotogenik Kab. Belitung Thn 2022-2023	Sefiola Bannati Khairani & Chelsea Saputra. L	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
25.	Ibu Dewan	Puji Astuti	Program Acara Pukis (Perempuan Punya Kisah)
26.	UMKM Julia Brownies	Yanti	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
27.	Guru SMAN 2 Tanjungpandan	Ilfa	Program Acara Jalan Cerite
28.	Diskominfo Kab. Belitung	Upik Sumarti	Program Inovatif Besadu
29.	Papdi Cab. Belitung	Dr. Dwi Wirastuti,M.Sc., Sppd, Subsp Gh(K), Finasim	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Gagal Ginjal Kronis
30.	Paud Pelangi Tj Rusa	Ibu Budiarti Usman, Spd	Program Acara Pukis (Perempuan Punya Kisah)
31.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Tanda Tangan Elektronik)
32.	UKM Kupi Tuan Kuase & Gerubak Ichan	Tantowi Thomas & Setiawan	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
33.	Buday Belitung 2022 Favorit	M Garcia & Carissa Muten	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)

34.	Komunitas Nasi Jumat	Miranda Dkk	Program Acara Pukis (Perempuan Punya Kisah)
35.	Buday Belitung 2022 Berbakat	Rosdian Asri Prihatino & Iza Afkarena	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
36.	Satpol PP Kabupaten Belitung	Abdul Sani & Rully Hidayat	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Persiapan Jelang Ramadhan
37.	UMKM Satu Ruang	Eko	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
38.	Ibu Yani Offroad Wanita	Yani	Program Acara Jalan Cerite
39.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Keamanan Siber Indonesia 1)
40.	Dm Miranda	Dila	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
41.	Motor Listrik	Fajar	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
42.	Layanan Jasa	Hardiansyah (Anca)	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
43.	Kabag Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Belitung /Jubir Pemkab Belitung	Dr. Zakina S.Sos,. M.Si	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Perjalanan Karir
44.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Antonio Apriza	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Isu Pemekaran Desa
45.	Bupati Belitung	H. Sahani Saleh, S.Sos	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Pariwisata Belitong
46.	Guru SMPN 2 Badau	Susan, Ayu & Eka	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Sekolah Adiwiyata
47.	Kepsek dan Guru SMPN 3 Sijuk	Sulianti, Adonia, Dwi Ningsih & Noerdiansyah	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Sekolah Adiwiyata
48.	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Belitung	Fedy Malonda Anwar, SH	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Perkembangan Isu Politik di Kabupaten Belitung
49.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Belitung	Annyta, Sp.Mil	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Event Pariwisata & Geopark
50.	Kabid Lalin Dishub	Suheri	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Analisis Dampak Lalin
51.	Paskibraka Kabupaten Belitung	Julia, Rakha, Riski (Pengibaran Bendera) & Angelina, M. Ares, Wilson (Penurunan Bendera)	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
52.	Buday Favorite 2023	Dio & Delia	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
53.	UMKM Ty-Yo	Ibu Yanti	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
54.	UMKM Bepulin Belitong	Nurul	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
55.	UMKM Hokyland	Heny	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
56.	BNNK Belitung	Dr. Nasrudin	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Perangi Narkoba
57.	Kasat Narkoba Polres Belitung	Akp Anton Sinaga	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Darurat Narkoba
58.	Disdukcapil Kab. Belitung	Dwi	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Pelayanan Disdukcapil
59.	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	Sekretaris Dinas Perikanan Kab Belitung	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Sektor Perikanan
60.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belitung	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Belitung Drs. Soebagio & Kabag Pendidikan Sutawijaya	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Hari Pendidikan Nasional
61.	Diskominfo Kab Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Sim Swap Dan Otp)
62.	Komisi I Dprd Provinsi Babel	Taufik Mardin & Drs. Erwandi A. Rani	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Kunker Komisi I Dprd Provinsi Babel
63.	Kejaksaan Belitung	Kasi Intel	Program Acara K.U.D (Kunjungan Urang Dinas) Jaksa Menyapa
64.	Duta Genre Kabupaten Belitung 2023	Kirana Sheira Safira & Muhammad Bilal Yusuf	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
65.	Duta Genre Kabupaten	Bonar & Nayla	Program Acara Karong

	Belitung 2023 Pasangan Runner Up		(Kanal Remaja Belitong)
66.	Bujang Dayang Belitung 2023	Melvin & Firny	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
67.	Bujang Dayang Belitung Persahabatan 2023	Ghanis & Kemal	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
68.	UMKM Mr. June	Gebri	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
69.	UMKM Batik Kelekak Belitong	Diana	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
70.	UMKM Detumbok Belitong	Hilda Kristi & Eka Rista Priza	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
71.	Komisi Perempuan Remaja Dan Keluarga MUI Belitung	Marlina	Program Acara Jalan Cerite
72.	Dkm Aura	Ayu	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
73.	Dayang Belitung 2023 dan Dayang Belitung Berbakat	Jessica & Elsya Oktavia	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)
74.	Tokopila Belitung	Yudi	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
75.	Ketua Pia Ardhya Garini Cabang 11 Lanud H.A.S Hanandjoeedin Tanjungpandan	Inggrid Rudi Hartono	Program Acara Pukis (Perempuan Punya Kisah)
76.	Diskominfo Kab. Belitung	Fitrohrozi	De Sintak
77.	Diskominfo Kab. Belitung	Fitrohrozi	HJKT 185
78.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Honey Net)
79.	UMKM Bakul Ayyamah	Ayamah	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
80.	UMKM Alam Lestari	Faisal	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
81.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Tips Bermedia Sosial)
82.	UMKM Hokyland	Tara	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
83.	UMKM Ka Ros	Rostiati	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
84.	UMKM Sambal Cha Cha	Caca	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
85.	UMKM Ty-Yo	Tyo	Program Acara Lakse (Ngelakar Kan Pelaku Usahe)
86.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Keamanan Siber)
87.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Ciberbulyying)
88.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Agresi Online)
89.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Mendeteksi Phising)
90.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Judi Online)
91.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Transaksi Mobile Banking)
92.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Digital Parenting)
93.	Diskominfo Kab. Belitung	Isnaini	Program Acara Besti (Pinjol Ilegal)
94.	Dayang Belitung Wakil 1 2023 Bujang Fotogenic 2023	Chelsie Muten & Jean Artha Dewa	Program Acara Karong (Kanal Remaja Belitong)

④ Media luar ruang, untuk pelaksanaan diseminasi media luar ruangan dilaksanakan melalui pemasangan spanduk yang berisikan informasi terkait Covid-19, dan himbauan protokol 4M melalui pengeras suara di kawasan bundaran satam. Media luar ruang dengan materi protokol kesehatan juga disampaikan dengan menggandeng 6 KIM yang ada di beberapa Kecamatan.

- ⑤ Media komunikasi tatap muka, diselenggarakan melalui 2 kegiatan yaitu diseminasi informasi melalui media tradisional dan kegiatan pengembangan dan pembinaan KIM. Kegiatan diseminasi informasi melalui media tradisional yang dilaksanakan di 5 kecamatan, mulai dari Badau, Membalong, Sijuk, Selat Nasik, dan Tanjungpandan. Kegiatan pengembangan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat telah dilakukan di KIM Pelita damai, KIM tanjung lancor, KIM Mendanau, KIM Berita Parit, KIM Sepakat Kembiri, KIM Gurok Geraye, serta melakukan inisasi pembentukan KIM di Desa Seliu. Adapun dokumentasi kunjungan KIM Tanjung Lancor, KIM Liu-liu dan KIM Kembilik sebagai berikut:

Realisasi capaian Diseminasi Informasi ini sama dengan capaian tahun sebelumnya. Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

- Aktivasi media cetak. Menjalin kemitraan dengan wartawan untuk berbagi informasi berdasarkan agenda kegiatan pimpinan daerah dan peliputan lainnya.
- Aktivasi media penyiaran. Indikasi keaktifan didasarkan dengan terselengganya siaran radio. Untuk mengatasi kendala manajemen dilakukan piket siaran.
- Aktivasi media daring. Mempublikasikan hasil liputan di media yang dikelola oleh Diskominfo dan Infopublik (dikelola oleh Kemenkominfo).
- Aktivasi media sosial. Memposting video, infografis dan liputan dalam media facebook dan instagram.
- Aktivasi media luar ruang melalui pemasangan baliho seperti peringatan hari penting.
- Aktivasi dan media tatap muka dengan mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat dan penyelenggaraan pertunjukan rakyat di 5 kecamatan.

Adapun untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan antara lain peningkatan produksi media (konten informasi), memperluas diseminasi informasi dan meningkatkan analisa media.

☞ Pemanfaatan Data

Komponen ini diukur dengan membandingkan jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dengan jumlah data yang tersedia. Pemanfaatan data yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 yaitu sebanyak 622 jenis data meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebanyak 502 jenis data yang tersedia melalui Portal Belitung Satu Data dan seluruh data tersebut telah termanfaatkan seluruhnya. Adapun jenis data yang tersedia adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67
Daftar Pemanfaatan Data Portal Belitung Satu Data Tahun 2023

NO	NAMA DINAS	JUMLAH DATA ASET
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	1
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung	11
3	Inspektorat Kabupaten Belitung	1
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	12
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung	13
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	30
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung	5
8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung	0
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung	15
10	Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung	32
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung	82
12	Dinas Perikanan Kabupaten Belitung	33
13	Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Belitung	11
14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung	8
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	48
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung	52
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	17
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung	33
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung	18
20	Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung	14
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung	47
22	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung	12

NO	NAMA DINAS	JUMLAH DATA ASET
23	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung	14
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung	24
25	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung	7
26	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung	3
27	UPT. RSUD H. Marsidi Judono	2
28	Kecamatan Tanjungpandan	4
29	Kecamatan Membalong	19
30	Kecamatan Sijuk	12
31	Kecamatan Badau	10
32	Kecamatan Selat Nasik	2
33	Instansi Vertikal	30
	TOTAL	**622**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2023

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Melakukan pemutakhiran data pada Portal Belitung Satu Data, dengan mengumpulkan data dari seluruh Perangkat Daerah.
2. Membuat akun admin pada masing-masing Perangkat Daerah, agar data dari Perangkat Daerah langsung diinput oleh masing-masing admin sehingga mempercepat publikasi data.
3. Melaksanakan Penyusunan Metadata kegiatan untuk beberapa Perangkat Daerah (Hasil metadata sebanyak 18 (Delapan Belas) Metadata dari 15 Perangkat Daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan :

1. Perbaikan tata kelola data dengan menerapkan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).
2. Penguatan kelembagaan Forum Satu Data Kabupaten Belitung.
3. Meningkatkan koordinasi ke Produsen Data / Perangkat Daerah, terutama yang belum menyampaikan atau menginput data pada Portal Belitung Satu Data.
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Sekretariat Satu Data Indonesia guna peningkatan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah.
5. Menyelenggarakan dan mengikuti Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi pengelola data baik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Perangkat Daerah.
6. Meningkatkan kualitas data agar memenuhi standar data dan metadata.
7. Mengembangkan Satu Data Spasial dengan membangun Geoportal.

☞ Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang dditerapkan BSSN.

Penilaian Komponen ini diukur dengan Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) dari Badan Siber dan Sandi Nasional(BSSN)

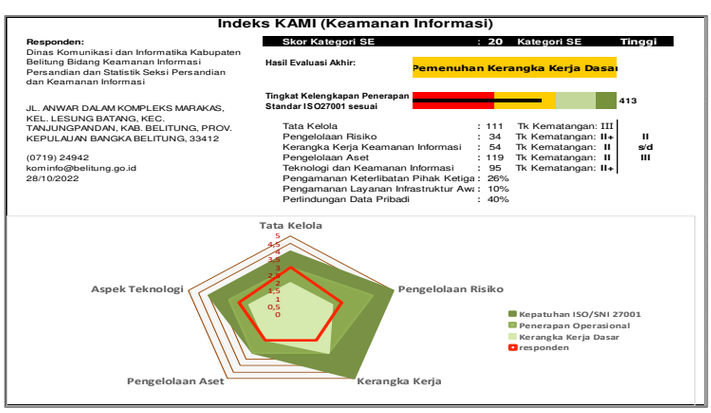

Gambar Hasil Validasi Penilaian Indeks KAMI Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Tingkat Kematangan Keamanan Informasi yang diperoleh dari Assesment Indeks KAMI (Keamanan Informasi) yakni Level II+ dengan Tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001 sesuai Kategori SE

sudah mencapai 413 jumlah nilai per area dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mendapatkan 409 jumlah nilai per area. sedangkan tahun 2020 yang hanya mendapatkan 384 jumlah nilai per area.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

1. Melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung menggunakan instrumen Indeks Keamanan Informasi (KAMI), *Cyber Security Maturity* (CSM) dan Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (Evaluasi Laks Paminfo) oleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan Evaluasi Penilaian Indeks KAMI untuk Persiapan Sertifikasi ISO 27001 di Pemerintah Kabupaten Belitung oleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah.
3. Melaksanakan *Renewal Software* Antivirus dalam hal pengamanan fisik dan non fisik sarana dan prsarana keamanan informasi.
4. Menyusun Keputusan Bupati Belitung tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Belitung (BelitungKab-CSIRT).
5. Melaksanakan Pendaftaran dan Aktivasi Sertifikat Elektronik Staf/Pegawai Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Melaksanakan Literasi Keamanan Informasi melalui media massa Radio Suara Praja.
7. Melaksanakan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung oleh Tim Direktorat Operasi Keamanan Siber Badan Siber dan Sandi Negara.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh :

- Terlaksananya kerjasama dan fasilitasi BSSN guna pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Tersedianya Anggaran untuk operasional pelaksanaan kegiatan maupun untuk pengadaan peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan keamanan informasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan :

1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Peningkatan Kapasitas SDM diantaranya:
   a. Literasi Keamanan Siber.
   b. Workshop, Pelatihan, Sharing Knowledge, Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber, Simulasi Serangan Sosial (Phising).
2) Perbaikan Proses dengan adanya Penguatan Kebijakan Keamanan Informasi, Keamanan Siber dan Persandian melalui:
   a. Menyusun Kebijakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) untuk mendukung terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi (JKS).
   b. Menyusun *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang mencakup *backup* (pencadangan) dan *restoration* (pemulihan) dari data pribadi.
3) Pengelolaan Teknologi
   a. Melakukan *static/dynamic* analysis terkait *source code.*
   b. Manajemen patch dan konfigurasi secara otomatis.
   c. Implementasi pengamanan *mail server* (DMARC).

Pelayanan pengaduan masyarakat atas layanan pemerintah Kabupaten Belitung salah satunya diakomodir melalui Layanan BESADU BELITUNG, jumlah laporan pengaduan pada tahun 2023 yaitu 170 Aduan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 yaitu sebanyak 149 laporan dan tahun 2021 sebanyak 214 laporan.

Tampilan website BESADU BELITONG https://besadu.belitung.go.id/

☞ Arah Kebijakan Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 sebesar 43,54 % diperoleh dari pelaksanaan operasional peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. Realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 28 %

Perkembangan realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2019–2023 dan perbandingan target tahun 2019- 2023 disajikan pada grafik berikut:

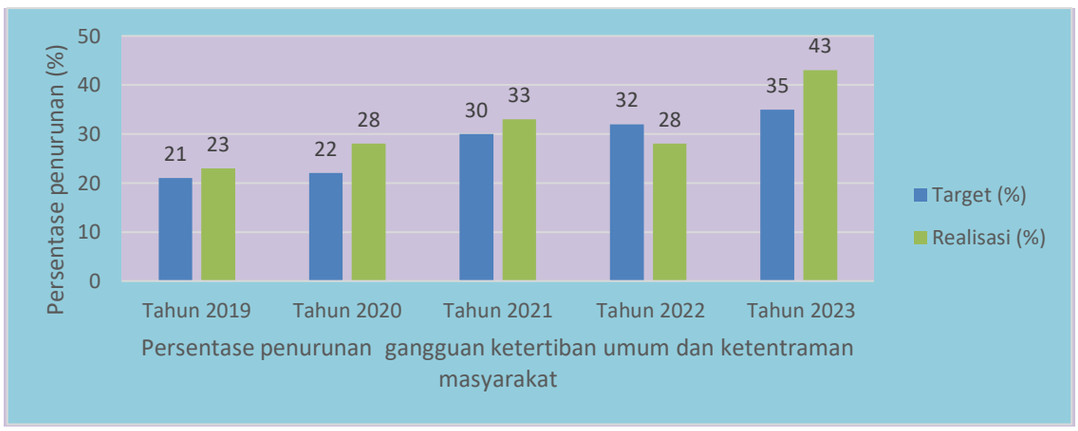

Dari gambar diatas Persentase capaian penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mencapai 124 % apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018–2023.

Upaya – upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1) Melaksanakan operasional pencegahan dan penindakan gangguan ketertiban umum secara rutin;
2) Melakukan operasional Patroli rutin 3 kali sehari;
3) Melakukan operasional pengamanan kegiatan/keramaian daerah sebanyak 102 kali;
4) Melakukan operasional Pengawalan Bupati/Wakil Bupati/Orang-Orang penting sebanyak 25 Kali;
5) Melakukan operasional Penertiban gangguan trantibum sebanyak 23 kali;
6) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan:

1) Peningkatan operasional pencegahan, pengawasan dan Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2) Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak;
3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
4) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

Berikut realisasi pencapaian target SPM pada tahun 2023:

Tabel 2.68
Target pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

Tabel 2.69
Realisasi pencapaian target SPM pada tahun 2023

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				**88,32%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	249	249	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8,32%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	41,62 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	Tidak ada
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	Tidak ada
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	14	7	7	50%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	1656	278	1378	16,79%
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	533	442	91	82,93%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100%

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

a) Kesulitan Penetapan jumlah target penerima layanan dasar, dikarenakan jumlah dan lokasi penertiban tidak dapat diketahui secara pasti (sebagai acuan penghitungan jumlah perkiraan yang akan terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada);
b) Kompetensi dan kapasitas Personil dalam hal tata cara pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelenggaran perda dan perkada belum optimal;
c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
d) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.

Solusi :

a) Prediksi Jumlah target penerima layanan dasar berdasarkan jumlah pelanggar tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan jumlah tahun berjalan;

b) Meningkatkan Kompetensi dalam hal tata cara pelayanan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
c) Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dengan "Tanpa Kecelakaan atau Kerugian".
d) Mengoptimalkan Sarpras yang tersedia dan mengupayakan penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
e) Melakukan Peningkatan kapasitas mandiri dan terbatas.

Meningkatnya penegakan perda dan perkada diukur dengan menggunakan rumus *2 kali taget di kurangi realisasi hasilnya dibagi target dikali 100 % (capaian = ((2 x target) – Realisasi) / Target x 100%)* indikator kinerja yaitu :

1) Menurunnya pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelanggaran perda dan perkada

Uraian kinerja atas Menurunnya pelanggaran perda dan perkada indikator kinerja Meningkatnya penegakan perda dan perkada sebagai berikut :

Menurunnya pelanggaran perda dan diukur dengan formulasi perhitungan *Jumlah pelanggaran perda dan perkada pada tahun berkenaan*, Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 253.

Pada tahun 2023, nilai yang terealisasi sebesar 147 atau 142 % dari target tahun 2023, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.70
Realisasi menurunnya pelanggaran perda dan perkada

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan	253	147

Menurunnya pelanggaran perda dan perkada yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 sebesar 147 diperoleh dari pelaksanaan operasional pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada. Realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkada ini mengalami penurunan sebesar tiga puluh delapan persen (38%) dibandingkan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 180 %.

Perkembangan realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkada tahun 2019–2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2022- 2023 disajikan berikut :

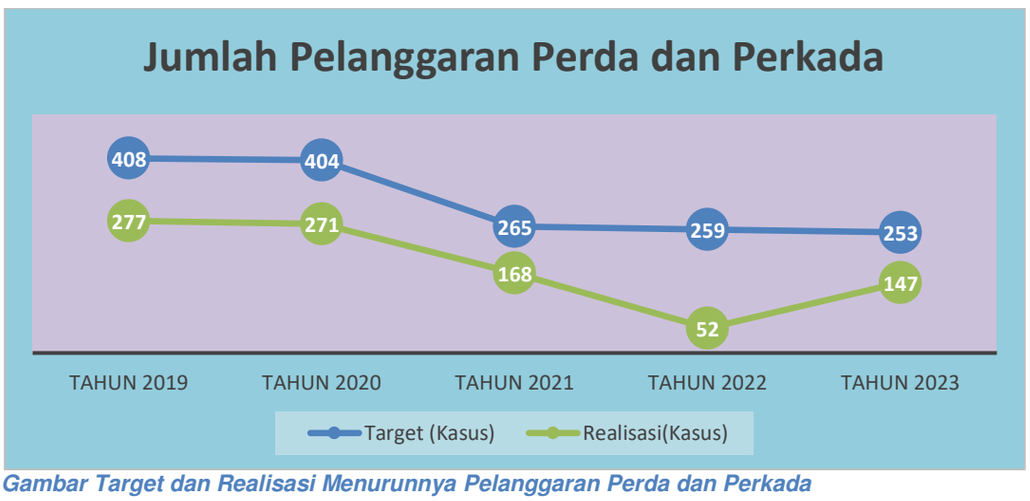

Gambar Target dan Realisasi Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada

Dari gambar 3.2 Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada telah mencapai 142 % apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018–2023.

Upaya – upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada
2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah teknis pengampu Perda dan Perkada.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target disebabkan antara lain oleh:

1) Laporan terhadap pelanggaran perda yang berlaku masih rendah;
2) Efek postitif pelaksanaan penindakan/penertiban tahun – tahun sebelumnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2022 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan :

1) Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan perda dan perkada yang berlaku;
2) Meningkatkan kompetensi aparatur;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada.

Beberapa hal perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan, persoalan – persoalan di Masyarakat belum sepenuhnya dijawab dengan baik pula. Tantangan – tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban , dimana masih terdapat berbagai palanggaran peraturan perundang – undangan, kondisi ketentraman dan ketertiban yang rentan terganggu terutama oleh kenakalan remaja dan konflik antar kepentingan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di perlukan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

☞ Kemudian untuk Arah Kebijakan meningkatkan pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Belitung menerima sertifikat kepatuhan tinggi Standar Pelayanan Publik di tahun 2023 dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023 Belitung meraih nilai 88.87 dengan Jumlah OPD 7 Unit Kerja Pelayanan Publik nilai ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 84,32 dengan standar kepatuhan tinggi dan masuk dalam zona hijau. Penganugerahan ini dilakukan sebagai puncak rangkaian kegiatan pendampingan dan penilaian yang telah dilaksanakan sejak triwulan pertama tahun 2022 terhadap instansi pemerintah dalam hal memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Tabel 2.71
REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023
Periode Penilaian : Juni-Oktober 2023

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Puskemas Tanjung Pandan	19.98	14.64	22.30	13.78	70.70
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.01	30.24	22.30	15.84	85.39
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.63	31.63	22.30	16.83	89.39
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	18.23	31.85	22.30	18.77	91.15
5	Dinas Kesehatan	20.85	32.37	22.30	18.95	94.48
6	Puskesmas Perawas	20.54	32.37	22.30	19.46	94.67
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.30	32.37	22.30	21.33	96.30

Sumber : Bagian Organisasi Setda Tahun 2024

Nilai Akhir dan Zona 88.87
Kategori A
Opini Kualitas Tertinggi

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENGHARGAAN
PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2023
DIBERIKAN KEPADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BELITUNG
85,39
Nilai
ZONA HIJAU
KUALITAS TINGGI
JAKARTA, 14 DESEMBER 2023
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.HUM., PH.D.

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik seharusnya dapat menjadi bukti nyata yang dapat diukur bahkan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa pemerintah atau suatu instansi ingin memberikan pelayanan yang berkepastian kepada masyarakat. Salah satu kunci penting dari suatu pelayanan publik adalah adanya kepastian pelayanan.

Tabel 2.72
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Keputusan Kemenpan RB nomor 795 tahun 2023 tanggal 24 Novsember 2023

No	Unit Layanan	Indeks	Kategori
1	Kecamatan BADAU	3.59	B
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.90	B
3	RSUD Dr. H. MARSIDI JUDONO	4.18	A-
	Indeks rata-rata	3.89	B

Hal ini secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan apabila komponen standar pelayanan publik seperti persyaratan, jangka waktu, biaya/tarif, persyaratan, prosedur pelayanan dan hal penting lainnya terpampang secara transparan di ruang pelayanan publik. Apalagi jika pada era digitalisasi ini, komponen standar pelayanan publik tersebut mampu divisualisasikan oleh instansi melalui website resmi yang dapat diakses masyarakat kapanpun dan di manapun.

Pemenuhan standar pelayanan baik secara elektronik maupun non-elektronik, sudah seharusnya menjadi hal prioritas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang berkepastian dan berkualitas kepada masyarakat. Upaya meningkatkan pelayanan berbasis penanganan permasalahan masyarakat dan menunjang peningkatan kinerja perangkat daerah tahun 2023 sebanyak 16 inovasi perangkat daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.73
Rekapitulasi Laporan Hasil Capaian Program Inovatif Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

NO	PROGRAM INOVASI	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	KETERANGAN
1	SEHATI (Sistem Kesehatan Terintegrasi)	Dinas Kesehatan UPT. RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	Pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, pasien rujukan dan dijemput. Pasien diantarkan ke RS Rujukan, pendampingan administrasi, keluarga diinapkan di rumah sehat dan pemulangan jenazah pasien sampai daerah	185 pasien Keterangan: Januari 27 pasien Februari 25 pasien Maret 21 pasien April 3 pasien Mei 27 pasien Juni 16 pasien Juli 20 pasien Agustus 23 pasien September 28 pasien	
2	KEMINANGAN (Kearifan Lokal dan Adat Istiadat sebagai Inspirasi Pembangunan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelembagaan resmi dukun kampong yang diberikan tunjangan rutin dan seragam.	120 Orang Anggaran: Rp 288.000.000,00	

3	KETARAP (Keterpaduan Antar Rakyat Antar Pengusaha) berupa program fasilitasi dan mediasi yang dilakukan Pemda kepada masyarakat sebagai pemilik usaha UMKM melalui kemitraan dengan pengusaha dan masyarakat Pemilik lahan dengan pengusaha selaku pemilik modal yang memberikan keuntungan dengan basis rencana pembangunan Pemda	DKUKMPTK	Fasilitasi dan mediasi Pemda kepada masyarakat sebagai pemilik usaha UMKM melalui kemitraan dengan pengusaha dan masyarakat pemilik lahan dengan pengusaha selaku pemilik modal yang memberikan keuntungan dengan basis rencana pembangunan Pemda	Terlaksananya Kemitraan antara UMKM dengan Pengusaha/Investor sebanyak 11 kemitraan	2023: Rencana peningkatan kemitraan antara UMKM dengan pengusaha/investor sebanyak 6 kemitraan. KENDALA: 1. Kesulitan untuk meginventarisasi data lahan perorangan atau data lahan yang dimiliki oleh desa yang clear and clean untuk siap ditawarkan kepada investor, 2. Pola kemitraan pelaku usaha UMKM dengan pengusaha /investor yang pada dasarnya sudah berjalan dilapangan tetapi belum terumuskan dengan baik bentuk legalitas pola kemitraannya untuk memenuhi kewajiban investor/pengusaha yang wajib bermitra dengan UMKM.
4	BAGUK (Bagi Bibit Gratis Untuk Kampong)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Penyediaan bibit buah dan lainnya secara gratis sesuai masterplan pembangunan desa di Kabupaten Belitung. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya pertanian dan perikanan secara optimal	500 Bibit Jambu Kristal Desa Mentigi 500 Bibit Lengkeng Desa Perawas 500 Bibit Mangga Desa Padang Kandis 500 Bibtt Mangga Desa Buluh Tumbang 500 Bibit Mangga Desa Aik Ra ak 300 Bibit Sawo Desa Membalong Pemeliharaan bibit kembali pada Bulan Januari-Maret, April-Juni dan Juli-September 2023 Perneliharaan bibit kembali pada Bulan Januari-Maret, April-Juni dan Juli-September 2023	Inovasi BAGUK juga ikut serta dalam IGA tahun 2020-2021
		Dinas Perikanan	Pemberian bibit ikan yang meliputi ikan air tawar dan ikan air laut kepada pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)	20,000	Benih Ikan diberikan kepada Pokdakan Nila Berjaya, Pokdakan Aik Senilai Berandun, Pokdakan Kopi Laut, Koperasi Karya Bahari, Koperasi Karang Petaling, HSRT Betang, Pokdakan Lancar Berkah, Pokdakan Padang Jaya, Pokdakan Bintang laut, Pokdakan Lintang, KUPS Kematang, dan Pokdakan Kumpai
5	ILAK (Intensif Langsung untuk Kemajuan) Berupa insentif untuk investor yang rutin dalam memberikan CSR sesuai arahan Pemda dan juga kepada investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan pembangunan usaha/investasi mereka yang selesai sebelum masa waktu yang ditentukan.	DPMPTSPP	Insentif untuk investor yang rutin memberikan CSR dan investor yang menyerap tenaga kerja lokal dan pembangunan usaha/investasi yang selesai sebelum masa waktu yang ditentukan	Penetapan Perbup Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung	2023: Rencana penyusunan Perbup Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung Keterangan: Belum secara optimal pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 karena baru akan dilaksanakan penyusunan rencana Perbup Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung

6	PUKAT (Program Air Bersih untuk Masyarakat)	Dinas PUPR	Pembangunan spot/titik jaringan air bersih bagi masyarakat yang berbasis rumah ibadah	Tidak lagi diilanjutkan pada Tahun 2023.	'Keterangan: Belum ada data (OPD tidak memberikan laporan)
7	PELANDUK (Pelayanan Medik untuk Kampung)	Dinas Kesehatan	Program Medik mengunjungi dan memberikan pengobatan ke rumah pasien menggunakan motor dan mobil untuk meningkatkan dan memperluas akses pelayanan kesehatan	Jumlah Kunjungan: 1001 Kegiatan Posyandu (Balita: 232), (Remaja:48), (Lansia: 102) Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil: 1) (Kelas Ibu Balita:2) (Posyandu PTM:12) Kebidanan (Neonatus (KN)/Nifas (KF):188) (Kasus Kebidanan Lainnya:24) Kasus Penyakit (Kasus Penyakit Dalam:117) (Kasus Penyakit Bedah:44) (Skrining Covid 19: 51) (Skrining Lainnya: 48) Patroli (Patroli Pelanduk Rutin: 51) (Patroli Pelanduk Kasus Kecelakaan:1) Lain-lain (80)	Inovasi PELANDUK juga ikut serta dalam IGA tahun 2020-2021
8	GANGAN (Garansi Hasil Panen Komoditi Gabungan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPMPTSPP	Garansi pembelian hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masyarakat yang telah membuat perjanjian bersama dan dibina oleh BUMD		Baru ada Mou antara Koperasi Kacang Botor dgn PT. CAN Bandung. Komoditi Lada
9	BETARE (Belitung Terang Benderang)	Dinas Perhubungan		7.316 Unit Penambahan 2.310 unit terdiri dari APBD = 183 unit, DID = 1.000 unit, APBD Perubahan = 1.040 unit (dalam proses pengadaan), DABA PJUTS = 87 unit (dalam proses pengadaan)	
		Dinas Perikanan (data dukungan untuk Program Inovasi Betare)	Pengadaan lampu untuk penerangan dermaga tambat kabuh kapal nelayan		
10	SIMPOR (Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	SD : 370 Siswa x Rp. 750.000,-/Tahun 100% SMP : 211 Siswa x Rp. 750.000,-/Tahun 100%	Inovasi SIMPOR juga ikut serta dalam IGA tahun 2021-2022
		Dinas Pemuda dan Olahraga	Bimbingan teknis dan bantuan paket finansial kepada olahragawanmuda dan bibit-bibit potensial		
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Pemberian Beasiswa	11 Mahasiswa Keterangan: Beasiswa penuh Institut Tazkia Rp. 374.000.000,-	
				4 Mahasiswa Keterangan: Beasiswa penuh Universitas Podomoro Rp. 181.445.000	
				1 Mahasiswa Keterangan: Beasiswa penuh Unversitas Sampoerna Rp. 65.105.000,-	
				2 Mahasiswa Keterangan: Beasiswa penuh Unversitas Muhammadiyah Purwokerto Rp. 469.230.000,-	
				20 Mahasiswa Keterangan: Beasiswa penuh Unversitas Sampoerna Rp. 443.155.000,-	

				50 Mahasiswa Keterangan: Beasiswa Parsial Rp. 500.000.000,-	
11	CUHAI (CSR untuk Hijau dan Indah)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Membangun ruang terbuka hijau menggunakan dana CSR perusahaan	Kegiatan SMANSA Care, Kerjasama antara SMAN 1 Tanjungpandan dan PT. Timah, Tbk. (Penanaman bibit sejumlah 100 bibit) Kegiatan Penanaman BW Suite, Kerjasama antara Hotel BW Suite dan KSM Suak Parak Mangrove. (Penanaman bibit mangrove sejumlah 30 bibit) Kegiatan Penanaman Batu Bedil, Kerjasama dengan Hotel Santika dan HKM Batu Bedil. (Penamanan Bibit) Peringatan HMPI, Kerjasama PT. Timah Tbk dan Dinas Lingkungan Hidup. (Penanaman bibit sejumlah 100 Bibit)	
12	BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah)	Sekretariat Daerah Bagian Kesra	Pembangunan dan perbaikan rumah ibadah di Kabupaten Belitung dengan sasaran rumah ibadah untuk semua agama. Rumah ibadah yang dibangun lokasinya dekat atau berada di daerah permukiman. Bagi rumah ibadah yang kondisinya memerlukan renovasi	21 Tempat Ibadah Total Anggaran: 4.500.000.000,00	Keterangan: 1. Yayasan Annikmah Pangkal lalang Tanjungpandan Rp. 200.000.000,- 2. Yayasan Masjid As Sajadah Buluh Tumbang Rp. 250.000.000,- 3. Yayasan Masjid At Thohiroh Air Merbau Rp. 200.000.000,- 4. Yayasan Masjid Attaubah Pangkal lalang Rp. 250.000.000,- 5. Yayasan Raudhatul Akhyar Gunong Tambak Rp. 250.000.000,- 6. Yayasan Masjid At Taubah Air Serkuk Rp. 150.000.000,- 7. Gereja Persekutuan Kristen Perawas Rp. 150.000.000,- 8. Gereja Persekutuan Kristen Tanjungpandan Rp. 250.000.000,- 9. Yayasan Baitussalam Kenanga Berkah Rp. 250.000.000,- 10. Yayasan Mualaf Center Bangka Belitung Rp. 150.000.000,- 11. Yayasan Baitul Jannah Lesung Batang Rp. 200.000.000,- 12. Yayasan Alakhiroh Simpang Rusa Rp. 250.000.000,- 13. Yayasan Masjid Attaqwa Parang Buluh Rp. 200.000.000,- 14. Yayasan Masjid Asysuhada Dudat Rp. 250.000.000,- 15. Yayasan Assholihin Parit Gunung Rp. 250.000.000,- 16. Yayasan Rimba Alam Bahagia Rp. 200.000.000,- 17. Yayasan Assujud Dusun Cerucuk Rp.100.000.000,- 18. Yayasan Al Mihrab Tanjung Binga Rp.

					400.000.000,- 19. Yayasan Masjid An Nur Simpang Empat Rp. 250.000.000,- 20. Yayasan Masjid Assajadah Pelepak Pute Rp. 150.000.000,- 21. Yayasan Masjid Darussalam Rp. 150.000.000,-
13	AMBONG (Program Asupan untuk Anak Balita dan Ibu Mengandung)	Dinas Kesehatan	Pemberian asupan makanan tambahan berupa biskuit untuk balita dan ibu hamil dengan takaran konsumsi tertentu	6.70%	
14	SOS CENTER	Dinas Kesehatan	Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan darurat dengan layanan telepon ke 505	622	
15	TERINDAK (Tanah Teregister, Integrasi dan Akuntabel)	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sistem informasi pencatatan tanah di kantor desa dan kecamatan berbasis IT.		Tidak Terealisasi
16	BESADU (Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Belitung	Menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat Belitung yang berkaitan dengan permasalahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung	170 Aduan	

Sumber Data: Bappeda Kab. Belitung Tahun 2024

Selanjutnya untuk Penataan Administrasi Kependudukan yang dilakasanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belitung. Persentase capaian tertib administrasi kependudukan pada tahun 2023 sebesar 88,55% kurang dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 94%. Adapun capaian indikator dari 3 layanan administrasi kependudukan sebagai berikut.

Tabel 2.74
Capaian Indikator Kinerja Program
unsur penunjang urusan administrasi kependudukan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase capaian pendaftaran penduduk	Persen	81	83	84	85	82,65	84,36	81,32	85,87
2	Persentase capaian pencatatan sipil	Persen	94	94	95	95	93,41	93,69	93,96	94,15
3	Persentase pemanfaatan data	Persen	100	100	100	100	100	100	85,71	85,71

Capaian Indikator Kinerja Program unsur penunjang urusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Jauhnya jarak tempuh masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih kurang dalam mendukung program dan kegiatan. Salah satunya adalah tidak tersedianya Kendaraan Pelayanan Keliling;
3. Sumber Daya Manusia saat ini masih kurang karena untuk melayani penduduk Kabupaten Belitung yang berjumlah 187.038 jiwa idealnya 60 orang sementara saat ini hanya terdapat 39 pegawai (20 ASN, 7 PPPK dan 12 Pegawai Non PNS).

Adapun formulasi perhitungan Persentase capaian tertib administrasi kependudukan yaitu:

(Persentase capaian pendaftaran penduduk + persentase capaian pencatatan sipil + persentase pemanfaatan data) / **3**

Keterangan:

1. Persentase capaian pendaftaran penduduk = (persentase capaian penerbitan KK + persentase capaian penerbitan KIA + persentase capaian penerbitan e-KTP)/3
2. Persentase capaian pencatatan sipil = (persentase capaian penerbitan kutipan akta kelahiran + persentase capaian penerbitan kutipan akta kematian + persentase capaian penerbitan kutipan akta perkawinan + persentase capaian penerbitan kutipan akta perceraian + persentase capaian penerbitan kutipan akta pengesahan anak)/5
3. Persentase pemanfaatan data = (jumlah permohonan data yang disetujui/jumlah permohonan data) x 100%

Tabel 2.75
Perhitungan Kinerja Program Administrasi Kependudukan Tahun 2023

NO	INDIKATOR PROGRAM	RUMUSAN	TAHUN 2023	PERSENTASE CAKUPAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	TARGET TAHUN TERAKHIR RENSTRA
	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	**(1+2+3)/3**	**(85,78+94,15+ 85,71) / 3**	**88,55%**	**94%**
1	**Persentase capaian pendaftaran penduduk**			**85,78%**	**86%**
a	Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elekronik (KTP-el)	Jumlah penerbitan KTP-el	137.820	97,46%	98%
		Jumlah penduduk wajib KTP-el yaitu usia >17 dan atau pernah/sudah menikah	141.416		
b	Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yang diterbitkan	64.773	99,91%	100%
		Jumlah Kepala Keluarga	64.831		
c	Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA yang diterbitkan	30.947	59,98%	60%
		Jumlah penduduk usia < 17 tahun	51.597		
2	**Persentase capaian pencatatan sipil**			**94,15%**	**95%**
a	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	134.366	70,74%	75%
		jumlah penduduk	189.945		
b	Persentase cakupan penerbitan akta kematian	Jumlah penerbitan akta kematian	1.149	100%	100%
		Jumlah laporan kematian penduduk	1.149		
c	Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan	Jumlah penerbitan akta perkawinan	75	100%	100%
		Jumlah pelaporan perkawinan penduduk	75		
d	Persentase cakupan penerbitan akta perceraian	Jumlah penerbitan akta perceraian	17	100%	100%
		Jumlah pelaporan perceraian penduduk	17		
e	Persentase cakupan akta pengesahan anak	Jumlah penerbitan akta pengesahan anak	13	100%	100%
		Jumlah pelaporan pengesahan anak	13		
3	**Persentase pemanfaatan data**			**85,71%**	**100%**
a	Persentase pemanfaatan data	Jumlah OPD yang diberikan hak akses data kependudukan	6	85,71%	100%
		Jumlah permohonan pemberian hak akses data kependudukan	7		

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 ataun untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan, melakukan kegiatan jemput bola terkait pengurusan dokumen kependudukan dan Melakukan perjanjian kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Belitung terkait data kependudukan.

Capaian tertib administrasi kependudukan dapat diuraikan pada beberapa sasaran program sebagai berikut:

1. **Persentase capaian pendaftaran penduduk**.
   a. Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elekronik (KTP-el)
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 97,46% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 98%. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elekronik (KTP-el) adalah perubahan sistem informasi administrasi kependudukan semula terdistribusi menjadi sistem informasi administrasi kependudukan terpusat.
   b. Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 99,91% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) adalah belum semua KK tercetak yang disebabkan adanya pecah KK akibat cerai hidup dan belum ada permintaan cetak dari yang bersangkutan.
   c. Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 59,98% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 60%. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah ada KIA yang belum tercetak.

   Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

2. **Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil**
   a. Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 70,74% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 75%. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah adanya sebagian penduduk yang belum memahami pentingnya memiliki Akta Kelahiran. Solusi yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya Akta Kelahiran dan dilakukannya pelayanan keliling sebagai upaya jemput bola kepada penduduk yang mengurus dokumen pencatatan sipil.
   b. Persentase cakupan penerbitan akta kematian
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta kematian adalah adanya insentif yang diberikan kepada RT di Kabupaten Belitung yang telah melaporkan peristiwa kematian dan dilakukannya pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung.
   c. Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan adalah adanya kegiatan pelayanan hari-hari tertentu khusus penerbitan akta perkawinan dan dilakukannya pelayanan keliling ke Desa se-Kabupaten Belitung.
   d. Persentase cakupan penerbitan akta perceraian
   Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta perceraian adalah kesadaran dalam pengajuan akta perceraian penduduk Non Muslim.
   e. Persentase cakupan akta pengesahan anak.

Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan cakupan penerbitan kutipan akta pengesahan anak adalah adanya kegiatan pelayanan hari-hari tertentu khusus penerbitan akta pengesahan anak.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

Gambar pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yaitu digitalisasi akta pencatatan sipil

3. Persentase Pemanfaatan Data

a. Persentase pemanfaatan data

Kinerja Tahun 2023 sebesar 85,71% kurang dari target tahun terakhir Renstra sebesar 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pemanfaatan data adalah adanya OPD yang melakukan permohonan pemberian hak akses data kependudukan tetapi belum diberikan hak akses data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan* *Dinas PMPTSPP*
Foto kegiatan monitoring ke beberapa OPD di Kabupaten Belitung terkait Pemanfaatan Data Kependudukan

4. Persentase Penyajian Data Kependudukan

Kinerja Tahun 2023 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Penyajian data kependudukan Buku data kependudukan berupa buku agregat data kependudukan semester II Tahun 2022, buku agregat data kependudukan semester I Tahun 2023, dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Belitung.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

Foto Penyajian Data Kependudukan berupa buku agregat data kependudukan semester II Tahun 2022, buku agregat data kependudukan semester I Tahun 2023, dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Belitung

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana. Berikut kinerja realisasi pencapaian SPM Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung dalam pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76
Target pencapaian SPM BPBD tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target
1	*2*	*3*	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

Tabel 2.77
Realisasi pencapaian target SPM pada tahun 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
1	**2**	**3**			**4**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		**TUNTAS UTAMA**			**94.42 %**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				**97.50 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	179.621	179.621	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.07 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**80.36 %**
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	**0**	**100.00 %**

	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	179.621	179.621	0	100 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100	100	**100**	**100.00 %**
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	10	5	**5**	**50%**
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				**78.05 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**89.75 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**179.621**	**179.621**	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**4.63 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**48.74 %**
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	30	10	**20**	**33.33 %**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	53	34	**19**	**64.15 %**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				88.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	3.012	3.012	**100**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	**0**	**100%**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.012	3.012	**100**	**100.00 %**
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	**0**	**100%**
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	0	**1**	**0%**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	1	**0**	**100%**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
1	**2**	**3**			**4**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS UTAMA**			**96.32 %**
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				92.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**92.10 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	279	279	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.10 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	60.48%

	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	279	195	**84**	**69.89 %**
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	**0**	**100%**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	30	10	**20**	**33.33 %**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	10	6	**4**	**60.00 %**
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	22	22	**0**	**100.00 %**
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0	0	**0**	**0 %**

Sumber Data: Laporan SPM BPBD Tahun 2024

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung:

Permasalahan :

a) Identifkasi data warga yang menjadi target layanan SPM belum optimal sehingga menghambat proses penyusunan rencana aksi;
b) Sulitnya menentukan jumlah target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran dalam SPM karena tentunya tidak ada yang berharap terjadi bencana atau targetnya adalah nol
c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
d) Standar peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar belum optimal.

Solusi :

a) Optimalisasi pendataan warga yang menjadi target layanan SPM;
b) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
c) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota TRC dan Angota Damkar.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pembenahan manajemen pelayanan publik. Sebagai upaya pengimplementasian Program BERUAH (Pembangunan dan Perbaikan Rumah Ibadah) sejak tahun 2019, yang sasarannya meliputi rumah ibadah untuk semua agama, meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui keterbukaan informasi publik dengan penggunaan teknologi dan informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Pemberian Bantuan untuk Rumah Ibadah dalam Program BERUAH

Tabel 2.78
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	182.397.460,00	180.369.376,00	98,89
2	Program Pencatatan Sipil	38.086.000,00	30.306.800,00	79,57
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43.958.930,00	40.863.800,00	92,96
4	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.260.499.168,00	1.121.071.452.00	88,94
5	Program Aplikasi Informatika	2.891.671.508,00	2.836.316.727,00	98,09

6	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	337.425.216,00	331.618.075,00	98,28
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	660.887.810,00	551.487.750.00	83,45
8	Program Penanggulangan Bencana	1.552.583.770,00	1.453.761.400,00	93,63
9	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.716.047.700,00	4.697.391.500,00	99,60
10	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	89.999.000,00	80.218.935,00	89,13
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	121.982.835,00	73.033.480,00	59,87
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.364.165.000,00	1.362.888.00	99,91
13	PProgram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	210.735.808,00	187.442.160.00	88,95
14	Program Pengelolaan Permuseuman	2.823.389.475,00	2.702.479.071.00	95,72
15	Penaganan Kerawanan Pangan	13.032.030,00	12.548.814,00	96,29

Sehingga untuk sasaran Birokrasi yang Mengedepankan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas dengan persentase realisasi anggaran 96,04% dengan persentase rata-rata capaian program 90,89% sehingga efisiensi sebesar 3,96%.

2.3.2.3 TUJUAN 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,29	4,4-5,1	5,75	112,74	SANGAT BERHASIL	4,4-5,1

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 4,4-5,1 dan terealisasi sebesar 5,75 dengan capaian kinerja sebesar 129,77% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Namun Akibat adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia, hal ini karena banyak indikator perekonomian yang memburuk seperti daya beli yang merosot tajam hingga angka-angka kegiatan bisnis yang terus mengalami penurunan. Laju Pertumbuhan Ekonomi selalu berkontraksi sejak awal hingga akhir tahun 2023. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Belitung, PDRB Kabupaten Belitung tahun 2022, ADHK tahun 2010, mencapai Rp 7 093,4 milliar mengalami peningkatan menjadi Rp 7500,99 milliar pada tahun 2023. Secara detail perkembagnan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80
PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2019 – 2023, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 657,64	1 781,36	1 856,19	1 859,5	1 917,21
Pertambangan dan Penggalian	546,87	485,05	509,25	504,00	502,14
Industri Pengolahan	733,66	734,69	770,06	839,8	881,17
Pengadaan Listrik dan Gas	9,82	9,72	10,55	10,1	10,38
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,89	2,05	2,16	2,3	2,28
Konstruksi	832,64	798,64	839,47	832,1	904,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	726,35	661,00	701,34	798,6	814,80
Transportasi dan Pergudangan	399,2	316,25	342,02	467,9	516,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	231,51	206,45	229,16	261,6	288.37
Informasi dan Komunikasi	244,71	285,43	308,72	341,1	388,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	154,13	142,33	155,02	164,4	189,46
Real Estat	208,54	210,86	221,95	234,1	244,05
Jasa Perusahaan	21,96	17,51	18,47	22,6	24,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	418,57	398,27	420,65	416,6	442,99
Jasa Pendidikan	129,02	124,88	127,98	131,7	146,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130,01	131,39	148,86	153,0,86	167,08
Jasa Lainnya	53,91	46,13	48,16	54,0	60,18
Produk Domestik Bruto	**6 500,42**	**6 352,03**	**6 710,01**	**7093,4**	**7500,99**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2019 – 2023 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2023 kontribusinya sebesar Rp 1.917,21 milliar atau sebesar 26,56%. Lapangan usaha yang kedua adalah industri pengolahan sebesar 13,01%, kemudian konstruksi sebesar 12,04%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,60%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2019 – 2023 :

Tabel 2.81
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2019 – 2023, ADHB

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,01	27,79	28,17	26,82	26,56
Pertambangan dan Penggalian	6,60	5,94	6,22	5,47	4,96
Industri Pengolahan	11,41	11,93	12,34	13,27	13,01
Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,18	0,17	0,15	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	13,34	12,94	12,61	11,72	12,04
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,23	10,35	10,23	10,91	10,60
Transportasi dan Pergudangan	7,00	5,31	5,36	7,61	8,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,83	3,75	3,80	4,03	4,13
Informasi dan Komunikasi	2,93	3,40	3,31	3,34	3,52
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,18	2,24	2,31	2,46
Real Estat	3,22	3,43	3,25	3,13	3,05
Jasa Perusahaan	0,36	0,31	0,30	0,33	0,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	7,52	7,12	6,28	6,16
Jasa Pendidikan	2,14	2,17	2,05	1,92	1,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,94	2,01	1,89	1,92
Jasa Lainnya	0,91	0,83	0,78	0,79	0,83

*Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara*

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstrusi, jasa pendidikan, jasa aministrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan.

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, walaupun sangat lamban, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Walaupun telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dan PDRB terus bertumbuh setiap tahun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi terjadi percepatan. Pada tahun 2023 LPE Kabupaten Belitung sebesar 5,75%, sementara LPE tahun 2022 sebesar 5,71% sedangkan LPE tahun 2021 sebesar 5,64%. Percepatan atau perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.82
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2019–2023

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,73	7,48	4,16	0,19	3,11
Pertambangan dan Penggalian	0,24	-11,45	5,06	-0,93	-0,37
Industri Pengolahan	-6,38	0,14	4,82	9,05	4,92
Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	-0,94	8,48	-4,03	2,52
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,03	8,63	5,35	4,74	0,77
Konstruksi	8,37	-4,09	5,11	-0,88	8,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,35	-8,94	5,98	14,25	1,75
Transportasi dan Pergudangan	1,16	-20,66	8,42	36,27	10,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-10,64	10,77	14,16	10,23
Informasi dan Komunikasi	15,71	16,63	8,16	10,49	13,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	-7,66	8,91	6,03	15,27
Real Estat	2,91	1,18	5,19	5,48	4,25
Jasa Perusahaan	2,77	-20,27	5,50	22,31	8,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,10	-4,85	5,62	-1,44	6,85
Jasa Pendidikan	7,88	-3,23	2,49	2,91	11,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,33	1,04	13,29	2,81	9,19
Jasa Lainnya	9,36	-14,43	4,39	12,22	11,35
Produk Domestik Bruto	3,33	-2,27	5,64	5,71	5,75

*Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara*
Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023 mengalami peningkatan 3,11 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 0,19.

Pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Beberapa indikator perekonomian mulai membaik seperti daya beli yang mulai meningkat hingga angka-angka kegiatan bisnis juga mengalami sedikit kenaikan. Tingginya ekonomi maka pendapatan mengalami kenaikan, sehingga berbagai lapangan usaha mengalami peningkatan.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Tabel 2.83
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten
di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Bangka	2,87	-0,70	7,46	4,87	4,44
2	Belitung	3,33	-2,27	5,62	5,71	5,75
3	Bangka Barat	7,06	-5,35	0,20	2,01	2,50
4	Bangka Tengah	1,21	-2,85	4,75	6,10	5,16
5	Bangka Selatan	2,53	-1,93	3,61	3,07	3,69
6	Belitung Timur	3,26	-0,63	4,55	3,80	4,72
7	Pangkalpinang	3,26	-3,00	9,26	6,21	5,32
Provinsi Bangka Belitung		**3,32**	**-2,29**	**5,05**	**4,40**	**4,38**

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2023 mengalami percepatan. Sehingga perekonomian Kabupaten Belitung menduduki peringkat paling tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2022, Kabupaten Belitung menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Development Working Group (DWG) G20 yang berlangsung pada tanggal 7-9 September 2022. Dengan diselenggarakannya G20 di Kabupaten Belitung ini, diharapkan akan berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat Belitung ke depannya, khususnya dibidang Pariwisata dan UMKM.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPJMD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru;
- Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang begerak di sektor industri pariwisata;
- Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- Ketersediaan pasokan listrik yang belum memadai;
- Kualitas SDM yang belum memadai.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- Menerapkan standarisasi industri lebih ketat, khususnya industri pariwisata sesuai dengan standar internasional;
- Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- Meningkatkan kuaitas SDM dengan program-program pelatihan.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023, upaya pencapaian Tujuan 3 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi“ melalui 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.84
Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 8 Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan
	Sasaran 9 Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan; 15. Meningkatkan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya.
	Sasaran 10 Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	16. Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
	Sasaran 11 Meningkatnya investasi	17. Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri.
	Sasaran 12 Meningkatnya infrastruktur Kewilayahan	18. Meningkatkan aksebilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah; 19. Pemenuhan Air Baku.

SASARAN 8 : Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Pariwisata” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (domestik dan mancanegara) dengan target 400.000 orang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata
Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara)	Orang	467.571	400.000	301.870	75.47	B	400.000

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) tahun 2023 sebesar 301.870 orang, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang semula 301.906 orang atau naik 36 orang. Tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran sebesar 75.47% dengan kategori BERHASIL, kurang dari target yang ditetapkan sebesar 24,53%.

Target indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Manca Negara) dari Tahun 2020 mengalami penyesuaian dengan kondisi perekonomian nasional akibat wabah dunia yaitu pandemi covid-19 yang berdampak pada minimnya rute penerbangan dari dan ke Belitung. Hal ini juga sebagai bentuk penyesuaian terhadap target Renstra dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 53

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Tabel 2.86
Jumlah Kunjungan Tamu Asing dan Domestik Tahun 2021, 2022 dan 2023

BULAN	2021			2022			2023		
	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH	TAMU ASING	TAMU DOMESTIK	JUMLAH
Januari	56	9.517	9.573	186	16.843	17.029	357	18.477	18.834
Februari	124	9.650	9.774	97	15.868	15.965	343	20.712	21.055
Maret	270	15.101	15.371	138	24.926	25.064	399	23.625	24.024
April	362	13.170	13.532	268	15.650	15.918	615	24.537	18.701
Mei	146	10.495	10.641	312	33.760	34.072	334	26.931	24.871
Juni	57	16.305	16.362	242	28.284	28.526	650	26.931	27.581
Juli	23	7.810	7.833	423	27.590	28.013	708	27.829	28.537
Agustus	50	7.769	7.819	378	23.363	23.741	995	26.164	27.159
September	39	12.465	12.504	484	34.570	35.054	606	26.431	27.037
Oktober	149	25.748	25.897	472	24.013	24.485	690	24.272	24.962
November	125	28.960	29.085	302	25.065	25.367	621	28.334	28.955
Desember	182	25.997	26.179	447	28.225	28.672	447	29.379	30.154
JUMLAH	**1.583**	**182.987**	**184.570**	**3.749**	**298.157**	**301.906**	**3.749**	**298.157**	**301.870**

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Belitung, 2023

Pada tahun 2023 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 301.870 orang, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 301.906, yang terdiri dari 7.093 orang wisatawan asing dan 294.777 orang wisatawan domestik. Ada 3 hal penting dalam daya tarik wisata yaitu alam, budaya dan daya tarik buatan. Kondisi alam Belitung yang dikelilingi lautan dan pantai yang indah, menjadi daya tarik utama wisatawan nusantara terutama yang berasal dari daerah padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, dan lainnya. Alam yang masih asri dan alami dengan udara yang bersih menjadikan penduduk kota memiliki minat yang besar berkunjung ke Belitung. Beberapa destinasi pariwisata seperti Tanjung Kelayang, Bukit Peramun, Gusong Bugis, Batu Baginda, Batu Mentas, Tanjungpendam dan lainnya yang terkenal di Belitung menyuguhkan keasrian dan keindahannya yang tidak didapatkan di kota-kota besar.

Program utama yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja tersebut dilaksakan melalui Program Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan yang mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya pengembangan pariwisata didorong oleh beberapa faktor sebagai daya ungkit pengembangan pariwisata, antara lain :

a. Attraction (Atraksi Wisata/Daya Tarik Wisata)

Ada 3 hal penting dalam daya tarik wisata yaitu alam, budaya dan daya tarik buatan. Kondisi alam Belitung yang dikelilingi lautan dan pantai yang indah, menjadi daya tarik utama wisatawan nusantara terutama yang berasal dari daerah padat penduduk seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Semarang, dan lainnya. Alam yang masih asri dan alami dengan udara yang bersih menjadikan penduduk kota memiliki minat yang besar berkunjung ke Belitung. Beberapa destinasi pariwisata seperti Tanjung Kelayang, Bukit Peramun, Gusong Bugis, Batu Baginda, Batu Mentas, Tanjungpendam dan lainnya yang terkenal di Belitung menyuguhkan keasrian dan keindahannya yang tidak didapatkan di kota-kota besar.

Budaya masyarakat Belitung yang kental dengan melayu serta perilaku masyarakatnya yang ramah, senang bergaul dan menjunjung tinggi toleransi umat beragama pada akhirnya menciptakan iklim berwisata yang aman dan nyaman dan kondusif bagi wisatawan. Sedangkan wisata buatan yaitu *waterboom*/kolam renang, kolam pemancingan, menyusuri hutan bakau dan event-event wisata tingkat nasional juga terbukti menarik minat wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara seperti ASEAN HLTF, Pesona Belitung Beach Festival, dan lain-lain. Seiring berkembanganya pariwisata di Indonesia, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung didukung oleh OPD di Pemerintahan Kabupaten Belitung serta BUMD/BUMN dan pihak swasta akan menjaga anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membangun insfrastruktur didestinasi pariwisata seperti jalan, jembatan, drainase, jaringan

listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan jaringan telekomunikasi dan sarana lainnya guna memberikan pelayanan yang maksimal (*hospitality*) kepada wisatawan.

b. Amenities (Amenitas/Fasilitas)

Fasilitas-fasilitas yang sudah ada di destinasi pariwisata di Kabupaten Belitung seperti bandara, pelabuhan, hotel berbintang dan non bintang, rumah makan (menu barat, nusantara dan lokal), rumah ibadah, rumah sakit 24 jam, gedung pertunjukan dan sebagainya juga menjadi faktor penentu orang berkunjung ke Belitung. Namun masih diperlukan pembangunan sarana lainnya seperti petak kios cinderamata didestinasi pariwisata, tempat parkir, saung/gazebo, kamar ganti/bilas, dan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan utama wisatawan.

c. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas ke Pulau Belitung dapat dicapai melalui 2 pintu utama yaitu Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan. Di Bandara Hanandjoeddin Tanjungpandan, ada 2 (dua) rute penerbangan yaitu Tanjungpandan-Jakarta (PP) dan Tanjungpandan-Pangkalpinang (PP). Wisatawan manca negara dan domestik bisa melakukan penerbangan langsung atau transit (via Jakarta/Pangkalpinang). Sedangkan Pelabuhan Laskar Pelangi dengan armada Kapal Express Bahari melayani rute Tanjungpandan-Pangkalbalam (Pulau Bangka).

Akses yang mudah kedestinasi pariwisatadi belitung, bisa dicapai dengan mobil, sepeda motor dan sepeda. Transportasi umum seperti bis dan jasa transportasi lainnya (mobil/sepeda motor rental) sangat mudah ditemukan di pusat kota Tanjungpandan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 300.000,- s.d Rp. 1.000.000,- sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Kemudahan akses transportasi dan penerapan tarif yang sesuai menjadi faktor penunjang besarnya minat berkunjung wisatawan ke Belitung.

d. Ancilliary (Pelayanan Tambahan).

Sarana pendukung lainnya (tambahan) di destinasi pariwisata Belitung yang sebenarnya merupakan kebutuhan pokok wisatawan seperti ketersediaan pusat informasi, *money changer*, biro perjalanan, lembaga-lembaga kepariwisataan, dan usaha jasa pariwisata lainnya seperti (*guide, spa, bodyguard, laundry,* dan lain-lain). Di Kabupaten Belitung, khususnya di destinasi pariwisata utama seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, Bukit Peramun, Gusung Bugis, dan Tanjungpendam, memiliki/terdapat fasilitas-fasilitas tambahan yang memudahkan wisatawan. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting keberadaannya dan akan terus ditingkatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan wisatawan/masyarakat umum.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, antara lain :

- Tingginya harga tiket pesawat sepanjang tahun 2023, dengan rata-rata harga tiket berkisar dari Rp. 700.000,- s.d Rp.900.000,- untuk 1 kali perjalanan ke Belitung dari Jakarta. Mahalnya harga tiket menyebabkan banyaknya pembatalan perjalanan wisatawan domestik melalui agen perjalanan wisata.
- Berkurangnya operator penerbangan pada bulan November s.d Desember 2023 dari 5 (lima) maskapai yaitu Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air, Nam Air dan Super Air Jet menjadi 4 (empat) yaitu Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air dan Nam Air.
- Kurangnya penerbangan langsung dari dan ke Belitung untuk destinasi selain Jakarta dan Pangkalpinang.

Grafik 2.9
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Manca Negara Tahun 2023

DATA WISATAWAN NUSANTARA DAN MANCANEGARA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

TAHUN 2023

NO	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI	
	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN
1	18.477	357	20.712	343	23.625	399	18.086	615	24.537	334	26.931	650
2	18.834		21.055		24.024		18.701		24.871		27.581	

NO	JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN	WISNU	WISMAN
1	27.829	708	26.164	995	26.431	606	24.272	690	28.334	621	29.379	775
2	28.537		27.159		27.037		24.962		28.955		30.154	

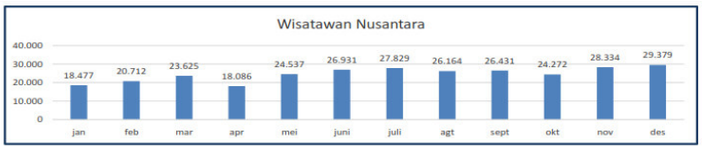

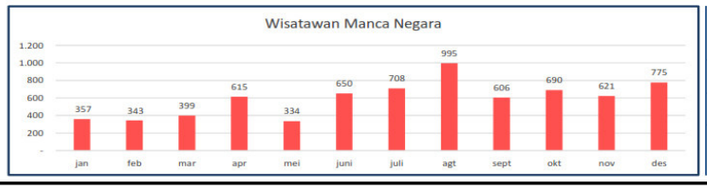

TOTAL WISATAWAN TAHUN 2023	
WISNU	294.777
WISMAN	7.093
TOTAL	301.870

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2023

Tabel 2.87
Persentase Kedatangan Wisatawan dari Bandara Udara dan Pelabuhan Kabupaten Belitung Tahun 2023

No.	Via	Tahun										Persentase Rata-rata dalam 5 tahun (2020 – 2023)
		2019 (orang)	%	2020 (orang)	%	2021 (orang)	%	2022 (orang)	%	2023 (orang)	%	
1.	Bandar Udara Tanjungpandan	395,274	**87.59**	163,298	**92.42**	147,363	**90.33**	282,757	**89.33**	323,418	**91.00**	90.25%
2.	Pelabuhan Tanjungpandan	55,987	**12.41**	13,402	**7.58**	15,774	**9.67**	33,781	**10.67**	30,255	**9.00**	9.75%
	Jumlah	**451,261**	**100**	**176,700**	**100**	**163,137**	**100**	**316,538**	**100**	**353,673**	**100.00**	**100**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2023

Tingginya persentase melalui bandar udara menggambarkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan Belitung sangat tergantung pada banyaknya operator penerbangan, jumlah destinasi kedatangan (pintu masuk) selain Jakarta dan Pangkalpinang.

Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung mengelola pendapatan daerah berupa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan target pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.669.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.085.838.980,- atau setara capaiannya dengan 124.96% atau dengan predikat **SANGAT BAIK.** Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan retribusi yang tersebar di 6 destinasi wisata yaitu :

1. Taman Hiburan Tanjungpendam
2. Taman Wisata Kolong Keramik
3. Kolam Dayang Sripinai
4. Pusat Selam (Dive Center) Tanjung Binga
5. Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang

Tabel 2.88
Data Objek Retribusi yang dikelola Tahun 2023

1	Tiket Masuk Taman Hiburan	15	Water Boom Kolong Keramik
2	Jasa Kebersihan Taman Hiburan	16	Tiket Masuk Kolong Keramik
3	Panggung Hiburan Taman Hiburan	17	Tiket Masuk Kolam Dayang Sri Pinai
4	Tempat Usaha (kios.Los.Gerobak) Taman Hiburan	18	Jasa Kebersihan Kolam Dayang Sri Pinai
5	Tanah/Lahan Taman Hiburan	19	Petak Kios Kolam Dayang Sri Pinai

6	Sewa Kursi Taman Hiburan	20	Selam Tanpa Tabung Pusat Selam Dive Center
7	Ruang Pertemuan Kolong Keramik	21	Selam Full Pusat Selam Dive Center
8	Tabung Selam dg isi Pusat Selam Dive Center	22	Sewa Amphiteater Siang Tanjung Kelayang
9	Snorkling Pusat Selam Dive Center	23	Pendopo Kesenian Malam Tanjung Kelayang
10	Jasa Toilet Kamar Mandi Tanjung Kelayang	24	Pendopo Kesenian Siang Tanjung Kelayang
11	Parkir Motor Tanjung Kelayang	25	Pendopo Utama Malam Tanjung Kelayang
12	Parkir Motor Roda 4 Tanjung Kelayang	26	Pendopo Utama Siang Tanjung Kelayang
13	Parkir Motor Roda 6 Tanjung Kelayang	27	Pendapatan Denda Retribusi
14	Sewa Amphiteater malam Tanjung Kelayang	28	Penerimaan Lain-Lain

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2023

Capaian kinerja pengelolan retribusi pariwisata diatas 100 % disebabkan oleh banyaknya pengunjung Pantai Wisata Tanjungpendam melalui even/acara-acara yang diselenggarakan, kualitas sarana pariwisata yang semakin membaik serta perilaku masyarakat yang tertib membayar retribusi karcis masuk.

Tabel 2.89
Data Objek Retribusi Pariwisata Tahun 2023

No.	Objek Retribusi	Target Tahun 2023	Target Tahun 2023 (PAPBD)	Reliasasi s.d Bulan Desember 2023
				Total
1	Tiket Masuk Taman Hiburan	1.000.000.000	1.283.893.000	1.481.400.000
2	Jasa Kebersihan Taman Hiburan	19.124.000	19.124.000	20.523.000
3	Panggung Hiburan Taman Hiburan	6.000.000	6.000.000	17.000.000
4	Tempat Usaha (kios.Los.Gerobak)Taman hiburan	147.183.000	147.183.000	214.971.200
5	Tanah/Lahan Taman Hiburan	25.000.000	25.000.000	54.365.000
6	Sewa Kursi Taman Hiburan	500.000	500.000	600.000
Jumlah Pendapatan Taman Hiburan		**1.197.807.000**	**1.481.700.000**	**1.788.859.200**
1	Ruang Pertemuan Kolong Keramik	48.000.000	48.000.000	36.750.000
2	Water Boom Kolong Keramik	60.793.000	4.500.000	4.500.000
3	Tiket Masuk Kolong Keramik	25.400.000	1.800.000	1.800.000
Jumlah Pendapatan Kolong Keramik		**134.193.000**	**54.300.000**	**43.050.000**
1	Tiket Masuk Kolam Dayang Sripinai	84.500.000	84.500.000	128.362.000
2	Jasa Kebersihan Kolam Dayang Sripinai	1.080.000	1.080.000	912.000
3	Petak Kios Kolam Dayang Sripinai	1.440.000	1.440.000	1.500.000
Jumlah Pendapatan Kolam Dayang Sri Pinai		**87.020.000**	**87.020.000**	**130.774.000**
1	Selam Tanpa Tabung Dive Center	700.000	700.000	720.000
2	Selam Full Dive Center	9.000.000	9.000.000	6.800.000
3	Tabung Selam dg isi Dive Center	900.000	900.000	900.000
4	Snorkling Dive Center	600.000	600.000	600.000
Jumlah Pendapatan Dive Center		**11.200.000**	**11.200.000**	**9.020.000**
1	Jasa Toilet Kamar Mandi Tanjung Kelayang	15.000.000	15.000.000	17.080.000
2	Parkir Motor Tanjung Kelayang	1.000.000	1.000.000	1.267.000
3	Parkir Motor Roda 4 Tanjung Kelayang	4.800.000	4.800.000	5.258.000
4	Parkir Motor Roda 6 Tanjung Kelayang	1.200.000	1.200.000	1.929.000
5	Sewa Amphiteater malam Tanjung Kelayang	1.000.000	1.000.000	-
6	Sewa Amphiteater Siang Tanjung Kelayang	1.000.000	1.000.000	-
7	Pendopo Kesenian Malam Tanjung Kelayang	1.000.000	1.000.000	-
8	Pendopo Kesenian Siang Tanjung Kelayang	1.000.000	1.000.000	-
9	Pendopo Utama Malam Tanjung Kelayang	1.000.000	1.000.000	-
10	Pendopo Utama Siang Tanjung Kelayang	12.000.000	8.000.000	4.000.000
Jumlah Pendapatan Tanjung Kelayang		**39.000.000**	**35.000.000**	**29.534.000**
1	Pendapatan Denda Retribusi			12.962.860
2	Penerimaan Lain-Lain			71.638.920
Jumlah Pendapatan/penerimaan		**-**	**-**	**84.601.780**
TOTAL		**1.469.220.000**	**1.669.220.000**	**2.085.838.980**

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2023

Grafik 2.10
Retribusi Pariwisata Tahun 2023

Bulan	Jumlah
Januari	246.380.760
Februari	152.816.060
Maret	112.913.620
April	111.016.860
Mei	191.762.360
Juni	171.138.860
Juli	247.843.700
Agustus	153.270.060
September	144.054.800
Oktober	240.169.360
November	163.617.380
Desember	150.855.160
Total	**2.085.838.980**

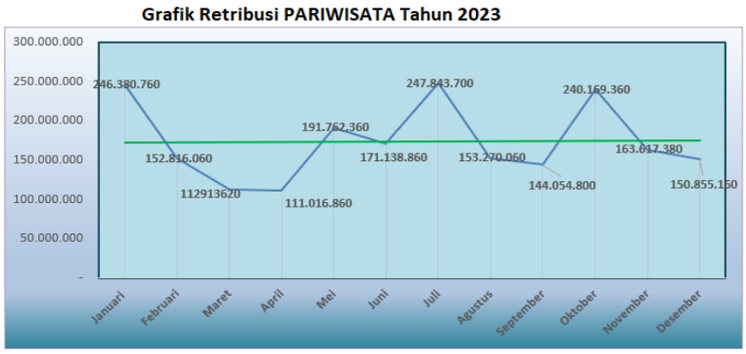

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung 2023

Disamping itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung mendorong meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan melalui program dan kegiatan kepariwisataan seperti festival, promosi pariwisata dan kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM pariwisata. Berikut data PAD Sektor Pariwisata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2.90
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	**PAJAK DAERAH**	**18.202.602.743,80**	**9.259.152.455,30**	**11.829.128.025**	**20.232.772.727,34**	**21.278.206.662,18**
1.	PAJAK HOTEL	9.251.808.783,11	3.877.534.981,54	4.872.620.335,98	8.271.751.894,00	9.348.814.425,07
2.	PAJAK RESTORAN	8.371.801.817,68	5.122.995.494,91	6.567.366.427,56	11.416.789.530,45	11.489.196.766,81
3.	PAJAK HIBURAN	578.992.143,01	258.621.978,85	389.141.261,10	544.231.302,89	440.195.470,30
II	**RETRIBUSI DAERAH**	**2.204.156.200,00**	**1.099.005.700,00**	**1.008.780.200**	**2.111.728.000**	**2.224.076.200**
1.	RETRIBUSI TEMPAT PARIWISATA	2.204.156.200,00	1.099.005.700,00	1.008.780.200	2.111.728.000,00	2.224.076.200,00
	TOTAL	**20.406.758.943,80**	**10.358.158.155,30**	**12.837.908.224,64**	**22.344.500.727,34**	**23.502.282.862,18**

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2023

Grafik 2.11
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

Tahun	TOTAL PAD PARIWISATA
2019	20.406.758.943,80
2020	10.358.158.155,30
2021	12.837.908.224,64
2022	22.344.500.727,34
2023	23.502.282.862,18

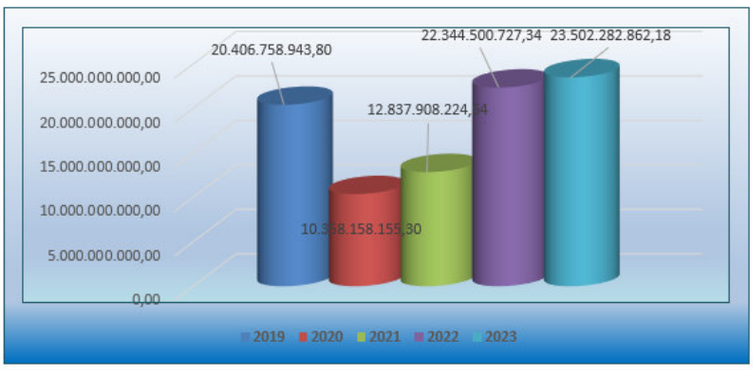

Sumber : badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2023

Dari data diatas, terdapat korelasi yang sangat erat antara jumlah kunjungan wisatawan dengan jumlah PAD Sektor Pariwisata yang masuk ke kas daerah. Keterkaitan ini merupakan sinyal bahwa semakin tinggi kunjungan wisatawan, semakin tinggi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.7.131.957.712,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.151.492.722,- setara dengan 86.25% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan :

a. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 198.973.400,- atau setara dengan 99.48%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini adalah pembuatan dokumen perencanaan untuk Geosite batu bedil dan Geosite Gunung Kubing. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

b. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.966.950,- realisasi sebesar Rp. 341.985.962,- atau setara dengan 94,74%. Penyediaan dana diperuntukkan operasional Kantor Geopark Information Center mulai dari honorarium Non ASN sebanyak 4 (empat) orang, ATK, BBM, FC, alat kebesihan dan sebagainya.

Geopark Information Center merupakan pusat informasi UNESCO Global Geopark pada April 2022 dengan 11 (sebelas) geosite di Kabupaten Belitung dan 10 (sepuluh) Geosite di Kabupaten Belitung Timur. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

2. Pengelolaan Destinasi Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub Kegiatan:

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.228.722.112,- realisasi sebesar Rp.5.316.687.424,- atau setara dengan 85.36%. Kegiatan ini adalah operasional Objek Wisata Taman Hiburan, Kolong Keramik dan Dayang Sripinai, Dive Center Tanjung Binga dan DTW Tanjung Kelayang dan Rumah Adat Belitung.

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 342.268.650,- realisasi sebesar Rp.293.845.936,- atau setara dengan 85.85%. Kegiatan bersumber dana DAK Non Fisik terdiri dari 2X pelatihan :

1.

Pelatihan pemandu geo wisata (DAK Non FISIK). Jumlah peserta 40 orang Pelaku Pariwisata se Kab. Belitung. Dilaksanakan di Hotel Grand Hatika dari tanggal 6-8 Juni 2023. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pariwisata di Destinasi pariwisata.

2.

Pelatihan pemandu geo wisata (DAK Non FISIK)sebanyak 40 orang dengan peserta berasal dari pelaku pariwisata se Kabupaten belitung dilaksanakan di Hotel Lalucia dari tanggal 20-23 Juni 2023.

3. Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 1.395.762.415,- dengan realisasi sebesar Rp.1.304.699.975,- atau setara dengan 93,47% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.702.150,- realisasi sebesar Rp.53.938.400,- atau setara dengan 96.83%. Faktor pendorongnya adalah kegiatan mempromosikan pariwisata Belitung berupa video promosi pariwisata. Faktor penghambat tidak ada, belanja sesuai kebutuhan.

Kegiatan Pembuatan Media Promosi Pariwisata sebanyak 300 eksamplar leaflet dan souvenir. Leaflet pariwisata berisikan informasi mengenai desrinasi pariwisata, agen perjalanan wisata, industry pariwisata, peta dan sarana pendukung lainnya yang ada di Kabupaten Belitung.

b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. dengan alokasi anggaran sebesar Rp.960.958.415,-realisasi sebesar Rp.893.917.400,- atau setara dengan 93.02%. terdiri dari 3 pekerjaan (kegiatan) yaitu :

1.

Kegiatan Pesona Belitung Beach Festival 2023 bertujuan mempromosikan Belitung sebagai tujuan wisata yang menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara serta meningkatkan dan memantapkan citra wisata Belitung di pasar nusantara/ domestik maupun internasional.

Kegiatan dilaksanakan di Pantai Tanjungpendam selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 01-04 juni 2023 dengan berbagai macam kegiatan didalamnya diantaranya yaitu : Fashion Carnaval, Parade Budaya, Expo, Band Competition, pertunjukan seni dan budaya, live music, beach clean dan senam aerobic.

2.

Kegiatan Expo Dalam Daerah dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tanjungpandan Ke -185. Expo selenggarakan di Pantai Tanjungpendam mulai tanggal 1-5 Juli 2023

3.

Kegiatan Expo di Luar Daerah yaitu di Cihampelas Mall, Bandung pada ajang Gelar Produk Usaha Pariwisata dan Koperasi Daerah dimulai dari tanggal 15-20 November 2023.

Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah provinsi, kebupaten /kota, juga bertujuan mempromosikan pariwisata Belitung pada dunia internasional.

c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri.dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi sebesar Rp.10.300.000,- atau setara dengan 100%.

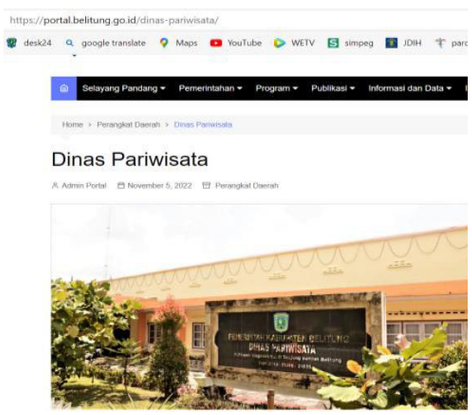

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan ini berupa honorarium penulis untuk 100 artikel yang tayang di website https://dispar.belitung.go.id. Faktor pendorong adalah kegiatan ini merupakan sarana promosi digital dan dapat menjangkau semua kalangan melalui handphone android. Faktor penghambat tidak ada.

d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp.368.801.850,- realisasi sebesar Rp.346.544.175,- atau setara dengan 93.96%. Kegiatan ini merupakan kegiatan Pemilihan Duta pariwisata Belitung yaitu Pemilihan Bujang dan Dayang Belitong Tahun 2023.

Peserta Pemilihan Bujang dan Dayang Belitung berasald ari 5 (lima) kecamatan yang lolos seleksi di tingkat kecamatan masing-masing. Pembekalan kepariwisa-taan berlangsung selama 3 hari di Hotel Golden Tulip dan pelaksanaan grand final di pantai Tanjungpendam. Kegiatan dimulai tanggal 12-15 Juli 2023.

Faktor pendorongnya adalah kegiatan ini merupakan kegiatan menciptakan duta-duta pariwisata Belitung yang diharapkan berpartisipasi aktif mempromosikan pariwisata belitung secara luas. Faktor penghambat tidak ada.

4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif** dengan anggaran sebesar 1.449.168.374,- realisasi sebesar Rp.1.235.194.665,- atau setara dengan 85,23%. dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dan dilaksanakan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.202.820,- realisasi sebesar Rp.93.223.956,- atau setara dengan 79.47%.

Kegiatan ini berupa Pelatihan perencanaan kepariwisataan bagi aparatur pemerintah desa (APBD) se kabupaten Belitung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan aparatur desa dalam mengembangan pariwisata di desa mereka.

Dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 14-16 Maret 2023 di Hotel Maxone Tanjungpandan. Faktor pendorongnya kinerja adalah kegiatan Golden Tulip. Faktor penghambat tidak ada.

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata anggaran sebesar Rp.919.241.450,- realisasi sebesar Rp.761.427.625,- atau setara dengan 85,23%. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) kali pelatihan yang bersumber dana DAK Non Fisik Kementerian Pariwisata RI yaitu :

1.

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner (DAK Non FISIK). Peserta merupakan pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 25-28 Juli 2023 di Hotel Golden Tulip Belitung.

2.

Kegiatan Pelatihan kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata(DAK Non FISIK). Peserta adalah pengelola homestay dan pelaku pariwisata Belitung berjumlah 40 Orang tanggal 6-8 Agustus 2023 bertempat di La Lucia

3.

Pelatihan Pemandu wisata outbond (DAK Non FISIK) peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 5-8 September 2023 di Hotel La Lucia Belitung.

4.

Pelatihan pemandu Ekowisata dengan peserta adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Belitung berjumlah 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 3-5 Oktober 2023 di Kec. Selat Nasik.

5.

Pelatihan Pemasaran Digitalisasi (DAK Non FISIK) peserta 40 orang berasal dari pelaku pariwisata di Belitung. Kegiatan mulai tanggal 24-26 Oktober 2022 di Desa Pelepak Pute.

Pelaksanaan 5 (lima) pelatihan ini sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana DAK Non Fisik yang pemanfaatannya sudah ditentukan. Faktor pendorong adalah kegiatan ini merupakan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata RI kepada pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengembangkan kepariwisataan Belitung. Faktor penghambat adalah juknis yang terkesan “kaku” dan harus sesuai petunjuk pelaksanaan, sehingga tidak bisa mengakomodir keadaan dilapangan/kondisi terkini. Misalkan sebuah desa mengharapkan pelaku pariwisata mereka /sebagian warganya membutuhkan pelatihan sementara, desa tersebut bukan lokasi desa/wisata/lokasi prioritas (sesuai juknis).

c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konversi Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.296.512.650,- realisasi sebesar Rp.263.573.700,- atau setara dengan 88.90% yaitu berupa kegiatan pertunjukan seni di wilayah Kabupaten Belitung

Kegiatan pertunjukan seni merupakan kegiatan memperkenalkan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Belitung guna melestarikannya agar tidak punah sekaligus menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjaganya.

2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dilaksanakan dengan sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.211.454,- realisasi sebesar Rp.116.969.384,- atau setara dengan 84.63%. kegiatan ini dilaksanakan untuk 1 (satu) kali pelatihan bersumber dana APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023

1.

Pelatihan Worksop sub sektor Musik (APBD) bagi para pelaku seni music Belitung dengan total peserta 40 orang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Maxone Belitung. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang fotografi.

Faktor pendorongnya kegiatn ini adalah kegiatan yang mendukung pengembangan 17 seubsektor ekonomi kreatif di kabupaten Belitung. Faktor penghambat adalah ketersediaan dana yang tidak memadai untuk menambah frekuensi pelaksanaan pelatihan subsektor ekonomi kreatif.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung upaya pencapaian tersebut. Berikut beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata :

- Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2016;
- Penetapan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016;
- Penetapan Geopark Belitung sebagai Geopark Nasional pada tahun 2017;
- Penetapan *Unesco Global Geopark* Belitung pada tanggal 15 April 2021 untuk periode 2021-2024;
- Dukungan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PUPR, dalam pengembangan KSPN Tanjung Kelayang.
- Adanya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata, antara lain :

- Kurangnya operator penerbangan, kurangnya penerbangan langsung dari dan ke Belitung untuk destinasi selain Jakarta dan Pangkalpinang, dan kurangnya jumlah jadwal penerbangan dari dan ke Belitung.
- Pintu masuk wisatawan ke Belitung Tahun 2021 sebesar 88,66 % melalui Bandara Udara Hanandjoeddin Tanjungpandan dan 11,34 % melalui Pelabuhan Laskar Pelangi Tanjungpandan.
- Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di daya tarik wisata belum maksimal.
- Pemasaran pariwisata (promosi pariwisata) belum maksimal.
- SDM Pariwisata kurang dan kualitas SDM Pariwisata tidak sesuai standar.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut di atas perlu strategi dan kebijakan daerah untuk mengatasinya. Berikut disampaikan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang :

- Promosi secara berkelanjutan dan inovatif

Promosi wajib dilakukan agar wisatawan semakin mengenal daerah tujuan wisata. Baik itu dengan melalui event-event berskala nasional maupun internasional, menyelenggarakan atau mengikuti pameran baik budaya maupun produk daerah berskala nasional dan internasional. juga
melakukan promosi potensi wisata Belitung secara kreatif melalui jaringan nirkabel atau medsos, yang dapat menjangkau seluruh dunia tanpa batas.

- Meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi pariwisata

Kesan pertama yang ada di benak setiap wisatawan adalah pelayanan. Pelayanan yang baik dan ramah akan membuat wisatawan merasa dihargai dan kehadirannya memang diharapkan. Perasaan dihargai dan diharapkan akan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung di lain waktu. Itu bisa diciptakan jika

layanan dan akomodasi pariwisatanya sudah bagus, lengkap dan membuat para wisatawan merasa nyaman. Layanan adalah hal yang tidak boleh dilewatkan, ini menjadi semacam sihir yang membuat para wisatawan merasa wajib untuk datang dan datang kembali.

- ⌘ Perlu adanya komitmen bersama untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kunjungan wisatawan (wisatawan domestik dan mancanegara).
- ⌘ Perlu ditingkatkan kerjasama semua pihak untuk segera mewujudkan pembukaan rute penerbangan baru dari dan ke Belitung.
- ⌘ Meningkatkan keamanan

Keamanan adalah faktor penting yang tidak boleh dilewatkan jika ingin wisatawan semakin banyak berdatangan. Keamanan meningkat jika ada peran aktif para penegak hukum menjaga wilayahnya dari sentuhan orang-rang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat setempat juga harus ikut menjaga suasana yang aman agar wisatawan bisa menikmati liburan dengan nyaman. Selain itu keramahtamahan warga juga sangat menentukan kemajuan pariwisata suatu daerah.

- ⌘ Memperbanyak destinasi wisata

Pengunjung biasanya tertarik dengan tempat wisata baru, unik dan menarik. Ini bisa diwujudkan dengan membuat destinasi baru yang belum ada. Tapi dengan adanya kerjasama dari pihak swasta dan pemerintah, kebutuhan dana bisa diatasi dan pembangunan bisa dilanjutkan demi menghadirkan tempat baru sehingga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung.

Tabel 2.91
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Peningkatan Daya Tarik destinasi pariwisata	7.3131.957.712,00	6.151.492.722,00	86,25
2.	Pemasaran Pariwisata	1.395.762.415,00	1.304.699.975,00	93,48
3.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.449.168.374,00	1.235.194.665,00	85,23
4.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	317.764.253,00	301.959.525,00	95,03

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dengan rata-rata capaian program 90.00% dengan persentase realisasi anggaran 87.36% maka terdapat efesiensi 12.64%.

SASARAN 9 : Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB dengan target “27,83%”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB	Persentase	26,19	27,83	26,56	95,43	SB	27,83

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran "Meningkatnya Produksi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan", yaitu Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB tahun 2023 sebesar 26,56%. Pencapaian ini belum mencapai target atau belum terealisasi sesuai target yang ditetapkan sebesar 27,83 %. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 sebesar 95,43% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Berikut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung, selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Grafik 2.12
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

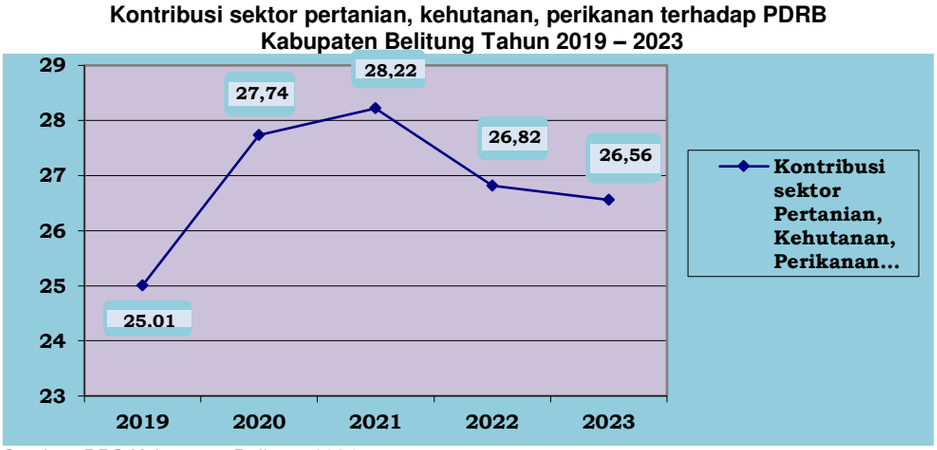

Sumber: BPS Kabupaten Belitung 2024

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar. Selama kurun waktu 2019 – 2023, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,01%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 27,74% dan meningkat cukup signifikan sampai dengan tahun 2021 menjadi 28,22% namun terus mengalami fluktuasi dan menurun kembali tahun 2022 sebesar 26,82% dan tahun 2023 sebesar 26,56. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dn kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung 2018 – 2023, upaya pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan" melalui 2 (dua) strategi, yaitu; 1) meningkatkan produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan; dan 2) meningkatkan perikanan tangkap, dan budidaya.

Ada 5 (lima) arah kebijakan dari strategi meningkatkan produksi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa dan mendukung pembangunan kepariwisataan, yaitu; 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; 2) mengembangkan produksi pertanian di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) "Mina Agro Wisata" Selat Nasik; 3) meningkatkan pengelolaan pasca panen dan mutu produksi; 4) perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; dan 5) penguatan kelembagaan pertanian.

Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman selama kurun waktu 4 (empat) tahun, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kuintal) Tahun 2019–2023

JENIS TANAMAN	2019	2020	2021	2022	2023
Bawang Daun	115	48	96	467	3 225
Bawang Merah	785	40	-	56	246
Bayam	808	355	1 036	3 316	3 856
Buncis	-	66	78	251	2 818
Cabai Besar	-	-	55	-	-
Cabai Keriting	-	-	1 514	1 472	4 600
Cabai Rawit	1 916	2 047	1 715	2 599	11 092

Kacang Panjang	2 477	2 014	1 208	2 793	10 038
Kangkung	1 145	789	2 025	3 801	4 755
Ketimun	5 890	4 620	3 793	5 886	10 105
Labu Siam	-	-	-	31	17
Petsai	1214	870	777	2 793	4 336
Terung	1 347	791	589	3 054	7 769
Tomat	198	312	261	852	3 661
Selada	-	-	-	-	-
Melon	-	-	104	35	2
Semangka	325	340	231	396	2 600

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tahun 2023 tertinggi adalah cabai rawit yaitu 11.092 kuintal, dan terendah melon yaitu 2 kuintal. Dibandingkan tahun 2022 tertinggi adalah ketimun yaitu 5.886 kuintal, dan terendah labu siam yaitu 31 kuintal. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tertinggi adalah cabai rawit yaitu sebanyak 11.092 kuintal pada tahun 2023 dan produksi terendah melon sebanyak 31 kuintal pada tahun 2023.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kg) selama kurun waktu 4 (empat) tahun, tersaji seperti tabel berikut:

Tabel 2.94
Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman (kg) tahun 2020–2023

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023
Jahe	1 134	9 554	8 395	25 788
Jeruk Nipis		236	121	13 670
Kencur	724	1 477	4 010	18 604
Kunyit	1 166	2 499	1 852	26 419
Laos/Lengkuas	1 917	6 376	18 090	58 202
Sambiloto	-	2	600	-
Serai	-	718	1 119	21 462

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di kabupaten Belitung tahun 2023 tertinggi pada produksi laos/ lengkuas yaitu 58.202 kg dan produksi terendah pada jeruk nipis yaitu 13.670 kg. Dibandingkan dengan tahun 2022 Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman, tertinggi pada laos/ lengkuas yaitu 18.090 kg, dan produksi terendah pada jeruk nipis yaitu 121 kg. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir produksi tertinggi pada laos/lengkuas sebanyak 58.202 kg pada tahun 2023, dan produksi terendah pada sambiloto sebanyak 2 kg di tahun 2021.

Selain meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu juga meningkatkan produksi perkebunan. Adapun produksi perkebunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2022-2023 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.95
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman
(ribu ton) Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Lada		Aren	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Membalong	3 725,20	3 841,20	221,80	213,80	1 252,00	1 155,00	6 749,00	6 234,00	331,50	323,50
Tanjungpandan	807,00	815,50	323,30	280,60	266,50	216,60	257,50	226,80	3,30	3,30
Badau	958,50	967,50	383,40	382,40	583,20	570,20	831,50	834,50	2,16	2,16
Sijuk	1 312,50	1 409,50	553,00	553,00	714,50	710,50	705,00	703,50	1,50	1,30
Selat Nasik	-	-	118,25	116,20	751,00	747,00	314,99	31,90	4,60	4,60
Belitung	**6 803,20**	**7 033,70**	**1 599,75**	**1,546,00**	**3 567,20**	**3 399,30**	**8 857,99**	**8 309,70**	**343,06**	**334,86**

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2024

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 6.803.20 ribu ton di tahun 2022 menjadi 7.033,70 ribu ton ditahun 2023; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman kelapa mengalami penurunan dari 1.599,75 ribu ton di tahun 2022 menjadi 1.599,75 ribu ton ditahun 2023; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman karet mengalami penurunan dari 3.567,20 ribu ton di tahun 2022 menjadi 3.399,30 ribu ton ditahun 2023; Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman lada juga mengalami penurunan sebesar dari 8.857,99 ribu ton ditahun 2022 menjadi 8.309,70 ribu ton di tahun 2023; dan Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis tanaman aren juga mengalami penurunan dari 343,06 ribu ton ditahun 2022 menjadi 334,86 ribu ton ditahun 2023. Sehingga produksi perkebunan yang paling tinggi di tahun 2023 ada pada lada sebesar 8.309,70 ribu ton dan terendah ada pada produksi perkebunan aren yaitu hanya sebesar 334,86 ribu ton.

Upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam bentuk persentase sebagai indikator kesejahteraan petani. Nilai tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dalam penentuan Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga. Berikut gambaran persentase (%) peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2023 :

Tabel 2.96
Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2023

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)	93,03 %	116,35%	125,07%

Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2023 terealisasi sebesar 116,35% dari target sebesar 93,03% dengan tingkat capaian sebesar 125,07%.

Dari Nilai tersebut dapat dikatakan bahwa petani di Kabupaten Belitung secara keseluruhan sudah sejahtera. Capaian kinerja program ini didukung oleh 6 (enam) program yang dijabarkan pada sasaran program sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana pertanian;
2. Meningkatnya persentase (%) prasarana pertanian yang digunakan;
3. Meningkatnya persentase (%) prasarana pertanian dalam kondisi baik;
4. Terkendalinya kasus penyakit hewan menular;
5. Tertanggulanginya bencana pertanian;
6. Meningkatnya kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Sasaran program pertama yaitu persentase kebutuhan sarana pertanian dengan target 12,25% (dua belas koma dua lima persen) terealisasi 18,28% (delapan belas koma dua puluh delapan persen). Persentase (%) kebutuhan sarana pertanian dihitung berdasarkan rata-rata persentase kebutuhan sarana pertanian pada subsektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang di fasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sarana Pertanian berupa benih padi dan bibit ternak yang diberikan kepada kelompok tani melebihi target karena ada dukungan dana insentif daerah (DID Fiskal) untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2023. Capaian sasaran program diatas didukung dengan realisasi anggaran dari kegiatan-kegiatan berikut:

a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp 776.174.438,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 1.403.862.630,- (satu milyar empat ratus tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Realisasi capaian kinerja kegiatan ini berupa jumlah sarana pertanian yang diberikan sebanyak 6 jenis sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Tercapaianya target ini didukung oleh diberikannya bibit manga, bibit sawo, bibit lengkeng, benih cabai, benih padi dan kultivator oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada kelompok-kelompok tani binaan.

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 373.439.800,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dari pagu anggaran Rp 375.041.600,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat puluh satu ribu enam ratus rupiah). Indikator capaian kinerja kegiatan ini yaitu benih dan bibit pertanian terealisasi sebanyak 9.064 bibit dari target 6.000 bibit. Adapun benih dan bibit yang dihasilkan yaitu aneka pisang, nanas dan bibit sapi.

c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 373.439.800,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Indikator capaian kinerja kegiatan ini yaitu tersediianya bibit sapi sebanyak 73 orang dari target 93 ekor. Bibit sapi tersebut dipelihara di UPT Perbenihan dan Perbibitan sebanyak 48 bibit dan terdapat penambahan bibit sapi hasil inseminasi buatan sebanyak 25 ekor di peternak-peternak kecil. Pada tahun 2023 petugas inseminator berkurang karena ada yang pensiun sehingga target bibit sapi dari hasil inseminasi buatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp 924.650.313,- (sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah). Indikator capaian kinerja kegiatan ini yaitu tersedianya bibit ternak unggas sebanyak 21.000 ekor dengan realisasi sebanyak 21.500 ekor. Tingginya capaian kinerja ini didukung oleh adanya tambahan dana insentif fiskal di akhir tahun anggaran.

Gambar Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kotadi UPT Perbenihan dan Perbibitan

Sasaran kedua dan ketiga mendukung capaian Sasaran Strategis 4 dengan cara yang sama dengan kedua sasaran ini mendukung capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian yang Berkelanjutan.

Sasaran progam keempat yaitu terkendalinya kasus penyakit hewan menular terealisasi 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tercapainya target program ini didukung oleh terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan puskeswan oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Capaian sasaran program didukung dengan realisasi anggaran dari kegiatan-kegiatan berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.917.130,-. Indikator kinerja kegiatan ini yaitu pelayanan puskeswan untuk 1200 masyarakat veteriner. Capaian kinerja dari kegiatan ini melebihi target dimana pada tahun 2023 Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kabupaten Belitung melayani 3.496 masyarakat veteriner. Tingginya kinerja kegiatan ini didukung oleh memadainya sarana, prasarana dan tenaga ahli yang kompeten di Puskeswan Kabupaten Belitung.

b. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.401.132,- (empat puluh tujuh juta empat ratus satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Indikator kinerja kegiatan ini yaitu bertambahnya juru sembelih halal yang kompeten sebanyak 30 orang. Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% dimana pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melatih 30 orang masyarakat menjadi juru sembelih halal yang kompeten melalui kegiatan ini. Tercapainya target kinerja kegiatan ini didukung oleh antusias masyarakat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ini.

Gambar Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sasaran program kelima yaitu tertanggulanginya bencana pertanian terealisasi sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian sasaran program tersebut didukung oleh terlaksananya kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp 119.030.390,- (seratus sembilan belas juta tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Indikator kinerja kegiatan ini yaitu fasilitasi penanggulangan bencana pertanian sebanyak dua belas kelompok tani. Tercapainya target kinerja ini didukung oleh pelaksanaan sekolah lapang penanggulangan hama penyakit tanaman sesuai dengan rencana pada tahun 2023.

Gambar Kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan

Sasaran program keenam yaitu Meningkatnya kelas kelembagaan kelompok tani dan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Program Penyuluhan Pertanian mendukung capaian Sasaran Strategis 4 dengan cara yang sama dengan program ini mendukung capaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pertanian yang Berkelanjutan.

Perkembangan target dan realisasi nilai Persentase (%) Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2019-2023 disajikan pada gambar berikut:

Grafik 2.13. Target dan Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) 2019-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Belitung 2024

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 125,26% (seratus dua puluh lima koma dua enam persen) apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018-2023. Capaian kinerja sudah mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk NTP Kabupaten Belitung secara keseluruhan berada di atas angka 100, baik berdasarkan sub sektor dan komoditas, yang berarti petani setiap komoditas di tiap sub sektor sudah sejahtera, NTP dihitung meliputi 4 sub sektor yaitu sub sektor tanaman perkebunan, hortikultura, tanaman pangan

dan peternakan. Untuk meningkatkan kinerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

1. Pembinaan, pendampingan kepada petani hortikultura, khususnya timun dan nanas serta petani tanaman pangan seperti padi dan ubi kayu dalam mengelola usaha taninya agar dapat meningkatkan produksi yang nantinya akan mempercepat peningkatan NTP dengan program bantuan input usaha tani dibarengi dengan diseminasi teknologi;
2. Sinergitas lebih diperkuat lagi antara pemerintah dan petani untuk memelihara sawah dan bisa meningkat produktivitasnya dari tahun ke tahun;
3. Meningkatkan produksi sektor pertanian sekaligus menjaga kestabilan harga jual produk pertanian.

Sementara strategi meningkatkan pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya memiliki 5 (lima) arah kebijakan, yaitu: 1) meningkatkan produksi perikanan budidaya, 2) meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan, 3) pengembangan pembibitan budidaya laut dan 4) mengembangkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) “Mina Agro Wisata” Selat Nasik, dan 5) Pengembangan Ekonomi Biru.

Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan budidaya dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Nilai Kontribusi sub Sektor PerikananTerhadap PDRB Kab. Belitung merupakan Indikator yang digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi PDRB subsektor Perikanan terhadap Total PBRD Kabupaten Belitung. Dimana Nilai kedua PDRB tersebut diperoleh dari BPS Kabupaten Belitung. Kemudian dihitung persentasenya berdasarkan rumusan:

$$Persentase\ Kontribusi\ sub\ sektor\ Perikanan\ terhadap\ PDRB\ Kab.Belitung = \frac{Nilai\ PDRB\ sub\ sektor\ Perikanan\ Tahun - N}{Nilai\ Total\ PDRB\ Kab.Belitung\ Tahun - N} x\ 100\%$$

Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 19,97 %, dan pada tahun 2023, nilai Kontribusi sub Sektor PerikananTerhadap PDRB Kab. Belitung yang terealisasi belum dapat diketahui. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.97
Realisasi Nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung Tahun 2023

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Kontribusi sub Sektor PerikananTerhadap PDRB Kab. Belitung	19,97	Belum Tersedia

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Sebagaimana yang kita ketahui adalah Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan di suatu negara, karena dalam jangka panjang partumbuhan ekonomi akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi. Jika dibandingkan perekonomian negara maju dan negara berkembang, biasanya negara-negara maju lebih mengutamakan untuk mengurangi pengangguran karena sektor industri dan jasa berperan besar dalam peningkatan pendapatan nasional dan penyediaan kesempatan kerja, sedangkan negara-negara berkembang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berupa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu subsektor pertanian penyumbang PDRB adalah perikanan. Secara teoritis, meningkatnya partumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi telah terjadi peningkatan PDRB.

Dengan demikian juga dapat diartikan kalau semakin tinggi nilai persentase PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya.Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik.

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2023 pencapaian indikator ini belum tersedia sehingga target yang ditetapkan belum bisa ditampilkan. Data dimaksud merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung dan baru akan dirilis pada bulan maret tahun 2024. Namun demikian dapat dilihat juga data PDRB sektor Perikanan tahun 2019 sebesar 16.37 atau sekitar 123,45 % dari target PDRB sebesar 13,26. data PDRB sektor Perikanan tahun 2020 sebesar 19.91 atau sekitar 149,81 % dari target PDRB sebesar 13,29. data PDRB sektor Perikanan tahun 2021 sebesar 21.67 atau sekitar 108,73 % dari target PDRB sebesar 19,93. Serta data PDRB sektor Perikanan tahun 2022 sebesar 22.07 atau sekitar 110,63 % dari target PDRB sebesar 19,95 sesuai dengan gambar berikut:

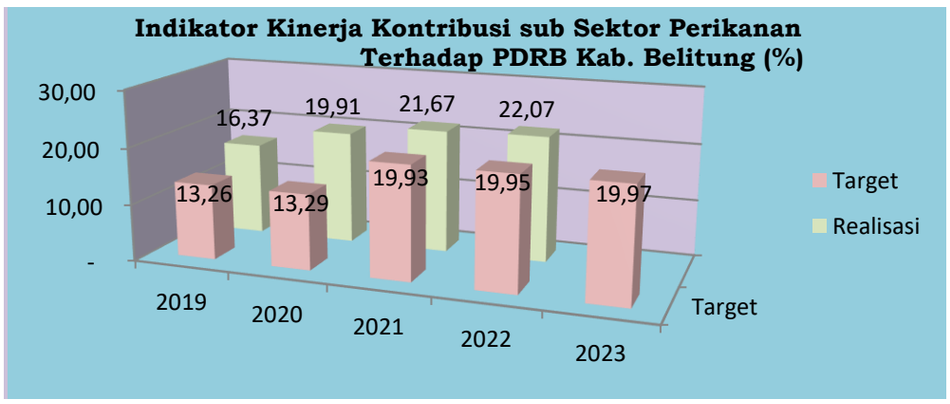

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa BPS tidak merilis lagi nilai PDRB per sub sektor sehingga data PDRB sub sektor perikanan tidak tersedia, namun demikian untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 perhitungan nilai ini dilakukan dengan menggunakan indek implisit PDRB sektor perikanan atas dasar harga berlaku yang berkorelasi dengan data laju pertumbuhan pertanian yang tersedia oleh BPS sehingga datanya sangat sementara sekali.

Jika dilihat dari nilai yang dihasilkan sebesar 16,37 pada tahun 2019, nilai sebesar 19,91 pada tahun 2020 dan nilai sebesar 21,67 pada tahun 2021 serta nilai sebesar 22,07 pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa perekonomian kabupaten Belitung pada sektor perikanan sangat baik bahkan jauh melewati target yang ditetapkan, hal ini menunjukan laju perekonomian sektor perikanan di kabupaten Belitung berjalan dengan baik selama tahun 2019-2022 walaupun sebagaimana kita ketahui pada tahun tersebut sedang dalam kondisi pandemi covid 19, sedangkan untuk tahun 2023 belum dapat diketahui karena rilis laju pertumbuhan pertanian tahun 2023 belum tersedia.

Belajar dari pengalaman tahun 2022 yang lalu diketahui bahwa pencapaian nilai Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kab. Belitung telah mencapai 110,63 % apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2018-2023 sebesar 19,97. Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2022 dan tetap dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Meningkatkan Produksi sektor perikanan baik produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahan hasil perikanan;
2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional bagi pelaku sector perikanan;
4. Meningkatkan SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Melihat dari realisasi tahun 2023 capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh:

1.Produksi perikanan tangkap, Budidaya dan Pengolahan hasil perikanan yang masih relative tinggi;
2.Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3.Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional;
4.SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5.Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini dinas perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan

1.Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
2.Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
3.Peningkatan Produksi Pengolahan hasil Perikanan;
4.Penyediaan Sarana dan prasarana sektor perikanan;
5.Peningkatan SDM sektor Perikanan;
6.Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan sektor Perikanan;
7.Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan SDKP

Kondisi perekonomian sektor perikanan tahun 2023 dikatakan baik dipengaruhi oleh faktor apa saja pada kesempatan ini belum dapat dijelaskan lebih rinci karena butuh survey lebih mendalam terhadap faktor penentu peningkatan perekonomian sektor perikanan. Perlu pengkajian lebih dalam terhadap pendapatan perkapita, kebijakan kebijakan dan struktur ekonominya sektor perikanan. Namun demikian sekilas dapat diperkiraan untuk tahun 2024 nanti kontribusi sektor perikanan akan mengalami penurunan karena pada tahun 2023 kondisi sudah normal kembali setelah masa pandemi dilewati, beberapa tahun sebelumnya sektor perikanan tidak berdampak nyata terhadap pandemi sehingga meningkatkan kontribusi untuk PDRB Kabupaten Belitung disaat sektor lain menurun. Dengan kondisi normal saat ini menyebabkan sektor lain yang sebelum nya terdampak akan segera normal kembali dalam memberikan kontribusi besar kepada total PDRB kabupaten Belitung sehingga dapat mengurangi kontribusi yang selama ini diberikan oleh sektor perikanan.

Namun demikian di tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan, jumlah usaha perikanan dan ekspor hasil perikanan meningkat sehingga ini bisa dijadikan indikator awal yang menyebabkan meningkatnya PDRB sektor perikanan di Tahun 2023. Harapan yang dapat kami simpulkan adalah dengan meningkatnya nilai PDRB ini diharapkan nilai pendapatan nelayan kecil, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha sektor perikanan lainnya dapat juga meningkat sehingga kesejahteraan dapat di peroleh.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Nilai ini diperoleh dengan cara membandingkan antara harga produksi dengan harga konsumsi pembudidaya ikan selama satu yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survey oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Nilai NTPi Tahun 2023 diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

NTPi = IT/IB x 100%

IT : Indek Harga yang diterima Pembudidaya Ikan

IB : Indek Harga yang dibayar Pembudidaya Ikan

Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 106 lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 104 pada tahun 2022. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.98
Tabel Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	106	106,02

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2023 realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai sebesar 106,02 diperoleh dari pencapaian pelaksanaan kegiatan baik yang tertuang dalam renja maupun pelaksanaan tupoksi

masing masing bidang. Realisasi nilai tukar pembudiaya ikan ini mengalami peningkatan sebesar 106,02 (100,02 %) dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 104,8.

Perkembangan realisasi nilai tukar pembudidaya ikan tahun 2019-2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:

Grafik 2.14 Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

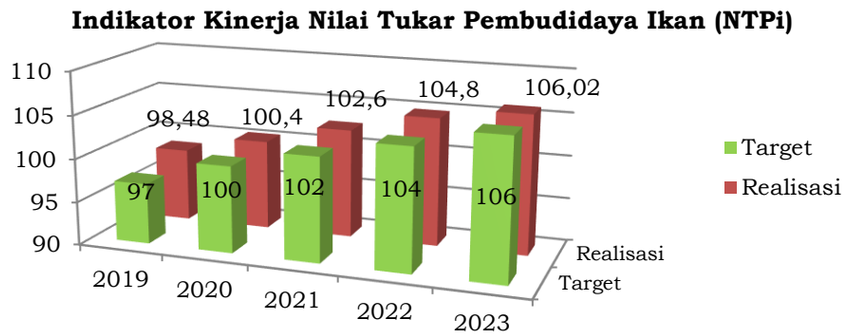

Pencapaian realisasi target Tahun 2023 sebesar 106,02 dari 106 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat sedikit dari Tahun 2022 yang hanya sebesar 104,8 dari 104 nilai yang ditargetkan. Peningkatan indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan Budidaya dan Bidang Lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Budidaya memberikan kotribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ini.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian NTPi :

a. NTPi > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
b. NTPi = 100, berarti pembudidaya ikan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan tidak mengalami perubahan.
c. NTPi < 100, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 sebesar 106,02 menunjukan bahwa pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya ikan dikatakan sejahtera.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) antara lain yaitu:

1. Melaksanakan peningkatan produksi budidaya ikan air laut, terutama ikan kerapu, dengan cara menumbuhkan pembudidaya-pembudidaya baru mengingat potensi budidaya ikan kerapu yang sangat besar namun baru termanfaatkan dalam jumlah yang kecil;
2. Melaksanakan pembinaan kepada pembudidaya untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya yang baku, baik Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB) maupun Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
3. Memperbanyak komoditas jenis budidaya yang akan di budidayakan oleh masyarakat
4. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pembudidaya ikan air laut maupun air tawar.

5. Meningkatnya keterampilan pembudidaya setelah mendapatkan pembinaan dan pelatihan-pelatihan melalui sekolah lapang yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupeten Belitung.
6. Menambah jumlah jenis ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) diantaranya :

1. Penurunan produksi ikan air tawar yang cukup besar dibandingkan tahun 2022 akibat kondisi cuaca kemarau ekstrem selama 6 bulan;
2. Menurunnya produksi perikanan budidaya juga disebabkan tidak ada lagi budidaya rumput laut yang juga berkontribusi terhadap pencapaian target produksi perikanan budidaya;
3. Adanya perubahan/peralihan mata pencaharian masyarakat pembudidaya yang sifatnya masih musiman akibat adanya aktivitas penambangan timah yang semakin marak karena harga yang cenderung lebih menjanjikan;
4. Sulitnya mendapatkan pakan alternative serta Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pakan ikan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Dinas Perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan:

1. Mengembangkan sistem produksi dan penerapan teknologi pembudidayaan ikan;
2. Mengembangkan inovasi di bidang perikanan air payau, yakni mendorong masyarakan untuk membudidayakan udang vanamei dan kepiting bakau;
3. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya berbasis teknologi dan ramah lingkungan;
4. Meningkatkan Manajemen serta Mendorong peran serta aktif anggota dalam peningkatan usaha dan kelembagaan kelompok Pembudidaya Ikan;
5. Mendorong Pembudidaya Ikan untuk aktif mengikuti pelatihan teknis Perikanan seperti Bimtek dan Sosialisasi serta praktek langsung dilapangan;
6. Diversifikasi komoditas perikanan budidaya dengan cara membudidayakan komoditas baru yang selama ini belum dikembangkan;
7. Penguatan Data statistik dan informasi Perikanan Budidaya.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Gambar Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Pembudidaya ikan

2. Gambar Pelaksanaan kegiatan budidaya ikan air tawar dan Proses pembagian bantuan bibit, pakan dan wadah budidaya.

3. Foto Pelaksanaan kegiatan di upt perikanan budidaya

Arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dilaksanakan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, dengan beberapa kegiatan, yaitu; (a) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; (b) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah/kota; dan (c) pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 42.220,25 ton/tahun menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 43.021,47 ton/tahun, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Berikut data produksi perikanan tangkap menurut kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2023:

Tabel 2.99
Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung (ton/tahun) Tahun 2023

Kecamatan	Volume 2022	Volume 2023
Membalong	9.154,97	8.984,47
Tanjungpandan	10.376,78	10.563,51
Badau	4.065,53	3.989,81
Sijuk	10.763,97	10.183,53
Selat Nasik	8.660,22	8.498,93
Total	**43.021,47**	**42.220,25**

Sumber : Dinas Perikanan 2024

Perkembangan produksi perikanan tangkap selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.100
Perkembangan produksi perikanan Tangkap (ton/tahun)
Tahun 2014-2023

NO.	TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
1	2014	50.134,49
2	2015	44.560,27
3	2016	67.189,18
4	2017	68.197,01
5	2018	65.723,44
6	2019	56.845,62

7	2020	52.912,48
8	2021	45.564,32
9	2022	43.021,47
10	2023	42.220,25

Sumber : Dinas Perikanan 2024

Dari 10 tahun terakhir, jumlah produksi perikanan tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 68.197,01 ton/tahun, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu hanya sebesar 42.220,25 ton/tahun.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) digunanakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Belitung yang diperoleh melalui survei oleh Universitas Bangka Belitung di lapangan.

Nilai NTN diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga data Tahunan yang nanti tersedia dan diperoleh berdasarkan rumusan:

NTN = IT/IB x 100%

IT : Indek Harga yang diterima Nelayan

IB : Indek Harga yang dibayar Nelayan

Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 113, nilai tukar nelayan yang terealisasi sebesar 112,52 atau mencapai 99,58 % dari target tahun 2023. Dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.101
Tabel Realisasi Nilai Tukar Nelayan Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113	112,52

Berdasarkan tabel diatas pada Tahun 2023 realisasi Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai sebesar 112,52 diperoleh dari pencapaian pelaksanaan kegiatan baik yang tertuang dalam renja maupun pelaksanaan Tupoksi masing masing bidang. Realisasi nilai tukar nelayan ini mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya. Nilai pada tahun 2023 sebesar 112,52 (99,58 %) dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 113,35 (101,21 %).

Perkembangan realisasi nilai tukar nelayan tahun 2019-2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023 dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut:

Grafik 2.15 Grafik Target dan Realisasi Nilai Tukar Nelayanan (NTN)

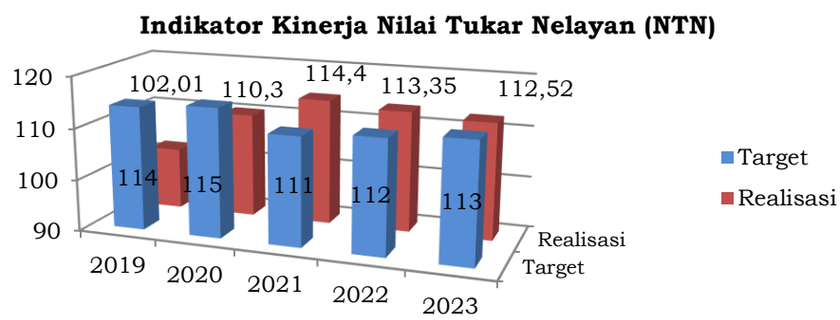

Pencapaian realisasi target tahun 2023 sebesar 112,52 dari 113 nilai yang ditargetkan dan nilai ini menurun sedikit dari tahun 2022 sebesar 113,35 dari 112 nilai yang ditargetkan. Target untuk tahun 2021 dan 2022 dan 2023 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan 2019 pada saat perubahan Renstra dilakukan dalam rangka menyesuaikan indikator pada Revisi RPJMD Kabupaten Belitung. Realisasi indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan tangkap dan bidang lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan tangkap di kabupaten belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam

program pengembangan Perikanan Tangkap memberikan kotribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Nelayan ini.

Sebagaimana yang diketahui bersama, Nilai Tukar Nelayan adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian nilai NTN :

a. NTN > 100, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
b. NTN = 100, berarti nelayan mengalami impas/ break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami perubahan.
c. NTN < 100, berarti nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan nelayan periode sebelumnya.

Hasil perhitungan nilai tukar nelayan di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 112.52 menujukkan bahwa harga yang diterima nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di bayar, sehinga pendapatan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya melaut. Hasil nilai tukar Nelayan di kabupaten Belitung pada tahun 2023 lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2022. Berdasarkan hasil hitungan data BPS diperoleh nilai NTN kabupaten belitung pada tahun 2019 sebesar 102,01 dan berdasarkan hasil hitungan data UBB diperoleh nilai NTN kabupaten belitung pada tahun 2020 yaitu 102,01 dan tahun 2021 yaitu 114,4 serta tahun 2022 yaitu 113.35. Hasil ini menunjukkan ada penurunan Nilai tukar Nelayan sebesar 112,52. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan kesejahteraan nelayan atau hasil penerimaan nelayan dari hasil tangkapan lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga di kabupaten Belitung pada tahun 2023.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan antara lain :

- Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari produksi Tahun 2022 sebesar 43.021,5 ton menjadi 42.220,3 ton pada Tahun 2023. Walaupun menurun namun nilai produksi perikanan tangkap relatif masih tinggi karena kondisi cuaca dan perairan laut di Tahun 2023 cenderung stabil seperti Tahun 2022 sehingga hasil tangkapan nelayan masih diatas rata rata terkecuali pada triwulan ke empat;
- Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik;
- Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari Pemkab Belitung berupa Kapal penangkap ikan, mesin kapal, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan;
- Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan;
- Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap.

Beberapa faktor penghambat/kendala pencapaian arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan diantaranya :

- kondisi cuaca yang ekstrem pada musim barat harus di minimalisir dengan perencanaan yang baik;
- Kondisi sarana dan prasarana Perikanan tangkap di beberapa lokasi yang sudah mengalami kerusakan;
- Belum maksimalnya penanganan dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan;
- Mayoritas nelayan di Kabupaten Belitung masuk dalam kategori nelayan Kecil;
- Masih rendahnya kesadaran nelayan dalam kelengkapan administrasi usaha penangkapan;

⌘ Penurunan produksi lebih kepada zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga perlu moderenisasi sarpras penangkapan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini, dinas perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan:

- Nelayan Belitung perlu melakukan modernisasi armada penangkapan yang lebih besar lagi sehingga jangkauan wilayah penangkapan menjadi lebih jauh;
- Terus melakukan pembinaan kepada kelompok nelayan sehingga dapat tertib administrasi saat melaut;
- Tetap memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung ketersediaan operasional nelayan kecil untuk tetap dapat melaut dengan baik seperti BBM, Kebutuhan pokok, alat tangkap dan sebagainya;
- Mendukung nelayan kecil untuk mengikuti program kementerian yang pro nelayan diantaranya asuransi nelayan, sehat nelayan, kartu kusuka dan program inovatif lainnya;
- Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan terkait pemahamaan penggunaan teknologi penangkapan ikan;
- Memaksimalkan kegiatan pengawasan terkait masuknya nelayan luar dan aktivitas illegal fishing serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang beroperasi di perairan Kabupaten Belitung;
- Mengoptimalkan usaha penangkapan ikan pada musim puncak sebelum musim pancaroba (paceklik) berlangsung;
- Melakukan pengendalian distribusi BBM minyak solar secara teratur dan terarah di titik penyalur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan mesin kapal, alat penangkapan ikan dan lokasi fishing ground sehingga pengalokasian BBM minyak solar untuk usaha perikanan/nelayan dapat tepat sasaran;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan
- Penguatan Data statistik dan informasi Perikanan Tangkap.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Dokumentasi Pelaksanaan Pemberian bantuan Kapal, Mesin Kapal, Alat Tangkap dan Fispinder

2. Dokumentasi Pelaksanaan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

3. Dokumentasi Pelaksanaan Penguatan daya saing sektor Perikanan

4. Dokumentasi Pelaksanaan Pembinaan pelaku usaha perikanan

5. Dokumentasi Pelaksanaan Pelestarian Sumber daya Perikanan

6. Dokumentasi Pelaksanaan operasional kapal perikanan dalam rangka pengendalian SDP

Strategi Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan Di Kabupaten Belitung Berdasarkan Dokumen Penyusunan Dokumen Analisis Indikator Kinerja Sektor Perikanan tahun 2023 hasil dari kerja sama antara Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung diperoleh Analisis untuk memperoleh strategi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Belitung sesuai dengan tabel dibawah ini sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Belitung tahun 2023

Tabel 2.102
SWOT Perikanan Tangkap

IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

Faktor Internal					
No.	**Kekuatan**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	***Score***
1.	Dukungan penuh dari pemerintah setempat terkait pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Belitung terlihat dari adanya program sosialisasi (pelatihan, pemasaran hasil perikanan) dan program bantuan (alat tangkap, kapal dan mesin)	4	0,12	4	0,472
2.	Kabupaten Belitung merupakan sentral perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kualitas mutu dan nilai ekonomi yang tinggi	5	0,15	4	0,588
3.	Ketersediaan peruntukkan lahan untuk kegiatan perikanan tangkap masih dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan industri perikanan global	4	0,12	3	0,354
4.	Letak geografis Kabupaten Belitung sangat strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang berada dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional	3	0,09	3	0,264
	Total		**0,47**		**1,68**
Faktor Internal					
No.	**Kelemahan**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	***Score***
1.	Belum optimalnya fasilitas penunjang dalam operasional kegiatan penangkapan ikan seperti dermaga, lampu pandu, SPBN, penyedia es ikan dan tempat pelelangan ikan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Belitung	5	0,15	-4	-0,6
2.	Tingginya biaya operasional dan masih terbatasnya lembaga penyedia permodalan pada nelayan	4	0,12	-2	-0,24
3.	Kurangnya pengetahuan SDM (nelayan dan tenaga ahli) dalam penggunaan teknologi penangkapan ikan	5	0,15	-4	-0,6
4.	Belum optimalnya fasilitas penunjang dalam memaksimalkan nilai jual terhadap produk hasil perikanan (*cold storage*, tempat penjemuran)	4	0,12	-3	-0,36

Total		**0,54**		**-1,80**
Total SW (X)				**-0,12**

(Sumber: Laporan Indikator Kinerja Dinas Perikanan, 2023)

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

Faktor Eksternal					
No.	**Peluang**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	***Score***
1.	Produk perikanan Kabupaten Belitung diminati pasar ekspor dan lokal	5	0,14	4	0,56
2.	Dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	5	0,14	3	0,42
3.	Sudah mulai direalisasikan pembangunan perikanan terpadu (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, pelabuhan perikanan) untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	4	0,11	3	0,33
4.	Terjalinnya kerjasama lintas sektoral terhadap para investor dan *stakeholder* dalam pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Belitung	5	0,14	4	0,56
Total			**0,53**		**1,87**
Faktor Eksternal					
No.	**Ancaman**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	***Score***
1.	Perubahan siklus oseanografis yang tidak menentu dan berlangsungnya musim paceklik yang mengakibatkan fluktuasi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan	4	0,11	-4	-0,44
2.	Munculnya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya diKecamatan Sijuk	4	0,11	-2	-0,22
3.	Masuknya nelayan luar yang beroperasi dengan kapasitas armada penangkapan yang lebih besar	4	0,11	-4	-0,44
4.	Ketergantungan nelayan terhadap Pemodal terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan	5	0,14	-4	-0,56
Total			**0,47**		**-1,66**
Total OT (Y)					**0,21**

Perhitungan analisis IFAS dan EFAS diatas dilakukan untuk menentukan alternatif strategi. Berikut ini merupakan alternatif strategi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.103
Analisis Strategi Perikanan Tangkap

IFAS	**Strengths (Kekuatan)** Dukungan penuh dari pemerintah setempat terkait pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Belitung terlihat dari adanya program sosialisasi (pelatihan, pemasaran hasil perikanan) dan program bantuan (alat tangkap, kapal dan mesin). Kabupaten Belitung merupakan sentral perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kualitas mutu dannilai ekonomi yang tinggi. Ketersediaan peruntukkan lahan untuk kegiatan perikanan tangkap masih dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan industri perikanan global. Letak geografis Kabupaten Belitung sangat strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang berada dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional.	**Weakness (Kelemahan)** Belum optimalnya fasilitas penunjang dalam operasional kegiatan penangkapan ikan seperti dermaga, lampu pandu, SPBN, penyedia es ikan dan tempat pelelangan ikan pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Belitung. Tingginya biaya operasional dan masih terbatasnya lembaga penyedia permodalan pada nelayan. Kurangnya pengetahuan SDM (nelayan dan tenaga ahli) dalam penggunaan teknologi penangkapan ikan. Belum optimalnya fasilitas penunjang dalam memaksimalkan nilai jual terhadap produk hasil perikanan (cold storage, tempat penjemuran).
EFAS		
Opportunity (Peluang) Produk perikanan Kabupaten Belitung diminati pasar ekspor dan lokal. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung. Sudah mulai direalisasikan pembangunan	**Strategi Agresif (SO)** Memaksimalkan pemanfaatan alokasi lahan dalam mengembangkan sektor perikanan seperti meningkatkan infrastruktur penunjang. Mengoptimalkan usaha kegiatan budidaya laut dan melakukan pembangunan untuk perikanan terpadu. Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk merealisasikan	**Strategi Berbenah Diri (WO)** Mengoptimalkan fungsi fasilitas dan melakukan pembangunan tambahan fasilitas yang sudah optimal untuk menunjang operasional kegiatan penangkapan ikan (dermaga, SPBN, lampu tanda, penyedia es pendingin) dan meningkatkan nilai jual produk perikanan (cold storage dan tempat

perikanan terpadu (Kawasan konomi Khusus/KEK, pelabuhan perikanan) untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung. Terjalinnya kerjasama lintas sektoral terhadap para investor dan stakeholder dalam pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Belitung.	pembangunan perikanan sehingga dapat memaksimalkan kegiatan perikanan dan dapat menjadi daya tarik para investor dan stakeholder, menjaga dan melestarikan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya perikanan sehingga dapat menjamin kualitas mutu produk perikanan dalam pemenuhan kebutuhan pasar dan sebagai sumber perekonomian daerah.	penjemuran) pada setiap sentra perikanan di Kabupaten Belitung sehingga dapat menjamin kualitas mutu produk di pangsa pasar. Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak stakeholder lainnya seperti pengajuan bantuan untuk pinjaman dari pihak perbankan, bantuan sarana dan prasarana, koperasi nelayan serta BBM bersubsidi sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan ketergantungan dengan pemodal. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap SDM (Nelayan dan Tenaga Ahli) terkait penggunaan teknologi penangkapan modern sehingga dapat melakukan pembaharuan terhadap keragaan unit kegiatan penangkapan ikan
Threats (Ancaman) Perubahan siklus oseanografis yang tidak menentu dan berlangsungnya musim paceklik yang mengakibatkan fluktuasi hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Munculnya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya di Kecamatan Sijuk, Masuknya nelayan luar yang beroperasi dengan kapasitas armada penangkapan yang lebih besar. Ketergantungan nelayan terhadap pemodal terkait dalam modal usaha perikanan yang mengakibatkan rendahnya harga jual hasil tangkapan	**Strategi Diversifikasi (ST)** Perlunya arah kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung khususnya kecamatan Sijuk sehingga dalam pemanfaatanya tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir konflik baik ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkepanjang di kehidupan masyarakat. Mengoptimalkan peran pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau stakeholder sebagai lembaga penyedia pinjaman modal untuk nelayan sehingga dapat meminimalisir ketergantungan simpanpinjam dengan bos/touke yang mematok harga lebih tinggi. Melakukan patroli secara berkala dan pemberian sanksi kepada para pelaku nelayan luar yang beroperasi di wilayah tangkap Kabupaten Belitung dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah setempat, pihak kepolisian dan pihak yang berkaitan sehingga dapat menjamin potensi perikanan yang ada.	**Strategi Defensif (WT)** Melakukan programperikanan seperti bazar ikan, gemar makan ikan, wisata kuliner dan pasar terbuka secara periodic sebagai "daya tarik/icon" dengan tujuan meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan sebagai upaya dalam menghadapi penurunan hasil dan pendapatan nelayan pada musim paceklik. Penegakan aturan dan hukum yang tegas terkait adanya aktivitas penambangan timah ilegal, adanya nelayan luar yang beroperasi di wilayah perairan penangkapan ikan di Kabupaten Belitung. Memanfaatkan peran dan dukungan dari pemerintah setempat dan pemerintah pusat untuk melakukan kerjasama dengan pihak investor terkait pembuatan produk olahan perikanan dalam skala pabrik sehingga pada musim paceklik berlangsung nelayan masih memiliki pendapatan

Berdasarkan hasil analisis matrik SWOT menunjukkan bahwa prioritas strategi yang tepat terhadap dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Belitung adalah strategi berbenah diri (strategi WO). Adapun matriks tersebut sebagai berikut:

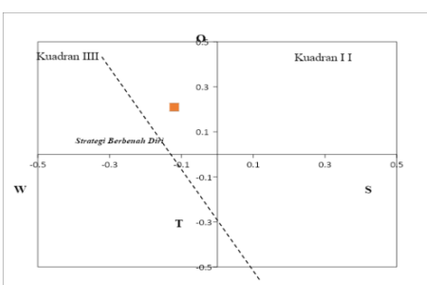

Gambar Analisis Kuadran SWOT perikanan Tangkap

Prioritas strategi peningkatan tingkat kesejahteraan nelayan di KabupatenBelitung adalah:

1) Mengoptimalkan fungsi fasilitas dan melakukan pembangunan tambahan fasilitas yang sudah optimal untuk menunjang operasional kegiatan penangkapan ikan (dermaga, SPBN, lampu tanda, penyedia es pendingin) dan meningkatkan nilai jual produk perikanan (cold storage dan tempat penjemuran) pada

setiap sentra perikanan di Kabupaten Belitung sehingga dapat menjamin kualitas mutu produk di pangsa pasar;

2) Mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak stakeholder lainnya seperti pengajuan bantuan untuk pinjaman dari pihak perbankan, bantuan sarana dan prasarana, koperasi nelayan serta BBM bersubsidi sehingga dapat meminimalisir biaya operasional dan ketergantungan dengan pemodal.
3) Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap SDM (Nelayan dan Tenaga Ahli) terkait penggunaan teknologi penangkapan modern sehingga dapat melakukan pembaharuan terhadap keragaan unit kegiatan penangkapan ikan.

b. Strategi Pengembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung tahun 2023

Tabel 2.104

SWOT Perikanan Budidaya Kabupaten Belitung

Faktor Internal					
No	**Kelemahan**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	**Score**
1.	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya di Kabupaten Belitung	5	0,14	-3	-0,42
2.	Terbatasnya ketersediaan benih	4	0,12	-4	-0,48
3.	Minimnya permodalan pelaku usaha budidaya	4	0,12	-2	-0,24
4.	Masih terbatasnya pengetahuan SDM (pembudidaya dan tenaga ahli) terkait kegiatan budidaya seperti penggunaan teknologi, pembuatan pakan, pembenihan serta pemahaman kualitasair dan penyakit ikan	5	0,14	-2	-0,28
Total			**0.52**		**-1.42**
Total SW (X)			**1.00**		**0.29**

Faktor Eksternal					
No.	**Peluang**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	**Score**
1.	Tinggi permintaan pasar lokal terhadap budidaya ikan air tawar maupun ekspor terhadap produk hasil budidaya seperti ikan kerapu, udang vanname dan kepiting bakau	5	0,14	3	0,42
2.	Prospek perikanan budidaya di Kabupaten Belitung sudah berkembang sehingga terbukanya kerjasama dengan pihak investor	4	0,11	3	0,33
3.	Sudah mulai teralisasikan pembangunan perikanan terpadu (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, pelabuhan perikanan) untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	4	0,09	3	0,27
4.	Dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	5	0,14	4	0,56
Total			**0.48**		**1.58**
No.	**Ancaman**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	**Score**
1.	Sudah adanya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya di Kecamatan Sijuk	4	0,11	-3	-0,33
2.	Tingginya harga pakan buatan (pelet) dan pakan alternative	5	0,14	-3	-0,42
3.	Perubahan kondisi cuaca mempengaruhi kualitas mutu ikan	4	0,11	-4	-0,44
4.	Tingginya harga jual lahan pada daerah pesisir dalam kegiatan budidaya (udang vaname) karena sebagian kawasan pesisir Kabupaten Belitung masuk dalam RTRW pariwisata	5	0,14	-3	-0,42
Total			**0.50**		**-1.61**
Total OT (Y)			**0.98**		**-0.03**

Faktor Internal					
No.	**Kekuatan**	**Bobot**	**Relatif**	**Rating**	**Score**
1.	Terdapat potensi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung terdiri dari budaya air laut (ikan kerapu, rumput laut dan garam) dan budidaya air tawar (ikan nila, lele, patin, kepiting bakau dan udang vanname)	4	0,12	3	0,36
2.	Sudah terbentuknya POKDAKAN yang dibina langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung	3	0,09	3	0,27
3.	Ketersediaan peruntukkan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya masih dapat di optimalkan untuk mendukung pengembangan industi perikanan global	5	0,15	4	0,6
4.	Sebagian besar kegiatan usaha budidaya sudah miliki sendiri dan juga perkelompok yang dibina oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung	4	0,12	4	0,48
Total			**0.48**		**1.71**

Tabel 2.105
Analisis Strategi Perikanan Budidaya

IFAS	**Strengths (Kekuatan)** Terdapat potensi perikanan budidaya di Kabupaten Belitung terdiri dari budidaya air laut (ikan kerapu, rumput laut dan garam) dan budidaya air tawar (ikan nila, lele, patin, kepiting bakau dan udang vanname). Sudah terbentuknya POKDAKAN yang dibina langsung oleh pemerintah daerah KabupatenBelitung. Ketersediaan peruntukkan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya masih dapat di optimalkan untuk mendukung pengembangan industi perikanan global. Sebagian besar kegiatan usaha budidaya sudahmiliki sendiri dan juga perkelompok yang dibinaoleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung.	**Weakness (Kelemahan)** Belum optimalnya saranadan prasarana penunjang kegiatan budidaya di Kabupaten Belitung. Terbatasnya ketersediaan benih. Minimnya permodalan pelaku usaha budidaya. Masih terbatasnya pengetahuan SDM (pembudidaya dan tenaga ahli) terkait kegiatan budidaya seperti penggunaan teknologi, pembuatan pakan, pembenihan serta pemahaman kualitas air dan penyakit ikan
EFAS		
Opportunity (Peluang) Tinggi permintaan pasar lokal terhadap budidaya ikan air tawar maupun ekspor terhadap produk hasil budidaya seperti ikan kerapu, udang vanname dan kepiting bakau. Prospek perikanan budidaya di Kabupaten Belitung sudah berkembang sehingga terbukanya kerjasama dengan pihak investor. Sudah mulai teralisasikan pembangunan perikanan terpadu (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, pelabuhan perikanan) untuk mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung. Dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Belitung	**Strategi Agresif (SO)** Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) untuk memaksimalkan jumlah hasil produksi dalam memenuhi permintaan pasar sehingga kegiatan budidaya dapat menjadi pekerjaan utama dalam sumber mata pencaharian. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sudah ditetapkan RZWP3K untuk kegiatan budidaya perikanan darat dan perikanan laut dalam mengembangkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sumber perekonomian di Kabupaten Belitung, Melakukan kerjasama antara pemerintah dan pihak stakeholder dalam mengembangkan potensi usaha kegiatan budidaya garam laut yang menjadi bahan dasar pegawetan ikan asin dan pupuk sehingga dapat memnimalisir biaya operasional dan sebagai salah satu wujud perekonomian baru di Kabupaten Belitung	**Strategi Berbenah Diri (WO)** Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak yang memiliki teknologi lebih modern seperti pelatihan sharing ilmu terkait teknologi modern budidaya,pembuatan pakan alternatif, proses pembenihan dan pencegahan terhadap penyakit ikan serta kualitas perairan, Mengupayakan penggandan cold strorage guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang tak diduga sehingga para pembudidaya dapat mendapatkan pemasukan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Mengoptimalkan peran pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau stakeholder sebagai lembaga penyedia pinjaman modal untuk pelaku pembudidaya sehingga dapat memaksimalkan usaha kegiatan budidaya untuk memenuhi kebutuhan hidup
Threats (Ancaman) Sudah adanya isu sosial dan lingkungan akibat aktivitas penambangan timah di perairan Kabupaten Belitung tepatnya di Kecamatan Sijuk. Tingginya harga pakan buatan (pelet) dan pakan alternatif. Perubahan kondisi cuaca mempengaruhi kualitas mutu ikan. Tingginya harga jual lahan pada daerah pesisir dalam kegiatan budidaya (udang vaname) karena sebagian	**Strategi Diversifikasi (ST)** Perlunya arah kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang tegas dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung khususnya kecamatan Sijuk sehinga dalam pemanfaatanya tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir konflik baik ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkepanjang di kehidupan masyarakat, Perlu adanya upaya meminimalisir biaya operasional dengan melakukan kerjasama dengan pihak antar OPD, swasta atau stakeholder lain terkait penyediaan	**Strategi Defensif (WT)** Melakukan edukasi terhadap pengetahuan dan pemahaman SDM terkait kegiatan budidaya mulai dari pra, proses dan produksi sehingga dapat memnimalisir biaya operasional dan ketergantungan dari pihak luar, Megoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya dengan teknologi modern untuk dapat memaksimalkan jumlah dan kualitas mutu

kawasan pesisir Kabupaten Belitung masuk dalam RTRW pariwisata	bahan baku pakan, pendanaan dan pelatihan edukasi teknis pembuatan pakan. Menyusun strategi untuk peningkatan kegiatan budidaya laut dan payau dengan mengoptimalkan penggunaan lahan terutama lahan peruntukan budidaya	hasil produksi budidaya maupun pendapatan pembudidaya, Memanfaatkan rogram penyedia lembaga permodalan usaha pe ikanan (LPMUKP, KUR) yang sudah tersedia sebagai modal pengembangan usaha budidaya

Berdasarkan hasil analisis matrik SWOT menunjukkan bahwa prioritas strategi yang tepat terhadap dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya di Kabupaten Belitung adalah strategi Diversifikasi (ST). Adapun matriks sebagai berikut:

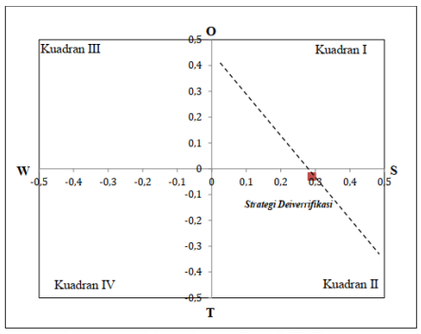

Gambar Analisis Kuadran SWOT Perikanan Budidaya

Prioritas strategi peningkatan tingkat kesejahteraan pembudidaya di Kabupaten Belitung adalah:

1) Perlunya arah kebijakan yang jelas dan pelaksanaan yang tegas dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Belitung khususnya kecamatan Sijuk sehinga dalam pemanfaatanya tidak saling tumpang tindih dan meminimalisir konflik baik ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkepanjang di kehidupan masyarakat;
2) Perlu adanya upaya meminimalisir biaya operasional dengan melakukan kerjasama dengan pihak antar OPD, swasta atau stakeholder lain terkait penyediaan bahan baku pakan, pendanaan dan pelatihan edukasi teknis pembuatan pakan;
3) Menyusun strategi untuk peningkatan kegiatan budidaya laut dan payau dengan mengoptimalkan penggunaan lahan terutama lahan peruntukan budidaya.

Tabel 2.106
Usulan arah kebijakan dalam pengelolaan perikanan budidaya
Kabupaten Belitung tahun 2023

No	Strategi WO	Isu Prioritas	Arah Kebijakan
1	Membuka pasar baru ikan kerapu dengan melihat tingginya keuntungan dan ketersediaan pakan rucah dalam kegiatan budidaya ikan kerapu (W5,O1,O2)	a. Hasil budidaya KJA Kerapu yang siap panen tidak dapat dijual akibat tidak ada permintaan dari pasar ekspor; b. Tingginya harga pakan dan sulitnya mendapatkan pakan alternative c. Terdapat pembudidaya ikan yang tidak mau bergabung dengan kelompok pembudidaya d. Kurangnya personil penyuluh untuk mencapai akses daerah yang belum pernah dilakukan penyuluhan	1. Melakukan riset pasar sebagai upaya untuk mencari pelanggan baru. 2. Melakukan riset dengan sistem Penjualan Baru baik secara online dan offline.
2	Melakukan riset pembuatan pakan sebagai alternatif pakan pabrikan dengan mengoptimalkan dukungan lintas sektorat seperti perguruan tinggi (W1,W4,O4,O5)		1. Melakukan riset terapan untuk pembuatan pakan ikan dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi 2. Menyusun studi kelayakan industry pakan oleh instansi terkait 3. Pemasaran hasil studi kelayakan ke berbagai industri pakan skala regional dan nasional
3	Meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan budidaya ikan dengan sosialisasi potensi budidaya ikan mulai dari kemudahan usaha, bantuan pemerintah, pendampingan, ketersediaan pakan dan pasar (W2,W4,1,O1,W2,W3,W4,W5)		1. Meningkatkan jumlah penyuluh perikanan untuk meningkatkan frekuensi dan luasan wilayah pendampingan. 2. Terus melakukan pendampingan dan sosialisasi untuk pengembangan pelaku usaha budidaya.

Tingkat konsumsi ikan atau angka konsumsi ikan merupakan jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat perkapita. Dengan mengkosumsi ikan maka dapat meningkatkan gizi masyarakat di karena mengandung protein

tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengika sedikit sehingga lebih mudah dicerna (kkp.go.id). Selain itu ikan memiliki harganya cukup murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Berdasarkan Permen KP No.35 tahun 2014 tingkat konsumsi ikan di tentukan penjumlahan konsumsi ikan segar, ikan awetan/ikan asin serta ikan hasil olahan. Konsumsi ikan dalam bentuk olahan tidak bisa ditentukan secara langsung, sehingga perlu dilakukan perhitungan pengeluaran ikan dari kelompok makanan jadi (PIMJ) dan pengeluaran ikan bentuk segar (PIS)

Pada dasarnya perhitungan konsumsi ikan adalah penjumlahan data konsumsi ikan segar dengan konsumsi ikan asin/awetan serta ikan olahan. Namun penjumlahan tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena perlu ada konversi untuk menyesuaikan satuannya. Oleh karena itu, metode perhitungan konsumsi sebagai berikut (Permen KP Nomor 35 Tahun 2014):

$$TKI = \sum i\ n{=}1 KIDS + \sum i\ n{=}1 KIDA + \sum i\ n{=}1 KIMJ$$

Keterangan :
TKI = Tingkat Konsumsi Ikan
KIDS = Konsumsi Ikan & Udang Segar
KIDA = Konsumsi Ikan Dan Udang Asing/ Awetan
KIMJ = Konsumsi Ikan yang Dibeli dalam Bentuk Olahan/Matang dalam Kelompok Makanan/Minuman Jadi

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada Tahun 2023 target nasional pada IKU Kementerian Kelautan Perikanan untuk angka konsumsi ikan meningkat menjadi 60 Kg/kap/thn. Tahun 2023, Capaian konsumsi ikan nasional secara resmi sampai sekarang belum di rilis namun diketahui bahwa sampai dengan bulan oktober 2023 tercatat angka capaian konsumsi ikan nasional sudah mencapai 56,48 Kg/kap/thn dan capaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga belum di rilis, sedangkan tahun 2023 capaian di Kabupaten Belitung adalah 72,2 kg/kap/tahun nilai ini meningkat dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 70,60 kg/kap/tahun. Kabupaten Belitung memiliki angka konsumsi ikan yang cukup tinggi apabila dilihat dari rata rata provinsi dan nasional, hal ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan sektor perikanan.

Untuk Pelaksanaan **Tahun 2023** Perhitungan Nilai Konsumsi Ikan diperoleh dari Universitas Bangka Belitung (UBB) melalui *Mou* dan Perjanjian Kerjasama (PKS). Dan Hasil perhitungan Tingkat Konsumsi Ikan (TKI) di Kabupaten Belitung Tahun 2023 yaitu sebesar 72,2 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Belitung sangat tinggi. Tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung telah memenuhi target tingkat konsumsi konsumsi ikan nasional pada Target IKU Kementerian Kelautan Perikanan yaitu 60 Kg/kap/thn untuk tahun 2023. Tingginya tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Letak geografisnya yang merupakan daerah kepulauan sehingga memiliki ketersediaan stok ikan yang melimpah;
2. Mayoritas masyarakat Kab. Belitung berprofesi nelayan, sehingga tersedia ikan di rumah tangga cukup banyak tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli ikan;
3. Harga beberapa jenis ikan tertentu relatif lebih rendah dan mudah di dapat dengan kondisi masih segar; dan
4. Banyaknya sentra kuliner yang menyajikan makanan menu dasar kan terdapat di Kabupaten Belitung.

Disamping itu Jenis ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Belitung cenderung menyukai mengkonsumsi ikan laut . Tingginya konsumsi jenis ikan laut merupakan hal yang wajar dikarenakan Kab. Belitung dikelilingi dan berbatasan langsung dengan laut lepas. Selain itu, mayoritas masyarakat Kab Belitung berprofesi sebagai nelayan, hasil tangkapan ikan juga sering untuk konsumsi sehari-hari. Slogan “Sehari dak makan ikan dak dapat dan dak nyaman juak” hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Belitung, menjadikan ikan sebagai bahan utama dalam konsumsi utama dalam kebutuhan sekunder sehari-hari. Maka, tinggi nya nilai konsumsi Ikan di Kab Belitung menjadi pendorong peningkatan konsumsi ikan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tingkat Konsumsi Ikan di Kab. Belitung pada tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2022 dan 2021 dimana Tingkat Konsumsi Ikan Tahun 2023 yaitu sebesar 72,2 kg/kap/tahun dan Tingkat Konsumsi Ikan 2022 yaitu sebesar 70,60 kg/kap/tahun. Hasil ini menunjukkan ada peningkatan sebesar 1.6 kg/kap/tahun tingkat konsumsi ikan di Kab. Belitung dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Indonesia setiap tahun merupakan salah satu capaian keberhasilan

kementerian kelautan perikanan dalam upaya mengkampanyekan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk makan ikan. Salah satu programnya yaitu Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang digagas oleh kementerian KKP bertujuan untuk bersama-sama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia indonesia yang sehat, kuat dan cerdas (kkp.go.id). Salah satu kabupaten yang cukup tinggi konsumsi ikan yaitu di Kab. Belitung, sehingga pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan cara :

1. Menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan sehingga stok ikan melimpah;
2. Mensosialisasi kepada masyarakat pentingnya konsumsi ikan;
3. Meningkatkan inovasi pengolahan produk perikanan untuk meningkatkan konsumsi ikan dalam bentuk olahan;
4. Menjaga kestabilan harga sumberdaya perikanan;dan
5. Menjaga kesegaran hasil tangkapan nelayan dengan pengadaan cold storage

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan, ada faktor-faktor yang mendukung upaya tersebut. faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- Komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Komitmen ini dibuktikan dengan peluncuran program inovatif, yaitu “Program Baguk” untuk peningkatan produk pertanian;
- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung;
- Potensi sektor perikanan yang cukup besar dan berdasarkan survei yang dilakukan Dinas Perikanan dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan antara lain:

- Rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok, dan untuk konsumsi bahan pangan non beras masih sangat rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menanam bahan pangan non beras sehingga berdampak pada rendahnya produksi sektor pertanian;
- Zona penangkapan nelayan yang lebih jauh sehingga membutuhkan armada penangkapan yang lebih besar;
- Kondisi cuaca yang ekstrim pada musim barat;
- Tingkat kegagalan budidaya ikan air tawar masih tinggi, sehingga kurang diminati masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan di atas, ada beberapa upaya peningkatan yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung untuk menjaga kinerja sasaran, yaitu:

- Meningkatkan capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melaksanakan sosialisasi varian-varian menu yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga pola konsumsi akan menjadi lebih beragam. Semakin beragamnya pola konsumsi masyarakat akan semakin tinggi kebutuhan akan pangan non beras. Pada akhirnya akan menarik minat masyarakat memproduksi pangan non beras;
- Menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat petani dan pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Belitung sehingga diharapkan meningkatkan produksi pertanian dan perikanan dan kesejahteraan taraf hidup masyarakat sektor pertanian dan perikanan;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan menggunakan pakan tambahan sehingga mampu menekan biaya produksi;

- Pelestarian terumbu karang dan padang lamun serta rumponisasi dan pembuatan terumbu karang buatan di zona tangkapan yang menjadi wilayah kewenangan kabupaten sehingga nelayan tidak perlu melakukan penangkapan di zona yang terlalu jauh;
- Melakukan pengawasan terhadap penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan padang lamun sehingga keberlanjutan reproduksi ikan tetap terjaga.

Berikut relisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya produksi pertanian dan perikanan:

Tabel 2.107
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1.	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.602.528.280,00	2.244.077.151,00	62,29
2.	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	5.414.297.000,00	4.733.299.732,00	87,42
3.	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	123.183.018,00	119.030.390,00	96,63
4.	Penyuluhan pertanian	549.689.280,00	548.917.387,00	99,86
5.	Pengelolaan perikanan tangkap	8.788.634.620,00	8.178.347.940,00	93,06
6.	Pengelolaan perikanan budidaya	1.851.407.730,00	1.619.103.108,00	87,45
7.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	389.404.655,00	364.434.670,00	93,59
8.	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	179.925.653,00	176.931.900,00	98,34

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan dengan persentase realisasi anggaran sasaran sebesar 86,05% dengan persentase rata-rata capaian program sebsar 89,83% maka terdapat efesiensi 13,95%.

SASARAN 10 : Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPMJD dengan indikator Nilai Omset Koperasi dengan target Rp 85.562.956.000,00 dan Nilai Omset Usaha Mikro Rp 1.957.050.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.108
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Belitung (Ribu Rupiah) Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Omset Koperasi	Ribu Rupiah	55.550.754	85.562.956	96.586.234	112,88	SB	85.562.956
2	Nilai Omset Usaha Mikro	Ribu Rupiah	973.000.000	1.957.050.000	1.966.800.000	100,50	SB	1.957.050.000

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja ***Nilai Omset Koperasi*** Tahun 2023 sebesar Rp 96.586.234.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 112,88 % berkategori SANGAT BERHASIL atau melampaui target sedangkan **Nilai Omset Usaha Mikro** Tahun 2023 sebesar Rp 1.966.800.000,00 tidak mencapai target dengan capaian kinerja hanya 100,50 % berkategori SANGAT BERHASIL.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dicapai melalui strategi meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro, dengan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu 1) meningkatkan

pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri; dan 2) meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro.

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, koperasi juga merupakan badan usaha yang cukup strategis dalam mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya dan masyarakat secara luas. Koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, serta bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kemandirian dan peranan koperasi baik koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, KUD, KSU, koppontren dan koperasi sekunder. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kopearsi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diharapkan keberadaan koperasi kedepannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan usaha kecil menengah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi, efektivitas dan kewirausahaan melalui pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pada tahun 2023, arah kebijakan meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi menuju koperasi mandiri dan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro yang merupakan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung dilaksanakan melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota melalui sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 141 koperasi aktif yang ada di Kabupaten Belitung dari total 193 koperasi dimana terdapat 54 koperasi yang tidak aktif dikarenakan koperasi tersebut statusnya dalam proses pembekuan. Sedangkan untuk proses pembekuan diperlukan waktu 2 tahun untuk pembubaran koperasi. Koperasi tersebut dibubarkan karena kepengurusan (ketua dan anggota) sudah tidak aktif lagi dan usaha koperasinya tidak berjalan. Kecamatan yang paling banyak memiliki koperasi adalah Kecamatan Tanjungpandan yang merupakan pusat perekonomian Kabupaten Belitung. Berikut disajikan Keragaan Koperasi Kabupaten Belitung Tahun 2023:

Tabel 2.109
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Membalong	17	17	17	17
Tanjungpandan	84	86	87	89
Badau	12	12	12	12
Sijuk	18	18	18	18
Selat Nasik	4	5	5	5
Jumlah	135	138	139	141

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2024

Berikut jumlah koperasi menurut jenis koperasi dan kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023 :

Tabel 2.110
Jumlah koperasi menurut jenis koperasi dan kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Koperasi					
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
Membalong	1	-	-	-	16	17
Tanjungpandan	2	11	3	-	73	89
Badau	-	1	2	-	9	12
Sijuk	-	-	-	-	18	18
Selat Nasik	-	-	-	-	5	5
Jumlah	3	12	5	0	121	141

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka 2024

Volume usaha koperasi pada tahun 2023 sebesar Rp96.586.234.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi belum terlalu baik meski pun terdapat dukungan dari pemerintah daerah, namun peran aktif masyarakat masih belum optimal untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan usaha koperasi.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menggalakkan Reformasi Koperasi yang dapat dicapai melalui tiga upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan usaha. Salah satu

tindakan nyata dari rehabilitasi adalah pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan *Online Base Data System* sehingga koperasi mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) serta membangun Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi secara online untuk mempermudah pendirian Badan Hukum Koperasi.

Sementara arah kebijakan meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro dilaksanakan melalui (a) Program Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan (b) Program Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Pada tahun 2023, usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Belitung berjumlah 21.327 usaha. Berikut tersaji jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Belitung.

Tabel 2.111

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kab. Belitung Tahun 2023

No	Kecamatan	SEKTOR PERDAGANGAN						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	1.769	2.744	4.513	4.337	173	3	4.513
2	Sijuk	566	416	982	927	54	1	982
3	Badau	253	244	497	487	10	-	497
4	Membalong	351	171	522	503	19	-	522
5	Selat Nasik	252	99	351	333	19	-	351
	JUMLAH	**3.191**	**3.674**	**6.865**	**6.587**	**275**	**4**	**6865**

No	Kecamatan	SEKTOR JASA						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	743	372	1.115	1.007	108	-	1.115
2	Sijuk	477	99	576	488	88	-	576
3	Badau	59	20	79	70	9	-	79
4	Membalong	151	27	178	155	23	-	178
5	Selat Nasik	71	2	73	60	13	-	73
	JUMLAH	**1.501**	**520**	**2.021**	**1.780**	**241**	**-**	**2.021**

No	Kecamatan	SEKTOR INDUSTRI						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	555	1.559	2.114	2.089	25	-	2.114
2	Sijuk	296	480	776	747	13	3	776
3	Badau	121	156	277	266	11	-	277
4	Membalong	349	214	563	562	1	-	563
5	Selat Nasik	174	143	317	316	1	-	317
	JUMLAH	**1.495**	**2.552**	**4.047**	**3.980**	**51**	**3**	**4.047**

No	Kecamatan	SEKTOR PERTANIAN/ PETERNAKAN, KEHUTANAN/PERIKANAN						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	538	142	680	625	55	-	680
2	Sijuk	2.343	291	2.634	2.524	110	-	2.634
3	Badau	170	39	209	197	12	-	209
4	Membalong	4.403	160	4.563	4.533	30	-	4.563
5	Selat Nasik	173	40	213	201	12	-	213

	JUMLAH	**7.627**	**672**	**8.299**	**8.080**	**219**	**-**	**8.299**

No	Kecamatan	SEKTOR PERTAMBANGAN/ PENGGALIAN						
		GENDER			KUALIFIKASI			
		LK	PR	JML	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
1	Tanjungpandan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sijuk	-	-	-	-	-	-	-
3	Badau	-	-	-	-	-	-	-
4	Membalong	12	-	12	12	-	-	12
5	Selat Nasik	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	**12**	**-**	**12**	**12**	**-**	**-**	**12**

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Belitung 2024

Faktor pendukung:

- Berkembangnya koperasi dan usaha mikro
- Meningkatnya Volume Usaha Koperasi.
- Penyerapan Tenaga Kerja dan Kompetensi Pencari Kerja

Faktor penghambat :

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro yaitu sebagai berikut :

- Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, menghadapi permasalahan :
  - Belum optimalnya promosi produk usaha kecil menengah dan penguatan jaringan pemasaran;
  - Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola koperasi dan usaha kecil menengah masih rendah;
  - Akses permodalan belum optimal;
  - Penurunan permintaan dan turunnya penjualan;
  - Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha;
  - Distribusi yang terhambat akibat banyak faktor;
- Urusan Usaha Perdagangan, menghadapi permasalahan :
  - Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana pelayanan kemetrologian dan perdagangan;
  - Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa;
  - Belum optimalnya perlindungan konsumen;
  - Belum optimalnya kapasitas kelembagaan pelayanan kemetrologian.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- koperasi hendaknya tidak terbatas di bidang simpan pinjam saja, tapi juga lebih bersifat produktif dan merambah berbagai sektor, terutama sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan pemanfaatan potensi sumberdaya lokal, sehingga nantinya dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung
- peningkatan kualitas dan produktivitas koperasi.
- mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa dan perluasan akses pasar.
- Meningkatkan daya saing dan pengembangnan kewirausahaan.
- mengoptimalkan perlindungan konsumen.
- mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pelayanan kemetrologian.
- Serta Kemudahan dan kesempatan berusaha dan meningkatkan koordinasi lintas sector.

Koperasi dan Usaha Mikro memegang peranan penting dalam

meningkatkan perekonomian daerah. Secara umum pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Belitung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai omset usaha mikro yang merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah secara intensif, khususnya Dinas KUKMPTK dan PLUT KUKM melalui pembinaan kewirausahaan disetiap kecamatan dan desa yang berimbas pada peningkatan kompetensi wirausaha di Kabupaten Belitung dan pada tahun 2023 dilaksanakan pembangunan Foodcourt yang terletak di pusat kota tanjungpandan sebagai dukungan pemerintah terhadap perkembangan UMKM Kabupaten Belitung.

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.112
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	329.049.162,00	313.172.350,00	95,17
2.	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	13.029.914.500,00	12.848.098.915,00	98,60
3.	Pengembangan UMKM	682.270.640,00	326.329.898,00	47,83

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan rata-rata capaian 96,06% dengan persentase realisasi anggaran 80,54% maka terdapat efektifitas dan efesiensi 3,94%.

SASARAN 11 : Meningkatnya Investasi

Investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Investasi” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Nilai Investasi dengan target Rp 5.023.529.000.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya investasi Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.113
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi (juta rupiah) Tahun 2023

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	Juta Rupiah	981.694	5.023.529,00	4.799.309,25	95,53	SB	5.023.529

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran meningkatnya investasi yaitu nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp 4.799.309.250.000,00 dengan capaian sebesar 95,53 % atau berkategori SANGAT BERHASIL. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD nilai investasi belum mencapai target, sehingga perlu peningkatan nilai investasi.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya investasi dicapai melalui strategi meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan industri, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif, 2) meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi, 3) meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah, 4) penataan peruntukan kawasan industri, 5) menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan, dan 6) menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan.

Pada tahun 2023, arah kebijakan meningkatkan promosi, kerjasama dan iklim investasi yang kondusif dilaksanakan melalui (a) program pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; b) program promosi penananamn modal dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan.

Arah kebijakan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi tahun 2023 dilaksanakan melalui program pelayanan penanaman modal dengan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan (b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

Arah kebijakan meningkatkan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan investasi daerah pada tahun 2023 dilaksanakan melalui (a) program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan (b) program perencanaan dan pembangunan industri dengan kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Arah kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan serta meningkatkan produktivitas industri kecil menengah berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan dan arah kebijakan menumbuhkan sentra-sentra industri kecil berbasis potensi daerah yang mendukung kepariwisataan tahun 2023 dilaksanakan melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah secara terstruktur dan berkelanjutan yang diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan IKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal yang pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap investasi.

Berikut tersaji tabel perkembangan investasi PMA dan PMDN per Triwulan tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 2.114
Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Belitung
Triwulan 1 s/d Triwulan 4 Tahun 2022 dan 2023

PMA	Insvestasi 2022 PMA	Insvestasi 2023 PMA	Investasi 2022 PMDN	Investasi 2023 PMDN
Triwulan 1	152.100.000,00	56.530.000.000,00	342.201.000.000,00	269.594.000.000,00
Triwulan 2	1.830.000.000,00	15.197.000.000,00	202.863.000.000,00	384.165.000.000,00
Triwulan 3	42.282.000.000,00	7.267.000.000,00	345.062.000.000,00	178.073.000.000,00
Triwulan 4	1.280.000.000,00	27.340.000.000,00	78,573.000.000,00	153.734.000.000,00
JUMLAH	**45.544.100.000,00**	**106.334.000.000,00**	**968.699.000.000,00**	**985.566.000.000,00**

Sumber Data : https://nswi.bkpm.go.id (Februari 2024)

Peningkatan capaian investasi di Kabupaten Belitung antara lain disebabkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, yang menjadi pendorong pelaksanaan investasi di sektor pariwisata dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Belitung nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Belitung dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Faktor pendukung:

- Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam menjaring investor yang menanamkan usahanya di Kabupaten Belitung, hal ini dibuktikan dengan berjalannya program KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung untuk mempermudah pelayanan informasi perizinan investasi menyasar sampai dengan seluruh desa di Kabupaten Belitung;
- Tersedianya Peraturan Daerah sebagai jaminan kepastian hukum tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah yang harus segera dijabarkan dalam turunan pelaksanaanya yaitu Peraturan Bupati mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah;

- Tersedianya Sumber Daya Alam dan Potensi Investasi yang memadai di berbagai sektor unggulan, sehingga mendorong harus adanya perumusan strategi perencanaan dan promosi investasi daerah;
- Telah diterapkannya Perizinan Online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengurus perizinan;
- Bersama OPD Teknis terkait perizinan dan non perizinan telah dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi terhadap regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat proses pelayanan perizinan dan non perizinan;

Faktor penghambat :

- Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten Belitung;
- Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya banyak berada pada sektor tersier;
- Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum spenuhnya diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi, baik regulasi terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan maupun OPD Teknis yang terkait perizinan dan non perizinan. Hal tersebut mengakibatkan perizinan dan non perizinan kurang efektif, karena regulasi seperti SOP, SPP, SPM yang menjadi dasar pemberian pelayanan lintas OPD Teknis belum ada.;
- Belum optimalnya perencanaan penanaman modal;
- Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil.
- Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (*Online Single Submission)* terkendala oleh pemenuhan komitmen dari OPD Teknis. Pemenuhan komitmen OSS sebagian besar belum dilakukan secara online.
- Masih rendahnya kesadaran investor untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh *stake holder*
- Memberikan kemudahan berinvestasi di kabupaten belitung dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (*Ease of Doing Business*)
- Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
- Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMD.
- Meningkatkan promosi investasi daerah;

Realisasi keuangan program penunjang sasaran meningkatnya investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Investasi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengembangan iklim penanaman modal	39.985.573,00	38.084.207,00	95,24
2.	Promosi penanaman modal	119.499.805,00	118.120.889,00	98,85
3.	Perencanaan dan pembangunan industri	353.978.524,00	348.684.971,00	98,50
4.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	569.107.038,00	514.340.880,00	90,38

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Investasi dengan rata-rata capaian 94,15% dengan persentase realisasi anggaran 95,74% maka terdapat efektifitas dan efesiensi 5,85%.

SASARAN 12 : Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

Capaian kinerja sasaran "meningkatnya infrastruktur kewilayahan" merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Pemenuhan Infrastuktur Kewilayahan dengan target 59,94 %. Berikut realisasi dan Capaian Indikator Sasaran infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.116
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023			Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayaan	Persentase	35,18	59,94	64,90	108,27	SB	59,94

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator kinerja Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2023 sebesar 64,90 % dari target sebesar 59,94 %, dengan capaian kinerja sebesar 108,27 % berkategori SANGAT BERHASIL.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah.

Ada 14 (dua belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksebilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan konektivitas antar pulau; 2) mendorong percepatan pembangunan pelabuhan wisata; 3) mendorong percepatan pembangunan infrastuktur marina; 4) meningkatkan penataan kawasan strategis dan kawasan perkotaan; 5) meningkatkan pengelolaan jalan dengan program hibah jalan daerah (PHD); 6) mendorong percepatan pembangunan jembatan juru seberang; 7) meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 8) Membangun akses jalan yang menghubungkan wilayah potensial; 9) meningkatkan pemenuhan penerangan jalan umum yang estetis dan fungsional; 10) meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan pelabuhan dan pembangunan lainnya; 11) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 12) meningkatkan keselamatan transportasi; dan 13) pemenuhan sarana dan prasarana transportasi publik yang terintegrasi.

Pencapaian kinerja pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

=(0,92 x Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten) + (0,08 x Target Pengelolaan sumber daya air)

= (0,92x 67,76%) + (0,08 x 48,02%)

= 66,18 %

Keterangan:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = (Panjang jalan mantap kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%
   Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
2. Pengelolaan sumber daya air = 90% sawah terairi + 10% sumber air baku yang terkelola dengan baik
   Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan pada tahun 2023 adalah sebesar 66,18 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 93,11 % dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan mantap kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten yang direncanakan}} \times 100\ \%$$

$$\frac{587.662}{867} \times 100\ \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 67,76 % dengan perhitungan Panjang jalan mantap kabupaten sebesar 587.662 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yang direncanakan yaitu 867 km dikali seratus persen.

b. Pengelolaan sumber daya air didapat dengan menggunakan rumus

= (90% sawah terairi irigasi) + (10% sumber air baku yang terkelola dengan baik)
= (90% * 52,05 %) + (10% * 11,76%)
= 48,02 %

Realisasi pengelolaan sumber daya air adalah sebesar 47,64 % dengan perhitungan 90% sawah terairi irigasi dan 10% air baku yang terkelola dengan baik.

Sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) Program antara lain Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang

No.	Program	Indikator Kinerja	2023			
			Target	Capaian	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kriteria
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Mantap Kabupaten	72,78%	67,76%	93,10	Sangat Baik
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	45,10%	48,02%	106,47	Sangat Baik
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00%	97,26%	97,26	Sangat Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Mantap Kabupaten sebesar **93,28%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **72,78%** pada tahun 2023 terealisasi sebesar **67,76%.** Penyebab tidak tercapainya target kinerja program ini adalah Kurangnya dukungan anggaran untuk pencapaian kinerja sehingga ada perubahan menyesuiakan dengan kondisi dilapangan serta kondisi jalan kabupaten yang masih dalam kondisi kurang baik disebabkan adanya kondisi jalan yang sebelumnya baik menjadi kurang baik terutama untuk jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan yang melebihi tonase yang telah ditentukan. Melalui program ini, selama tahun 2023, terdapat penambahan 0,34 km jalan kabupaten yang dibangun, 7,455 km jalan yang dilebarkan sesuai standar jalan, 4,224 km jalan yang dipelihara secara berkala serta 624 km jalan yang dipelihara secara rutin.

Salah satu faktor penghambat tidak tercapainya kinerja program adalah kurang sinkronisasi perencanaan target capaian panjang jalan mantap kabupaten. Pada saat dilakukan perencanaan awal renstra di tahun 2019, penambahan panjang jalan mantap adalah sebesar 20 km per tahun. Pada kenyataannya, sejak pandemi covid-19

melanda Indonesia di awal tahun 2020, baik itu kegiatan DAK maupuan APBD bidang jalan terus mengalami penurunan sehingga penambahan jalan dalam kondisi baik tidak sesuai target yang direncanakan.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan.

Dilihat dari Tabel diatas realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar 48,02% dari target sebesar 45,10% dengan realisasi kinerja sebesar 106,47% dengan kategori sangan baik.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Gambar Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Gede

Pembangunan Irigasi Sawah Tanjung Rusa

Pembuatan Bangunan Pelimpah dan Saluran Irigasi Sawah Dusun Mentigi

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Karya Bersama Desa Simpang Rusa

Sepanjang tahun 2023, terdapat 3.002 meter tanggul sungai yang dipelihara, 90 meter tanggul sungai yang ditingkatkan, 104 meter tanggul sungai yang dibangun. Selain itu, pada tahun yang sama, sepanjang 224 meter saluran irigasi yang ditingkatkan dan 856 meter saluran irigasi yang dipelihara dan 490 m irigasi yang dibangun. Adapun rincian luas sawah yang terairi irigasi pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Luas sawah yang terairi irigasi

Kecamatan	Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha)	Luas Irigasi (Ha)
Tanjungpandan	69,00	80
Sijuk	38,45	160
Membalong	468,00	765,2
Badau	56,00	72,53
Selat Nasik	0	0
Total	**631,45**	**1077,73**

Pelaksanaan pencapaian kinerja indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik didorong oleh faktor yaitu:

- Tersedianya data rincian yang akurat dan peta seluruh daerah irigasi di wilayah kabupaten.
- Tersedianya alat penunjang kebutuhan di lapangan seperti mobilisasi lapangan dan alat pengukuran yang lengkap dalam melakukan pendataan terkait perencanaan dibidang SDA.

Faktor penghambat pelaksanaan adalah:

- Adanya alih fungsi lahan irigasi menjadi permukiman sehingga mengurangi dareah fungsional irigasi
- Kurangnya optimalnya sumber daya air untuk pertanian.
- Daerah sekitar sumber daya air yang masih belum terbebas dari wilayah permukiman maupun tambang.

Pada Sasaran strategis terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan dengan indikator rasio konektivitas memiliki rumus:

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Dimana :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas:

   Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

Berikut data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan:

Tabel 2.119
Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Trayek		Jarak	Jumlah Trayek	
	Dari	Ke		Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Tanjung Binga	37	1	1
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1
8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi –via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1

13	Dalam Kota Tanjungpandan 1		15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2		15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
Jumlah				**17**	**11**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut

  (11 x 1) /17 = 0,65

Tabel 2.120
Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung
Tahun 2023

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
	TOTAL	10 Lintasan	4 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dermaga Kuil) Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan melalui trayek baru TG Ru - TG Nyato

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Sungai, Danau, Penyebrangan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb × bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

  (4×1)/10 =0,40

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

= ((11 × 1/ 17) × 50) +((4×1/10) × 50)

= (0,65 × 50) + (0,40 × 50)

= 32,50 + 20,00

= 52,50

Nilai 52,50 ini menunjukan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan baik itu lintas trayek.

Meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari rata-rata volume lalu lintas dibagi rata-rata kapasitas jalan. Berikut tabel capaian indikator kinerja lalu lintas

Tabel 2.121
Capaian Indikator Kinerja Lalu Lintas Tahun 2023

No	Ruas/ Nama Jalan	Fungsi Jalan	Volume Lalu Lintas (kend/jam)	Kapasitas (kend/jam)	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
1	D.K Tanjungpandan- Kota	Jalan Utama	925	1019	0,19	60
2	Perawas – Kelapa Kera	Jalan Utama	355	1019	0,35	60
3	Pilang – Cerucuk	Jalan Utama	248	1019	0,24	65
4	Pilang – TPA	Jalan Utama	440	1019	0,43	50
5	Sp. Mungkui – Cerucuk	Jalan Utama	199	1019	0,20	65
6	Pilang – Juru Seberang	Jalan Utama	164	1019	0,16	60
7	Buluh Tumbang – Air Seru	Jalan Utama	320	1019	0,31	55
8	Buluh Tumbang – Air Mungkui – Mempiu	Jalan Utama	199	1019	0,20	60
9	Piak Aik – Kantor Camat	Jalan Utama	172	1019	0,17	65
10	Tanjungpandan- Simpang Empat	Jalan Utama	625	1019	0,61	55
11	Simpang Empat - Pasarakan	Jalan Utama	150	1019	0,15	60
12	Simpang Empat – Sungai Padang	Jalan Utama	189	1019	0,19	55
13	Sungai Padang – Cendil	Jalan Utama	120	1019	0,12	65
14	JL. Padang Bola – JL. Padang Bola	Jalan Utama	167	1019	0,16	60
15	Tanjung Binga – Sp. III Tanjung Binga	Jalan Utama	164	1019	0,16	50
Rata- rata			**4.437/ 15=295,8**	**1019**	**0,29**	**59**

Keterangan:

Jumlah sampel (n) wajib minimal sesuai dengan matriks dibawah, panjang jalan minimal 1 Km, untuk seluruh jenis kota, yang meliputi:

Ruas jalan yang dinilai terdiri dari:

1. Jalan Nasional (maks. 2 ruas)
2. Jalan Propinsi (maks. 2 ruas)
3. Jalan Kab/Kota.

Kinerja Lalu Lintas = Rata-rata volume lalu lintas dibagi rata-rata kapasitas jalan.

= 295,8/ 1019

= 0.29

Nilai 0,29 ini menunjukan bahwa kinerja jalan di kabupaten kota dalam kategori lancar.

Armada untuk melayani anak sekolah di Kabupaten Belitung

Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Permasalahan dan Solusi Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Belum meratanya fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut di Kabupaten Belitung;
- Belum tertatanya kawasan perparkiran di Kabupaten Belitung;
- Belum adanya aturan tentang angkutan khusus yang ada di Kabupaten Belitung;
- Untuk melayani anak sekolah masih perlu penambahan armada. Seperti dari rute Pelepak Pute bus hanya 1 ujtuk melayani hampit 80 siswa. Sehingga ada siswa yang tidak terlayani (terangkut)

Solusi:

- Pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas baik darat maupun laut secara bertahap di Kabupaten Belitung;
- Revitalisasi terminal penumpang di Kabupaten Belitung;
- Pembuatan aturan dan dasar hukum untuk mengatur kawasan perparkiran di Kabupaten Belitung;
- Pembuatan aturan dan dasar hukum untuk mengatur angkutan khusus di Kabupaten Belitung.

Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2023 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu:

- Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- Melakukan pembangunan jaringan trayek darat dan laut;
- Melakukan penataan manajemen rekayasa lalu lintas;
- Meningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia perhubungan.

Tabel 2.123
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.660.938.367,00	3.498.726.050,00	95,57
2	Penataan Bangunan Gedung	15.312.000.000,00	14.044.102.000,00	91,72
3	Penyelenggaraan Jalan	57.896.642.039,00	48.930.267.602,00	84,51
4	Penyelenggaraan Penataan Ruang	773.622.800,00	749.597.079,00	96,89
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	14.326.005.498,00	12.653.456.085,00	88,33
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	680.000.000,00	678.580.000,00	99,79
7	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	34.824.300.448,00	33.544.593.724,00	96,33
8	Pengelolaan Pelayaran	1.456.042.000,00	1.397.363.700,00	95,97

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebesar 89,58% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 93,64% maka terdapat efesiensi 10,42 %.

3.2.4 TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, upaya pencapaian Tujuan 4 " meningkatkan kualitas lingkungan hidup " telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
	Sasaran 14 Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaataan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja tujuan "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup" merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 dengan target 68,88. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.124
Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2022		Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
				Target	Realisasi			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	58,18	68,88	68,90	100,03	SB	68,88

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 68,90 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2023 sebesar 69,25 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori ***Sedang***. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus :

Untuk formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 menggunakan Formulasi Perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusannya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air
IKU : Indeks Kualitas Udara
IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.125
Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2020 sampai dengan 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.62	68.09	69,25	68,90

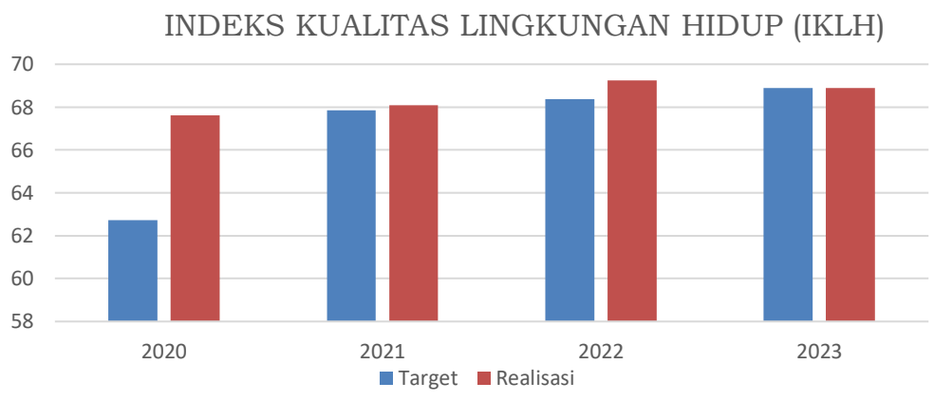

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bergantung dari adanya penilaian Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang cukup signifikan, meskipun Indeks Kualitas Lahan meningkat.

Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

1. Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udarasalah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik.
2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan.
3. Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan sir sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL Domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.
5. Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung.
6. Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder.
7. Peningkatan program kegiatan penanaman pohon dan reboisasi atau kegiatan inovasi lainnya Bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.

SASARAN 13 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan 3 indikator Indeks kualitas lingkungan Air dengan target 53,46, Indeks kualitas lingkungan Udara dengan target 93,83 dan Indeks kualitas lingkungan Tutpan Lahan dengan target 50,35. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Belitung Tahun 2022.

Tabel 2.126
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Indeks Kualitas Air	Skala	57,34	53,46	59,71	111,69	SB	53,46
2	Indeks Kualitas Udara	Skala	89,40	93,83	90,43	96,38	SB	93,83
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Skala	35,40	50,35	44,89	89,16	B	50,35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara, dan Tutupan Lahan yaitu Indeks Kualitas Air kinerja sebesar 59,71 melampaui target dengan persentase capaian sebesar 111,69%, Indeks Kualitas Udara kinerja sebesar 90,43 belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 96,38 %, Indeks Kualitas Tutupan Lahan kinerja sebesar 50,35 belum mencapai target dengan persentase capaian sebesar 89,16%.

- Indeks Kualitas Air (IKA)

  Nilai IKA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 53,46.sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 ialah 59,71 dengan tingkat capaian sebesar 111,69%

  Nilai IKA tahun 2023 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik yang dipantau yang terlapor sejumlah 24 (Dua puluh empat) titik yang terdiri dari 18 (delapan belas) titik air sungai dan 6 (enam) air danau/Kolong/SPAM. Nilai IKA pada tahun 2023 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

  1. Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.
  2. Penambahan nilai IKA yang terhitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding yang diukur sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
  3. Adanya pengaruh penurunan debit air dikarenakan kemarau Panjang dampak dari Peristiwa El Nino Tahun 2023 sehingga terdapat beberapa parameter yang mengalami penurunan kualitas terutama kandungan oksigen dalam air / *Dissolve oxygen* (DO).

  Nilai IKA yang terhitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK.Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib. Data yang terverifikasi sejumlah 68 (enam puluh delapan) dari 99 (Sembilan puluh sembilan) titik air sungai dan danau yang terinput dengan persentase titik yang memenuhi baku mutu sebanyak 34 titik (35%), cemar ringan sebanyak 33 titik (24,26%), dan cemar sedang 1 titik (0,4%). Terlihat bahwa tidak ada perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara persentase titik yang memenuhi baku mutu dengan titik yang tercemar ringan dan tercemar sedang

  Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA 6 (enam) Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.127
Perbandingan Nilai IKA Tahun 2018 s.d 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	57,34	50,00	53,16	56,75	59,90	59,71

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja IKA sebagai berikut :

1. Kecamatan Tanjungpandan

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Cerucuk

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Kubu

2. Kecamatan sijuk

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Padang

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Sengkelik

3. Kecamatan Membalong

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Sapai

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Membalong

4. Kecamatan Badau

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Aik Patah 1

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Aik Patah 2

5. Kecamatan Selat Nasik

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Selat Nasik

Pengambilan sampel air di aliran Sungai Selat Nasik

6. Kolong

Pengambilan sampel air di Air Danau SPAM Mempadin

Pengambilan sampel air di Air Danau SPAM Bantan

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

  Nilai IKU pada tahun 2023 ditargetkan 93,83 sedangkan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 90,43 dengan tingkat pencapaian sebesar 96,38%. Nilai IKU dihitung berdasarkan hasil pengujian parameter SO_2 dan NO_2 menggunakan metode *passive sampler* selama 24 jam/14 hari yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteria lokasi, antara lain:

  1. Kepadatan transportasi

     Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jl. Jendral Sudirman
  2. Kepadatan pemukiman

     Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara Rt.04 RW.02
  3. Lokasi perkantoran

     Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di Area Perkantoran dekat Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung.
  4. Lokasi industri

     Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge Jalan TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Rerata Nilai SO_2 dan NO_2 yang terukur masih memenuhi baku mutu namun nilai IKU belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kenaikan nilai SO_2 dan NO_2 pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128
PERBANDINGAN NILAI SO_2 DAN NO_2 TAHUN 2021, 2022 dan 2023

NO	PARAMETER	KATEGORI	NILAI RATA-RATA		
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	SO_2	Transportasi	6,59	7,35	8,86
		Industri	5,91	5,29	5,31
		Pemukiman	9,76	8,74	9,92

		Perkantoran	5,69	5,10	5,13
2	NO_2	Transportasi	4,83	4,98	7,89
		Industri	4,07	3,74	3,97
		Pemukiman	6,33	6,62	5,54
		Perkantoran	8,75	11,69	11,73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung Tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai pada 4 (empat) titik kategori sampling yaitu Transportasi (SO_2 dan NO_2), Lokasi Pemukiman (NO_2), dan Perkantoran (NO_2).

2. Sumber sulfur utama yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi SO_2, ialah salah satunya ialah gas buang dari kendaraan. Lokasi titik sampling area transportasi berdekatan dengan jalan raya padat kendaraan yang menjadi akses utama jalan kabupaten. Demikian halnya dengan meningkatnya nilai NO_2 di area transportasi dimana jumlah kendaraan yang meningkat dapat mempengaruhi banyaknya pengeluaran emisi gas buang kendaraan ke udara.
3. Meningkatnya nilai NO_2 pada area perkantoran dikarenakan berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas.
4. Adanya peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau dampak dari peristiwa El Nino pada tahun 2023 yang menyebabkan kondisi lingkungan lebih berdebu.
5. Nilai IKU didapat berdasarkan data hasil pengujian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga data perhitungan indeks kualitas udara hanya terbatas pada hasil di 4 (empat) titik pantau tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung agar dapat menambah jumlah titik pantau kualitas udara sesuai dengan metode yang dipersyaratkan dalam PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Kurangnya penetapan ruang terbuka hijau di Kabupaten Belitung

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKU 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.129
Perbandingan Nilai IKU Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,40	96,32	92,63	91,69	91,67	90,43

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKU pada tahun 2023 mengalami penurunan 1,24 poin dibandaingkan tahun 2022.

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja IKU sebagai berikut :

1. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Kawasan Industri PLTU Suge

2. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Kawasan Pemukiman Kantor Desa Aik Pelempang Jaya

3. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung

4. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Terminal Bus Tanjungpandan

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

  Nilai IKL pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 50,35 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 44,89 dengan tingkat capaian sebesar 89,16%

Nilai IKL dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dalam aplikasi IKLH. Kabupaten hanya dapat menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung dan Data Vegetasi Lainnya yang didapat dari verifikasi lapangan reklamasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Belitung.

Seperti yang terlihat terdapat penurunan nilai IKL antara tahun 2022 dan tahun 2023, hal ini disebabkan oleh:

1. Inventarisasi data seperti verifikasi lapangan dan pengumpulan data sekunder dari dinas lainnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022 dan dilanjutkan hingga tahun 2023, sehingga terdapat kenaikan nilai IKL dari 43,89 tahun 2022 menjadi 44,89 tahun 2023. Namun, perlu dilakukan metode lain yang dapat menunjang peningkatan nilai indeks kualitas lahan, salah satunya ialah Deliniasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 menggunakan *software* dan verifikasi lapangan.
2. Terdapat kenaikan target IKL tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang cukup signifikan dari 48,38 tahun 2022 menjadi 50,35 tahun 2023.

Tabel 2.130

Perbandingan Nilai IKTL Tahun 2018 s.d 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	35,40	40,18	46,19	43,89	43,83	44,89

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai IKL pada tahun 2023 sedikit meningkat yaitu 1,06 point jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Faktor pendukung :

- Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik
- Setiap kegiatan usaha wajib memliki izin lingkungan dan persetujuan teknis lingkungan
- Monitoring dan pengawasan kegiatan setiap industri atau kegiatan usaha yang melakukan kegiatan wajib melaksanakan pencegahan dan pengurangan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- SDM sudah didukung oleh pejabat fungsional yaitu pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup
- Sudah didukung oleh Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah terakreditasi oleh lembaga KAN.

Faktor penghambat :

- Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi adanya perubahan iklim
- Masih rendahnya Indeks Tutupan Lahan (IKL) dikarenakan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Masih kurangnya pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) perlu pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.
- Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah
- Menambah SDM pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup

Tabel 2.131
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	363.615.750,00	328.120.862,00	90,24
2.	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.099.269.120,00	2.306.259.301,00	74,41
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	549.039.650,00	156.641.243,00	28,69
4	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	23.691.600,00	23.139.050,00	97,67
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	49.999.750,00	43.085.982,00	86,17

6.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	99.999.850,00	99.271.266,00	99,27
7.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	30.470.800,00	15.162.350,00	49,76

Sehingga untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan realisasi anggaran sebesar 70,53% dan rata-rata persentase per sasaran sebesar 75,17%, maka terdapat efektifitas dan efesiensi 29,47%.

SASARAN 14 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Capaian kinerja sasaran "meningkatnya pengelolaan sampah" merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan dengan target 16.00%. Berikut Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tabel 2.132
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	2023 Target	2023 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2023 Target
1	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	%	0,79	16,00	16,96	106	SB	16,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase cakupan pelayanan persampahan Tahun 2023 sebesar 16,96% dengan capaian kinerja sebesar 106 % berkategori SANGAT BERHASIL.

Untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$Persentase\ Cakupan\ Pelayanan\ Persampahan\ = \frac{luas\ area\ pengelolaan\ sampah(km^2/ha)}{luas\ area\ Kabupaten/Kota\ (km^2/ha)} x\ 100\%$$

Luas area pengelolaan sampah = 389,12 km²

Luas area Kabupaten Belitung = 2.293,69 km²

Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan = $\frac{389,12}{2.293,69} x\ 100\% = 16,96\%$

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan sampah dicapai melalui strategi meningkatkan pengelolaan persampahan, dengan 6 (enam) arah kebijakan yaitu 1) meningkatkan ketersediaan kontainer sampah untuk penampungan sampah sementara; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; 3) meningkatkan perencanaan pengelolaan persampahan; 4) meningkatkan cakupan pelayanan persampahan; 5) meningkatkan pengolahan TPA berbasis 3R; dan 6) mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.

Arah kebijakan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan tahun 2022 terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah terus bertambah, dan akan menjadi permasalahan yang besar di masa yang akan datang.

Capaian untuk sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sampah dengan indikator kinerja persentase cakupan pelayanan persampahan dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas.Pada tahun 2023 dari target yang di tentukan sebesar 16 %, realisasi tahun 2023 sebesar 16,96 % dengan tingkat capaian sebesar 106%, dengan penambahan lokasi Gudang Wings di Desa Badau. Selain itu didukung dengan Kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Laskar Bebas Sampah (Lebah) diwilayah pedesaan diseluruh Kecamatan se Kabupaten Belitung.

Berikut perbandingan persentase cakupan pelayanan persampahan 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019-2023 :

Tabel 2.133

Perbandingan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2019 sampai dengan 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase (%) Cakupan Pelayanan Persampahan	3,10	15,02	16,73	16,81	16,96

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase (%) Cakupan Pelayanan Persampahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 0,15 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,92 atau 384,52 %. Hal ini terjadi karena peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan terbentuknya Satuan Tugas Laskar Bebas Sampah (Lebah).

Pelayanan Pengangkutan Sampah di Pasar Tanjungpandan

Pelayanan kebersihan/persampahan di Aliran Sungai Amau

Pelayanan kebersihan/persampahan di Pantai Wisata Tanjun Tinggi

Pelayanan Pengangkutan Kontainer Sampah di Pos II (Jl. Saidan)

Berikut tersaji hasil kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Belitung selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

Tabel 2.134
Hasil Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Belitung
Tahun 2016 – 2023

NO	Kinerja Pengelolaan Sampah	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Timbulan sampah yang di tangani (Ton/Tahun)	26.092,17	11.679,22	13.577,09	19.673,74	19.829,21
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	34,03%	44,76 %	52,03 %	73,23 %	72,90%
3	Jumlah TPS 3R yang ada	14	16	17	6	6

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa timbulan sampah yang ditangani tahun 2023 sebesar 19.829,21 ton/tahun. Timbulan sampah yang ditangani paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 19.673,74 ton/tahun, dan paling rendah sebesar 11.679,22 ton/tahun di tahun 2020.

Target persentase (%) jumlah sampah yang ditangani tahun 2023 adalah 72,90 %. Dibandingkan tahun 2023 persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami penurunan sebesar 0,33% di tahun 2023 dari 73,23 %.

Persentase jumlah sampah yang tertangani paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 73,23 % dan paling rendah sebesar 34,03 % di tahun 2019. Jumlah TPS 3R sebanyak 6 TPS 3R ditahun 2023.

Faktor pendukung :

- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan
- Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Jasa Unit Laboratorium Lingkungan.

Faktor penghambat :

- Keterbatasan sarana dan prasarana penyedia layanan
- Kurangnya SDM yg menangani tugas pokok dan fungsi di TPA dan IPLT (menurut analisa pakar lingkungan KLHK untuk kapasitas volume sampah 50-60 ton/hr membutuhkan tenaga kerja yg bewawasan lingkungan sebanyak 30 org

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- Terus mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung;
- Penyediaan sarana prasarana UPT Pengelolaan Sampah
- Penambahan jumlah SDM
- Pada daerah-daerah destinasi wisata menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat karena meningkatnya volume sampah.
  Oleh karena itu, perlu peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan persampahan yang diarahkan pada meluaskan cakupan pelayanan persampahan, serta pengolahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis 3R dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan persampahan dan mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di masyarakat.
- Keberlanjutan satgas khusus patroli kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sampai dengan saat ini. Program ini merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2018 - 2023. Program ini dibuat untuk melakukan penanganan atau perang terhadap sampah, terutama sampah plastik. Program Lebah ini, sebagian merupakan bantuan oleh CSR perusahaan swasta, sehingga permasalahan sampah, kini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun sudah menjadi tanggung jawab seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung.

Untuk Program Adiwiyata Tahun 2023 mendapat penghargaan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

- Untuk Sekolah Adiwiyata Nasional ada 2 (dua) Sekolah yaitu :
  1. SDN 33 Tanjungpandan
  2. SDN 20 Tanjungpandan
- Untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional ada 1 (satu) Sekolah yaitu :
  1. SMPN 2 Badau
- Untuk Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi ada 1 (satu) sekolah yaitu :
  1. SMPN 1 Tanjungpandan

Tabel 2.135
Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Peningkatan Pengelolan Persampahan	8.411.530.600,00	8.324.233.336,00	98,96

Sehingga untuk sasaran strategis keempat belas yaitu meningkatnya pengelolaan persampahan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,96% dan rata-rata persentase per sasaran sebesar 98,96%, maka terdapat efesiensi 1,04%.

○ AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.102.152.244.292,00 bertambah sejumlah Rp. 114.912.347.067,00 sehingga menjadi Rp. 1.217.064.591.359,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan daerah:	
Semula	Rp. 1.002.651.044.292,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 37.745.153.473,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.040.396.197.765,00
Belanja daerah:	
Semula	Rp. 1.102.152.244.292,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 14.912.347.067,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.217.064.591.359,00
Pembiayaan daerah:	
Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 99.501.200.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 77.167.193.594,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 176.668.393.594,00
Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp. --
Bertambah/ (berkurang)	Rp. --
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 176.668.393.594,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 176.668.393.594,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. –

▪ Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari komponen (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer

dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut **:**

Tabel 2.136
Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,055,850,545,765.00**	**1,117,439,818,908.80**	**105.83**	**1,107,840,034,233.53**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**147,139,608,350.00**	**186,621,508,495.80**	**126.83**	**188,041,448,784.53**
	Pajak Daerah	80,797,248,000.00	94,099,943,027.70	116.46	91,471,330,006.49
	Retribusi Daerah	10,520,950,399.00	12,144,891,525.60	115.44	8,933,321,281.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,035,003,956.00	6,035,003,956.00	100.00	4,679,197,843.02
	Lain-lain PAD yang Sah	49,786,405,995.00	74,341,669,986.50	149.32	82,957,599,654.02
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**147,139,608,350.00**	**186,621,508,495.80**	**126.83**	**188,041,448,784.53**
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**897,489,400,967.00**	**920,148,463,207.00**	**102.52**	**905,578,221,778.00**
	Dana Perimbangan	748,962,672,000.00	760,379,607,792.00	101.52	766,304,065,556.00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	118,040,689,000.00	136,611,970,768.00	115.73	152,569,701,649.00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	469,570,334,000.00	469,430,528,687.00	99.97	452,940,056,460.00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73,229,668,000.00	69,464,145,429.00	94.86	85,300,343,046.00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88,121,981,000.00	84,872,962,908.00	96.31	75,493,964,401.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**748,962,672,000.00**	**760,379,607,792.00**	**101.52**	**766,304,065,556.00**
	Dana Insentif Daerah (DID)	41,029,718,000.00	41,029,718,000.00	100.00	37,414,115,000.00
	Dana Desa	41,042,594,000.00	40,466,853,100.00	98.60	38,559,339,600.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**82,072,312,000.00**	**81,496,571,100.00**	**99.30**	**75,973,454,600.00**
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66,454,416,967.00	78,272,284,315.00	117.78	63,300,701,622.00
	Pendapatan Bagi Hasil	58,759,926,967.00	71,558,916,815.00	121.78	59,714,901,622.00
	Bantuan Keuangan	7,694,490,000.00	6,713,367,500.00	87.25	3,585,800,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**66,454,416,967.00**	**78,272,284,315.00**	**117.78**	**63,300,701,622.00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**897,489,400,967.00**	**920,148,463,207.00**	**102.52**	**905,578,221,778.00**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11,221,536,448.00**	**10,669,847,206.00**	**95.08**	**14,220,363,671.00**
	Pendapatan Hibah	-	-	-	4,763,000,000.00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11,221,536,448.00	10,669,847,206.00	95.08	9,457,363,671.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**11,221,536,448.00**	**10,669,847,206.00**	**95.08**	**14,220,363,671.00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,055,850,545,765.00**	**1,117,439,818,908.80**	**105.83**	**1,107,840,034,233.53**

▪ Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing- masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program- program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2023 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.137
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
1	**BELANJA DAERAH**	**1,232,518,939,359.00**	**1,108,349,766,933.00**	**89.93**	**1,074,182,835,247.83**
	BELANJA OPERASI	**959,091,928,326.00**	**849,724,295,083.00**	**88.60**	**841,947,804,625.83**
	Belanja Pegawai	502,345,646,990.00	445,534,554,743.00	88.69	453,049,538,368.00
	Belanja Barang dan Jasa	412,117,458,266.00	363,655,233,235.00	88.24	361,277,774,296.35
	Belanja Subsidi	693,409,628.00	644,159,628.00	92.90	1,196,662,498.00
	Belanja Hibah	43,510,361,690.00	39,685,936,477.00	91.21	24,335,941,910.48
	Belanja Bantuan Sosial	425,051,752.00	204,411,000.00	48.09	2,087,887,553.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**959,091,928,326.00**	**849,724,295,083.00**	**88.60**	**841,947,804,625.83**
2	**BELANJA MODAL**	**162,890,260,033.00**	**151,031,461,750.00**	**92.72**	**128,347,523,022.00**
	Belanja Modal Tanah	2,430,000,000.00	1,098,020,400.00	45.19	2,421,196,500.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,578,467,067.00	62,234,547,745.00	93.48	32,210,468,113.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,809,582,540.00	38,123,739,705.00	93.42	24,135,368,303.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,188,964,851.00	46,774,899,000.00	93.20	67,928,699,480.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,883,245,575.00	2,800,254,900.00	97.12	1,651,790,626.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**162,890,260,033.00**	**151,031,461,750.00**	**92.72**	**128,347,523,022.00**
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**2,367,000,000.00**	**-**	**-**	**1,430,000,000.00**
	Belanja Tidak Terduga	2,367,000,000.00	-	-	1,430,000,000.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**2,367,000,000.00**	**-**	**-**	**1,430,000,000.00**
3	**BELANJA TRANSFER**	**108,169,751,000.00**	**107,594,010,100.00**	**99.47**	**102,457,507,600.00**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8,079,725,000.00	8,079,725,000.00	100.00	8,074,534,000.00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1,052,096,000.00	1,052,096,000.00	100.00	921,234,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	99,037,930,000.00	98,462,189,100.00	99.42	93,461,739,600.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**108,169,751,000.00**	**107,594,010,100.00**	**99.47**	**102,457,507,600.00**
	JUMLAH BELANJA	**1,232,518,939,359.00**	**1,108,349,766,933.00**	**89.93**	**1,074,182,835,247.83**
	SURPLUS/DEFISIT	**- 176,668,393,594.00**	**9,090,051,975.80**	**- 5.15**	**33,657,198,985.70**

▪ Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2.138
Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**176,668,393,594.00**	**176,668,393,594.32**	**100.00**	**143,011,194,608.62**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**176,668,393,594.00**	**176,668,393,594.32**	**100.00**	**143,011,194,608.62**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	176,668,393,594.00	176,668,393,594.32	100.00	143,011,194,608.62
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**176,668,393,594.00**	**176,668,393,594.32**	**100.00**	**143,011,194,608.62**
	PEMBIAYAAN NETTO	**176,668,393,594.00**	**176,668,393,594.32**	**100.00**	**143,011,194,608.62**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**185,758,445,570.12**	**-**	**176,668,393,594.32**

▪ Capaian Keuangan

Rencana keuangan pendukung 14 sasaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.139 Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Realisasi Anggaran 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)	TARGET ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	CAPAIAN 2023(%)	KETRERANGAN
MISI I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan											
1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Skala	74,21	74,49	100,38	-	-	-	-
			2. Angka Kemiskinan	Persentase	5,41	6,46	80,59	-	-	-	-
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,47	71,54	100,10	117.700.029.572,00	101.507.328.484,00	86,24	EFEKTIF DAN EFISIEN
		3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	4. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,56	8,98	104,91	76.390.354.526,00	71.782.122.783,00	93.97	EFEKTIF DAN EFISIEN
		4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	5.Pengeluaran per Kapita (dalam ribu rupiah)	Rupiah	14.049	14.365	102,25	1.507.363.368,00	1.142.568.679,00	75,80	EFEKTIF DAN EFISIEN
		5. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	6. Status Desa "Maju"	Desa	31	40	129,03	3.189.978.222,00	2.681.457.092,00	84,06	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI II : Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan											
2. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	2. Indeks Reformasi Birokrasi	6. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	BB	BB	100	-	-	-	-
		7. Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	8. Opini BPK	Skala	WTP	n/a	-	134.157.167.935,00	127.553.431.722,00	95,08	EFEKTIF DAN EFISIEN
			9. Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Skala	BB	B	90,73	-	-	-	-
		8. Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	10. Indeks Profesional ASN	Skala	76	n/a	-	4.497.117.387,00	3.653.708.753,00	81,25	EFEKTIF DAN EFISIEN
		9. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	11. Survey Kepuasan Masyarakat	Skala	88	88,28	100,32	16.306.861.710,00	15.661.798.240,00	96,04	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI III : Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan											

3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	10. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	12. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,4 – 5,1	5,75	112,74	-	-	-	-
		11. Meningkatnya pengembangan pariwisata	13. Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik dan mancanegara)	Orang	400.000	301.870	75,47	10.294.652.754,00	8.993.346.887,00	87,36	EFEKTIF DAN EFISIEN
		12. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	14. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)	Persentase	27,83	26,56	95,43	20.899.070.236,00	17.984.142.278,00	86,05	EFEKTIF DAN EFISIEN
		13. Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro	15. Nilai Omset Koperasi (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	85.562.956	96.586.234	112,88	14.041.234.302,00	13.487.601.163,00	96,06	EFEKTIF DAN EFISIEN
			16. Nilai Omset Usaha mikro (dalam ribu rupiah)	Ribu Rupiah	1.957.050.000	1.699.800.000	100,50	-	-	-	-
		14. Meningkatnya investasi	17. Nilai Investasi (dalam juta rupiah)	Juta Rupiah	5.023.529	4.799.309,25	95,53	1.082.570.940,00	1.019.230.947,00	94,15	EFEKTIF DAN EFISIEN
		15. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	18. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	59,94	64,90	108,27	128.929.551.152,00	115.496.686.240,00	89,58	EFEKTIF DAN EFISIEN
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	16. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas lingkungan hidup	Skala	68,88	68,90	100,03	4.213.086.520,00	291.680.054,00	70,53	EFEKTIF DAN EFISIEN
		17. Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	20. Indeks Kualitas air	Skala	53,46	59,71	111,69	-	-	-	-
			21. Indeks Kualitas udara	Skala	93,83	90,43	96,38	-	-	-	-
			22.Indeks Kualitas tutupan lahan	Skala	50,35	44,89	89,16	-	-	-	-
		18. Meningkatnya pengelolaan sampah	23. Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	Persentase	16,00	16,96	106	8.411.530.600,00	8.324.233.336,00	98,96	EFEKTIF DAN EFISIEN

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu, tugas pembantuan diberikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui kementerian teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan tersebut akan lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ada tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan terdiri dari:

a. Pendidikan anak usia dini;
b. Pendidikan dasar; dan
c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2023
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	5.874
2	Pendidikan Dasar	Orang	28.583
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	29.830

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap jenjang pada tahun 2023 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2023 (Orang)	Realisasi (Orang)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	5.874	3.810
2	Pendidikan Dasar	28.583	22.033
3	Pendidikan Kesetaraan	29.830	289

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 258.834.807.598,00 dengan realisasi sebesar Rp. 241.962.531.295,00 atau terserap 93,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3

Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	174.784.369.881	163.098.034.831	93,31
2.	Belanja Barang dan Jasa	55.058.484.207	50.906.574.181	100,72
3.	Belanja Hibah	6.143.461.000	5.867.291.279	95,50
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.358.749.935	15.220.291.104	99,10
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.630.497.000	4.093.858.000	88,41
6.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.859.245.575	2.776.481.900	97,11
Jumlah		**258.834.807.598**	**241.962.531.295**	**93,48**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No	Program Pengelolaan Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	36.219.623.439	34.563.690.015	95,43
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.829.577.241	26.874.468.789	93,22
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.382.715.605	6.935.534.669	93,94
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.666.286.241	3.164.952.810	86,33
Jumlah		**76.098.202.526**	**71.538.646.283**	**94,01**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	69	S2 : 2 orang S1 : 48 orang D3 : 5 orang SMA : 14 orang	Gol II : 8 orang Gol III : 36 orang Gol IV : 15 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 6 Esl.IV : 9	28 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2023 capaiannya sebesar 8,98 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 8,74 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP belum seluruh guru memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan bersertifikat pendidik;
2. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
3. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih harus ditingkatkan bila dibandingkan standar Nasional, hal ini terlihat dari Capaian Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Mendorong pemeratan Guru PNS dengan Pengukuran Indeks Pemerataan Guru, paling tidak di tingkat kecamatan untuk menekan adanya perpindahan Guru yang kurang jam mengajar;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian Kinerja Berkelanjutan (PKB).

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang (SPM) Kesehatan di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten Belitung juga melakukan penghitungan kebutuhan untuk tenaga serta sarana dalam menunjang pencapaian SPM ini. Berikut Data penghitungan kebutuhan tenaga, alat / sarana :

Tabel 4.6

Penghitungan Kebutuhan Tenaga Serta Sarana Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
1	**Pelayanan kesehatan Ibu hamil**			
	Kartu Ibu	3120	3120	
	Buku KIA	3120	3120	
	Tablet tambah darah	280.800	902.200	
	Vaksin tetanus Difteri	30 vial	30 vial	
	Alat deteksi resiko Bumil,test kehamilan, pemeriksaan Hb,Gol darah, protein urine	3120	3120	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	20	20	
	Bidan	45	45	
	Perawat	45	45	
2	**Pelayanan kesehatan Ibu bersalin**			
	Formulir patograf	2978	2978	
	Kartu Ibu	2978	2978	
	Buku KIA	2978	2978	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	20	20	
	Bidan	45	45	
	Perawat	45	45	
3	**Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir**			
	Vaksin hepatitis B	2836	2836	
	Vitamin K Injeksi	2836	2836	
	Salep/tetes mata antibiotik	2836	2836	
	Formulir Bayi baru lahir	2836	2836	
	Formulir manajemen terpadu bayi muda (MTBM)	2836	2836	
	Buku KIA	2836	2836	
	Dokter / Dokter Spesialis Anak	8	8	
	Bidan	40	40	
	Perawat	40	40	
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**			
	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	13640	13640	
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	13640	13640	
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2836	2836	
	Vitamin A Biru	1285	1285	
	Vitamin A Merah	10162	10162	
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2836	2836	
	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2836	2836	
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2836	2836	
	Peralatan Anafilaktik	49	49	

	Bidan	9	9	
	Dokter	9	9	
	Perawat	9	9	
	Ahli Gizi	9	9	
	Guru Paud	80	80	
	Kader kesehatan	245	245	
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**			
	Buku raport kesehatanku	27184	27184	
	Buku pemantauan kesehatan	27184	27184	
	Kuesioner skrining kesehatan	27184	27184	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	15	15	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	15	15	
	Dokter/Dokter gigi	15	15	
	Bidan	35	35	
	Perawat	35	35	
	Ahli Gizi	15	15	
	Tenaga kesehatan masyarakat	10	10	
	Guru	525	525	
	Kader kesehatan	176	176	
6	**Pelayanan kesehatan Usia Produktif**			
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	90	90	
	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	9	9	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9	9	
	Dokter	9	9	
	Perawat	9	9	
	Bidan	9	9	
	Ahli Gizi	9	9	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9	9	
	Tenaga non kesehatan terlatih	245	245	
7	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**			
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	19490	17903	
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	19490	19490	
	Buku kesehatan lansia	19490	19490	
	Dokter	15	15	
	Bidan	15	15	
	Perawat	15	15	
	Ahli gizi	15	15	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	15	15	
	Tenaga non kesehatan terlatih	15	15	
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**			
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media	10	10	

	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			
	Tensimeter	18	18	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9	9	
	Dokter	9	9	
	Bidan	9	9	
	Perawat	9	9	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9	9	
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus**			
	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	3017	3017	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	10	10	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	10	10	
	Dokter	9	9	
	Perawat	9	9	
	Bidan	9	9	
	Ahli Gizi	9	9	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	9	9	
10	**Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**			
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	9	9	
	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	9	9	
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	9	9	
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	9	9	
	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	36	36	
11	**Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis**			
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	1000	1000	
	Reagen Zn TB	500	500	
	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	500	500	
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	15	15	
	Catridge tes cepat molekuler	4700	4700	
	Formulir pencatatan dan pelaporan	10	10	
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	5	5	
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	16	16	
	Perawat	17	17	
	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	16	16	
	Penata Rontgen	10	10	
	Tenaga kesehatan masyarakat	9	9	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	9	9	
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**			

	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	100	100	
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	4400	4400	
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	45 paket	45 paket	
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13 paket	13 paket	
	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	13	13	
	Perawat	13	13	
	Bidan	13	13	
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	13	13	
	Tenaga kesehatan masyarakat	13	13	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	9	9	

Sumber : Dinas Kesehatan 2023

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan target sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.7

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	Jenis layanan	Target	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3120	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2978	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2836	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13640	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27184	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	116415	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19490	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	48883	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2604	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	319	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	4321	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3772	100%

Sumber : Dinas Kesehatan 2023

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis layanan	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2436	78.08%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2638	88.58%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	2602	91.75%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	11397	83.56%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.875	98.86%
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	99441	85.42%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	17913	91.91%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	37206	76.11%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	2966	113.90%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	327	102.51%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	5163	119.49%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3515	93.19%

Sumber : Dinas Kesehatan 2023

a. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2023 adalah sebesar 78,08%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan untuk sub kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil didukung dari sumber pembiayaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui kegiatan kelas ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil, pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil, memberikan buku KMS Ibu hamil pada saat kontak pertama dengan petugas kesehatan (K1), Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Glukoprotein urin, serta pada ibu hamil dilakukan pelayanan antenatal dengan 10T, pemantauan P4K pada ibu hamil.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tentang adanya ibu hamil kepada tenaga kesehatan dan membantu memasang stiker P4K, pelasanaan kelas ibu hamil, yang dipantau oleh tenaga kesehatan.

b. Realisasi Jenis Pelayanan Ibu Bersalin tahun 2023 adalah sebesar 88,58%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan ibu bersalin melalui kegiatan kegiatan Jaminan persalinan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani persalinan, pengadaan buku KIA yang digunakan untuk pencatatan selama masa kehamilan dan kelahiran, pemberian vaksin TT pada ibu hamil, menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang diperuntukkan pada ibu yang akan melahirkan di fasilitas kesehatan (RS), mengaktifkan Puskesmas mampu salin pada 9 Puskesmas di Kabupaten Belitung serta menjalin jejaring dengan klinik dan RS swasta.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran swasta dengan adanya bantuan ambulance desa yang diberikan melalui CSR dan digunakan untuk membantu sistem rujukan bagi ibu hamil yang akan bersalin yang mengalami resiko dalam persalinan (PEB, KPD dan lainnya) / komplikasi dalam persalinan. Peran masyarakat dalam hal ini sangat kuat diantaranya selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan melalui perannya sebagai kader kesehatan di Desa.

c. Realisasi Jenis Pelayanan Bayi Baru Lahir tahun 2023 adalah sebesar 91,75%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan Bayi Baru Lahir melalui kegiatan DAK Non Fisik yaitu kegiatan Jaminan persalinan dimana jaminan persalinan ini bisa mendanai persalinan ibu dan perawatan bayi jika bayi harus dilakukan perawatan yang intensif, kegiatan vaksinasi pada bayi baru lahir (HBo, Vik K, salep mata), melakukan kunjungan pelayanan pada bayi baru lahir 4 x, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan pada bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital (SHK) dengan mengambil sampel darah pada tumit bayi dengan metode khusus dan sampel tersebut di kirim ke RS dalam hal ini adalah RSCM karena sudah dilakukan MoU antara Dinas Kesehatan dengan pihak RSCM Jakarta.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat adalah peran serta kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, mencegah adanya bayi baru lahir yang tidak terlayani seperti pelayanan perawatan tali pusar.

d. Realisasi Jenis Pelayanan Balita sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 83,58%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan anak Balita melalui Anggaran DAK Non Fisik yaitu pelayanan DDTK pada balita, pemberian Vit A, kegiatan vaksinasi, pemberian makanan tambahan bagi bayi balita yang mengalami masalah gizi, pelayanan posyandu bayi balita, kegiatan penimbangan. Kegiatan inovasi yang dilakukan adalah AMBONG (asistensi dan pemberian makanan tambahan pada balita dan Ibu mengandung)

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Untuk peran dari masyarakat dalam hal ini berperan sebagai kader posyandu yang bertugas dalam menjalani tugas di 5 (lima) meja yang menjadi mitra tenaga kesehatan.

e. Realisasi Jenis Pelayanan Anak Usia Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebesar 98,86%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan bersumber dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Puskesmas (BOK). Sub kegiatan pelayanan kesehatan anak sekolah melalui kegiatan penjaringan kesehatan pada anak sekolah, pelayanan kegiatan UKGS dan lain – lain.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat warga sekolah dalam hal ini guru di sekolah (guru) UKS/M yang berperan aktif dalam membantu tenaga kesehatan dalam melakukan penjaringan kesehatan pada peserta didik usia pendidikan dasar (SD sampai dengan SMP).

f. Realisasi Jenis Pelayanan Usia Lanjut pada tahun 2023 adalah sebesar 91,91%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan kesehatan usia lanjut bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) melalui kegiatan posyandu lansia di desa, senam lansia di desa, pemeriksaan kesehatan pada lansia yang tidak bisa datang di Posyandu dengan inovasi yang dilakukan di Puskesmas- Puskesmas di Kabupaten Belitung.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di posyandu Usia lanjut dan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).

g. Realisasi Jenis Pelayanan warga Negara usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 85,42%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjaringan penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.

h. Realisasi Jenis Pelayanan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 76,11%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pencegahan dan penanggulangan penyakit di danai DAK Non Fisik melalui kegiatan penjaringan penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita hipertensi disarankan untuk rutin memeriksakan kondisinya ke fasilitas kesehatan (pemeriksaan secara berkala) dan melaksanakan Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (GERMAS)

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM dan kader kesehatan secara keseluruhan.

i. Realisasi Jenis Pelayanan DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 113,90%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjaringan penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita DM harus rutin konsumsi obat dan mengatur pola makan serta melaksanakan GERMAS.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM.

j. Realisasi Jenis Pelayanan ODGJB (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 102,51%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan yaitu penjaringan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB), pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan mental, wawancara (jika memungkinkan), edukasi (Jika Memungkinkan) serta proses rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu membantu memerikan informasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas/ kabupaten.

k. Realisasi Jenis Pelayanan TB Paru yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 119,49%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis bersumber dari APBD dan DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) baik penanganan pasien, penjaringan, pengadaan BHP untuk menunjang pemeriksaan laboratorium. Kegiatan yang dilakukan yaitu penjaringan orang terduga TB baik dari tingkat desa maupun masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk anak sekolah juga dilakukan penjaringan,serta pada penderita DM dilakukan skrining TB

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Belum ada kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat dalam menaggulangi penyakit TB sudah ada yaitu Komunitas Parhat (Paru Sehat).Komunitas ini adalah masyarakat yang mantan penderita TBC berupaya dalam mendampingi pasien yang sedang dalam masa pengobatan sampai selesai pengobatan hingga tidak terjadi mangkir minum obat yang dapat menyebabkan terjadi resistensi obat pada pasien TBC. Yayasan atau komunitas Parhat ini mempunyai visi yaitu menjadi organisasi penyintas TBC yang berkompeten dan mampu memberikan kontibusi untuk Kabupaten Belitung Bebas TBC. Adapun lingkup kegiatan yayasan/komunitas Parhat ini antara lain : a.menjadi pendamping sebaya bagi penderita TBC RO (Tuberkolosis Resisten Obat) yang sedang menjalani pengobatan, b. membantu advokasi bagi pasien TBC yang di PHK (pemberhentian hubungan kerja) oleh tempat kerjanya, c.menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC.

l. Realisasi Jenis Pelayanan HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 93,19%;

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV bersumber dari APBD dan DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan adalah penjaringan kesehatan pada ibu hamil, kelompok beresiko, penderita TB, penderita IMS, waria, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pada kelompok-kelompok beresiko, peningkatan kapasitas petugas dalam menjalani klinik VCT di RS ataupun di sarana fasilitas lainnya (Puskesmas).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Belum ada kontribusi dari pihak swasta dan masyarakat dalam menaggulangi penyakit HIV karena penyakit ini dianggap aib seperti layaknya fenomena gunung es yaitu yayasan insert. Yayasan ini merupakan pendukung sebaya yang memberikan dukungan psikososial bagi ODHA dan keluarga terdekatnya. Pendukung sebaya ini bertugas : a) memberikan informasi dan membantu kemudahan rujukan perawatan dan pengobatan, b) memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada seorang ODHA minimal 2 kali dalam tiga bulan, c) mendorong kepatuhan minum Anti Retroviral Virus (ARV) dan obat anti Tuberkulosis (OAT) melalui dukungan di rumah ataupun di Rumah Sakit, d) mendorong perubahan perilaku terutama pencegahan positif, e) melakukan kunjungan di layanan kesehatan atau di luar layanan kesehatan.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.9

Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	
			DAK	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.030.968.350	699.715.850
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Pengelolaan Pelayanan kesehatanIbu bersalin	30.663.000	30.063.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	40.700.000	35.675.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	841.526.150	741.945.000
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	268.013.000	260.488.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	413.522.000	406.868.100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	231.950.600	220.750.600
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	206.800.000	206.350.000
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	138.275.000	137.750.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	83.250.000	83.250.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis	156.582.500	140.082.600
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	91.875.000	81.525.000

Sumber : Dinas Kesehatan 2023

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan ASN dan Non ASN serta tenaga lainnya seperti guru, kader kesehatan dan lain - lain yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar

Tabel 4.10

Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	110 orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	88 orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	361 orang
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	810 orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	56 orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	90 orang
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	45 orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	45 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	77 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	74 orang

Sumber : Dinas Kesehatan 2023

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

➢ **Masalah :**

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya target 100% adalah :

✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (78,08%)

1. Belum semua ibu hamil melakukan ANC sesuai standar karena adanya kehamilan ibu hamil.
2. Kurangnya pemahaman ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya ANC sejak awal kehamilan.
3. Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan ANC sesuai standar.
4. Masih ada ibu hamil yang tidak terdata karena melakukan pemeriksaan kehamilan diluar wilayah kerja faskes.
5. Masih adanya ibu hamil di bawah umur yang hamil di luar nikah.
6. Pelayanan USG terkendala dengan jadwal piket dokter.
7. Belum semua ibu hamil melakukan USG di Trimester 1 dan Trimester II.

✓ SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (88,58%)

1. Masih adanya persalinan yang terjadi tanpa ditolong tenaga kesehatan (melahirkan di rumah).
2. Masih adanya adat masyarakat tidak mau persalinan di damping tenaga kesehatan.
3. Masih adanya persalinan dengan faktor resiko (usia tua/ terlalu muda sehingga malu melahirkan di fasyankes).
4. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan.

✓ SPM Pelayanan kesehatan bayi Baru lahir (91,75%)

1. Masih adanya Bayi yang belum dilakukan pelayanan sesuai definisi operasional. (kunjungan neonatus belum 3 X).
2. Belum optimalnya penyuluhan tentang pentingnya skrining pada bayi baru lahir.
3. Masih kurangnya konseling tentang pelayanan neonatal esensial setelah lahir.

✓ SPM Pelayanan kesehatan Balita (83.56%)

1. Pemantauan kesehatan balita melalui sweeping terkendala oleh jumlah tenaga baik di Puskesmas maupun di desa/kelurahan dikarenakan tenaga yang tersedia mempunyai tugas dalam pelaksanaan program Puskesmas.
2. Masih adanya ibu balita yang tidak rutin membawa balita ke posyandu untuk ditimbang sampai 8 kali.
3. Masih adanya orang tua yang tidak memberikan anaknya imunisasi dasar lengkap.
4. Belum Optimalnya pelaksanaan kelas ibu balita diposyandu.

✓ SPM Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar (98.86%)

1. Jadwal kegiatan skrining sering bertabrakan dengan jadwal kegiatan di sekolah.
2. Masih kurangnya tim penjaringan UKS di Fasyankes.

3. Tidak tersedianya anggaran untuk pengadaan buku raport kesehatanku.

✓ SPM Pelayanan kesehatan Usia Lanjut (91.91%)
1. Kurangnya kunjungan lansia ke Posyandu karena tidak ada pengobatan.
2. Masih kurangnya dukungan keluarga untuk mendampingi lansia ke posyandu lansia.

✓ SPM Pelayanan Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) (85,42%)
1. Jumlah sasaran skrining kelompok usia produktif yang tinggi dibandingkan dengan jumlah SDM Puskesmas yang melayani sasaran skrining usia produktif.
2. Adanya tugas rangkap dan alih tugas pengelola program P2PTM di Puskesmas.
3. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posbindu PTM, karena adanya anggapan tubuh dalam kondisi sehat, adanya kekhawatiran apabila mengetahui penyakit yang diderita membuat ketakutan, adanya kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga.
4. Kurang Optimalnya dukungan lintas sektor, Toma/ toga termasuk pihak swasta dalam layanan posbindu PTM dan juga belum adanya kader khusus posbindu PTM.

✓ SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (76,11%)
1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke fasyankes atau Posbindu, karena merasa tidak ada keluhan sakit, sehingga tidak diketahui kemungkinan mempunyai resiko penyakit hipertensi.
2. Sebagian masyarakat mencari pengobatan sendiri seperti membeli obat di toko/apotik atau mencari pengobatan alternatif pada saat merasa ada keluhan sakit.
3. Belum semua kasus hipertensi di fasyankes Swasta belum terintegrasi dengan pelaporan kasus di Puskesmas

✓ SPM Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (93.19%)
1. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti target ibu hamil K1 yang tinggi, kemudian untuk yang di Pulau yaitu tingginya mobilisasi masyarakat dari pula ke daratan, adanya kejadian abortus di trimester 1, adanya ibu hamil yang pindah sebelum dilakukan pemeriksaan awal.
2. Untuk Kelompok resiko Trangender/Waria tidak tercapai dikarena tim puskesmas mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam kelompok tersebut (apatis/ ada penolakan).
3. Untuk kelompok resiko Penderita TBC, masih ada beberapa pasien TBC baik TBC anak maupun TBC Dewasa yang tidak bersedia diperiksa HIV nya, padahal petugas puskesmas sudah menjelaskan prosedur sesuai SOP.
4. Masih terbatasnya komunitas penjangkau untuk kegiatan skrining ataupun penemuan kasus aktif HIV pada kelompok beresiko, seperti LSL, trangender, dll.

Hal tersebut diatas menjadi kendala sehingga tidak mencapai atau memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. Disamping memang ada alat dan bahan serta dana untuk kelapangan yang terbatas. Selain itu hal – hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ini adalah masih belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

➢ **Solusi :**

Untuk menanggulangi permasalahan di atas diperlukan beberapa solusi sebagai berikut :
1. memaksimalkan kegiatan/ program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO) dan melakukan skrining ke sasaran lebih di tingkatkan. Kegiatan lebih banyak didanai oleh bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Melakukan kerjasama Lintas Sektor/ Lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Meningkatkan Komunikasi, informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Promosi Kesehatan

4. Meningkatkan Kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas
5. Melakukan Monev secara berkala per bulan/ per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
6. Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

- **Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari (Kabupaten/Kota)**

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

- **Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Kabupaten/Kota)**

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Memperhatikan kebutuhan di Kabupaten Belitung maka direncanakan target pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	544
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target	Realisasi Pencapaian SPM	Realisasi Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	544	544	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan SPM Pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari pada Tahun 2023 mencapai target direncanakan persentase pencapaiannya mencapai 100%.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 4.13 di bawah ini :

Tabel 4.13
Anggaran SPM Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pengadaan dan pemasangan jaringan + SR untuk pelayanan air minum	APBD-P	48.000.000	47.875.935	99,74
2	Pengadaan dan Pemasangan jaringan + SR untuk pelayanan air minum di Desa Ibul (Dana Insentif Fiskal 2023)	APBD-P	199.500.000	198.069.954	99,28
3	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan + SR untuk pelayanan air minum di Desa Pegantungan (Dana Insentif Fiskal 2023)	APBD-P	199.500.000	199.256.400	99,88
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah [#] Pengadaan dan pemasangan Sambungan Rumah untuk pelayanan air minum	APBD	61.050.000	57.668.200	94,46
5	Reviu Dokumen RISPAM	APBD	100.000.000	98.824.413	98,82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

Tabel 4.14
Realisasi Anggaran SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen SSK (DAU EARMARKED)	APBD	289.000.000	284.326.500	98,38

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.3.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2023, jumlah Pegawai adalah sebanyak 50 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 44 orang (88%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 6 orang (12%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Sumber Daya Air	6
3	Bidang Bina Marga	5
4	Bidang Cipta Karya	6
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	8
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	5
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	4
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	**50**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.16
Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	2	0	2	4
2	S.1	24	1	25	50
3	D4	4	0	4	8
4	D3	12	1	13	26
5	SMA/Sederajat	5	0	5	10
6	SMP/Sederajat	1	0	1	2
Jumlah		**48**	**2**	**50**	**100**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- Permasalahan
  a. Belum Optimalnya Koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/ sektor.
  b. Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam SPM mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik daerah.
  c. Belum tersusunnya database yang komprehensif dalam penerapan SPM.
  d. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan SPM.

- Solusi
  a. Kebijakan Pejabat Terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
  b. Dukungan OPD terkait penanganan SPM Air minum dan Air Limbah
  c. Dukungan Alokasi anggaran daerah dan pusat terkait penerapan SPM.
  d. Penyiapan dan bimbingan teknis SDM Terkait Penyusunan SPM.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan Rakyat terdiri dari:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

   Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

   1) Pada saat masa pasca bencana;
   2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
   3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

   Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

   1. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
   2. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

c. Penyusunan Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Perhitungan capaian adalah sebagai berikut.

1. Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan
2. Tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
3. Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
4. Tidak memiliki asset bangunan lain;
5. Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
2. Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
3. Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

Berdasarkan RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Pada tahun 2023 tidak ada relokasi program pemerintah daerah. Adapun Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 berdasarkan RPJMD adalah adalah 10 orang (asumsi untuk 2 unit rumah).

Tabel 4.17

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2023
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Unit	2
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Unit	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2023 tidak terealisasi anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten karena sepanjang Tahun 2023 tidak terjadi bencana alam/lainnya yang dampaknya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana kabupaten oleh Bupati, sehingga tidak ada rumah korban bencana yang pemiliknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Sedangkan untuk Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, pada tahun 2023 tidak ada relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.18

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi	
			Orang	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	2	N/A	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini :

Tabel 4.19

Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	154.500.000,-	-	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.4.5 Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas PUPR kabupaten Belitung pada Desember 2023, jumlah Pegawai adalah sebanyak 50 pegawai. Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas PUPR didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1/D4 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 44 orang (88%). Sisanya berupa

lulusan SMP dan SMA sebanyak 6 orang (12%). Jumlah dan komposisi pegawai Pada Dinas PUPR Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20

Alokasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat	14
2	Bidang Sumber Daya Air	6
3	Bidang Bina Marga	5
4	Bidang Cipta Karya	6
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	8
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	5
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	4
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	**50**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

Kondisi kepegawaian Dinas PUPR berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.21

Jumlah SDM Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Total	Persentase (%)
1	S.2	2	0	2	4
2	S.1	24	1	25	50
3	D4	4	0	4	8
4	D3	12	1	13	26
5	SMA/Sederajat	5	0	5	10
6	SMP/Sederajat	1	0	1	2
Jumlah		**48**	**2**	**50**	**100**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2023

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

✓ Permasalahan :

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sektor;
b. Tingkat pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum komprehensif antar stakeholder/sektor;
c. Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mudah dipahami dan sesuai dengan karateristik Daerah;
d. Belum terindentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
e. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

✓ Solusi :

a. Kebijakan pejabat terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
b. Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.
c. Penyiapan dan bimbingan teknis SDM terkait Penyusunan SPM

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22
Jenis SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	OPD Pelaksana SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2023

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target
1	*2*	*3*	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab. Belitung 2023

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**				**88,32%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	249	249	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8,32%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	41,62 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	Tidak ada
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan	0	0	0	Tidak ada

	pengobatan				
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	14	7	7	50%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	1656	278	1378	16,79%
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	533	442	91	82,93%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2023

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					
No	**Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM**	**Indikator Pencapaian / Output**			**Total Pencapaian**
-1	**-2**	**-3**			**-4**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		**TUNTAS UTAMA**			**94.42 %**
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**				**97.50 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**179.621**	**179.621**	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.07 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**80.36 %**
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	**0**	**100.00 %**
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	179.621	179.621	0	100 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100	100	**100**	**100.00 %**
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	10	5	**5**	**50%**
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)**				**78.05 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**89.75 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**179.621**	**179.621**	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**4.63 %**

	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**48.74 %**
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	30	10	**20**	**33.33 %**
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	53	34	**19**	**64.15 %**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)**				88.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	3.012	3.012	**100**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**16.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	80.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	**0**	**100%**
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.012	3.012	**100**	**100.00 %**
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	1	1	**0**	**100%**
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	0	**1**	**0%**
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	1	**0**	**100%**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA			96.32 %
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**				92.10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**92.10 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	279	279	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**12.10 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum**	60.48%

				Tersedia	
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	279	195	**84**	**69.89 %**
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	**0**	**100%**
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	30	10	**20**	**33.33 %**
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	10	6	**4**	**60.00 %**
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	22	22	**0**	**100.00 %**
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	0	0	**0**	**0 %**

Sumber : BPBD Kab.Belitung 2023

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

Belanja Langsung : Rp. 6.040.797.000,- (Enam Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.653.718.650,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah :

Tabel 4.25
Anggaran Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Belitung
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

NO.	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	*2*	*3*
I.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	101.559.700
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12.000.000
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	1.439.024.070
4.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	660.887.810

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2023

1.5.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 di Kabupaten Belitung didukung oleh Personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Belitung.

Tabel 4.26

Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Satuan	1	
2.	Sekretaris	1	
	Subbag Kepegawaian dan Umum	1	
	Subbagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	1	
	Bendahara	1	
	PPPK Fungsional umum	2	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah	1	
	Seksi Penyelidikan dan penyelidikan	1	
	Seksi pengawasan dan penindakan	1	
	Sub koordinator pembinaan dan penyuluhan		
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	4	
	Fungsional Polisi Pamong Praja termapil	3	
	Funsional Umum	2	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	
	Seksi penertiban, operasional dan pengendalian	1	
	Seksi samapta	1	
	Sub koordinator pengamanan dan pengawalan		
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	3	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	4	
	Fungsional Umum	4	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	
	Seksi satuan perlindungan masyarakat	1	
	Seksi bina potensi masyarakat	1	
	Fungsional polisi pamong praja ahli	2	
	Fungsional polisi pamong praja terampil	2	
	Fungsional umum	4	
	Total ASN	**44**	
6.	Non ASN	**99**	
	Jumlah	143	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2023

Tabel 4.27

Rincian SDM ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BelitungTahun 2023
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	7	-	1	-	-	7	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	5	1		-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPPK	-	-	-	-	2	-	-	-	-		-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	1	18	-	12	-	-	12	1	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2023

Terhitung per 1 Desember 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung seluruhnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) ASN dan 36 (tiga puluh enam) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 4.28

Komposisi dan Jumlah ASN BPBD Kabupaten BelitungTahun 2023

NO.	J a b a t a n	PNS Berdasarkan Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelaksana				1	1
2.	Sekretariat			2		2
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			3		3
4.	Seksi Penanganan Darurat logistik dan Kebakaran		5	7		12
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			2		2
	J U M L A H		**6**	**12**	**1**	**20**

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2023

Tabel 4.29

Komposisi dan Jumlah Tenaga Non PNS BPBD Kabupaten BelitungTahun 2023

No.	URAIAN	Jumlah
1.	Tenaga Operasional Lapangan	34
2.	Petugas Kebersihan	2
	Jumlah	**36**

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2023

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

a) Kesulitan Penetapan jumlah target penerima layanan dasar, dikarenakan jumlah dan lokasi penertiban tidak dapat diketahui secara pasti (sebagai acuan penghitungan jumlah perkiraan yang akan terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada);
b) Kompetensi dan kapasitas Personil dalam hal tata cara pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelenggaran perda dan perkada belum optimal;
c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
d) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.

Solusi :

a) Prediksi Jumlah target penerima layanan dasar berdasarkan jumlah pelanggar tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan jumlah tahun berjalan;
b) Meningkatkan Kompetensi dalam hal tata cara pelayanan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
c) Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dengan “Tanpa Kecelakaan atau Kerugian”.
d) Mengoptimalkan Sarpras yang tersedia dan mengupayakan penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
e) Melakukan Peningkatan kapasitas mandiri dan terbatas.

- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

a) Identifkasi data warga yang menjadi target layanan SPM belum optimal sehingga menghambat proses penyusunan rencana aksi;
b) Sulitnya menentukan jumlah target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran dalam SPM karena tentunya tidak ada yang berharap terjadi bencana atau targetnya adalah nol;
c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
d) Standar peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar belum optimal.

Solusi :

a) Optimalisasi pendataan warga yang menjadi target layanan SPM;
b) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;

c) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota TRC dan Angota Damkar.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab. /kota;
e. Perlindungan Sosial Korban Bencana pada saat dan pasca tanggap darurat bencana.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang tersedia. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah Warga Negara yang belum mampu memperoleh Pelayanan Dasar akan diberikan Pelayanan Dasar melalui APBD.

Tabel 4.30
Perhitungan Sasaran Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2023

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH SASARAN	RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR			
			Jumlah Yang Sudah Terpenuhi Melalui APBN / Sumber Lain	Jumlah Yang Belum Terpenuhi		
				Jumlah	Dipenuhi Melalui APBD	Yang Belum Ditangani
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Jiwa	-	30 Jiwa	30 jiwa	-
2.	Anak Terlantar	15 Jiwa	-	15 Jiwa	15 Jiwa	-
3.	Lanjut Usia Terlantar	60 Jiwa	-	60 Jiwa	60 Jiwa	-
4.	Gelandangan dan Pengemis	39 Jiwa	-	39 Jiwa	39 Jiwa	-
5.	Korban Bencana Alam dan Sosial	24 Jiwa	24 Jiwa	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023

Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2023 adalah 100% dengan rincian target capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.31
Target Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target Capaian
		Indikator Kinerja	2023

1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	**100 %**
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	**100 %**
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	**100 %**
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	**100 %**
		Persentase (%)Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	**100 %**
		Persentase (%) Korban Bencana Alam Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023

4.6.3 Realisasi

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan permakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitasi untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 dapat tergambar dalam tabel 4.31 berikut :

Tabel 4.32

Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kabupaten		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2023	100	= 30 orang / 30 orang X 100% = 100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2023	100	= 15 orang / 15 orang x 100% = 100	100
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti				
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2023	100	= 60 orang / 60 orang x 100% = 100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2023	100	= 39 orang / 39 orang x 100% = 100%	100
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	2023	100	Bencana alam dan sosial = (14 + 10) orang / (14 + 10) orang x 100% = 100%	100
Nilai Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial						**100**

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 33
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2023

Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	APBD	**4.324.717.203,-**
2.	APBN	**28.189.288.600,-**
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	18.391.600.000-
	- Kebencanaan Alam dan Sosial	327.430.617,-
	- PKH (3.680 KPM)	9.470.257.983,-
Jumlah		**32.514.005.803,-**

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM tahun 2023 pada Bidang sosial yaitu :

- Aparatur Sipil Negara 29 orang
- Non PNS 6 orang
- Pekerja Sosial Penyandang Disabilitas 2 orang
- Pendamping Sosial Lanjut Usia dan Anak 1 Orang
- Petugas Pengelola Gudang Logistik dan Kendaraan Operasional Kebencanaan 1 Orang
- Pendamping Rehabilitasi Sosial/Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI sebanyak 1 Orang
- Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya:
  1. SDM PKH sebanyak 20 Orang
  2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 5 Orang
  3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 49 Orang
  4. Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 45 Orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu data PMKS yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial, anggaran dan sarana prasarana.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS secara periodic dan terencana, penyiapan dan penguatan SDM Kessos melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS

Beberapa permasalahan yang dihadapi terutama dalam setiap tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, diantaranya adalah:

a. Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar bersifat dinamis sehingga sulit untuk menetapkan data baku, sedangkan untuk data Gepeng dan korban bencana bersifat asumsi berdasarkan data realisasi pada Tahun sebelumnya.
b. Permasalahan dalam penghitungan kebutuhan seperti dalam penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar yang memerlukan tenaga ahli untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis alat bantu yang sesuai. Kondisi di Kabupaten Belitung jumlah tenaga ahli sangat terbatas.
c. Terbatasnya anggaran sehingga penghitungan kebutuhan yang sudah dihitung dalam perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan tidak dapat seluruhnya masuk dalam penganggaran.
d. Realisasi anggaran pelayanan SPM sampai dengan Triwulan I (Satu) masih relatif rendah dikarenakan terkendala oleh Pengadaan secara e-Katalog.
e. Peran Sekretariat Bersama Penerapan SPM yang belum optimal sehingga banyak permasalahan penerapan SPM tidak menjadi concern bersama dalam solusi dan pemecahan masalah.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

- **Urusan Pendidikan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

(1) Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
(2) Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
(3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
(4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
(5) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga
(6) Pengadaan Mebel Sekolah
(7) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
(8) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
(9) Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
(10) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
(11) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
(12) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
(13) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
(14) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
(15) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

b. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

(1) Penambahan Ruang Kelas Baru
(2) Pembangunan Laboratorium
(3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
(4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
(5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
(6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
(7) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
(8) Pengadaan Mebel Sekolah
(9) Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama
(10) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
(11) Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
(12) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(13) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
(14) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
(16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

(1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
(2) Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD
(3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
(4) Pengadaan Mebel PAUD
(5) Pengadaan Perlengkapan PAUD
(6) Penyelenggaraan proses belajar PAUD
(7) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
(8) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
(9) Pengelolaan Dana BOP PAUD

(10) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

(1) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal/kesetaraan
(2) Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan
(4) Penyelenggaraan Proses belajar Nonformal/ Kesetaraan
(5) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

➢ **Urusan Kesehatan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

Tabel 4.34
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayana Dasar SPM	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pengadaan Buku KIA
			Montoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Kelurga (Ibu Hamil)
			Kelas Ibu Hamil
			Pemantauan P4K
			Pelayanan Antenatal Care (ANC)
			Pemberian Tablet Tambah Darah
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Jaminan Persalinan
			Penguatan Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Pelayanan Kesehatan ibu Nifas
			Pelayanan KB Pasca Salin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pemberian Vit K dan vaksin HB O
			Perawatan Tali Pusat
			Skrining Hipotiroid Kongenital
			Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan bayi
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Koordinasi Penguatan Buku KIA
			Pemantauan pemanfaatan kohort Balita
			Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
			Deteksi Dini Tumbuh Kembang balita (DDTK)
			Pelayanan imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
			Penguatan orientasi aplikasi SDIDTK
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Penguatan Posyandu Remaja
			Penjaringan kesehatan anak sekolah
			pelayanan vaksinasi anak sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
			Pembinaan PKPR
			Pembinaan UKS/M

6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pemantauan pelayanan screening Penyakit Tidak Menular (PTM)
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
			Pendampingan dan pelaksanaan screening IVA
			Pendampingan kegiatan screening Gangguan Indra Fungsiaonal (GIF)
			Pelayanan Posbindu PTM
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pelayanan kesehatan lansia
			Posyandu Lansia
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
			Screening PTM
			kegiatan pelayanan Posbindu PTM
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
			kegiatan pelayanan Posbindu PTM
			Informasi dan edukasi terkait Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pendampingan, edukasi dan advokasi kesehatan jiwa di masyarakat
			koordinasi terpadu lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan kesehatan jiwa
			melakukan rujukan (oleh Puskesmas) ke Fasilitas kesehatan lanjutan (RSUD dan RSJ)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Penanggulangan Penyakit TB Baru
			Pendampingan Deteksi dini TB
			Pemeriksaan Sputum TB yang dilakukan oleh analis Puskesmas dan RS
			Edukasi terkait penyakit TB
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
			Pelayanan pencegahan dan penanggulanagan penyakit menular (HIV/ AIDS)
			Pendampingan pelaksanaan screening HIV pada populasi kunci
			Pemberdayaan masyarakat melalui kader penjangkauan lapangan dalam rangka mapping populasi kunci
			Orientasi kader penjangkau lapangan dalam Penanggulangan penyakit HIV/ AIDS

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

- **Urusan Pekerjaan Umum**

Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

✓ Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan dan pemasangan jaringan + SR untuk pelayanan air minum
- Pengadaan dan Pemasangan jaringan + SR untuk pelayanan air minum di Desa Ibul (Dana Insentif Fiskal 2023)
- Pengadaan dan Pemasangan Jaringan + SR untuk pelayanan air minum di Desa Pegantungan (Dana Insentif Fiskal 2023)
- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah [#] Pengadaan dan pemasangan Sambungan Rumah untuk pelayanan air minum
- Reviu Dokumen RISPAM

✓ Penyusunan Dokumen SSK (DAU EARMARKED)

➢ **Urusan Perumahan Rakyat**

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

✓ Program Pengembangan Perumahan

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➢ **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

Tabel 4.35

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja

1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			Indikator	target	realisasi	Persentase capaian
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	100	249	249%
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	36	30	83%
		3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	12	12	100%
		4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	30	30	100%
		5	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	4	4	100%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			100%	100%	100 %
		1	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

Tabel 4.36

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1	**Program Penanggulangan Bencana**
	Kegiatan :
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
2	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
	Kegiatan :
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023

- **Urusan Sosial**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

Tabel 4.37
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2022
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	**Program** Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Penyediaan Permakanan
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, serta Galandangan Pengemis di Luar Panti	2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan
		2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan
		3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2	**Program** Penanggulangan Bencana **Kegiatan** Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
3.	**Program** Pemberdayaan Sosial	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	2. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
4.	**Program** Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5.	**Program** Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **Kegiatan** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebagai suatu tahapan proses pemerintahan, dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah terdapat program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan terdapat juga program-program yang belum optimal hasilnya seperti perencanaannya. Namun demikian, pada masa yang akan datang hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga program-program dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 masih terdapat kendala dalam realisasinya yang disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dan juga sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat meminimalisasi berbagai kendala tersebut sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

a. Meminimalisasi jumlah program-program yang akhirnya batal dilaksanakan dan juga program-program yang ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, diharapkan semua unsur terkait pada masa yang akan datang membuat perencanaan program-program dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian diharapkan kinerja dapat lebih efektif karena tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan program-program yang tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan.

b. Diharapkan OPD dalam penyampaian data dan bahan untuk menunjang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kelengkapan dari laporannya masing-masing sesuai dengan format yang diberikan demi untuk memudahkan rekapitulasi data. Selain itu diharapkan agar menyampaikan laporannya tepat waktu sehingga penyampaian LPPD Kabupaten Belitung ke Provinsi dapat disampaikan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.

c. Agar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan dapat meningkatkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terkesan hanya baik pada sisi kuantitas personil penyusunan namun tidak pada sisi kualitas/kinerjanya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang, agar terjadi kesinambungan pembangunan yang terpola dan tersusun secara tahap demi tahap dan sistematis.

Lampiran 1

Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin Tahun 2023

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	7.135	6.611	13.746
2	5-9	7.862	7.341	15.203
3	10-14	8.458	8.068	16.526
4	15-19	7.411	7.278	14.689
5	20-24	7.853	7.821	15.674
6	25-29	7.735	7.383	15.118
7	30-34	7.312	6.932	14.244
8	35-39	7.349	6.833	14.182
9	40-44	8.279	7.811	16.090
10	45-49	6.907	6.471	13.378
11	50-54	6.094	5.775	11.869
12	55-59	4.588	4.478	9.066
13	60-64	3.722	3.768	7.490
14	65-69	2.664	2.830	5.494
15	70-74	1.678	1.876	3.554
16	>75	1.494	2.128	3.622
TOTAL		**96.541**	**93.404**	**189.945**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2023

Lampiran 2

Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pekerjaan Tahun 2023

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	21.181	19.077	40.258
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	48.115	48.118
3	PELAJAR/MAHASISWA	18.273	16.836	35.109
4	PENSIUNAN	896	360	1.256
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1.989	2.165	4.154
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	204	3	207
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	415	25	440
8	PERDAGANGAN	692	176	868
9	PETANI/PEKEBUN	5.419	268	5.687
10	PETERNAK	15	3	18
11	NELAYAN/PERIKANAN	7.370	15	7.385
12	INDUSTRI	36	4	40
13	KONSTRUKSI	55	2	57
14	TRANSPORTASI	57	0	57
15	KARYAWAN SWASTA	8.314	3.009	11.323
16	KARYAWAN BUMN	210	62	272
17	KARYAWAN BUMD	22	23	45
18	KARYAWAN HONORER	739	832	1.571
19	BURUH HARIAN LEPAS	20.143	473	20.616
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	134	31	165
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	224	2	226
22	BURUH PETERNAKAN	4	2	6
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	1	49	50
24	TUKANG CUKUR	3	0	3
25	TUKANG LISTRIK	13	0	13
26	TUKANG BATU	10	0	10
27	TUKANG KAYU	47	0	47
28	TUKANG SOL SEPATU	4	0	4
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	22	0	22
30	TUKANG JAHIT	20	18	38
31	TUKANG GIGI	0	0	0
32	PENATA RIAS	6	7	13
33	PENATA BUSANA	0	0	0
34	PENATA RAMBUT	7	9	16
35	MEKANIK	102	0	102
36	SENIMAN	26	2	28
37	TABIB	2	0	2
38	PARAJI	0	2	2
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0
40	PENTERJEMAH	0	0	0
41	IMAM MASJID	2	0	2
42	PENDETA	16	2	18
43	PASTOR	2	0	2
44	WARTAWAN	25	0	25
45	USTADZ/MUBALIGH	6	0	6
46	JURU MASAK	1	6	7
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0
48	ANGGOTA DPR RI	0	0	0

49	ANGGOTA DPD RI	0	0	0
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR L	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0
58	BUPATI	1	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	1
60	WALIKOTA	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROP.	3	1	4
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	18	1	19
64	DOSEN	10	12	22
65	GURU	120	282	402
66	PILOT	1	0	1
67	PENGACARA	10	2	12
68	NOTARIS	1	3	4
69	ARSITEK	4	0	4
70	AKUNTAN	0	1	1
71	KONSULTAN	14	1	15
72	DOKTER	34	48	82
73	BIDAN	0	50	50
74	PERAWAT	12	36	48
75	APOTEKER	2	12	14
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0
78	PENYIAR RADIO	1	1	2
79	PELAUT	135	0	135
80	PENELITI	1	0	1
81	SOPIR	374	1	375
82	PIALANG	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0
84	PEDAGANG	366	105	471
85	PERANGKAT DESA	123	94	217
86	KEPALA DESA	21	1	22
87	BIARAWAN/BIARAWATI	0	7	7
88	WIRASWASTA	8.577	1.168	9.745
89	ANGGOTA LEMB.TINGGI LAINNYA	1	0	1
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	0	0
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
95	OPERATOR	0	0	0
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	0	0	0
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	1	0	1
TOTAL		**96.541**	**93.404**	**189.945**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2023

Lampiran 3

Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Agama Tahun 2023

NO	AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	ISLAM	89.036	85.977	175.013
2	KRISTEN	1.698	1.678	3.376
3	KATHOLIK	656	611	1.267
4	HINDU	422	382	804
5	BUDHA	4.631	4.657	9.288
6	KONGHUCHU	92	94	186
7	ALIRAN KEPENCAYAAN	6	5	11
TOTAL		**96.541**	**93.404**	**189.945**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2023

Lampiran 4

Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	1.965	2.049	4.014
2		PARIT	2.738	2.731	5.469
3		LESUNG BATANG	3.465	3.495	6.960
4		PANGKALLALANG	6.452	6.378	12.830
5		TANJUNGPENDAM	2.626	2.657	5.283
6		PAAL SATU	4.243	4.155	8.398
7		KAMPONG DAMAI	1.963	1.976	3.939
8		BULUH TUMBANG	2.152	2.014	4.166
9		PERAWAS	2.610	2.539	5.149
10		DUKONG	3.229	3.084	6.313
11		JURU SEBERANG	1.391	1.288	2.679
12		AIR SAGA	6.125	5.931	12.056
13		AIR MERBAU	4.090	4.015	8.105
14		AIK PELEMPANG JAYA	3.569	3.492	7.061
15		AIK KETEKOK	2.832	2.661	5.493
16		AIK RAYAK	5.091	4.997	10.088
Jumlah			54.541	53.462	108.003
1	MEMBALONG	MEMBALONG	2.538	2.420	4.958
2		PERPAT	988	934	1.922
3		LASSAR	1.803	1.624	3.427
4		SIMPANG RUSA	1.592	1.486	3.078
5		KEMBIRI	1.505	1.439	2.944
6		BANTAN	1.465	1.380	2.845
7		TANJUNGRUSA	1.080	1.059	2.139
8		MENTIGI	737	727	1.464
9		PULAU SELIU	571	507	1.078
10		PULAU SUMEDANG	265	285	550
11		GUNUNG RITING	711	676	1.387
12		PADANG KANDIS	646	643	1.289
Jumlah			13.901	13.180	27.081
1	SELAT NASIK	SELAT NASIK	1.217	1.163	2.380
2		PETALING	347	325	672
3		SUAK GUAL	492	438	930
4		PULAU GERSIK	1.154	1.107	2.261
Jumlah			3.210	3.033	6.243
1	SIJUK	SIJUK	1.615	1.580	3.195
2		BATU ITAM	1.354	1.299	2.653
3		TERONG	1.419	1.395	2.814
4		AIR SERUK	3.156	3.030	6.186
5		TANJUNG BINGA	3.369	3.192	6.561
6		AIR SELUMAR	1.714	1.677	3.391
7		SUNGAI PADANG	1.263	1.177	2.440
8		KECIPUT	1.357	1.297	2.654
9		PELEPAK PUTE	1.034	935	1.969
10		TANJONG TINGGI	569	571	1.140
Jumlah			16.850	16.153	33.003

1	BADAU	BADAU	1.829	1.731	3.560
2		AIR BATU BUDING	758	731	1.489
3		SUNGAI SAMAK	1.232	1.187	2.419
4		KACANG BUTOR	1.401	1.293	2.694
5		CERUCUK	1.088	978	2.066
6		PEGANTUNGAN	1.028	1.002	2.030
7		IBUL	703	654	1.357
Jumlah			8.039	7.576	15.615
TOTAL			**96.541**	**93.404**	**189.945**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2023

Lampiran 5

Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Belitung
Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	1.044	375	1.419
2		PARIT	1.473	546	2.019
3		LESUNG BATANG	1.874	510	2.384
4		PANGKALLALANG	3.436	953	4.389
5		TANJUNGPENDAM	1.384	449	1.833
6		PAAL SATU	2.284	658	2.942
7		KAMPONG DAMAI	1.028	353	1.381
8		BULUH TUMBANG	1.205	211	1.416
9		PERAWAS	1.399	290	1.689
10		DUKONG	1.717	417	2.134
11		JURU SEBERANG	759	154	913
12		AIR SAGA	3.194	778	3.972
13		AIR MERBAU	2.112	498	2.610
14		AIK PELEMPANG JAYA	1.849	419	2.268
15		AIK KETEKOK	1.494	359	1.853
16		AIK RAYAK	2.755	612	3.367
Jumlah			29.007	7.582	36.589
1	MEMBALONG	MEMBALONG	1.566	275	1.841
2		PERPAT	585	95	680
3		LASSAR	1.043	149	1.192
4		SIMPANG RUSA	906	128	1.034
5		KEMBIRI	916	130	1.046
6		BANTAN	839	140	979
7		TANJUNGRUSA	635	166	801
8		MENTIGI	458	82	540
9		PULAU SELIU	312	93	405
10		PULAU SUMEDANG	139	28	167
11		GUNUNG RITING	408	109	517
12		PADANG KANDIS	391	105	496
Jumlah			8.198	1.500	9.698
1	SELAT NASIK	SELAT NASIK	685	142	827
2		PETALING	204	33	237
3		SUAK GUAL	277	56	333
4		PULAU GERSIK	589	147	736
Jumlah			1.755	378	2.133
1	SIJUK	SIJUK	941	217	1.158
2		BATU ITAM	749	124	873
3		TERONG	780	147	927
4		AIR SERUK	1.799	266	2.065
5		TANJUNG BINGA	1.760	343	2.103
6		AIR SELUMAR	1.022	177	1.199
7		SUNGAI PADANG	712	129	841
8		KECIPUT	757	135	892
9		PELEPAK PUTE	570	67	637
10		TANJONG TINGGI	321	51	372
Jumlah			9.411	1.656	11.067

1	BADAU	BADAU	1.067	153	1.220
2		AIR BATU BUDING	457	49	506
3		SUNGAI SAMAK	715	134	849
4		KACANG BUTOR	804	135	939
5		CERUCUK	613	94	707
6		PEGANTUNGAN	572	93	665
7		IBUL	401	57	458
Jumlah			4.629	715	5.344
TOTAL			**53.000**	**11.831**	**64.831**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2023

Lampiran 6

CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

Belitung dengan predikat Unesco Global Geopark (UGG) yang diraih tahun sebelumnya makin dikenal publik luar dengan suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Keindahan alam dengan pesona pantai berpasir putih dalam bingkai batu granit yang memukau adalah anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk kemudian ditebarkan pesonanya ke seluruh pelosok di berbagai belahan dunia. Butuh *effort* luar biasa untuk ini hingga suatu hari Belitung dapat menyamai pamor destinasi internasional sekelas Pulau Dewata, Bali.

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2023 tersebut diraih beberapa penghargaan. Penghargaan yang diterima pada tahun 2023 terdiri dari :

1. Penghargaan sebagai pemimpin terpopuler di media pemberitaan online pada ajang The 1st Indonesia GPR Award (IGA) 2023
2. Penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung untuk Kepatuhan Belitung atas Kepatuhan Harmonisasi dan Kerjasama dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2022
3. Piagam Penghargaan Rekor Muri Pemerintah Kabupaten Belitung
4. Penghargaan sebagai pemimpin Berdampak di Media Digital Tahun 2023 pada Award The 2nd Indonesia DEI & ESG (IDEAS) 2023
5. Penghargaan BKN Award Tahun 2023
6. Penghargaan Plakat dari Kementerian Agama RI.